



Vol. 8 No. 1 Juni 2013

KEBUDAYAAN

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PERMASALAHAN DAN UPAYA PELESTARIAN KAWASAN KOTA LAMA DI MEDAN
Damardjati Kun Marjanto, Ernayanti, Robby Ardiwijaya

PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERBASIS KOMUNITAS:
STUDI TENTANG PEMANFAATAN AIR BAGI MASYARAKAT DUSUN ROWO, DESA TLOGOPAKIS,
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
Ihya Ulumuddin

KEARIFAN LOKAL PADA ARSITEKTUR HUNIAN TRADISIONAL DI KAWASAN RAWAN BENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Bakti Utama

BUDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DI PULAU JAWA: SEBUAH REFLEKSI MASA LAMPAU
UNTUK MELIHAT PROSPEK MASA DEPAN
Budiana Setiawan

PERUBAHAN SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEKAL DI DESA SIBAK, KABUPATEN
MUKO-MUKO, PROVINSI BENGKULU: DARI PETANI PELADANG MENJADI PETANI KELAPA SAWIT
Bambang H. Suta Purwana

PENGARUH AGEN SOSIALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN BUDI PEKERTI REMAJA
Ais Irmawati

REAKTUALISASI DAN REVITALISASI KESENIAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER
RR. Nur Suwarnindyah

MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENGUKUHKAN KETAHANAN BUDAYA PELAJAR INDONESIA
DI SINGAPURA
S. Dloyana Kusumah

PANCASILA SEBAGAI ACUAN DALAM STANDARISASI BUDAYA NASIONAL INDONESIA
Adityo Nugroho

BENCANA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT PANGANDARAN,
CIAMIS, JAWA BARAT
Mikka Wildha Nurrochsyam; R.R Nur Suwarnindyah

ISSN 1907-5561

**SUSUNAN REDAKSI
JURNAL KEBUDAYAAN**

PEMBINA

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S.
Kepala Balitbang Kemdikbud

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Hurip Danu Ismadi
Kapuslitbang Kebudayaan

PENYUNTING

Dr. Ade Makmur K., M.Phil
Dra. S. Dloyana Kusumah, APU
Ir. Nur Berlian VA, M.E
Drs. Bambang H Suta Purwana, M.Si.
Sugih Biantoro, M.Hum

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Prof. Rusdi Muchtar, MA
Dr. Emmed Madjid, M.A
Dr. Ali Akbar

DEWAN REDAKSI

KETUA

Budiana Setiawan, S.S., M.Si.

SEKRETARIS

Lukman Solihin, S.Ant
Ihya Ulumuddin, S.Sos

ANGGOTA

Damardjati KM, S.Sos
Mikka WN, M.Hum
Nur Suwarnigdyah, S.Sn
Unggul Sudrajat, S.S.

PERWAJAHAN/TATA LETAK

Agus Sudarmaji, S.Kom., M.M
Genardi Atmadiredja, S.Sn

PENERBIT DAN ALAMAT REDAKSI

Puslitbang Kebudayaan,
Komp. Kemdikbud, Gedung E lt 9,
Jl. Jend Sudirman-Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Email:

jurnalkebudayaan@yahoo.com ;
jurnalkebudayaan@gmail.com



Jurnal Kebudayaan merupakan terbitan berkala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

diterbitkan dua kali dalam setahun. Jurnal ini menyajikan tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian, tinjauan teori maupun konsep, penilaian terhadap hasil penelitian dan pendekatan baru, serta tinjauan buku. Redaksi menerima tulisan baik dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal Kebudayaan

DAFTAR ISI

PERMASALAHAN DAN UPAYA PELESTARIAN KAWASAN KOTA LAMA DI MEDAN Damardjati Kun Marjanto, Ernayanti, Robby Ardiwijaya	5
PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERBASIS KOMUNITAS: STUDI TENTANG PEMANFAATAN AIR BAGI MASYARAKAT DUSUN ROWO, DESA TLOGOPAKIS, KECAMATAN PETUNGKRIYONO Ihya Ulumuddin.	24
KEARIFAN LOKAL PADA ARSITEKTUR HUNIAN TRADISIONAL DI KAWASAN RAWAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Bakti Utama.....	40
BUDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DI PULAU JAWA: SEBUAH REFLEKSI MASA LAMPAU UNTUK MELIHAT PROSPEK MASA DEPAN Budiana Setiawan.....	55
PERUBAHAN SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEKAL DI DESA SIBAK, KABUPATEN MUKO-MUKO, PROVINSI BENGKULU: DARI PETANI PELADANG MENJADI PETANI KELAPA SAWIT Bambang H. Suta Purwana.....	68
PENGARUH AGEN SOSIALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN BUDI PEKERTI REMAJA Ais Irmawati.....	85
REAKTUALISASI DAN REVITALISASI KESENIAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER RR. Nur Suwarnindyah.....	97
MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENGUKUHKAN KETAHANAN BUDAYA PELAJAR INDONESIA DI SINGAPURA S. Dloyana Kusumah.....	108
PANCASILA SEBAGAI ACUAN DALAM STANDARISASI BUDAYA NASIONAL INDONESIA Adityo Nugroho.....	128
BENCANA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT PANGANDARAN, CIAMIS, JAWA BARAT Mikka Wildha Nurrochsyam; R.R Nur Suwarnindyah	143

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL KEBUDAYAAN

Jurnal Kebudayaan dalam edisi ini menampilkan tema-tema yang beragam, seperti pendidikan, pelestarian tinggalan budaya, perekonomian, dan kearifan lokal. Tema pendidikan, antara lain mengenai model pembelajaran untuk mengukuhkan ketahanan budaya pelajar Indonesia di luar negeri, Pancasila sebagai acuan dalam standarisasi budaya nasional, pengaruh agen sosial terhadap perkembangan budi pekerti remaja, dan kesenian sebagai media pendidikan. Tema pelestarian tinggalan budaya antara lain mengangkat mengenai pelestarian kawasan Kota Lama di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tema perekonomian mengangkat mengenai: sistem perekonomian masyarakat Pekal di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu; budaya pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa; dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas masyarakat setempat di Dusun Rowo, Kabupaten Pekalongan. Yang terakhir, tema kearifan lokal mengangkat mengenai arsitektur tradisional untuk daerah rawan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan kearifan lokal masyarakat di Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dalam mengatasi bencana tsunami. Mudah-mudahan tema-tema yang beragam ini dapat semakin memperkaya khasanah pengetahuan kita mengenai kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia.

Selamat membaca!

PERMASALAHAN DAN UPAYA PELESTARIAN KAWASAN KOTA LAMA DI MEDAN

Damardjati Kun Marjanto
Puslitbang Kebudayaan
damardjatikun@yahoo.co.id

Ernayanti
Puslitbang Kebudayaan
ernalano@yahoo.co.id

Robby Ardiwijaya
Puslitbang Kepariwisata, Kemparekraf
r_ardiwijaya@yahoo.com

Abstract

This study aims to explain a variety of cultural heritages in the area of the old city of Medan and try to express a variety of concerns and conservation efforts should be made to maintain the cultural heritages. This study uses qualitative research method, observation, interviews, focus group discussion (FGD), as well as literature study. The results show that Medan has a cultural heritage in the form of heritage buildings. The cultural heritages have a variety of conditions, some are still maintained, but in some places is very alarming. The main problem occurs in the preservation of cultural heritage of the old city, among other environmental aspects of the old city area is not well ordered, the designation is not in accordance with the functions of the old city buildings, and there is no clear concept of the old city cultural preservation. While efforts should be made for the preservation of the old city, among others; formulate conservation principles in the planning and development process; identify, map, assess and interpret the cultural resources; promote the old city as a center of historical importance to the identity of the city of Medan

Keywords: Problems, Preservation, the Old Town area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan berbagai warisan budaya kawasan kota lama di Medan, dan mencoba mengungkapkan berbagai permasalahan dan upaya pelestarian yang perlu dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan observasi di kawasan kota lama Medan, wawancara dengan berbagai informan, *focus group discussion* (FGD), serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki warisan budaya dalam bentuk peninggalan bangunan kota lama yang cukup banyak. Warisan budaya tersebut memiliki kondisi yang beragam, ada yang masih terjaga keutuhan dan kondisinya, namun di beberapa tempat sangat memprihatinkan. Permasalahan pokok yang terjadi dalam pelestarian warisan budaya kota lama tersebut antara lain aspek lingkungan kawasan kota lama yang belum tertata dengan baik, peruntukkan yang tidak sesuai dengan fungsi bangunan kota lama, serta tidak jelasnya konsep pelestarian budaya kota lama. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian kota lama antara lain; merumuskan prinsip-prinsip pelestarian dalam perencanaan dan proses pembangunan; mengidentifikasi, memetakan, menilai dan menginterpretasikan sumberdaya budaya kota lama; mempromosikan citra kota lama sebagai pusat sejarah yang penting bagi identitas Kota Medan.

Kata Kunci: Permasalahan, Pelestarian, Kawasan Kota Lama

A. PENDAHULUAN

Sebuah kota dalam pertumbuhannya memiliki kawasan sebagai awal dari pusat pertumbuhan dan sekaligus sejarah kota. Kehadiran bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis dari suatu tempat, menggambarkan perubahan tata cara kehidupan dan budaya masyarakatnya secara kronologis. Pembangunan fisik perkotaan termasuk warisan yang telah ada baik dari segi bangunan, kawasan, tatanan masyarakat dan yang lainnya, mencerminkan kemampuan dari masyarakat dalam mengelola nilai-nilai yang tertanam di wajah kota tersebut. Oleh karenanya, bangunan bersejarah suatu kota merupakan aset negara baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.

Saat ini keberadaan bangunan bersejarah secara umum semakin berkurang sebagai akibat kemajuan ekonomi, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan keragaman kelompok etnis, sehingga membawa perubahan nilai dan sikap. Perubahan ini berpengaruh kepada pola pikir, penilaian, dan cara pandang masyarakat yang akhirnya menggiring pada pembangunan yang menitikberatkan hanya pada kepentingan ekonomi.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki peninggalan bangunan bersejarah adalah Kota Medan yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan memiliki sekitar 600-an bangunan bersejarah yang berusia rata-rata lebih dari 100 tahun.¹ Dengan kemajuan pembangunan yang sangat pesat saat ini,

beberapa kawasan yang memiliki warisan sejarah kota di Kota Medan perlu dilestarikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi Warisan Budaya Kota Lama Medan dan mencoba menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi, serta upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk sebuah tujuan akhir merevitalisasi Kawasan Kota Lama Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi (pengamatan) terhadap Kawasan Kota Lama Medan, wawancara dengan para narasumber, baik dari pemerintahan daerah, penghuni Kawasan Kota Lama, peneliti Balai Arkeologi Medan, serta Badan Warisan Sumatra (BWS). Penelitian lapangan diakhiri dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang berguna untuk memverifikasi data yang sudah diperoleh maupun untuk menjaring informasi baru dari para peserta. Studi pustaka juga merupakan langkah yang dilakukan, baik di awal penelitian maupun setelah penelitian dilakukan untuk melengkapi data-data yang sudah terhimpun.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Kawasan Kota Lama Medan

a. Kawasan Kota Lama Kesawan

Menurut sejarah, daerah Kesawan dahulunya adalah cikal bakal berdirinya Kota Medan pada tahun 1870, yang wilayahnya terhubung dari daerah Kesawan hingga Labuhan Deli. Pada awal abad ke-19 pembangunan Kota Medan menjadi sedemikian pesat, ditandai dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun pada masa itu. Pembangunan Kota Medan dimulai pada

1 Informasi dari Badan Warisan Sumatra (BWS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pelestarian warisan budaya di Kota Medan.

tahun 1880 dengan berdirinya bangunan-bangunan baru. Tahun 1885 rel kereta api sudah dibangun dan stasiun kereta api yang berdekatan dengan lapangan Esplanade juga sudah berdiri pada tahun 1887. Kemudian diikuti dengan pembangunan Hotel De Boer dan Bank Java. Hotel De Boer dibangun pada tahun 1889 dan menjadi terkenal di Eropa karena kemewahannya dan keindahannya pada masa itu. Selain perusahaan kereta api, hotel, dan lapangan Esplanade (sekarang Lapangan Merdeka/*Merdeka Walk*), berbagai macam gedung perkantoran dan perusahaan dibangun di sekeliling lapangan Esplanade, di antaranya adalah bangunan kantor perusahaan perkebunan Inggris Harrison & Crosfield yang berdiri tahun 1909 dan terletak di sudut kawasan Kesawan dan lapangan Esplanade.

Kawasan Kesawan sampai saat ini masih menyisakan bangunan tua yang sebagian besar masih difungsikan untuk kegiatan ekonomi, seperti kantor, warung, restoran, butik, dan toko olahraga. Menurut sejarahnya, dahulu Kesawan masuk ke dalam wilayah perkebunan, kemudian berkembang menjadi pertokoan yang dibangun oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Misalnya yang terkenal adalah Tjong A Fie, seorang saudagar besar Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Rumah Tjong A Fie merupakan bangunan dengan perpaduan gaya Cina dan Eropa yang selesai dibangun tahun 1900. Disain rumah Tjong A Fie mirip dengan rumah kerabatnya di Pulau Penang, Malaysia, bernama Cheong Fatt Tze. Tjong A Fie datang dari Kanton pada tahun 1875 bersama saudaranya, Tjong Yong Hian, dan kemudian menjadi *Majoer der*

Chineezen. Tjong A Fie adalah salah seorang pendiri *Colonial Institute* di Amsterdam yang saat ini bernama *Koninklijk Instituut voor de Tropen*.

Di depan rumah ini dapat ditemui beberapa bangunan besar yang kosong, tidak terawat, dan berdebu. Seiring perjalanan waktu, berbagai etnik pun menyebar dengan memanfaatkan wilayah ini sebagai kawasan bisnis. Tempat ini merupakan transit sentral penduduk yang berasal dari Serdang yang akan menuju ke Sunggal, dari Percut ke Hamparan Perak, dan bahkan dari Labuhan Deli Tua. Pada awal abad ke-19, pembangunan Kota Medan menjadi sedemikian pesat ditandai banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pada tahun 1918, wilayah ini diserahkan oleh Kesultanan Deli kepada Pemerintah Hindia-Belanda hingga akhirnya terbentuklah *gemeente*. Oleh Pemerintah Kota Praja Medan, kawasan ini pun disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah kawasan bernama Kesawan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan dengan tampilan arsitektur bergaya Eropa. Nama Kesawan diambil dari bahasa Karo dari akar kata *kesawahen*, yang artinya kampung. Kawasan Kesawan merupakan cikal bakal berdirinya Kota Medan yang wilayahnya terhubung dari Kesawan hingga Labuhan Deli.

Kawasan Kesawan yang termasuk Kawasan Kota Lama Medan, merupakan lokasi awal perkembangan Kota Medan modern yang mulai berdiri pada akhir abad ke-16 dan berkembang pada awal tahun 1900-an. Fungsi yang mendominasi dari kawasan ini adalah campuran antara fungsi hunian (ruko dan fungsi komersial), perbelanjaan/retail, dan perkantoran. Pada saat ini Kawasan Kesawan

sedang mengalami perubahan akibat adanya penggunaan fungsi bisnis yang sebagian terpusat di Jalan A.Yani dan sekitarnya. Sejak itu berdatanglah perusahaan-perusahaan asing untuk membuka berbagai perkantoran, bank, perusahaan perkebunan, kantor pusat, perusahaan pelayaran, kapal-kapal asing, dan lain-lain, sehingga Kawasan Kesawan menjadi pusat kota. Dulu kios-kios yang dibangun masih berbentuk kayu dan sederhana bentuknya, belum seperti sekarang ini, kemudian berubah menjadi bangunan beton. Pada abad ke-19, kawasan itu masih seperti kampung. Kondisinya pun masih belum tertata dengan baik. Akan tetapi, setelah diambil alih oleh Belanda, kawasan itu pun berubah menjadi seperti sekarang ini.

b. Pulo Brayan, Kawasan Perkeretaapian di Kota Medan

Sejarah perkeretaapian di Kota Medan tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda. Belanda dengan perusahaannya yang bernama *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM) mulai menorehkan sejarah perkeretaapian di Kota Medan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1870 dengan tujuan untuk memperlancar pengangkutan berbagai hasil perkebunan, misalnya tembakau, kopi, karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Kemudian dari berbagai lokasi perkebunan di Sumatera Utara dibawa menuju ke Pelabuhan Belawan (*Belanda Ocean Haven*), untuk seterusnya dibawa ke Belanda, yang kemudian diperdagangkan secara luas di kawasan Eropa. Pemakaian kereta api dimaksudkan untuk memperlancar transportasi dan menghindari gangguan lumpur di jalan ketika musim hujan (Sinar,

2011:61).

Tembakau Deli merupakan komoditas utama dari perkebunan di Sumatera Utara yang sangat digemari oleh orang-orang Eropa. Belanda menginvestasikan modal untuk perkebunan tembakau serta membuat jaringan perkeretaapian di Sumatera Utara karena keuntungan dari perdagangan tembakau Deli juga sangat menggiurkan. Selain dipakai untuk mengangkut hasil perkebunan, kereta api juga dipakai untuk mengangkut buruh perkebunan yang pada waktu itu cukup banyak didatangkan dari Jawa. Perkebunan di Sumatera Utara semakin berkembang sejak kedatangan pengusaha Belanda yang bernama Nienhuys pada tahun 1863. Sejak saat itu, pembukaan lahan-lahan perkebunan dengan menyewa tanah konsesi dari Kesultanan Deli maupun masyarakat semakin meluas (Pasaribu, 2008:2).

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sistem komunikasi untuk memperlancar perjalanan kereta api dari satu stasiun ke stasiun yang lain memakai telegraf. Dalam perkembangannya, dengan memakai fasilitas jalur kereta api, perusahaan DSM mempergunakan teknologi komunikasi yang lebih canggih pada masa itu, yaitu dengan teknologi telepon. Penggunaan telepon dan pemasangan sarannya dapat dipermudah dengan adanya jalur kereta api. Penggunaan jalur kereta api untuk pemasangan kabel telepon juga mempermudah pemeliharaan jaringan telepon, sehingga pada masa itu perusahaan telepon disatukan dengan DSM. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kantor telepon pada tahun 1921 yang diberi nama *Telefoon Dienst DSM* di Jalan Serdang, Medan

yang berhadapan dengan kantor pusat DSM (Pasaribu, 2008:11).

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia berpengaruh juga pada perusahaan perkeretaapian di Kota Medan. Secara otomatis perusahaan DSM dikuasai oleh Jepang. Para pegawai tinggi dan staf DSM warga Belanda lari ke Inggris, sedangkan yang tidak sempat lari dari Kota Medan menjadi tawanan Jepang. Demikian pula para kerani DSM warga Indonesia, mereka beralih menjadi pegawai kereta api di bawah pimpinan penguasa Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang ini, kereta api menjadi sarana yang cukup strategis bagi para pejuang pergerakan Indonesia. Para pejuang memanfaatkan kereta api dan juga sarana komunikasi yang ada di sepanjang jalur kereta api untuk menyusun perlawanan terhadap Jepang dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rapat

dengan cepat menyebar bahkan sampai ke ujung Sumatera, termasuk Kota Medan. Pada tanggal 4 Oktober 1945 di Lapangan Fukurada (depan Stasiun Medan) dibacakan kembali Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh T.M. Hasan, gubernur pertama Provinsi Sumatera. Berita proklamasi tersebut tersebar ke seluruh Sumatera melalui satu stasiun ke stasiun lainnya (Pasaribu, 2008:19-20).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1945, tentara sekutu dengan memakai Kapal HMS Venus mendarat di Pelabuhan Belawan, kemudian menuju Kota Medan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah kalah kepada sekutu. Pada kenyataannya, bukan hanya tentara sekutu yang datang ke Medan, namun tentara *Netherland India Civil Administration* (NICA) dengan membonceng tentara sekutu untuk



Foto 1. Stasiun, dan Bengkel Kereta Api Kawasan Pulo Brayan

umum persiapan kemerdekaan di Lapangan Merdeka yang letaknya di depan Stasiun Medan membuktikan bagaimana peranan kereta api begitu besar dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia di Kota Medan. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, beritanya

menjajah kembali Kota Medan dan sekitarnya.

Usaha dari tentara NICA tersebut tidak berhasil karena para pejuang kemerdekaan melakukan perlawanan sehingga tentara NICA keluar dari Kota Medan. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950-an, kabinet pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno melakukan

nasionalisasi aset Pemerintah Kolonial Belanda menjadi milik Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, jaringan kereta api di Kota Medan yang dahulu bernama DSM diubah menjadi Perjan Kereta Api, sebelum akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Sebagai pusat perkeretaapian masa Belanda, kawasan Pulo Brayan terdiri dari beberapa lokasi yang masing-masing memiliki peruntukannya. Lokasi-lokasi tersebut antara lain:

1) Stasiun dan Bengkel

Stasiun Pulo Brayan merupakan stasiun kecil yang terletak sekitar dua ratus meter dari persimpangan Brayan. Saat ini orang sering menyebutnya sebagai daerah Brayan Bengkel, karena di samping stasiun ini terletak bengkel/ Balai Yasa Kereta Api Medan. Kompleks stasiun ini memiliki peralatan yang masih berfungsi hingga sekarang yaitu sebuah sinyal yang masih aktif dan komplek pergudangan yang disewakan untuk umum. Saat ini, stasiun Pulo Brayan masih berfungsi untuk mengangkut penumpang komuter yang pulang pergi ke Kota Medan dan sekitarnya.

Di kawasan stasiun ini terdapat pintu gerbang menuju ke Balai Yasa, sebagai tempat memperbaiki berbagai komponen kereta api, khususnya lokomotif dan gerbong. Bangunan gerbang Balai Yasa sendiri sudah ada sejak masa Belanda karena sebagai kawasan perbengkelan kereta api untuk seluruh wilayah Sumatera Utara, sangat diperlukan adanya pintu gerbang yang menghubungkan stasiun dengan bengkel Balai Yasa. Kawasan stasiun dan sekitarnya ini juga merupakan cikal bakal dari perkembangan perkeretaapian di

Sumatera Utara, sehingga tidak mengherankan apabila pemerintahan Belanda dahulu juga membangun berbagai fasilitas yang diperlukan untuk sebuah kawasan perbengkelan, misalnya menara air untuk mensuplai kebutuhan air untuk lokomotif uap dan bagi karyawan kereta api yang tinggal di kawasan tersebut.

2) Rumah Pimpinan dan Staf DSM

Dalam sejarah perkeretaapian di Kota Medan yang dimulai pada masa penjajahan Belanda, kereta api memegang peranan yang sangat penting bagi transportasi antardaerah di Sumatera Utara atau di wilayah Pantai Timur Sumatera (*Sumatera East Coast*), sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang penting dan sangat ramai dengan berbagai aktivitas warganya. Perkembangan perkebunan yang sangat pesat lebih mendorong perkembangan kota ini, termasuk keberadaan sebuah kawasan perkeretaapian, menyebabkan pembangunan berbagai perumahan harus dilakukan oleh DSM untuk memberikan tempat bagi para karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut.

Permukiman, dalam hal ini tempat tinggal, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar pada saat itu, mengingat pesatnya pertumbuhan perkebunan dan perkeretaapian. Pada masa Belanda sudah ada *master plan* dalam penggunaan lahan. Untuk menjadikan permukiman menjadi satu kawasan yang utuh, dibutuhkan beberapa komponen, sebagai berikut:

- a) lahan atau tanah untuk peruntukannya di mana harga dari satuan rumah sangat berpengaruh terhadap lokasi permukiman itu sendiri;

- b) sarana dan prasarana permukiman seperti jalan lokal, saluran drainase, saluran air bersih, dan jaringan listrik. Sarana dan prasarana ini menunjang kualitas permukiman;
- c) perumahan (tempat tinggal yang terbangun) dalam kawasan permukiman;
- d) adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial di dalamnya seperti fasilitas pendidikan, peribadatan, lapangan bermain, dan sebagainya (Fachrizal et.al, 2010:29).

ini bergaya Eropa, yang satu rumah dengan rumah lainnya terpisahkan jarak yang cukup jauh. Rumah-rumah tipe ini sampai sekarang masih tegak berdiri di Kawasan Pulo Brayan, dengan berbagai kondisi, baik terawat maupun tidak terawat. Saat ini, rumah tipe B ini banyak dimiliki oleh para pensiunan TNI Angkatan Darat karena sejak proses nasionalisasi setelah kemerdekaan dialihkan menjadi perumahan TNI Angkatan Darat.



Foto 2. Rumah Peninggalan Perusahaan DSM di Kawasan Pulo Brayan

Perumahan bagi karyawan dan pimpinan perusahaan DSM yang dibangun di Kawasan Pulo Brayan meliputi beberapa tipe, yaitu rumah untuk staf dan rumah untuk pejabat DSM. Peninggalan rumah staf sampai saat ini masih ada, walaupun sudah banyak yang dibangun atau diperbaiki oleh pemiliknya yang merupakan keturunan dari staf DSM. Rumah tipe ini yang diperuntukkan bagi para pekerja DSM disebut rumah tipe A yang termasuk dalam klasifikasi rumah deret. Rumah tipe ini dihuni oleh pekerja perusahaan DSM dari kalangan pribumi Indonesia.

Selain rumah tipe A, ada juga rumah tipe B yang diperuntukkan bagi para pejabat DSM dari Eropa. Arsitektur perumahan tipe

3) Kantin dan Lapangan

Salah satu prasarana pendukung kelangsungan sebuah kawasan adalah prasarana rekreasi dan tempat beristirahat. Pada masa Belanda, tempat tersebut adalah sebuah kantin yang berada di dekat lapangan bermain. Menurut cerita, kantin yang berbentuk dua buah bangunan kembar ini dulunya dipakai untuk tempat makan para pekerja dan pimpinan perusahaan perkeretaapian DSM. Saat ini, kondisi kantin tersebut masih tegak berdiri dengan kokoh, namun peruntukkannya bukan lagi sebagai kantin melainkan sebagai TK Islam yang dikelola oleh para keturunan pegawai DSM. Kegiatan sekolah dengan dua ruang

kelas tersebut saat ini berjalan dengan baik dengan jumlah murid yang cukup memadai. Pemanfaatan bekas kantin menjadi sebuah TK ini sedikit banyak ikut menyumbangkan pelestarian bangunan karena bangunan tersebut dirawat dengan baik dan bukan merupakan tempat kosong yang tidak berpenghuni.

Di depan bangunan bekas kantin yang sekarang menjadi TK tersebut terdapat sebuah lapangan sepakbola yang cukup luas. Kedua tempat ini dikelola oleh PT KAI, namun masyarakat umum dapat menggunakannya dengan cukup leluasa. Bahkan sekarang lapangan bola dipakai sebagai markas sebuah sekolah sepak bola bagi anak-anak.

c. Kawasan Kota Lama Labuhan Deli

1) Gambaran Umum Wilayah Labuhan

Wilayah Labuhan yang berada di Kelurahan Pekan Labuhan di bawah Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, merupakan salah satu bagian dari Kota Lama Medan dan menjadi pintu gerbang menuju Kota Medan dari arah utara. Saat ini sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah Kelurahan Pekan Labuhan dianggap sebagai salah satu kota tertua yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Hal itu terbukti dengan adanya bangunan peninggalan zaman Kerajaan Melayu, seperti Masjid Al Osmani, Vihara Sui San Keng, dan rumah-rumah bangunan peninggalan Belanda.

Batas-batas wilayah Pekan Labuhan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan; sebelah selatan berbatasan

dengan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan; sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan; sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Jarak tempuh dari pusat Kota Medan ke Kelurahan Pekan Labuhan kurang lebih 19 km.

Sebagian besar penduduk daerah Pekan Labuhan ini adalah orang Melayu, dan sebagian kecil terdiri dari berbagai etnis. Dengan demikian, daerah Kelurahan Pekan Labuhan ini bersifat heterogen. Penduduk Kelurahan Pekan Labuhan berjumlah 27.727 jiwa, terdiri dari 14.048 laki-laki dan 13.679 perempuan. Jika dilihat berdasarkan etnis, penduduk yang terbesar adalah etnis Melayu yang berjumlah 13.544 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah etnis Nias yang berjumlah 81 jiwa. Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar adalah nelayan, yaitu 1.201 jiwa, dan mata pencaharian lainnya 1.533 jiwa (Sumber: Monografi Kelurahan Pekan Labuhan).

2) Labuhan pada Masa Lalu

Kelurahan Pekan Labuhan dahulu merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Deli, tempat Sultan Mahmud Perkasa Alam bertahta. Istana sultan merupakan sebuah rumah besar yang berserambi dua, terletak di pinggir sungai agak ke arah hulu, di ujung jalan. Masing-masing serambi yang terletak di depan dan belakang istana itu berukuran 27 m x 9 m. Serambi-serambi itu juga digunakan untuk pertemuan-pertemuan besar (Soedewo dan Shalihat, 2010: 11). Sebagai kerajaan dengan budaya Melayu yang identik dengan Islam, didirikan juga masjid yang indah, dan

diberi nama Masjid Al-Osmani.

Masjid Al-Osmani dibangun sejak ayah Sultan Mahmud, yaitu Sultan Osman bertahta (1824-1854), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Berawal dari masjid berdinding papan hingga menjadi masjid dengan bangunan megah. Pada awalnya masjid tersebut dibangun guna kepentingan ibadah keluarga istana, namun pada perkembangannya dapat digunakan oleh rakyat untuk perayaan hari-hari besar Islam dan untuk kepentingan syiar Agama Islam.

Dari sumber data yang diperoleh dikatakan, bahwa pada waktu itu (masa Kesultanan Deli), rumah-rumah di Labuhan berbentuk rumah panggung dengan tinggi kurang lebih satu meter di atas permukaan tanah. Morfologi daerahnya digambarkan sebagai kampung di pinggir sungai yang susunannya kurang teratur dan saling berdekatan. Adapun materi yang digunakan untuk membangun rumah itu, adalah batang nibung untuk tiang, pelepah nipah untuk atap, bambu untuk dinding, dan papan dari beberapa jenis pohon berkayu keras untuk lantai. Setiap rumah mempunyai bagian serambi yang biasa digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang dagangan. Bentuk dan ukuran rumah hampir sama satu sama lain, kecuali Istana Sultan Deli. .

Selain penduduk pribumi, pendatang yang bermukim di daerah Labuhan adalah orang Cina dan India. Orang Cina yang datang ke daerah Labuhan ini adalah para pedagang dari Semenanjung Malaka. Mereka menguasai perdagangan antara Pantai Timur Sumatera dengan Semenanjung Malaka, antara lain: garam, candu, senjata, perkakas logam untuk ditukar dengan beras, tembakau, lada hitam,

kopi, rotan, dan lain-lain. Seperti diketahui bahwa wilayah Sumatera Utara merupakan daerah perkebunan penghasil komoditas tersebut yang mengakibatkan banyak para pedagang singgah untuk bertransaksi. Orang India yang ada pada waktu itu dianggap sebagai etnis Melayu keturunan India. Mereka sudah ada di wilayah Labuhan, Kota Medan dan menempati Kampung Keling yang menyebar di luar Labuhan. Unsur-unsur budaya yang mereka bawa terakulturasi dalam bentuk makanan khas India.

Sebelum Belanda masuk, Labuhan sebagai ibukota dan pusat perdagangan telah menjadi daerah yang mengalami pertumbuhan kota dan penduduk yang senantiasa mengalami perubahan. Seiring dengan pertumbuhan industri tembakau dan perluasan kekuasaan kolonial ke Labuhan Deli, perubahan kota sekitar Labuhan bertambah cepat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduknya yang semakin meningkat dan morfologi Kota Labuhan itu yang mengalami perkembangan (Soedewo dan Shalihat, 2010: 12).

Kota Labuhan Deli yang sebagian besar berpenghuni Etnis Melayu tidak mencerminkan ciri khas Melayu yang biasanya tumbuh di sepanjang sungai. Kondisi ini terjadi karena susunan Kota Labuhan dibangun mengikuti alur jalan darat utama. Bangunan-bangunan permanen berupa rumah atau toko-toko dibangun menghadap jalan utama. Deretan bangunan permanen yang bercat putih berada di sepanjang jalan utama itulah yang menjadi pusat Kota Labuhan (Soedewo dan Shalihat, 2010: 13).



Foto 3. Rumah Toko di Labuhan Deli

Sebagai bentuk perjanjian antara Sultan dengan pemerintah kolonial (1876), Labuhan Deli yang merupakan Ibukota Kesultanan Deli dipindahkan ke Kota Ma'shum, yang mana kesultanan memperoleh cukai atau semacam tunjangan tahunan dari pemerintah kolonial yang menjadi sumber pendapatan Kesultanan Deli. Pengalihan itu terkesan menguntungkan, tetapi secara politik telah membatasi kekuasaan sultan atas sumber-sumber ekonomi dan pemerintahan. Pengalihan atau perpindahan ibukota Deli mengakibatkan Kota Labuhan Deli mengalami kemunduran (1869). Pembangunan jalan raya, jaringan jalan kereta api, dan pelabuhan semakin membuat tidak berfungsinya sungai yang melintasi Kota Labuhan.

Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti Labuhan menjadi lebih baik. Hal ini karena Labuhan menjadi daerah operasi tentara sekutu dan Belanda sekaligus menjadi tempat atau basis kelompok laskar rakyat pro Republik, milisi Cina, dan kelompok pengganggu. Pada perkembangan selanjutnya, perluasan wilayah Kotamadya Medan sampai ke Belawan tidak membuat Labuhan menjadi lebih baik. Pembangunan kota yang terpusat di tengah kota mendorong kegiatan perusakan

berbagai warisan bangunan yang ada di Kota Medan.

3) Labuhan pada Masa Kini



Foto 4. Masjid Al Osmani

Secara morfologis, susunan Pekan Labuhan masih nampak seperti dulu, di mana kota ini berkembang memanjang mengikuti alur jalan dan membelakangi sungai. Bangunan rumah/pertokoan Cina masih terlihat (Soedewo dan Shalihah. 2010: 15).

Bentuk bangunan asli masih terlihat, meskipun terdapat sejumlah bangunan yang sudah diganti dengan bangunan baru. Terkesan warga Labuhan mempertahankan konstruksi lama walaupun nampak tidak terawat. Di bagian beranda nampak ada penambahan baru yang menjadi penghubung antartoko. Bangunan rumah/toko Cina berderet sepanjang jalan utama di Labuhan tersebut terhalang oleh aktivitas pasar. Para pedagang di jalan tersebut menggelar tikar dan meja untuk meletakkan barang dagangannya.

Ada bangunan penting lainnya yang memberi gambaran daerah Labuhan sebagai kota lama/kota tua, yakni rumah tinggal pengusaha Cina Tjong A Fie dan rumah candu yang dikelola *Liutenant der Chinezen* tersebut. Rumah Tjong A Fie sangat mudah dikenali,

yang kini ditempati keturunannya. Secara fisik, ukuran rumah Tjong A Fie lebih besar dari bangunan lain. Atap rumahnya berbentuk melengkung model atap benteng, terdiri dari dua pintu utama yang masing-masing ditempati oleh satu keluarga (Soedewo dan Shalihat, 2010:16). Sekarang ini, yang menempati rumah Tjong A Fie tidak ada hubungan keluarga. Rumah tersebut dihibahkan oleh keturunan Tjong A Fie.

Labuhan sebagai kota lama juga ditandai dengan adanya bangunan lama yang merupakan rumah candu, terletak tidak jauh dari rumah Tjong A Fie. Bentuk rumah candu berbeda dari pertokoan, dibangun menjorok dari jalan utama. Di belakang rumah candu tersebut adalah pelabuhan pada masa kesultanan yang dikenal dengan nama Bom Lama (pelabuhan lama) (Soedewo dan Shalihat, 2010:16).

Pada masa kini, Labuhan ditandai dengan adanya Masjid Raya Al-Osmani yang menjadi ikon, Kompleks Makam Diraja Deli, dan Klenteng Tridharma. Hingga kini bangunan-bangunan tersebut cukup terawat. Masjid Al-Osmani ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 1927 atas biaya *De Deli Maatschappij*. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang ada pada masjid tersebut. Masjid ini mempunyai arsitektur perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, dan Cina.

Klenteng Tridharma/Vihara Sui San merupakan ikon Labuhan yang paling tua. Tidak diketahui secara pasti kapan klenteng ini dibangun. Bentuk klenteng di Labuhan ini masih dipertahankan dengan gaya lama. Ornamen ragam hias pada klenteng tersebut

berupa naga, ikan berkepala naga, gapura, ikan mas, burung merak, dan lain-lain, yang menggambarkan adanya kesamaan dengan Vihara Gunung Timur di tepi Sungai Babura (Soedewo dan Shalihat, 2010: 19).



Foto 5. Vihara Sui San

Peninggalan masa lalu tersebut cukup terawat dan dikelola dengan baik karena telah menjadi cagar budaya. Namun rumah-rumah atau toko orang Cina yang berada di sepanjang jalan utama di Labuhan atau Kelurahan Pekan Labuhan kurang terawat/tidak terawat. Padahal bangunan tersebut juga termasuk sebagai bukti atau memberi gambaran bahwa Labuhan sebagai kota lama/kota tua yang mencerminkan nilai sejarahnya. Terkesan sosialisasi tentang bangunan-bangunan lama yang dapat menjadi cagar budaya dan harus dilestarikan belum sampai ke warga masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Lurah Pekan Labuhan, banyak warga yang tidak paham akan hal tersebut.

2. Analisis

a. Pentingnya Kota Lama Sebagai Kawasan Cagar Budaya

Bangunan berusia minimal 50 tahun yang mempunyai kekhususan dari segi arsitektural

dan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat layak disebut sebagai bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan bersejarah tersebut dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Sebagian besar bangunan cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa tersebut pada masa lalu, yang selain sebagai salah satu pertanda jati diri sebuah kota, juga dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 1).

Disadari atau tidak, bangunan cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, karena dapat dikatakan bahwa bangunan cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Namun tidak semua bangunan peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai bangunan cagar budaya. Ada kriteria tertentu sehingga sebuah bangunan dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya yang wajib dilestarikan, di antaranya bangunan tersebut sudah berusia minimal 50 tahun serta dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di samping nilai estetika, dan orisinalitas juga menjadi

pertimbangan apakah sebuah bangunan bersejarah dapat dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Indonesia mempunyai banyak sekali bangunan bersejarah, baik yang sifatnya tradisional maupun kolonial. Oleh karena itu, pelestarian bangunan cagar budaya terutama di Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain seperti pariwisata dalam rangka kepentingan pembangunan nasional.

Pelestarian bangunan (cagar budaya) secara umum telah menjadi wacana internasional selama beberapa dasawarsa, yang dapat dilihat pada beberapa piagam pelestarian, di antaranya *The Burra Charter* (1979), Rekomendasi UNESCO (1976), serta *The World Heritage Cities Management Guide* (1991). Piagam dari *International Council of Monuments and Site (ICOMOS)* tahun 1981, yaitu *Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance*, menegaskan bahwa makna pelestarian merupakan suatu proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang ada tetap terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat. Menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003), pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Menurut Undang-Undang Cagar Budaya

No.11 Tahun 2010, pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Secara umum, istilah pelestarian merupakan proses dalam memelihara, menjaga, maupun melindungi sesuatu yang bernilai dipandang dari segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar hal tersebut tidak menghilang. Namun, pembangunan yang dilaksanakan saat ini di Indonesia membuat khawatir sekelompok orang yang peduli terhadap keberlangsungan bangunan-bangunan bersejarah. Kondisi ini timbul karena seringkali bangunan-bangunan kuno dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ditambah lagi dengan adanya beberapa paradigma yang tidak benar terkait keberadaan bangunan-bangunan bersejarah, seperti cara pandang tentang besarnya biaya yang dibutuhkan guna memelihara sebuah gedung yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun, serta tidak efisiennya sebuah bangunan kuno.

Demikian juga dengan peran pentingnya Kawasan Kota Lama Medan yang memiliki sejarah panjang hingga saat ini. Sejarah menjelaskan bahwa John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833, menemukan sebuah kampung bernama Medan yang didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. Pada tahun 1883, Medan telah menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial Belanda membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Medan mempunyai kawasan lama sebagai lokasi awal pertumbuhannya. Pola kehidupan

plural sejak pra-Indonesia seperti itu tercermin juga dalam kebudayaan fisik kotanya, melalui ratusan bangunan bersejarah tinggalan kolonial yang sangat menarik, yang saat ini dapat disaksikan terutama dalam berbagai fungsi baru seperti rumah tinggal, kantor, hotel, rumah toko, tempat peribadatan, rumah sakit, dan sekolah. Secara estetika, bangunan tersebut pada umumnya merupakan paduan gaya, desain, dan arsitektur Melayu, Belanda, India, Inggris, dan Cina, sebagai akumulasi dan kristalisasi sejarah Kota Medan sendiri, yang dapat ditelusuri sejak era penanaman tembakau Deli di Sumatera Timur pada tahun 1863.

Pertumbuhan kota Medan sejak masa lalu hingga sekarang, meninggalkan banyak bangunan tua bersejarah di beberapa kawasan, mulai dari Kawasan Kota Tua Labuhan hingga Kawasan Kota Tua Kesawan. Sejarah Kota Medan yang sekarang dimulai dari kawasan kota tua dengan bangunan tua sebagai ciri identitasnya yang mengandung nilai dan makna sejarah dan arsitektural, sehingga secara total mencerminkan citra Kota Medan itu sendiri. Tanpa adanya kawasan kota tua tersebut, dipastikan bahwa pemerintah dan bahkan masyarakat akan kehilangan tentang asal-usul lingkungannya yang tidak mempunyai orientasi pada masa lampau.

b. Permasalahan di Kawasan Kota Lama Medan

Bila didasarkan pada informasi bahwa bangunan lama di Medan terdaftar keberadaannya sebanyak 600 bangunan, maka dilihat dari kondisinya saat ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut sudah

sangat berkurang banyak karena setiap tahunnya sejumlah bangunan lama sebagai cagar budaya dihancurkan untuk kepentingan ekonomi. Lebih jauh lagi, Kawasan Kesawan yang sekarang telah berubah menjadi kawasan yang sangat tidak tertata dengan baik, bahkan seperti disengaja dilakukan pembiaran antara lain terhadap beberapa aspek:

1) Aspek Lingkungan

Pembangunan lingkungan hanya berorientasi pada sisi ekonomi saja, tanpa melihat nilai estetika, sosial-budaya, sejarah, dan sebagainya. Lalu lintas dengan volume kendaraan yang sangat padat sering terjadi pada jam-jam tertentu melintas di kawasan yang sudah menjadi jalan utama. Belum lagi ditambah dengan iklan (*billboard*) dari ukuran kecil hingga besar yang melintang di atas Jalan Kesawan, menjadikan lingkungan Kawasan Kesawan semakin kumuh. Banyak bangunan baru mengganti gedung lama, bahkan bangunan cagar budaya. Belum lagi bangunan yang diperuntukkan untuk rumah burung walet. Demikian juga dengan sistem drainase saluran limbah pembuangan dan parit-parit yang tidak terurus dan menimbulkan polusi udara, suatu saat bisa saja menjadi penyebab banjir di daerah ini.

2) Aspek Pelestarian Bangunan

Beberapa contoh tidak adanya upaya pelestarian pemerintah terhadap bangunan cagar budaya, antara lain Gedung Varekamp & Co yang digunakan sebagai kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara; Kantor Perwakilan *Stork* eks Bank Modern; bangunan ruko yang berada di Jalan

Gwangju; *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM), *Lindeteves-Stokvis*, dan Villa Kembar. Kondisi ini juga berlaku untuk gedung-gedung cagar budaya lainnya, yang memperkuat alasan pemerintah dan pemilik untuk merubuhkan dan menggantikannya dengan bangunan baru. Pemeliharaan yang sangat kurang, faktor cuaca, iklim, dan usia menjadikan kondisi eksterior maupun interior gedung lebih kusam. Bahkan banyak juga bangunan cagar budaya menjadi tempat pemeliharaan burung walet, sehingga Kawasan Kesawan semakin tercemar polusi suara dan kotoran burung walet yang melekat di dinding gedung. Hal ini bertentangan dengan UU BCB No. 11 tahun 2010 dan mengurangi makna dan fungsi gedung bersangkutan. Bangunan yang seharusnya masuk dalam daftar benda cagar budaya di Kota Medan ini telah dihancurkan atau banyak mengalami perubahan secara drastis dari sisi interior dan eksterior.

Dari sisi interior bangunan, saat ini tidak memberikan gambaran fungsi pada masa lalu. Misalnya Gedung Varekamp & Co yang digunakan sebagai Kantor Disbudpar Provinsi. Karena alasan praktis dan ekonomis, bagian dalam interior bangunan tersebut saat ini tidak lagi memberikan informasi yang utuh mengenai sejarah gedung ketika pertama kali dibangun. Pada ruangan depan, tatanan interior dan furnitur yang sekarang dipakai menjadikan ruangan, bertambah sempit karena tata letak dari meja dan kursi sangat kontras kondisinya dengan pada saat awal pembangunan gedung. Saat ini ruangan dipergunakan sebagai pusat informasi wisatawan. Bagian ruang pameran perlu peninjauan kembali atas peruntukan ruangan dan penempatan furnitur maupun

ruang etalase gedung ini.

Dari sisi eksterior, menunjukkan banyak bangunan lama tidak mengesankan bangunan cagar budaya. Posisi gedung yang saling berdempetan dengan bangunan-bangunan sekitarnya sangat memengaruhi keberadaan gedung sehingga terlihat sempit. Banyak bangunan lama yang di bagian dindingnya bertuliskan nama gedung pada masa dahulu, namun saat ini tulisan tersebut secara sengaja dihilangkan.

Pemerintah tidak memedulikan pelestarian pusaka budaya yang potensial dikembangkan sebagai modal pemahaman identitas, jati diri, dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Kondisi ini akibat tidak dipahaminya konsep pelestarian terkait perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai aset strategis daerah yang harus dikelola dengan benar. Banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya pelestarian, misalnya pariwisata budaya. Beberapa masalah yang berkaitan dengan Kawasan Kota Lama Medan, yaitu:

- 1) tidak adanya lembaga yang beranggotakan *stake* dan *shareholder* bertanggung jawab dalam pengelolaan Kawasan Kota Lama Medan;
- 2) pemerintah menempatkan pariwisata budaya dengan tujuan bukan sebagai alat pelestari namun sebagai tujuan utama yang berorientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) tidak jelasnya konsep pelestarian budaya;
- 4) keberpihakan RT/RW lebih kepada pemanfaatan (hak guna/pakai) lahan untuk kepentingan ekonomi (pariwisata) dibanding untuk penguatan akar budaya

daerah;

- 5) perhatian pemerintah sangat kurang terhadap insan budaya sebagai aset bangsa dalam upaya pelestarian bangunan lama di Kota Medan;
- 6) menipisnya semangat pelestarian cagar budaya dari pemerintah dan pengusaha;
- 7) keberpihakan pemerintah terhadap investor dalam mengembangkan program, berdampak pada konflik dan pendapatan;
- 8) belum adanya aturan yang jelas terkait pelestarian bangunan cagar budaya dan investasi yang ramah lingkungan;
- 9) minimnya informasi mengenai konsep dan tata cara pelestarian budaya yang diperlukan oleh pemangku resiko;
- 10) sering dalam pembangunan Kota Medan terjadi proses komodifikasi antara pemerintah dengan pengusaha yang berdampak pada penghancuran warisan budaya dan menghambat upaya pelestarian;
- 11) tidak adanya upaya pemerintah dalam rangka meringankan dan memudahkan upaya pelestarian bangunan cagar budaya, melakukan pembinaan dan kerjasama dengan *stakeholder* dan *shareholder*, khususnya elemen masyarakat seperti: organisasi masyarakat dan LSM, intelektual, dan media massa yang membela pelestarian warisan budaya dan pengembangan pariwisata.

c. Keberlanjutan Kawasan

Kawasan kota lama merupakan suatu kawasan yang menjadi landasan pembentuk

kota pada masa awal terbentuknya kota tersebut. Kawasan kota lama biasanya merupakan kawasan bersejarah atau *'heritage district'*. Kawasan kota lama/bersejarah tersebut merupakan suatu area di dalam kota di mana terdapat banyak bangunan-bangunan yang signifikan sebagai bangunan lama/bersejarah. Biasanya lokasi ini merupakan bagian kecil area dalam suatu kota. Dari pengalaman beberapa negara menunjukkan keberhasilan upaya pelestarian kota lama terletak pada kemampuan pemerintah bersama masyarakat dalam melestarikan aset yang dimilikinya.

Pemahaman dan apresiasi masyarakat akan menciptakan gerakan dari masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, termasuk bangunan cagar budaya. Masih banyak pembicaraan warisan bangunan cagar budaya hanya baru pada tataran tentang sejarahnya, keindahannya, ataupun ciri arsitekturnya, belum sampai pada bagaimana mengkomunikasikan nilai yang terkandung kepada masyarakat. Masyarakat inilah yang nantinya mampu memberikan apresiasi terhadap objek tersebut, untuk kemudian secara mandiri mampu memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Oleh karenanya, *good governance* sangat diperlukan guna mengakomodasi apresiasi dan gerakan budaya masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, khususnya lingkungan kawasan kota lama sebagai aset bangsa dengan memprioritaskan pada upaya-upaya:

- 1) mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya budaya;
- 2) menyediakan prosedur perlindungan yang memadai untuk sumber daya budaya;

- 3) memastikan tindakan konstruksi yang sesuai dengan karakter lingkungan bersejarah dan daerah;
- 4) meningkatkan program pendidikan untuk pemilik properti, pejabat dan staf pemerintah, dan elemen masyarakat yang ada di daerah;
- 5) mempromosikan manfaat ekonomi dan pelestarian;
- 6) pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan oleh lembaga;
- 7) mendukung insentif dan program yang mendorong pelestarian;
- 8) koordinasi kegiatan pelestarian dengan instansi lain dan organisasi.

d. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang diperlukan terhadap kawasan kota lama Medan meliputi

- 1) merumuskan prinsip-prinsip pelestarian dalam perencanaan dan proses pembangunan;
 - a) pemerintah harus mempromosikan pelestarian sumber daya budaya untuk memastikan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan untuk memahami dan menghargai keunikan warisan kota lama;
 - b) pemerintah harus bertanggung jawab secara langsung untuk pelestarian kawasan warisan budaya dengan melindungi dan mempertahankan kawasan tersebut termasuk yang dimiliki masyarakat yang tidak terbatas pada bangunan, monumen, maupun lansekap beserta lingkungannya;
 - c) pemerintah harus melindungi

- situs arkeologi dan signifikansinya berdasarkan peraturan pelestarian yang berlaku;
- d) pemerintah harus melindungi sumber daya alam seperti keunikan geologi, vegetasi, dan lanskap yang berada di kawasan dengan mengevaluasi perencanaan dan pengembangan tata lingkungan dan ruang terbuka;
 - e) pemerintah harus mempromosikan dan meningkatkan pelestarian identitas warisan lingkungan kota lama kepada masyarakat;
 - f) pemerintah harus menggunakan pelestarian warisan budaya sebagai alat untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman terkait warisan budaya termasuk kawasan kota lama;
 - g) pemerintah harus memastikan konsistensi antara elemen pelestarian warisan budaya dengan rencana program lainnya.
- 2) Mengidentifikasi, memetakan, menilai, dan menginterpretasikan sumber daya budaya kota lama.
- a) menerapkan program komprehensif untuk mendokumentasikan dan melestarikan bangunan bersejarah, struktur, situs (termasuk situs arkeologi), benda-benda, lanskap, dan sumber terkait kota lama;
 - b) menilai dan mengidentifikasi sumber daya budaya yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam skala lokal, regional, dan nasional;
 - c) mengkomunikasikan data dan informasi kepada *stakeholder* warga, serta memperkuat kepedulian masyarakat terhadap apa yang harus dilakukan dalam upaya pelestarian kota lama.
- 3) mempromosikan citra kota lama sebagai pusat sejarah yang penting bagi identitas Kota Medan;
- a) melakukan program-program pendidikan dalam rangka mengkomunikasikan pemahaman tentang pentingnya kota lama terkait sejarah, interpretasi, lingkungan budaya, perizinan bangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi bangunan cagar budaya di kota lama;
 - b) meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya pelestarian terhadap sejarah kota lama bagi para pemangku dan pemilik resiko (*stakeholder* dan *shareholder*).
- 4) memperkuat keterpaduan dalam perencanaan, perizinan, dan kegiatan pengembangan terkait kota lama;
- a) membangun *database* yang *up-to-date* kota lama yang dapat mendukung perlindungan terhadap kawasan kota lama;
 - b) menerapkan persyaratan tentang kepemilikan terhadap signifikansi integritas sumberdaya budaya di kawasan kota lama;
- 5) menetapkan kompatibilitas antara pembangunan dan sumber daya budaya yang sudah ada di kawasan kota lama;
- a) menyusun desain dan *review* proses rencana tapak untuk mendorong konstruksi baru menjadi kompatibel dalam skala dan karakter dengan

budaya dan sumber daya budaya di kota lama;

- b) menggunakan desain dan *review* proses rencana tapak untuk mendorong kompatibilitas desain jalan, perbaikan umum, dan utilitas infrastruktur dengan sumber daya budaya yang ada.
- 6) mengalokasikan anggaran untuk program pelestarian kawasan kota lama, termasuk yang diperlukan untuk pendidikan, penelitian, survei, dan insentif bagi pemilik properti;
 - a) menyediakan insentif untuk mempromosikan restorasi, rehabilitasi, dan penggunaan kembali sumber daya budaya yang adaptif;
 - b) menghimpun sumber daya finansial dari pemerintah dan industri yang membantu dalam identifikasi, penetapan dan pelestarian sumber daya budaya.
- 7) mendorong pengelolaan sumber daya budaya di kota lama oleh pemerintah maupun swasta;
 - a) menerapkan penegakan peringkat, zonasi, dan keamanan gedung serta peraturan konstruksi sebagai alat untuk membantu pelestarian di kawasan kota lama;
 - b) mengintegrasikan pelestarian sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses rencana spesifik, rencana umum, dan lingkungan;
 - c) memperkuat koordinasi pelestarian dengan kegiatan lain;
 - d) mempromosikan pelestarian sumber daya budaya yang bertanggung jawab

khususnya yang dilakukan oleh lembaga terkait baik dalam skala lokal, regional dan nasional.

C. PENUTUP

Penelitian tentang pengembangan warisan budaya Kawasan Kota Lama Medan ini mendapatkan hasil sebagai berikut; permasalahan pelestarian Kawasan Kota Lama Medan ini ada beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, pelestarian bangunan, dan keberlanjutan kawasan. Upaya tindak lanjut pelestarian Kawasan Kota Lama Medan dapat dilakukan dengan cara; pertama, merumuskan prinsip-prinsip pelestarian dalam perencanaan dan proses pembangunan; kedua, mengidentifikasi, memetakan, menilai dan menginterpretasikan sumber daya budaya kota lama; ketiga, mempromosikan citra kota lama sebagai pusat sejarah yang penting bagi identitas Kota Medan; keempat, memperkuat keterpaduan dalam perencanaan, perizinan, dan kegiatan pengembangan terkait kota lama; kelima, menetapkan kompatibilitas antara pembangunan dan sumber daya budaya yang sudah ada di kawasan kota lama; keenam, mengalokasikan anggaran untuk program pelestarian kawasan kota lama, termasuk yang diperlukan untuk pendidikan, penelitian, survei, dan insentif bagi pemilik properti; ketujuh, mendorong pengelolaan sumber daya budaya di kota lama oleh pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Monografi Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan*.
- Anonim. 2010. *Profile Mesjid Al-Osmani Medan Labuhan 1854-2010*.
- Fachrizal, Effan, et.al. 2010. *Konservasi Kawasan Brayan Bengkel*. Tugas Mata Kuliah Konservasi Lingkungan dan Bangunan, Fakultas Teknik Pasca Sarjana USU Medan.
- Koestoro, Lucas Pertanda. 2006. *Medan, Kota di Pesisir Timur Sumatera Utara dan Peninggalan Tuanya*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Pasaribu, M. Yusuf. 2008. *Sejarah Kereta Api Tempo Dulu. Cetakan II*. Medan: diterbitkan sendiri.
- Sinar, Tengku Luckman. 2011. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Sinar Budaya Group.
- Soedewo, Eri dan Misnah Shalihat (ed.). 2010. *Kota-Kota Tua Sumatra Utara*. Medan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERBASIS KOMUNITAS:

Studi tentang Pemanfaatan Air bagi Masyarakat Dusun Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono

Ihya Ulumuddin
Puslitbang Kebudayaan
ihya_aden@yahoo.com

Abstract

Community-based resource management is a community development strategy that gives a dominant role to the society at community level to manage the development process, in this case leads to the strengthening of resources managing mechanisms to meet the needs of local communities in Dusun Rowo, Desa Tlogopakis, Petungkriyono District, Pekalongan. With qualitative research methods, this study may reveal that water was used by the local community in a productive and sustainable for their daily needs. It found that there are actors who organize other residents in Dusun Rowo to manage water use and community participation in utilizing the water resources. They use water for various purposes, such as for bathing, drinking, washing, or for their cattle. In addition, water is also used by local communities to meet the needs of irrigating rice fields, irrigation ponds, pools wood preservation and hydroelectric power.

Key words: resources, water use, community

Abstrak

Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas merupakan suatu strategi pembangunan masyarakat yang memberikan peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan. Dalam hal ini mengarah pada penguatan mekanisme dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat, yakni masyarakat Dusun Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Dengan metode penelitian kualitatif ini, penelitian dapat mengungkapkan pemanfaatan air yang dilakukan masyarakat setempat secara produktif dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang melakukan pengorganisasian terhadap warga lainnya di Dusun Rowo dalam memanfaatkan air, juga terdapat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya air tersebut. Mereka menggunakan air untuk berbagai keperluan hidupnya, baik untuk mandi, minum, mencuci, maupun untuk memenuhi kebutuhan minum hewan ternaknya. Selain itu, air juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah, pengairan kolam ikan, kolam pengawetan kayu, dan termasuk untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air.

Kata kunci: sumber daya, pemanfaatan air, masyarakat

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Strategi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas merupakan penjabaran dari perspektif pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang dalam banyak hal merupakan koreksi atas perspektif pembangunan konvensional yang berorientasi produksi. Oleh karena itu, dalam banyak hal, pendekatan dan karakteristiknya kebalikan dari pendekatan pembangunan konvensional. Jika dalam perspektif pembangunan konvensional digunakan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sangat mengutamakan produksi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cenderung mengalahkan kepentingan rakyat, maka dalam perspektif ini menggunakan hal yang sebaliknya, yaitu mengutamakan desentralisasi. Desentralisasi ini dilakukan dalam pengambilan keputusan yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi persoalan dan kebutuhan, penyusunan, dan pengelolaan program (Soetomo, 2008).

Pendekatan ini memiliki prinsip kontrol terhadap suatu tindakan yang berada pada pihak yang akan menanggung akibat dari tindakan tersebut. Hal itu disebabkan karena hubungan antara suatu keputusan yang diambil dengan akibat dari keputusan itu sangatlah dekat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas kontrol masyarakat lokal terhadap keputusan tindakan yang akan dijalankan, diperlukan pendekatan yang dapat mendorong inisiatif lokal, tanggung jawab lokal, dan pengelolaan secara mandiri yang dapat memperkuat proses belajar sosial, yakni pembangunan yang mengarusutamakan komunitas.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang melakukan pembangunan dengan mengedepankan komunitas, salah satunya adalah Petungkriyono, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut cukup terasa bagi kita ketika melakukan pengamatan kehidupan masyarakat Petungkriyono dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, salah satunya adalah sumber daya alam.

Petungkriyono memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk di antaranya adalah air. Air merupakan sumber daya yang amat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Petungkriyono, termasuk di Dusun Rowo, Desa Tlogopak. Kondisi air yang melimpah di Dusun Rowo ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai hal, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai pada pemenuhan aliran air di sawah. Selain itu, banyak juga yang memanfaatkan air sebagai tenaga listrik yang berasal dari kincir air.

Kebutuhan akan listrik, sangat terasa di berbagai wilayah yang belum terjangkau jaringan PT PLN (Persero), termasuk sebagian warga Dusun Rowo yang belum memiliki jaringan listrik. Untuk itu diperlukan pemanfaatan air sebagai sarana produksi energi listrik yang dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan. Penggunaan mikro hidro di Dusun Rowo ini telah mampu

menjadi salah satu alternatif bagi warga dalam mengatasi masalah listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan alat yang menghasilkan listrik dengan menggunakan sumber tenaga air (Wibowo, 2005). Pembangkit listrik mikro hidro juga dapat berarti pembangkit skala kecil dengan tenaga air dengan kapasitas 5-100 KW.

Penggunaan pembangkit listrik mikro hidro secara ekologis mampu mendorong masyarakat untuk memahami arti pentingnya air. Pada tataran selanjutnya, hal ini akan memacu masyarakat untuk melakukan pelestarian hutan dan lingkungannya. Penggunaan energi kinetik dari air untuk menggerakkan turbin menuntut masyarakat menjaga kelestarian alam agar debit air tetap besar.

Pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik skala mikro belum menjadi suatu hal yang umum di negeri ini, namun beberapa daerah telah menerapkan sebagai solusi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara swadaya. Salah satu daerah yang telah menerapkannya adalah Dusun Rowo, Desa Tlogopak, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pemanfaatan air sebagai sumber tenaga listrik di daerah ini dimulai sekitar tahun 1980-an. Namun demikian, ketika musim kemarau datang debit aliran air menurun, sehingga produksi listrik menurun pula. Kebutuhan masyarakat akan listrik tidak mampu dipenuhi secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan usaha bersama agar dapat mencukupi kebutuhan listrik tersebut, di samping untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga bersumber pada air.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengungkap beberapa hal tentang hasil pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang terjadi pada masyarakat Dusun Rowo dalam memanfaatkan air. Dalam kaitan ini akan lebih banyak mengungkap pemanfaatan air sebagai sumber tenaga listrik.

Penelitian tentang pengelolaan sumber daya berbasis komunitas ini merupakan bentuk usaha untuk menggali berbagai informasi yang

tengah berkembang pada masyarakat Dusun Rowo terkait dengan pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas, dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk mengenai berbagai karakteristik pemanfaatan air.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*Community Based Resources Management*) merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif (Soetomo, 2008: 384). Dengan demikian, strategi ini mengarah pada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal. Melalui strategi ini setiap komunitas dapat mengembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Sumber daya lokal yang dimaksud, antara lain berupa tanah, air, informasi, teknologi, energi manusia, dan kreativitas.

Salah satu prinsip penting dari pengembangan masyarakat adalah prinsip keswadayaan, yang diturunkan langsung dari prinsip ekologi keberlanjutan (Haque, 2000; Harcourt, 1994; Ife dan Tesoriero, 2008). Keswadayaan berarti pada hakikatnya masyarakat bergantung pada sumber daya mereka sendiri, dibanding bergantung pada sumber daya yang diberikan secara eksternal (Kelly, 1992; Ife & Tesoriero, 2008). Hal ini ditambahkan oleh Murphy dan Cauchi (2004; Ife & Tesoriero, 2008) bahwa prinsip-prinsip mendasar yang menyangga pembentukan komunitas terutama didasarkan atas pendekatan-pendekatan yang menekankan penentuan nasib sendiri dan keswadayaan, yaitu bahwa masyarakat perlu diberdayakan

untuk mengelola persoalan-persoalan mereka sendiri, yang mencakup merumuskan solusi-solusi mereka dan proses-proses untuk mencapainya.

Strategi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Strategi ini akan nampak berhasil jika keterlibatan dalam mengontrol pengelolaan sumber daya dapat didistribusikan secara luas di dalam komunitas, bukan tergantung dari kalangan elit lokal atau dari pihak luar (Soetomo, 2008).

Masyarakat pada tingkat lokal memiliki karakteristik yang beragam jika dilihat dari berbagai sudut permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dapat dikembangkan, maupun tingkat perkembangan sosial ekonominya. Untuk itu, agar program pembangunan dapat menyentuh dan relevan dengan situasi dan kondisi serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, hendaknya tidak hanya menggunakan pola seragam yang telah dibakukan, serta dikendalikan secara terpusat dan bersifat *top down* (Korten, 1987; Soetomo, 2008). Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak dapat dilakukan secara seragam dan dikelola secara terpusat, yakni variasi, sumber daya, dan tanggung jawab lokal.

Variasi lokal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kehidupan komunitas secara substansi diwarnai oleh lingkungan alam dan sosialnya. Produktivitas dan keberlanjutan yang optimal guna pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan tergantung dari kemampuan adaptasinya terhadap variasi tersebut. Dalam kaitan ini, birokrasi yang sentralistik dan pola baku yang seragam memiliki kapasitas yang kurang sesuai dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan pada masing-masing komunitas.

Kehidupan masyarakat pada tingkat

komunitas lebih mudah diorganisasikan dalam berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat di tingkat komunitas lebih kental dengan kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, jika masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas, mereka akan berusaha memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama untuk merealisasikan gagasan tersebut. Bahkan ada yang secara sukarela memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk sesuai kemampuan dalam mendukung terwujudnya tindakan bersama secara swadaya dan swakelola.

Menurut Nasution (2009), untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam penyelenggaraan dan keberhasilan pembangunan perlu ditumbuhkan interaksi sosial karena ikatan kultural, sehingga muncul kebersamaan komunitas yang unsur-unsurnya meliputi: seperasaan, sepenanggungan, dan saling butuh, yang pada akhirnya menumbuhkan kembali solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah kekuatan persatuan internal dari suatu kelompok yang merupakan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Menurut Durkheim (dalam Jhonson, 1981; Nasution, 2009) solidaritas sosial menjelaskan keadaan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Keadaan interaksi ini oleh Durkheim digambarkan sebagai suatu bentuk integrasi sosial dan kekompakan sosial.

Lebih lanjut, orientasi yang sangat dominan pada komunitas pada dasarnya dapat

dijelaskan melalui tiga alasan (Korten, 1987, dalam Soetomo, 2009). Ketiga alasan tersebut adalah *local variety*, *local resources*, dan *local accountability*. *Local variety* dimaksudkan agar pembangunan memperhatikan variasi yang ada pada setiap komunitas. Hal ini disebabkan setiap kehidupan komunitas selalu ditandai adanya variasi dalam lingkungan alam dan sosial. Produktivitas yang optimal serta berkesinambungan dalam penggunaan sumber daya sangat ditentukan oleh seberapa jauh telah dilakukan penyesuaian terhadap variasi tersebut. *Local resources* dimaksudkan sebagai masyarakat pada level komunitas dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam hal ini, kewenangan harus lebih banyak diberikan pada masyarakat dengan membatasi campur tangan birokrasi. *Local accountability* dimaksudkan sebagai prinsip dasar dari masyarakat yang demokratis dapat terwujud apabila pengelolaan dan pertanggungjawaban atas suatu tindakan harus diberikan kepada pihak yang terutama akan menanggung akibat dari tindakan tersebut. Dengan demikian, proses pembangunan harus berorientasi pada inisiatif, kreativitas, dan pengelolaan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan diterapkannya beberapa prinsip tersebut paling tidak terdapat dua keuntungan yang diharapkan dapat dipetik. Pertama, hasil-hasil pembangunan akan lebih menyentuh kepada masalah, kebutuhan, dan kepentingan riil dari komunitas. Hal ini disebabkan program-program pembangunan tidak disusun secara sentralistik dan uniform, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan variasi yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua, proses pembangunan diharapkan lebih berkesinambungan, sehingga dapat mewujudkan asas *sustained development*. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan lebih bertumpu pada prakarsa dan kreativitas masyarakat. Campur tangan dari luar relatif terbatas dan bersifat sebagai stimulator dan fasilitator. Melalui pendekatan ini akan mengurangi sifat ketergantungan. Pelaksanaan

pembangunan pada level komunitas berlangsung melalui proses belajar secara sosial, sehingga mekanisme pembangunan pada level komunitas akan terlembagakan. Dengan demikian, ada atau tidaknya campur tangan dari luar, proses pembangunan akan tetap berjalan (Soetomo, 2009).

Dalam kaitan ini, diperlukan pemberian kewenangan yang besar pada masyarakat lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berjalan seiring dengan pelestarian modal sosial dan kearifan lokal. Dalam berbagai kasus, desentralisasi kewenangan yang diberikan, baik kepada daerah maupun kepada masyarakat lokal, yang tidak diimbangi dengan terpeliharanya kearifan lokal dapat berdampak buruk, bahkan fatal bagi pelestarian sumber daya itu sendiri. Sebagai contoh, otonomi daerah yang sering ditafsirkan secara kurang proporsional seolah-olah identik dengan kewajiban daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila pemikiran ini yang dianggap benar dan tidak diimbangi dengan kearifan lokal yang sudah berlangsung lama di suatu wilayah, maka yang terjadi adalah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kuncinya adalah perlunya kewenangan yang dimiliki dibarengi dengan kapasitas pengelolaan bagi kelestarian sumber daya alam.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petungkriyono meliputi menginventarisasi dan menelaah pustaka yang berkaitan dengan tema, melakukan pengamatan, dan wawancara mendalam. Kegiatan menginventarisasi dan menelaah pustaka ini dilakukan di berbagai institusi, baik perpustakaan, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. Observasi/ pengamatan dilakukan pada masyarakat di lokus penelitian, terutama komunitas yang memanfaatkan sumber daya air, termasuk sebagai bahan energi listrik dengan kincir air. Adapun wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan terhadap narasumber yang mengetahui

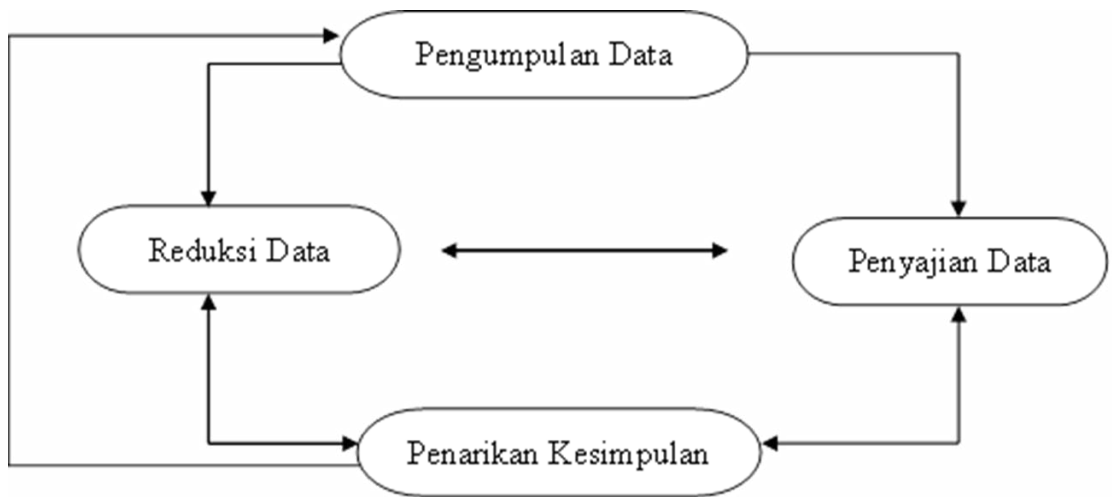
tentang tema yang diteliti. Narasumber yang akan dipilih dalam penelitian ini terdiri dari tokoh setempat, warga masyarakat, praktisi, dan pihak-pihak terkait yang paham dengan kajian yang ada. Di samping itu juga dilakukan pendokumentasian dalam bentuk tulisan, foto, dan gambar tentang berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya.

Proses Kegiatan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas pada Masyarakat Petungkriyono dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan. Tahap persiapan meliputi: inventarisasi lokasi penelitian, studi kepustakaan, koordinasi dengan instansi terkait pada lokasi penelitian, serta persiapan instrumen dan kelengkapan penelitian.

Tahap pelaksanaan meliputi: pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi/ pengamatan, dan pendokumentasian. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memahami tema yang ada. Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan *participant as observer*. Di sini peneliti melakukan observasi secara langsung dari kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan subyek kajiannya, dan peneliti memberitahukan maksudnya kepada informan yang ditelitinya (Milles dan Huberman, 1992).

Pengolahan dan analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Mill dan Huberman (Matthew B. Milles and Michael Huberman, 1992:20). Model analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini.

Bagan 1. Model Analisis Interaktif



Sumber: Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, 1992.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan adalah Petungkriyono. Wilayah ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut dan merupakan daerah terpencil di Kabupaten Pekalongan. Wilayah ini tidak banyak dikunjungi, termasuk warga

Pekalongan dan sekitarnya. Perjalanan dari Ibukota Kabupaten Pekalongan menuju Petungkriyono disugahi pemandangan hutan dengan pohon-pohon yang masih lebat dan rindang. Suasana perbukitan yang asri menambah pesona alam Petungkriyono yang eksotik. Suara burung dengan khas kicauannya menambah suasana alam yang indah dan memesona. Berbagai jenis tumbuhan yang berpadu dengan aliran air perbukitan menghiasi selama perjalanan ke Petungkriyono.

Petungkriyono merupakan suatu wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Doro dan Talun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dan sebelah barat berbatasan dengan



Foto 1. Kawasan Petungkriyono

Kecamatan Lebakbarang.

Kecamatan Petungkriyono terletak 43 km ke arah selatan dari Ibukota Kabupaten Pekalongan. Luas wilayahnya 7.358,523 ha dengan ketinggian mencapai 1.300 meter dpl, dan suhu udara 18 – 30° C. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari sembilan desa, yaitu: Simego, Songgodadi, Curugmuncar, Gumelem, Tlogohendro, Yosorejo, Tlogopakis, Kasimpar, dan Kayupuring. Luas areal lahan sawah irigasi di Kecamatan Petungkriyono pada tahun 2009 adalah 234,450 ha. Adapun areal lahan lainnya terdiri dari: bangunan pekarangan 119,652 ha, tegalan/kebun 1.379,702 ha, ladang/huma 63,616 ha, padang rumput 2,025 ha, kolam/tebat/empang 6,310 ha, hutan rakyat 340,836 ha, hutan negara 5.189,507 ha, dan lain-lain 22,425 ha. Selanjutnya untuk luas areal lahan kritis pada tahun 2006 adalah 1.165,000 ha, yang terdiri dari lahan kritis 160,000 ha, agak kritis 719,000 ha, dan potensial kritis 286,000 ha.

Pada tahun 2009, Kecamatan Petungkriyono memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.818 jiwa, yang terdiri dari 6.483 laki-laki dan 6.335 perempuan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Petungkriyono
Tahun 2009

No	Desa	Jenis Kelamin		JML
		L	P	
1	Simego	1.030	939	1.969
2	Songgodadi	671	613	1.284
3	Curugmuncar	256	231	487
4	Gumelem	448	402	850
5	Tlogohendro	1.155	1.227	2.382
6	Yosorejo	800	757	1.557
7	Tlogopakis	1.011	1.104	2.115
8	Kasimpar	408	450	858
9	Kayupuring	704	612	1.316
Jumlah		6.483	6.335	12.818

Sumber: Kecamatan Petungkriyono dalam Angka 2009

Salah satu desa yang berada dalam wilayah Petungkriyono adalah Desa Tlogopakis.

Desa Tlogopakis terdiri dari tujuh dusun, yaitu: Krajan, Kambangan, Rowo, Sipetung, Totogan, Karanggondang, dan Sawangan. Desa Tlogopakis memiliki luas wilayah 1.145,5 ha. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kasimpar, sebelah selatan dengan Desa Curugmuncar, sebelah barat dengan Desa Songgodadi, dan sebelah timur dengan Desa Yosorejo. Jarak antara dusun satu dengan yang lainnya saling berjauhan. Jika dilihat dari jaraknya, Dusun Sawangan merupakan dusun yang paling jauh dari pusat Desa Tlogopakis.



Foto 2. Doplak, alat transportasi di Kecamatan Petungkriyono.

Perjalanan menuju Desa Tlogopakis dapat menggunakan mobil bak terbuka atau biasa disebut dengan *doplak*. Jenis kendaraan ini tidak setiap saat bisa ditemui, hanya pada jam-jam tertentu saja dapat kita gunakan jasanya. Biasanya dalam sehari *doplak* hanya mengambil penumpang pada pagi hari di beberapa dusun atau desa menuju ke Kecamatan Petungkriyono dan Doro. Kemudian pada siang hari *doplak* tersebut akan mengantarkan penumpang dari Doro menuju ke dusun atau desa masing-masing penumpang. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi mobilitas masyarakat yang berada di dusun atau desa wilayah Petungkriyono.

Penggunaan transportasi yang terbatas ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah karena kondisi jalan perbukitan yang banyak tanjakan, tikungan tajam, jurang yang dalam dan mudah longsor, serta kurang adanya dukungan infrastruktur yang memadai.

Ketika sampai di Desa Tlogopakis, khususnya Dusun Rowo, banyak beragam jenis rumah, ada yang sudah berbentuk rumah beton dan bagus, namun ada juga rumah yang masih gubug. Semua rumah yang ada di Dusun Rowo telah mendapatkan penerangan, baik oleh PLN ataupun pembangkit listrik dengan memakai tenaga mikro hidro. Ada juga penduduk yang menyambung aliran listriknya pada warga lain yang berlangganan listrik PLN ataupun yang memiliki listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Jenis listrik yang menggunakan tenaga mikro hidro sangat tergantung pada pasokan air di sekitar dusun.



foto 3 Rumah-rumah di Dusun Rowo dilihat dari ketinggian

Di Dusun Rowo terdapat sebuah masjid yang digunakan untuk tempat shalat dan juga sebagai tempat pertemuan berbagai keperluan masyarakat Dusun Rowo, termasuk untuk pembahasan sosialisasi program pemerintah.

Kondisi jalan di wilayah perkampungan Dusun Rowo dapat dilalui kendaraan roda empat, hal ini disebabkan karena wilayah Dusun Rowo memiliki jalan yang cukup lebar yang dapat menghubungkan wilayah tersebut

ke beberapa dusun lainnya, termasuk menuju Kecamatan Petungkriyono.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat Dusun Rowo bekerja sebagai petani dan peternak sapi. Hampir setiap rumah tangga di Dusun Rowo, mempunyai satu atau dua ekor sapi, baik milik pribadi maupun milik orang lain yang dititipkan kepada mereka. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.

Dalam bidang pertanian, para petani tidak khawatir dengan kebutuhan air, karena kondisi geografis dan topografis yang ada

menyebabkan Dusun Rowo dan sekitarnya merupakan wilayah yang berlimpah airnya. Kondisi ini banyak dimanfaatkan dengan *m e n g e m b a n g k a n* usahatani perladangan, *p e r k e b u n a n*, peternakan, dan juga pemeliharaan ikan di empang atau kolam belakang rumah mereka. Hasil usaha mereka sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, jika ada hasil lebih, akan mereka jual ke pasar

terdekat, yaitu Pasar Doro. Terkadang ada pula pembeli yang langsung datang ke dusun mereka.

2. Manfaat Sumber Daya Air bagi Warga

Dusun Rowo merupakan wilayah yang berada di dataran yang paling tinggi dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya di wilayah Desa Tlogopakis. Hal ini menyebabkan udara yang segar dan bersih dapat dinikmati di wilayah ini. Bahkan pada malam hari hawa dinginnya udara terasa menusuk tulang.

Keberadaan air yang sangat melimpah

di wilayah Dusun Rowo ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai hal, antara lain: mandi, minum, mencuci, memasak, untuk keperluan asupan air bagi hewan ternak mereka, kebutuhan kolam ikan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan aliran air pada sawah yang mereka miliki.

Menurut Sudarmo (83 tahun), mantan kepala Dusun Rowo, mengambil air dari rawa yang terletak di sekitar Dusun Rowo. Namun saat ini rawa tersebut sudah tidak begitu nampak karena tertutupi oleh kolam-kolam ikan yang dimiliki masyarakat Dusun Rowo.

Di sekitar rumah penduduk banyak ditemui aliran air yang terus-menerus mengalirkan air dari wilayah yang lebih tinggi ke wilayah yang lebih rendah, termasuk di Dusun Rowo. Menurut Dasmin (42 tahun), salah satu warga Dusun Rowo, air yang mengalir di sekitar Dusun Rowo ini berasal dari Sungai Mawan yang terletak di selatan Dusun Rowo. Aliran air tersebut berfungsi sebagai saluran irigasi sawah, serta untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari rumah-rumah penduduk. Dapat ditemui juga saluran air yang menggunakan selang-selang air. Air dari selang-selang ini berasal dari sebuah mata air yang bersih dan lebih berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penduduk.

Walaupun sekilas terlihat bersih, namun kalau diperhatikan lebih saksama, akan terlihat berbeda antara aliran air yang berasal dari mata air dan yang berasal dari sungai. Air bersih yang berasal dari mata air digunakan untuk keperluan mandi, minum, mencuci, dan juga untuk kebutuhan minum hewan ternak, sedangkan air yang berasal dari sungai digunakan untuk mengairi sawah, kolam ikan, kolam pengawetan kayu, dan juga untuk pembangkit listrik.

3. Manfaat Aliran Air dari Sumber Mata Air

Suharyono (36 tahun), salah satu tokoh muda Dusun Rowo, mengatakan bahwa

sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat berasal dari rawa-rawa yang sekitarnya ditumbuhi rumput-rumput lebat, sehingga airnya terus-menerus mengalirkan air bersih. Air tersebut ditampung dalam bak penampungan yang terbuat dari beton. Kemudian dari bak penampungan tersebut air dialirkan ke rumah-rumah penduduk melalui selang atau peralon air.

Hampir sebagian besar penduduk Dusun Rowo memelihara hewan ternak, khususnya sapi. Menurut Dahlan (46 tahun), salah seorang warga, memelihara sapi merupakan kegiatan yang sudah turun-temurun. Hal ini didukung dengan kondisi alam yang subur dengan rumput-rumput yang segar untuk hewan ternak mereka. Dahlan sendiri memiliki tiga ekor sapi, yang setiap hari diberi makan tiga kali, yaitu pagi, siang, dan sore, sedangkan pada malam hari kandang ternaknya diberi uap untuk mengusir nyamuk yang seringkali berada di kandang sapi. Hal itu menjadi salah satu penyebab sapi mereka menjadi lebih sehat dan gemuk.

Untuk memperoleh rumput, mereka pergi ke sekitar hutan atau sawah. Di sana mereka dapat menemukan rumput-rumput yang hijau dan segar. Selain diberi pakan rumput yang cukup, mereka juga menggunakan air bersih yang berasal dari sumber mata air sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan air bagi sapi-sapi mereka. Hasil dari peternakan sapi dipergunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti membeli lauk pauk, membayar uang sekolah, memperbaiki rumah, hajatan, dan persiapan kebutuhan kesehatan. Bahkan ada yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor.

Menurut Suntung (42 th), Kepala Desa Tlogopakis, hampir seluruh rumah tangga yang ada di Desa Tlogopakis, termasuk Dusun Rowo, memiliki ternak sapi antara satu hingga empat ekor. Apabila tidak memiliki sapi, mereka biasanya diminta oleh tetangganya yang memiliki banyak sapi, untuk memeliharanya dengan sistem bagi hasil atau *maro*.

Untuk memenuhi kebutuhan makan sapi, para peternak melakukan kegiatan mencari rumput (*merumput*) di sawah, kebun, atau hutan sekitarnya yang dipenuhi tumbuhan rumput. Ada rumput liar, ada juga rumput yang sengaja dipelihara oleh masyarakat sekitar, khususnya di sekitar hutan milik Perhutani yang dipinjamkan kepada penduduk sekitar. Untuk satu ekor sapi minimal memerlukan dua keranjang rumput. Hal ini yang menyebabkan beberapa pemilik sapi yang merasa kewalahan, akhirnya menitipkan sapi mereka kepada warga yang tidak memiliki sapi namun bersedia memeliharanya, sehingga sang pemilik tidak terlalu repot untuk memelihara sapi.

Di samping kebutuhan rumput, sapi-sapi tersebut membutuhkan asupan air. Setiap seekor sapi setidaknya membutuhkan 20 liter air setiap harinya. Para peternak banyak yang mencampur airnya dengan bekatul dan air garam agar perkembangan sapi menjadi lebih besar.

4. Manfaat Aliran Air dari Sungai

Begitu pentingnya air bagi penduduk membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan air, termasuk air sungai. Air sungai yang digunakan untuk pengairan sawah, diatur sedemikian rupa antara anggota masyarakat dengan tokoh masyarakat, --termasuk para ketua RT, ketua RW, dan kepala dusun--, agar keberlangsungan pengairan sawah mereka tetap terjaga dan berkesinambungan. Jika kondisi air kurang mendukung, terutama akibat kemarau panjang, maka untuk memenuhi kebutuhan pengairan mereka memanfaatkan dari sumber mata air yang berada di sekitar perumahan mereka, terutama mata air yang berada di sekitar rawa-rawa. Rawa tersebut ditutupi dengan karung-karung yang berisi tanah atau pasir untuk membendung aliran air agar mengalir dulu ke dalam bak penampungan besar, yang saat ini digunakan warga sebagai kolam ikan besar. Setelah kolam tersebut terisi penuh, maka airnya dapat didistribusikan pada areal sawah sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pembagian yang adil, yaitu

areal sawah sebelah utara selama dua hari, sebelah selatan selama tiga hari, dan sebelah barat selama dua hari. Areal sawah yang mendapatkan pengairan air selama tiga hari dikarenakan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan lainnya. Namun lamanya hari pengairan dapat berubah sesuai dengan kondisi areal sawah. Bagi areal sawah yang sudah tercukupi kebutuhan airnya, sementara debit air mengalir lebih cepat dari biasanya, maka aliran air dapat dipindahkan ke areal sawah lain yang juga membutuhkan. Hal tersebut memang pernah dialami oleh warga, namun mengingat kondisi geografis Dusun Rowo yang berada pada dataran tinggi dengan debit air tinggi, maka tersebut jarang terjadi.

Aliran air yang berasal dari sungai sekitar, selain untuk kebutuhan pengairan sawah, juga digunakan masyarakat Dusun Rowo untuk mengairi kolam ikan. Sebagian besar masyarakat Dusun Rowo juga mempunyai kolam ikan. Mereka kebanyakan membuat kolam ikan di samping atau di belakang rumah tinggal. Kolam-kolam ikan tersebut mendapatkan aliran air secara terus-menerus. Untuk menjaga kebersihan air dan aktivitas ikan, kolam tersebut dibersihkan setiap airnya terlihat keruh. Kegiatan membersihkan kolam ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, tergantung waktu luang yang dimiliki warga. Saat air surut, dasar kolam dibersihkan dari kotoran ikan yang mengendap di dalam lumpur..

Jenis ikan yang dapat ditemukan di Dusun Rowo, antara lain: *lele*, *tombro* (ikan mas), *gasekap* (braskap), dan *mujair*. Jenis ikan yang berasal dari Dusun Rowo adalah ikan *mujair* dan *tombro* (ikan mas), sedangkan ikan *gasekap* dan *lele* didatangkan dari luar dusun. Warga Dusun Rowo dapat mengembangbiakkan sendiri ikan *mujair*, *tombro* (ikan mas), dan *gasekap*, walaupun pada awalnya bibitnya harus didatangkan dari daerah lain. Berbeda halnya dengan bibit ikan *lele* yang masih harus mendatangkan dari daerah lain. Ketika ikan-ikan yang dipelihara sudah besar, maka dapat dipanen dan dinikmati dagingnya untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Kolam-kolam

tersebut biasanya dipanen setahun sekali saat lebaran tiba. Selain kolam-kolam milik warga Dusun Rowo, terdapat kolam ikan bantuan dari Universitas Gadjah Mada. Kolam bantuan Universitas Gadjah Mada berada di atas rawa-rawa yang memiliki sumber mata air. Berbeda dengan hasil tangkapan ikan yang berada di kolam besar, pada kolam ikan bantuan Universitas Gadjah Mada hasil panennya dibagikan kepada seluruh warga Dusun Rowo.

Secara keseluruhan di areal rawa-rawa tersebut terdapat lima kolam yang dindingnya sudah terbuat dari bahan beton dan empat kolam yang dindingnya masih menggunakan tanah, termasuk di dalamnya kolam besar yang merupakan salah satu sumber mata air. Dari beberapa kolam yang ada, baik yang berdinding beton maupun tanah, sebagian dimiliki warga RT 01 dan sebagian lagi warga RT 02 Dusun Rowo, serta sebagian lagi dimiliki oleh perkumpulan atau organisasi pemuda. Adapun kolam yang besar merupakan milik bersama warga.

Di sekitar kolam merupakan daerah subur, apalagi terdapat saluran mata air yang mengalir tanpa henti. Hal ini dapat menyebabkan tumbuhnya berbagai tanaman yang subur, termasuk rerumputan, pohon pisang, dan lain-lain. Buah dari pohon pisang tersebut banyak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai pelengkap makan besar, dan juga untuk hidangan buah pada saat penduduk mempunyai hajatan.

Aliran air dari sungai juga dimanfaatkan masyarakat Dusun Rowo sebagai bahan pembangkit listrik. Pembangkit listrik dari aliran sungai di Dusun Rowo ini mulai dikenalkan oleh Suharyono (36 tahun), salah seorang guru SD setempat yang memiliki kemampuan elektronika. Suharyono memiliki keinginan yang kuat agar warga Dusun Rowo dapat menikmati penerangan listrik sebagaimana dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Solidaritas sosial dan kemampuan inilah yang mengantarkan Suharyono menjadi orang pertama yang mengenalkan teknologi listrik dengan

memanfaatkan aliran sungai di sekitar Dusun Rowo. Awalnya ia belajar dari salah satu warga Desa Curugmuncar yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara menghasilkan listrik dari aliran air.

5. Manfaat Air untuk Pembangkit Listrik

Selain untuk pengairan sawah dan kolam ikan, aliran sungai juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Adalah Suharyono, seorang guru SD dan juga anak dari Sudarmo, mantan Kepala Dusun Rowo, yang merupakan pelopor bagi pengembangan pembangkit listrik dari aliran sungai dengan menggunakan teknologi kincir air di Dusun Rowo.



Foto 4. Kabel-kabel listrik di atas rumah-rumah penduduk, baik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari tenaga listrik mikro hidro.

Kondisi sekarang, aliran listrik dari PLN sudah merambah ke desa-desa, termasuk Desa Tlogopakis. Akan tetapi tidak semua penduduk menggunakan listrik dari PLN dalam memenuhi kebutuhan listriknya. Dalam hal ini, masih banyak ditemukan warga yang menggunakan pembangkit listrik dengan tenaga mikro hidro. Dari hasil temuan yang ada, sebagaimana juga yang dinyatakan oleh I Dewa Putu Eska Sasnanda (2009), bahwa biaya untuk membangun satu pembangkit listrik tidaklah murah. Untuk membuat kincir air selain harus mengeluarkan biaya untuk membeli dinamo, membuat kincir dari kayu,

dan membuat bilik pembangkit listrik, mereka juga harus membeli kabel yang panjang untuk mengalirkan listrik itu ke rumah-rumah. Panjang kabel ini tiap-tiap rumah bervariasi, semakin jauh pembangkit listrik dari rumah semakin panjang kabel yang dibutuhkan.



Foto 5. Banyak kabel yang dipasang dengan ketinggian di bawah lutut orang dewasa. Kabel-kabel ini berada di lokasi yang cukup jauh dari permukiman. Namun dengan adanya orang yang melintasi di areal ini untuk merumput, kabel-kabel ini dapat membahayakan bagi mereka yang melintasinya.

Penduduk membangun pembangkit listrik yang jauh dari permukiman mereka demi mendapatkan aliran air yang deras. Bahkan penduduk Dusun Kambangan, yang terletak di sebelah Dusun Rowo, membuat kincir pembangkit listrik di Sungai Mawan yang letaknya kira-kira 500 meter dari dusun mereka. Jika kita membuat pembangkit listrik berjarak 500 meter, berarti harus membeli kabel sepanjang minimal 500 meter untuk mengalirkan listrik ke rumah mereka, selain juga harus menyediakan tiang-tiang dari bambu sebagai penyangga kabel.

Di Dusun Rowo dan Kambangan belum ada aturan mengenai penataan tiang-tiang dan kabel-kabel listrik ini. Akibatnya, kabel-kabel tersebut terlihat tidak teratur. Padahal kabel-kabel ini sangat berbahaya karena aliran

listriknya cukup besar untuk dapat merenggut jiwa orang yang memegangnya. Menurut penuturan beberapa warga, beberapa waktu yang lalu ada warga yang tewas akibat tersengat listrik dari kabel-kabel ini. Seorang pria yang sedang mencari rumput, jatuh terpeleset dan terlilit kabel penyalur listrik, sehingga ia pun terserum hingga tewas.

Selain itu, biaya perawatan pembangkit listrik juga perlu mendapatkan perhatian lebih, karena terdapat bagian yang sering rusak, yaitu pada bagian *laher* roda yang aus sehingga memerlukan penggantian secara berkala. Harga sebuah *laher* memang tidak terlalu mahal, namun jika digabung dengan biaya pemasangannya menjadi mahal, karena penggantian *laher* tidak dapat dilakukan seorang diri. Sebelum mengganti *laher*, kincir kayu yang besar dan berat harus diturunkan dahulu. Diperlukan dua atau tiga orang dewasa untuk dapat mengangkat dan menurunkan kincir air ini. Penggantian *laher* ini termasuk dalam kriteria perawatan ringan karena terkadang kincir dapat mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat ini adalah ketika kincir rusak akibat termakan usia atau setelah terkena batu-batu dari timbunan lumpur setelah sungai mengalami banjir.

Kondisi biaya pembuatan dan perawatan pembangkit listrik tenaga air yang cenderung mahal tidak mengurangi minat warga untuk memilikinya. Apalagi jika dibandingkan dengan pemasangan listrik dari PLN, maka pemasangan listrik mikro hidro cenderung lebih murah. Ditambah juga karena warga merasakan manfaat yang diberikan listrik bagi aktivitas sehari-hari lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membuat listrik mikro hidro tersebut. Untuk mengantisipasi biaya yang dinilai cukup mahal tersebut, yang dilakukan warga adalah dengan membuat pembangkit listrik secara berkelompok, bisa

dua rumah tangga atau bahkan lebih banyak lagi. Hal ini tergantung dari kesepakatan warga.

Jika dilihat dari pasokan listriknya, tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro termasuk dalam kategori kecil. Hanya beberapa orang saja yang dapat menikmati energi listrik dari mikro hidro yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bebas termasuk untuk menyalakan TV, Komputer, dan lain sebagainya.



Foto 6. Anak - anak sedang menggunakan komputer untuk bermain game.

Di samping nilai positif dari pembangkit listrik tenaga kincir air, juga terdapat beberapa kelemahan, yakni akses energi listrik yang relatif kecil dan kurang stabil karena daya listrik sangat tergantung pada derasnya aliran air pada saluran air yang menggerakkan kincir. Oleh karena itu ketika aliran air berkurang pada waktu musim kemarau, maka daya listrik yang dihasilkan pun berkurang akibat putaran kincir air yang berkurang. Dengan kata lain energi listrik mikro hidro sangat mengandalkan debit air yang cukup tinggi. Jika debit air ini tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu pasokan listrik ke rumah-rumah warga. Kondisi ini disikapi oleh sebagian masyarakat dengan menggunakan jasa PLN untuk pemenuhan kebutuhan listriknya. Ada warga yang memakai listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan juga dekaligus

dengan PLN, namun ada juga warga yang tidak memiliki listrik sama sekali. Akhirnya bagi mereka yang tidak memiliki listrik mikrohidro maupun PLN, ikut menyambung ke rumah tetangga yang memiliki listrik, bisa yang menggunakan PLN maupun yang mikrohidro. Tentu saja mereka harus memberikan sedikit iuran kepada pemilik rumah setiap bulannya.

Hal tersebut agak berbeda dengan kondisi pada sekitar tahun 2007 dan sebelumnya. Saat itu sangat sedikit warga Dusun Rowo yang bisa mencukupi kebutuhan listriknya dengan jasa PLN. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Mereka tidak memungkinkan untuk mengakses listrik karena harus membayar beban pemasangan dan pembayaran iuran setiap bulannya. Sementara itu, dengan listrik mikrohidro yang mandiri, mereka tidak terbebani untuk membayar penggunaan listriknya, kecuali beban pemeliharaan yang harus dijaga secara bersama.

Pada saat itu warga yang memakai listrik dari PLN hanya sekitar lima kepala keluarga (KK), itupun hanya dipakai sebagai cadangan bila pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro berkurang. Dari kelima penduduk ini, mereka masih mengandalkan kincir air miliknya untuk memenuhi kebutuhan listrik utama. Listrik dari PLN hanya dipakai bila mereka membutuhkan daya listrik lebih besar dan stabil untuk menghidupkan peralatan listrik bertegangan besar, seperti TV dan Komputer.

Pembangkit listrik tenaga air sangat familiar di Dusun Rowo karena hampir semua penduduk pernah memakainya. Mengenai jumlah kincir air di Dusun Rowo berdasarkan informasi yang diberikan Suharyono, sedikitnya terdapat sekitar sembilan pembangkit listrik tenaga air di sekitar Dusun Rowo, baik yang menggunakan listrik mikro hidro secara mandiri maupun yang berkelompok dengan rumah tangga lain. Dalam perkembangannya pengguna PLN saat ini sudah ada belasan KK, meskipun ada yang menggunakan

PLN sebagai cadangan saja, terutama untuk mengantisipasi jika memerlukan pemakaian listrik yang lebih besar. Namun ada juga yang hanya menggunakan energi listrik jasa PLN, dikarenakan listrik tenaga mikro hidro yang mereka miliki sudah rusak. Ada pula warga yang tidak memiliki sama sekali energi listrik baik PLN, maupun dengan mikrohidro, yaitu sekitar 10 KK. Mereka dengan terpaksa mencari listrik dengan cara menyambungkan listrik milik tetangganya baik dengan PLN atau yang mikro hidro.

Perilaku warga Dusun Rowo yang menggunakan listrik dari pembangkit listrik mikro hidro cenderung kurang bersikap hemat listrik, seperti air yang mereka alirkan 24 jam di kamar mandi atau lampu-lampu rumah yang dihidupkan selama 24 jam. Hal ini berbeda dengan warga yang menggunakan listrik dari jasa PLN, mereka cenderung hemat dalam pemakaiannya dan menghitung berapa biaya yang akan dikenakan pada saat pembayarannya nanti.

Secara umum, pembangkit listrik tenaga air di Dusun Rowo ada dua jenis, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan turbin dan pembangkit listrik yang menggunakan kincir air. Pada beberapa tahun sebelumnya, hanya ada satu keluarga yang menggunakan pembangkit listrik dengan menggunakan turbin. Hal inipun dikarenakan mereka mendapat bantuan dari Universitas Gajah Mada, yang melihat perlunya intensifikasi kincir listrik mikro hidro dari system *water wheel* ke *banki turbine* agar dilaksanakan di wilayah Dusun Rowo (Wicaksono, 2008). Keterbatasan akses dalam memperoleh sumber daya yang utama adalah modal awal untuk membeli peralatan-peralatan dan unit *banki turbine*. Hal ini mengakibatkan usaha intensifikasi tersebut terhambat, padahal jika melihat kondisi alamnya yang bergunung-gunung dan dikelilingi hutan yang cukup lebat, wilayah ini memungkinkan untuk membangun kincir listrik mikro hidro dengan system *banki turbine*.

Pada sekitar tahun 2007, hanya ada satu

keluarga yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air dengan menggunakan turbin. Turbin air masih jarang digunakan, sehingga hal ini merupakan informasi baru bagi warga Dusun Rowo. Menurut Suharyono, turbin air ini adalah bantuan dari Tim Antropologi UGM yang sering melakukan studi di desanya. Karena salah satu tim yang ada, adalah dosen UGM yang memiliki pengalaman di Belanda, maka model turbin air yang digunakan terinspirasi dari desain turbin air yang ada di negeri Kincir Angin tersebut.

Pembangkit listrik tenaga air atau mikro hidro ini berasal dari turbin yang lain dengan yang banyak dimiliki warga Dusun Rowo, yaitu pembangkit listrik dengan turbin ini relatif lebih tenang, bertenaga, dan terlihat modern, juga tahan lama dan stabil, serta menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kincir air saja. Hal ini menurut Sasnanda (2008) tidak terlepas dari teknologi yang digunakannya, antara lain :

1. Dalam pembangkit listrik ini, air tidak dipakai untuk menggerakkan kincir air kayu yang besar dan berat, melainkan hanya untuk menggerakkan air kecil dalam turbin oleh karenanya suara dan getaran yang ditimbulkannya pun tidak sebesar kincir air.
2. Sebelum dipakai menggerakkan turbin atau kincir air, air terlebih dahulu dimasukkan dalam bak besar guna memperkuat tekanannya. Dalam pembangkit listrik ini air yang sudah ditambah tekanannya tadi diperkuat lagi dengan mengalirkannya melalui pralon air dengan sudut kemiringan tertentu sebelum akhirnya menggerakkan turbin. Dengan didapatkannya putaran per menit/ *rotation per minutes (rpm)* yang lebih kencang untuk menggerakkan dinamo, maka dihasilkan daya listrik yang lebih besar untuk warga. Saat ini turbin air dapat mengalirkan listrik untuk sepuluh warga dari dua dusun yang berbeda, yaitu Dusun Rowo dan Kambangan.
3. Pembangkit listrik ini terlihat lebih

modern karena selain penutup turbin air terbuat dari besi yang bagus, juga hanya pembangkit listrik ini saja yang bak dan saluran airnya dibuat dari semen untuk menstabilkan posisi turbin dan aliran air. Selain kelebihan yang dimiliki oleh pembangkit listrik turbin, juga terdapat kelemahan. Kelemahan itu adalah bila dibanding dengan kincir air, turbin lebih rentan terhadap batu-batu kerikil yang ikut terbawa aliran air. Bila berhasil masuk ke dalam pralon, batu sebesar jempol orang dewasa pun dapat merusak bilah-bilah kipas dalam turbin. Mengatasi hal ini, penyaring dalam bak pesat harus dibuat lebih rapat. Akan tetapi konsekuensinya, selain air yang masuk ke dalam bak pesat menjadi berkurang, penyaring air ini pun juga menjadi lebih cepat kotor sehingga perlu perawatan dan pembersihan secara berkala.

Suharyono adalah orang yang bertugas merawat dan membersihkan turbin ini secara berkala, meskipun dalam melakukan pekerjaan ini tidak digaji tetapi. Bila turbin sudah cukup lama tidak diperiksa atau daya listrik yang dihasilkan turbin berkurang, Suharyono akan memeriksa turbin air ini. Dengan bersepatu dan tas punggung berisi peralatan, Suharyono pergi naik ke hutan pinus bagian barat desa tempat di mana turbin air ini diletakkan.

Kelebihan lain pembangkit listrik turbin ini adalah perawatannya sangat mudah. Suharyono mengatakan bahwa turbin air ini dapat dibongkar pasang, sehingga perawatannya dapat dilakukannya dengan seorang diri. Hal ini berbeda dengan perawatan kincir air di mana untuk melakukannya diperlukan bantuan dari dua atau tiga orang. Telah dikemukakan di atas bahwa perawatan kincir air dilakukan untuk mengganti *laher* kincir yang sudah rusak atau aus. Untuk mengganti *laher*, kincir air yang besar dan berat ini harus dilepas dan untuk melakukannya diperlukan tenaga dari beberapa orang. Hal ini berbeda dengan turbin air, karena turbin

dapat dibongkar-pasang maka apabila terjadi kerusakan, bagian yang rusak, dapat dibawa satu-persatu ke rumah untuk diperbaiki keadaannya.

Penggunaan listrik tenaga air selain memberi banyak kemudahan bagi penduduk Dusun Rowo secara tidak langsung ikut merawat keberadaan sumber air di dusun tersebut. Pembangkit listrik tenaga air membutuhkan aliran air sungai yang cukup deras dan konstan, oleh karena itu, penduduk harus menjaga keberadaan aliran air sungai di sekitar Dusun Rowo supaya pembangkit listrik tetap dapat beroperasi dengan baik. Untuk mendukung kelestarian lingkungan serta dalam rangka menjaga sumber-sumber air, warga Dusun Rowo diminta agar tidak terlalu banyak memotong pohon di hutan supaya air tidak menjadi langka. Batu dan pasir di sungai juga tidak boleh terlalu banyak ditambang supaya sungai tidak bertambah dalam dan debit air semakin berkurang. Mereka juga saling bergotong-royong dalam menjaga saluran air dan menjaga hutan agar tetap lestari dengan menanam berbagai jenis pohon/ tumbuhan yang dapat melindungi alam, seperti: pohon pinus, puspa, mahoni, cengkeh, nangka dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan oleh warga dan mendapat dukungan dari Perhutani, petugas lapangan, serta LSM, termasuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

C. KESIMPULAN

Pengelolaan Sumber daya berbasis komunitas (*Community Based Resources Management*) merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif. Strategi ini mengarah pada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal, yaitu pada masyarakat Dusun Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono,

Kabupaten Pekalongan. Melalui strategi ini masyarakat setempat dapat mengembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal, khususnya air yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Dusun Rowo memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia, khususnya air, untuk dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, antara lain: mandi, minum, mencuci, memasak, juga untuk keperluan asupan air bagi hewan ternak mereka, kebutuhan kolam ikan, juga untuk memenuhi kebutuhan aliran air pada sawah. Termasuk pula, air dimanfaatkan sebagai tenaga listrik dengan menggunakan kincir air. Yang membedakan dalam menggunakan air tersebut adalah jenis asal aliran air yang ada. Aliran air yang berasal dari mata air digunakan masyarakat untuk keperluan mandi, minum, mencuci, juga untuk kebutuhan minum hewan ternak, sedangkan aliran air yang berasal dari sungai digunakan untuk pengairan sawah, pengairan kolam ikan, kolam pengawetan kayu, juga untuk pembangkit listrik tenaga air.

Berdasarkan hasil temuan di atas, sudah sepantasnya, para pemegang kebijakan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebelum memutuskan tentang kebijakan apa yang perlu diterapkan. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan program yang diterapkan. Misalnya, di Kecamatan Petungkriyono sangat tepat jika pemerintah memberikan program-program yang berkaitan dengan pemanfaatan air, seperti pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air. Hal ini penting menjadi untuk dipertimbangkan karena sumber daya air di kecamatan ini cenderung berlimpah. Selain program yang diterapkan disesuaikan dengan potensi yang ada, juga sistem pengelolaan sumber daya tersebut berbasis pada komunitas,

hal ini akan memberikan energi sosial bagi masyarakat setempat dalam mengelola proses pembangunan, yang mengarah pada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR BACAAN

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2010. *Kecamatan Petungkriyono dalam Angka 2009*. Pekalongan: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Pekalongan.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, Matthew B. dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Sasnanda, I Dewa Putu Eska, 2008. "Sumber Daya Air Bagi Penduduk Dusun Rowo", dalam Laporan Penelitian, *Rumah Tangga Petani di Tengah Arus Pasar Dunia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2009. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Catoer, 2005. *Langkah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro*. Jakarta: Bintang Mas.
- Wicaksono, Agung, 2008. "Membentuk Desa Mandiri Energi dengan Pembangkit Listrik Skala Minihidro", dalam Laporan Penelitian, *Rumah Tangga Petani Di Tengah Arus Pasar Dunia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sumber foto:

Foto 1 s.d 6 © Ihya Ulumuddin, dok. Puslitbang Kebudayaan

KEARIFAN LOKAL PADA ARSITEKTUR HUNIAN TRADISIONAL DI KAWASAN RAWAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bakti Utama
Puslitbang Kebudayaan
baktiutama@gmail.com

Abstract

For Javanese people, a house is a place for make a harmonization among the inhabitants with God and their environmental, both physical and social. Harmonization with physical environmental is explained through traditional architecture of their house. This article tries to explore some of the ideas behind the architecture of Javanese traditional houses in the Special Region of Yogyakarta, which makes it adaptable to earthquake risk. Ideas may include: material properties are relatively lightweight and flexible, building footprints are symmetrical and relatively flexible construction. This adaptivity makes the discussion of the traditional houses were met with what social scientists call "the local wisdom". The data in this paper comes to the study of literature and interviews. Theoretically, this paper strengthens the thesis that environmental conditions be one of the main determinants of how humans develop culture. In the practical side, this paper tries to show that there are knowledges in a variety of cultures in Indonesia that are relevant to address current issues, particularly related to disaster risk reduction efforts.

Keywords: Javanese traditional house, harmonization, earthquake, environmental adaption

Abstrak

Rumah oleh masyarakat Jawa dipandang sebagai ruang untuk mewujudkan harmonisasi antara penghuninya dengan Tuhan maupun lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Harmonisasi dengan lingkungan fisik ditunjukkan dengan bentuk arsitektur tradisionalnya. Tulisan ini berusaha menelusuri beberapa gagasan di balik arsitektur rumah tradisional Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membuatnya adaptif terhadap resiko bencana gempa bumi. Gagasan yang dimaksud meliputi: sifat material yang relatif ringan dan fleksibel, tapak bangunan yang simetris, dan konstruksi bangunan yang relatif lentur. Adaptivitas inilah yang membuat diskusi tentang rumah tradisional bertemu dengan apa yang disebut para ilmuwan sosial sebagai kearifan lokal. Data dalam tulisan ini bersumber pada studi pustaka dan wawancara. Secara teoritis tulisan ini menguatkan tesis bahwa kondisi lingkungan menjadi salah satu penentu utama bagaimana manusia mengembangkan kebudayaannya. Sementara dalam tujuan praktisnya, tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan-pengetahuan dalam berbagai budaya di Indonesia yang relevan untuk mengatasi permasalahan saat ini, khususnya usaha terkait pengurangan resiko bencana.

Kata Kunci: rumah tradisional Jawa, harmonisasi, gempa bumi, adaptasi lingkungan,

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

"...environment mechanically 'dictates' how culture adapt"
(Sutton & Anderson, 1992).

Kebudayaan merupakan keseluruhan tanda dan simbol yang digunakan oleh manusia dalam hidupnya untuk mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk hidup, yang diperolehnya dalam kehidupannya sebagai warga suatu masyarakat atau komunitas (Ahimsa-Putra: 2012). Dalam perspektif fungsionalistik, definisi di atas menyiratkan pesan bahwa kebudayaan merupakan

sebuah instrumen bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Orang Bali misalnya, membangun mekanisme pengairan Subak untuk mengatasi persoalan kondisi bentang geografi yang tidak merata sehingga menyulitkan distribusi air ke lahan pertanian. Contoh lainnya, di pedalaman Kalimantan, rumah panjang tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal semata. Melalui berbagai aturan adat, rumah panjang dapat dimaknai sebagai sebuah organisasi sosial yang memungkinkan orang Dayak untuk mengatur pembagian tenaga kerja dalam mengelola sumber daya alam.

Seturut dengan pandangan di atas, rumah tradisional Jawa pun dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Pada rumah tradisional bertipe *joglo*, di mana bentuk atap tersusun bertingkat, tentunya bukan tanpa tujuan. Dengan struktur semacam itu, jarak antara lantai dengan atap semakin ke tengah semakin tinggi sehingga distribusi udara mampu berjalan optimal dan ketika seseorang berada di tengah rumah *joglo* ia pun tetap merasakan kesejukan udara dari luar.

Dalam konteks lain, riwayat kejadian gempa bumi yang seringkali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun tentunya direspon masyarakat dengan berusaha mewujudkan sebuah hunian yang relatif aman dan nyaman. Tulisan ini berusaha untuk menguraikan bagaimana rumah tradisional Jawa beradaptasi pada lingkungan, khususnya berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan inilah yang membuat rumah tradisional Jawa dipandang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karenanya, diskusi ini akan dimulai dengan menguraikan konsepsi kearifan lokal.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasan ini mengacu pada perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, --baik berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun

dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya--, untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/ atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan hukum maupun tidak (Ahimsa-Putra, 2006).

Terdapat tiga unsur pokok dalam definisi di atas. Unsur pertama definisi di atas menyebutkan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan. Sebagaimana uraian Ahimsa-Putra (2006), pemaknaan atas perangkat ini terkandung beberapa pengertian yang meliputi: adanya unsur-unsur; adanya hubungan antar-unsur tetapi tidak bersifat empiris; hubungan antar-unsur juga tidak mekanis ataupun fungsional; serta membentuk suatu kesatuan tanpa harus ada batas-batas empiris yang jelas untuk satuan ini. Unsur kedua berkaitan dengan darimana perangkat pengetahuan ini diperoleh. Sebagaimana kata pembentuknya, pengertian kearifan lokal terfokus pada tempat atau lokalitas dari kearifan tersebut. Maka dari itu, perangkat pengetahuan yang arif itu dapat diperoleh baik dari generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya. Unsur terakhir dari definisi kearifan lokal di atas berkaitan dengan tujuan dan sifat kearifan lokal itu sendiri. Dalam definisi ini, kearifan lokal ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan label “arif” maka penyelesaian atas permasalahan itu harus baik dan benar. Sementara itu, terkait sifatnya kearifan lokal dapat berkekuatan hukum ataupun tidak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumah bagi Orang Jawa

Pemahaman atas rumah erat berhubungan dengan pemaknaan “*papan*” sebagai satu dari tiga kebutuhan primer manusia selain “*sandang*” dan “*pangan*”. Dalam pandangan masyarakat Jawa, *papan* dapat dijabarkan menjadi empat fungsi, yaitu: ruang tinggal (*longkangan*), tempat tinggal (*panggonan*), tempat merenung (*panepen*), dan tempat

berinteraksi sosial (*palungguhan*) (Ronald, 2005: 78-83). Sebagai ruang tinggal, *papan* merupakan ruang bagi penghuninya dalam berproses psikologi. Sebagai tempat tinggal *papan* dimaknai sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali penghuninya. Pengertian kedua ini menunjukkan rumah sebagai okupasi dan akomodasi¹. Sebagai tempat merenung rumah dipandang orang Jawa juga berfungsi untuk menyepi (*nenepi*) dan berkontemplasi. Terakhir, sebagai tempat berinteraksi sosial, rumah bagi orang Jawa merupakan tempat untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Selain pengertian di atas, di dalam konsep Jawa, rumah (*omah*) adalah tempat untuk *mulih*, yang merupakan kata aktif dari *pulih*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti sembuh. Jadi, rumah merupakan tempat untuk menyembuhkan dari kepenatan dan rutinitas penghuninya. Dengan pengertian demikian, bagi orang Jawa rumah menjadi tidak bermakna ketika pulang ke rumah justru menambah kepenatan hidup.

Rumah bagi orang Jawa juga sangat dekat maknanya dengan rumah tangga dalam bahasa Melayu. Kata *omah-omah* bagi orang Jawa merupakan sebuah tahapan hidup ketika telah menikah. Di sini, *omah-omah* memiliki dua makna, yaitu: di mana seseorang telah mampu membangun rumah baik dalam pengertian mental maupun material, serta di mana seseorang telah mampu bertanggung jawab atas seisi rumah.

Rumah juga dipandang orang Jawa sebagai ruang untuk mewujudkan harmonisasi baik antara penghuni rumah dengan Tuhan maupun penghuni rumah dengan lingkungan, --fisik dan sosial--, di sekitarnya. Harmonisasi tersebut merupakan hal penting, oleh karena itu dengan melihat tiap-tiap aspek dalam rumah Jawa kita akan dapat mencermati harmonisasi

tersebut dibangun. Dalam tata ruang rumah Jawa yang lengkap, *langgar* dibangun sebagai tempat ibadah. Dalam *dhalem* utama terdapat pula ruang yang disebut *senthong tengah* yang selain sebagai ruang menyimpan pusaka juga sebagai ruang magis bagi penghuninya rumah untuk “berhubungan” dengan Tuhan. *Senthong tengah* ini disebut juga dengan *pasren* karena ruang ini juga digunakan untuk menghormati Dewi Sri sebagai dewi pemberi kesejahteraan bagi penghuni rumah. Selain itu, ornamen-ornamen dalam rumah Jawa, seperti kaligrafi-kaligrafi Arab bertuliskan “Allah” dan “Muhammad”, seringkali juga menunjukkan usaha penghuni rumah untuk membangun harmoni dengan Tuhan. Demikianlah tampak bahwa rumah merupakan sebuah media ruang bagi orang Jawa untuk mewujudkan harmoni dengan Tuhan.

Foto 1.

Langgar dan Ornamen-Ornamen Kaligrafi dalam Rumah Tradisional Jawa



Sumber: Dokumentasi Bakti Utama

1 Ronald (2005) memberikan pengertian bahwa okupasi di sini lebih bersifat kuantitatif, yaitu menyangkut daya tampung sementara akomodasi lebih bersifat kualitatif, yaitu menyangkut daya dukung.

Harmonisasi antara penghuni rumah dengan lingkungan, --baik lingkungan alam maupun social--, begitu tampak baik dalam tata ruang, ornamen-ornamen rumah Jawa, maupun dalam ragam hias perabot rumah. Untuk membangun hubungan sosial dengan tetangga sekitar, dalam tata ruang rumah Jawa terdapat *pendopo*, yang merupakan ruang tanpa dinding sebagai ruang publik. Selain untuk menerima tamu, *pendopo* dalam rumah Jawa difungsikan untuk ruang dalam aktivitas-aktivitas social, seperti pertemuan warga, *kenduri*, *tahlilan*, arisan, dan aktivitas lainnya. Selain itu, terdapat pula *regol butulan* yang merupakan pintu tembus yang menghubungkan antara sebuah rumah dengan rumah di sampingnya. Pintu ini biasanya difungsikan sebagai jalan pintas terutama ketika tetangga sedang memiliki hajat.

Foto 2.

Pendopo dan Regol Butulan dalam Rumah Tradisional Jawa



Sumber: Dokumentasi Bakti Utama

Sementara itu, harmonisasi antara penghuni rumah dengan lingkungan alam terwujud dalam beberapa hal. Ragam hias dalam rumah tradisional Jawa, seperti pada daun pintu, ventilasi udara, maupun perabot rumah tangga didominasi sulur-sulur, pepohonan, dedaunan, maupun hewan. Selain itu, tanaman di halaman (*pelataran*) rumah tradisional Jawa pun berfungsi untuk mewujudkan harmoni antara penghuni dengan lingkungan alam. Bahkan untuk menegaskan harmonisasi dengan lingkungan alamnya, orang Jawa memberikan makna pada tanaman yang mereka tanam di halaman rumah. Sawo Kecil misalnya, dari pelafalan namanya tanaman ini mirip dengan pelafalan “*sarwo becik*” atau dalam Bahasa Indonesia, berarti serba baik. Oleh karena itu, tanaman yang seringkali menghiasi halaman rumah orang Jawa ini, terutama rumah bangsawan, akan membawa kebaikan pada penghuni rumah. Sementara tanaman seperti Jambu Air dan Jeruk Kingkit dimaknai sebagai tanaman yang memberikan kesejahteraan bagi penghuninya.

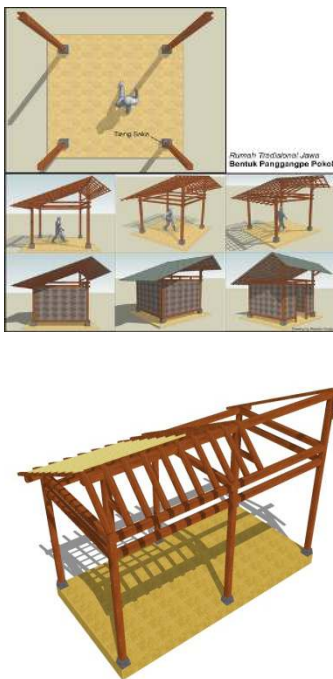
Uraian di atas menunjukkan bahwa bagi masyarakat Jawa, rumah bukanlah sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebuah media membangun harmoni dengan Tuhan ataupun lingkungannya (sosial dan alam). Sementara itu, dilihat dari desainnya, arsitektur rumah hunian tradisional Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibedakan menjadi empat model, yaitu: *panggangpe*, *kampung*, *limasan*, dan *joglo*. Perbedaan tiap model arsitektural pada rumah Jawa tersebut lebih pada desain atapnya. Berikut adalah deskripsi ke empat model tersebut.

a. *Panggangpe*

Rumah Jawa beratap *panggangpe* merupakan model rumah paling sederhana. Dari namanya *panggangpe* berasal dari kata *panggang* yang berarti dipanaskan di atas bara api, dan *pe* yang berarti dijemur. Nama

ini diberikan karena seringkali pada atap rumah model ini digunakan untuk menjemur barang-barang keperluan rumah tangga². Pada awalnya, jenis rumah ini bukanlah rumah untuk tempat tinggal, melainkan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan, seperti singkong, jagung, daun teh, dan bahan makanan lain. Namun, sering juga dijumpai model rumah jenis ini digunakan untuk tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Gambar 1
Desain Rumah *Panggangpe Pokok*



Pada bentuk dasarnya atau sering juga disebut rumah *Panggangpe Pokok*, rumah model ini mempunyai empat atau enam penyangga dengan model atap sebelah sisi. Pada sisi-sisi keliling rumah model ini diberi dinding sekedar penahan hawa lingkungan sekitarnya yang biasanya berupa anyaman bambu/ *gedhek*. Seiring perkembangannya,

model rumah *panggangpe* berkembang menjadi beberapa ragam bentuk. Berikut adalah ragam bentuk perkembangan rumah model *panggangpe*.

- 1) *Panggangpe Gedhang Selirang*, yaitu gabungan dua bentuk *panggangpe* dengan salah satu dibuat lebih rendah dari yang lain, kemudian atap bangunan yang lebih rendah disambungkan dengan atap yang rendah pada bangunan yang lebih tinggi.
- 2) *Panggangpe Empyak Setangkep*, yaitu gabungan dua *Panggangpe Pokok* dengan sisi depan saling dipertemukan.
- 3) *Panggangpe Gedang Setangkep*, yaitu gabungan dari dua *Panggangpe Gedhang Selirang* dengan mempertemukan masing-masing bagian depan/ bagian atap paling tinggi.
- 4) *Panggangpe Ceregancet*, yaitu gabungan dari dua *Panggangpe Gedhang Selirang* dengan mempertemukan masing-masing bagian belakang/ bagian atap yang paling rendah.
- 5) *Panggangpe Trajumas*, yaitu *panggangpe* dengan menggunakan tiga buah *pengeret* dan enam tiang/*saka*. Desain bangunan ini tetap menggunakan atap sebelah sisi.
- 6) *Panggangpe Barengan*, yaitu beberapa bentuk bangunan *panggangpe* yang disusun berderet

b. *Kampung*

Jenis rumah hunian Jawa kedua ini relatif lebih kompleks dibanding model rumah *panggangpe*. Sebagaimana tampak pada gambar, model rumah *kampung* terdiri dari empat, enam, atau delapan tiang/ *saka*, walaupun demikian sebagai rumah hunian model rumah ini lebih sering dijumpai dengan delapan tiang. Atap model rumah *kampung* merupakan atap dua belah sisi yang membentuk sebuah bubungan/ *wuwung*.

2 Periksa, <http://www.tourismsleman.com/dir.php?lang=INA&id=30#lagi>

Gambar 2
Model Rangka Rumah *Kampung Pokok*



Sumber: <http://www.gebyok.com/rumah-tradisional-jenis-kampung.html>

Rumah Jawa model *kampung* ini mengalami variasi menjadi sembilan jenis. Ke sembilan jenis model rumah kampung tersebut adalah:

1) *Kampung Pacul Gowang*

Desain rumah *Kampung Pacul Gowang* merupakan pengembangan rumah *kampung pokok* dengan penambahan bagian bangunan yang disebut *emperan*/ serambi dengan bangunan lain berbentuk *panggangpe*. Biasanya bagian serambi ini difungsikan sebagai teras rumah ataupun ruang untuk menerima tamu. Pada rumah *Kampung Pacul Gowang* terdapat bagian yang disebut *tutup keong*, yaitu penutup pada atap bagian samping kiri dan kanan. Model ini menggunakan tiang penyangga sebanyak enam, sembilan, atau dua belas tiang/ *saka*. Sebagai dinding biasanya digunakan kayu/ *gebyok* ataupun anyaman bambu/ *gedhek*.

2) *Kampung Srotong*

Desain rumah *Kampung Srotong*³ hampir mirip dengan rumah *Kampung Pacul Gowang* hanya saja pada model rumah ini memiliki dua buah serambi di bagian depan dan belakang rumah. Jika serambi depan biasanya

difungsikan sebagai ruang tamu dan teras, maka serambi belakang biasanya difungsikan sebagai dapur. Di luar penambahan serambi tersebut tidak ada perbedaan desain rumah ini dengan rumah *Kampung Pacul Gowang*. Jumlah tiang penyangga rumah model ini berjumlah delapan, dua belas, atau enam belas buah.

3) *Kampung Dara Gepak*

Desain rumah *Kampung Dara Gepak* merupakan pengembangan rumah *kampung pokok* dengan penambahan *emperan* di keempat sisi rumah. Dengan penambahan *emperan* ini biasanya rumah inti, yaitu bagian rumah *kampung pokok* menjadi lebih tinggi dari *emperannya*. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara menjadi lancar dan bagian tengah rumah tetap merasakan kesejukan udara dari luar. Tiang penyangga rumah model ini biasanya berjumlah 16, 20, atau 24 buah.

4) *Kampung Klabang Nyander*.

Jenis Rumah *Kampung Klabang Nyander* merupakan rumah *Kampung* dengan 16, 24, atau lebih tiang dan membutuhkan empat, atau enam *pengeret*, yaitu balok kayu yang menghubungkan ujung-ujung tiang/ *saka* (Jogja Heritage Society, 2007: 61). Desain bangunan ini juga memiliki dua tutup *keong*. Sementara untuk desain atap, terdapat dua atap di sebelah kanan dan kiri rumah, hal tersebut yang membuat rumah ini disebut *Klabang Nyander*.

5) *Kampung Lambang Teplok*

Salah satu ciri khas desain model rumah *Kampung Lambang Teplok* adalah adanya regangan pada struktur atapnya, atau disebut juga atap *brunjung*. Model rumah ini memiliki satu *wuwung* dan dua tutup *keong* (Dakung, 1982: 34). Tiang yang digunakan dalam model rumah ini berjumlah 16 atau 24 buah dengan empat, di antaranya berada di tengah sebagai *saka guru*. *Emper* pada rumah *Kampung Lambang Teplok* berjumlah dua, yaitu di depan dan di belakang bangunan pokok.

6) *Kampung Lambang Teplok Semar Tinandhu*

Desain rumah ini hampir sama dengan desain *Rumah Kampung Lambang Teplok*, namun pada rumah ini memiliki *emperan* empat buah yang mengelilingi struktur bangunan utama. Sementara itu, tiang penyangga atap *brunjung* pada rumah model ini bertumpu pada *blandar*, di mana *blandar* itu sendiri bertumpu pada tiang-tiang yang ada di pinggir.

7) *Kampung Gadjah Njerum*.

Desain *Rumah Kampung Gadjah Njerum* merupakan varian *Rumah Kampung Pokok* dengan tiga *emperan*. Dua *emperan* terletak di muka dan belakang, sementara satu *emperan* berada di salah satu sisi rumah. Rumah ini juga menggunakan dua *tutup keong* sebagai penutup atap samping.

8) *Kampung Ceregancet*

Jenis *Rumah Kampung* ini merupakan gabungan dari dua *Rumah Kampung Pacul Gowang*, yaitu dengan menggabungkan bagian yang tidak ber-*emperan*. Terdapat talang pada sepanjang sambungan tersebut sebagai saluran air.

9) *Kampung Semar Pinondhong*

Berbeda dengan *Rumah Kampung* yang lain, Jenis *Kampung Semar Pinondhong* ditumpu oleh tiang yang berjajar. Jumlah tiang bisa empat, enam, atau delapan, tergantung pada panjang rumah. Atap pada rumah jenis ini terdapat pada dua sisi.

c. *Limasan*

Desain rumah *limasan* merupakan perkembangan lebih lanjut dalam rumah hunian Jawa. Kata *limasan* ini diambil dari kata “*lima-lasan*”, yakni perhitungan sederhana penggunaan *molo* 3 m dan *blandar* 5 m, akan tetapi apabila *molo* 10 m, maka *blandar* harus memakai ukuran 15 m (*limasan* = lima belas = 15) (Sugiyarto, 1982: 36). Sebagaimana jenis *Rumah Panggangpe* dan *Kampung*, *Rumah*

limasan juga berkembang menjadi beberapa ragam. Berikut adalah ragam *Rumah Limasan*.

- 1) *Limasan Lawakan*, yaitu perkembangan dari *Limasan Pokok* dengan penambahan *emperan* berbentuk *Panggangpe* di ke empat sisi rumah.
- 2) *Limasan Gadjah Ngombe*, yaitu perkembangan dari *Limasan Pokok* dengan penambahan satu *emperan* berbentuk *panggangpe* pada salah satu sisi yang pendek.
- 3) *Limasan Gadjah Njerum*, yaitu perkembangan *Limasan Pokok* dengan penambahan dan pengurangan terutama pada bagian atap. Pengurangan terjadi dengan tidak adanya salah satu *emperan* atap pendek, sementara penambahan terjadi dengan adanya dua bangunan *emperan* pada ke dua sisi panjangnya.
- 4) *Limasan Apitan*, yaitu *limasan* yang hanya memakai empat *saka* dan sebuah *ander* yang menopang bagian rumah *suwunan* atau *molo* di tengahnya (Sugiyarto, 1982:38).
- 5) *Limasan Klabang Nyander*, yaitu *limasan* yang menggunakan banyak *pengeret*. *Pengeret* di sini berfungsi sebagai pengunci antar tiang/ *saka*.
- 6) *Limasan Pacul Gowang*, yaitu perkembangan *Limasan Pokok* dengan menambahkan *emperan* di salah satu sisi panjangnya.
- 7) *Limasan Gajah Mungkur*, yaitu perpaduan antara rumah *limasan* dengan rumah *kampung*, di mana bentuk atap di salah satu sisinya merupakan atap *limasan*, sementara atap pada sisi lainnya merupakan atap *kampung*.
- 8) *Limasan Ceregancet*, yaitu merupakan penggabungan dari dua bentuk rumah *Limasan Gajah Gowang* dengan cara menghubungkan dua bangunan *emperan*-nya.
- 9) *Limasan Apitan Pengapit*, yaitu penggabungan dari dua bentuk rumah *Limasan Lawakan* dengan cara

menghubungkan bagian *emperan*.

- 10) *Limasan Lambang Teplok*, yaitu model rumah *limasan* dengan menggunakan regangan pada atap *brunjung* dan *penanggap*.
- 11) *Limasan Semar Tinandu*, yaitu model *limasan* yang atap *brunjung*-nya bertumpu pada tiang/ *saka* yang bertumpu pada *blander*.
- 12) *Limasan Trajumas Lambang Gantung*, merupakan *limasan* yang *emperan*-nya tidak bertumpu langsung pada *saka* utama, melainkan bergantung pada *saka bethung* yang menempel pada *brunjung*.
- 13) *Limasan Trajumas*, yaitu *limasan* yang bertumpu pada enam tiang/ *saka*.
- 14) *Limasan Trajumas Lawakan*, yaitu perkembangan dari *Limasan Trajumas* dengan menambahkan *emperan* pada keempat sisi rumah.
- 15) *Limasan Lambangsari*, yaitu bangunan *limasan* yang mempunyai balok penyambung antara atap *brunjung* dan atap *penanggap*.
- 16) *Limasan Sinom Lambang Gantung Rangka Kutuk Ngambang*, yaitu bentuk *limasan* yang mempunyai atap *penanggap* bersusun dua dan bergantung pada *saka bethung*. Pada rumah jenis ini ukuran *molo* menonjol sepanjang $\frac{2}{3}$ dari *ander*.

d. Joglo

Jenis rumah hunian Jawa yang terakhir adalah *joglo*. Ukuran bangunan model *joglo* relatif lebih besar jika dibandingkan dengan rumah *panggangpe*, *kampung*, ataupun *limasan*. Terdapat beberapa ciri umum bangunan ini. Pertama, terdapat empat tiang pokok yang menopang bangunan yang biasa disebut *saka guru*. Kedua, di antara *saka guru* dan *blander* terdapat *sunduk kili* yang berfungsi sebagai *penyiku* dan penguat bangunan agar tidak berubah posisinya.

Gambar 3
Ilustrasi Desain Rumah Joglo



Sumber: Jogja Heritage Society, 2007

Ciri lain dari rumah *joglo* adalah adanya *blander* bersusun yang biasa disebut *tumpang sari*. *Blander* ini tersusun seperti piramida terbalik, di mana semakin ke atas akan semakin melebar. Di tengah susunan rangka *tumpang sari* ini terdapat papan kayu yang biasa disebut *dada peksi*. *Dada peksi* ini biasanya dihiasi ornamen ukiran yang menggambarkan filosofi pemilik rumah.

Sebagaimana rumah *panggangpe*, *kampung*, dan *limasan*, terdapat beberapa ragam bentuk rumah *joglo*. Berikut beberapa ragam bangunan rumah *joglo* (Dakung, 1982)

1) Joglo Lawakan

Model rumah *Joglo Lawakan* merupakan bentuk pokok dari rumah *joglo*. Sebagai bentuk dasar dari rumah *joglo*, *Joglo Lawakan* memiliki 16 tiang penyangga dengan empat di antaranya adalah *saka guru*/ tiang penyangga utama. Bangunan ini memiliki *usuk payung*, yaitu kerangka atap yang semakin ke bawah semakin melebar seperti bentuk payung.

2) Joglo Sinom

Joglo Sinom merupakan perkembangan dari *Joglo Lawakan* dengan penambahan *emperan* yang mengelilingi bangunan utama. Dengan penambahan *emperan* ini jumlah tiang yang menyangga rumah *Joglo Sinom* menjadi 36 buah dengan empat di antaranya adalah *saka guru*.

3) *Joglo Jompongan*

Ciri khas dari model *Joglo Jompongan* adalah perbandingan antara *blandar* dan *pengeret* (balok kayu yang menghubungkan dan memperkuat ujung-ujung tiang) adalah 1:1.

4) *Joglo Pengrawit*

Merupakan jenis *joglo* yang di antara atap *brunjung* dan atap *penanggap* terdapat *renggangan*.

5) *Joglo Mangkurat*

Merupakan perkembangan dari *Joglo Pengrawit*. Selain ukuran yang lebih besar dari *Joglo Pengrawit*, pada *Joglo Mangkurat* terdapat perbedaan, yaitu antara atap *penanggap* dan *emperan* dihubungkan dengan *saka benthung* (*saka* yang menggantung pada *penanggap*)

6) *Joglo Hageng*

Model *Joglo Hageng* merupakan

Tabel 1.
Catatan Sejarah Kejadian Gempa di Yogyakarta dan Sekitarnya

Waktu	Pusat Gempa	Besaran Gempa	Korban dan Kerusakan
10 Juni 1967	Na	VIII-IX MMI	372 rumah roboh dan 5 orang meninggal, runtuhnya tugu Keraton Yogyakarta, sejumlah bangunan di Tamansari, kompleks peristirahatan raja. Kediaman residen Belanda (Gedung Agung) juga ambruk.
1937	Na	Na	Na
23 Juli 1943	6,6 LS dan 109,9 BT	Na	213 orang meninggal dunia, 2096 luka-luka, dan sekitar 2800 rumah hancur
14 Maret 1981	7,2 LS dan 109,3 BT (kedalaman 33 km dibawah permukaan laut)	6 SR	Meretakkan dinding hotel Ambarukmo
9 Juni 1992	Na	6,5 SR	Na
25 Mei 2001	8,62 LS dan 110,11 BT (berpusat di Samudra Hindia)	6,3 SR	Beberapa bangunan di kabupaten Bantul mengalami kerusakan
19 Agustus 2004	9,22 LS dan 109,58 BT (berpusat di Samudra Hindia kedalaman 55 km)	6,3 SR	Na
19 Juli 2005	Berpusat di Samudra Hindia kedalaman 33 km	5,5 SR	Tidak menimbulkan kerusakan
27 Mei 2006	8,007 LS dan 110,286 BT di kedalaman 17 km	5,9 SR	6716 orang meninggal dan 37.139 orang luka-luka ratusan ribu rumah dan fasilitas umum rusak.

Sumber: Best Practice Penanganan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Lintas Sektor

pengembangan dari *Joglo Mangkurat* dengan ukuran yang lebih besar. Selain itu, pada *Joglo Hageng* susunan atap bertingkat empat, yaitu: atap *brunjung*, *penanggap*, *penitih*, dan *peningrat*. Di sekeliling bangunan utama *Joglo Hageng* juga terdapat *emperan* yang mengelilingi, yang biasa disebut dengan istilah *tratag*.

7) *Joglo Semar Tinandhu*

Model *Joglo Semar Tinandhu* memiliki karakteristik yang berbeda dengan model *joglo* yang lain karena pada model ini hanya memiliki dua *saka guru* (tiang penyangga utama). *Joglo Semar Tinandhu* juga memiliki dua *pengeret* di antara dua *saka guru* tersebut.

2. Gempa Bumi dan Efeknya Terhadap Bangunan

Gempa merupakan peristiwa alam yang berupa getaran atau gerakan yang bergelombang pada kulit bumi (KBI, 2008). Berdasar sumbernya, gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu: gempa vulkanik jika terjadinya gempa karena adanya aktivitas gunung berapi dan gempa tektonik jika terjadinya gempa berasal dari pelepasan akumulasi energi di daerah patahan lempeng bumi.

Energi yang dilepas pada saat gempa akan menimbulkan gelombang seismik yang menjalar dari pusat gempa. Dalam pengertian ini terdapat dua macam gelombang seismik. Pertama, gelombang badan (*body waves*), yaitu jenis gelombang yang tidak hanya menjalar di permukaan bumi, tetapi juga menjalar pada badan medianya. Jenis gelombang badan ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang P yang merupakan gelombang *longitudinal* yang menyebabkan tanah memampat dan mengembang dan gelombang S yang merupakan gelombang *tranverse* yang menyebabkan tanah bergeser ke samping tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Kedua, gelombang permukaan (*surface waves*), yaitu gelombang yang hanya menjalar di permukaan bumi. Sebagaimana gelombang badan, terdapat dua

jenis gelombang permukaan, yaitu: gelombang Rayleigh yang menjalar di permukaan dengan memutar tanah permukaan dan gelombang Love yang menggeser tanah permukaan ke kiri dan ke kanan. Berbeda dengan gelombang badan, gelombang permukaan ini lebih mudah teramati. Akibat gelombang Rayleigh, misalnya, benda-benda di permukaan bumi akan terlihat naik turun (Jogja Heritage Society, 2007).

Adanya gelombang seismik pada saat gempa bumi inilah yang seringkali menimbulkan kerusakan pada bangunan di kawasan gempa. Getaran gelombang pada saat gempa akan menimbulkan gaya *inersia*. Gaya *inersia* ini akan menyebabkan bangunan bergetar dan bahkan rusak jika struktur bangunan tidak tahan terhadap guncangan.

Menghadapi guncangan akibat gempa bumi tersebut, sebuah rumah dituntut memenuhi syarat-syarat rumah tahan gempa, yaitu: pertama, bangunan akan lebih tahan terhadap gempa jika konfigurasi bangunannya simetris dan teratur; kedua, ukuran bukaan pada dinding tidak besar; ketiga, memiliki distribusi kekakuan yang merata baik dalam arah vertikal ataupun horizontal; dan keempat, memiliki *daktilitas* tinggi, yaitu kemampuan struktur untuk mengalami lendutan tanpa mengalami keruntuhan. Di atas semua itu, tentunya dalam pembangunan sebuah rumah hunian yang tahan gempa harus menjaga mutu konstruksi, baik mutu pekerjaan ataupun mutu material (Boen, 2006).

3. Omah Jawa: Hunian di Lingkungan Gempa

Menempati wilayah pada jalur pertemuan antara lempeng Indo-australian dengan lempeng Eurasian menjadikan Yogyakarta merupakan daerah yang rawan bencana gempa bumi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kejadian gempa telah berulang kali terjadi daerah ini dan mengakibatkan berbagai kerugian sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Catatan Sejarah Kejadian Gempa di Yogyakarta dan Sekitarnya

Waktu	Pusat Gempa	Besaran Gempa	Korban dan Kerusakan
10 Juni 1967	Na	VIII-IX MMI	372 rumah roboh dan 5 orang meninggal, runtuhnya Tugu Keraton Yogyakarta, sejumlah bangunan di Tamansari, kompleks peristirahatan raja. Kediaman Residen Belanda (Gedung Agung) juga ambruk.
1937	Na	Na	Na
23 Juli 1943	6,6 LS dan 109,9 BT	Na	213 orang meninggal dunia, 2096 luka-luka, dan sekitar 2800 rumah hancur
14 Maret 1981	7,2 LS dan 109,3 BT (kedalaman 33 km di bawah permukaan laut)	6 SR	Meretakkan dinding Hotel Ambarukmo
9 Juni 1992	Na	6,5 SR	Na
25 Mei 2001	8,62 LS dan 110,11 BT (berpusat di Samudra Hindia)	6,3 SR	Beberapa bangunan di Kabupaten Bantul mengalami kerusakan
19 Agustus 2004	9,22 LS dan 109, 58 BT (berpusat di Samudra Hindia kedalaman 55 km)	6,3 SR	Na
19 Juli 2005	Berpusat di Samudra Hindia kedalaman 33 km	5,5 SR	Tidak menimbulkan kerusakan
27 Mei 2006	8,007 LS dan 110,286 BT di kedalaman 17 km	5,9 SR	6716 orang meninggal dan 37.139 orang luka-luka ratusan ribu rumah dan fasilitas umum rusak.

Sumber: Best Practice Penanganan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Lintas Sektor

Tabel di atas menunjukkan bahwa gempa bumi merupakan fenomena yang telah berulang di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kejadian berulang ini tampaknya

telah direspon nenek moyang masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, salah satunya dengan membangun rumah yang relatif tahan guncangan. Beberapa ahli saat ini menguraikan, sebagaimana telah tertulis di bagian tulisan ini sebelumnya, bahwa bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa bumi setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, seperti: konfigurasi bangunan yang simetris dan teratur, memiliki distribusi kekakuan yang merata, memiliki daya lentur, dan lain sebagainya. Ternyata prinsip-prinsip itu pun ada dalam bangunan rumah tradisional Jawa. Berikut adalah hal-hal dalam rumah tradisional Jawa yang membuatnya relatif tahan terhadap guncangan gempa bumi.

a. Material Bangunan

Rumah tradisional Jawa menggunakan kayu sebagai material utama bangunan. Jenis kayu Jati (*Tectono grandis*) merupakan pilihan pertama masyarakat Jawa dalam membangun rumah. Namun, selain jenis kayu tersebut sering juga dijumpai rumah Jawa dengan menggunakan kayu Nangka (*Artocarpus heterophyllus*), kayu Glugu (*Cocos nucifera*), ataupun kayu Meranti (*Shorea leprosula*). Sementara untuk genteng, pada rumah tradisional Jawa biasa menggunakan genteng berbahan baku tanah liat.

Penggunaan kayu sebagai material utama membuat rumah tradisional Jawa memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap guncangan gempa bumi. Penggunaan kayu Jati sebagai pilihan utama juga menjadikan rumah ini relatif lebih tahan gempa karena kayu ini termasuk memiliki tingkat kekuatan dan keawetan yang relatif baik. Sementara itu, pemilihan dan penggunaan bahan kayu untuk dinding (*gebyok*) dan tanah liat sebagai bahan baku genteng yang bersifat ringan membuat struktur bangunan relatif tidak terbebani.

b. Tapak Bangunan

Karakteristik tata tapak rumah bangunan tradisional Jawa yang lengkap adalah susunannya yang simetris (Jogja Heritage

Society, 2007: 42). Sebagaimana tampak pada ilustrasi di bawah ini, semua jenis rumah hunian tradisional Jawa (*panggangpe*, *kampung*, *limasan*, dan *joglo*) memiliki denah yang sederhana dengan bentuk dasar persegi ataupun persegi panjang. Pola denah ataupun tata tapak tanah yang simetris dan sederhana ini akan membuat rumah tradisional Jawa memiliki keseimbangan untuk menahan guncangan akibat gempa bumi.

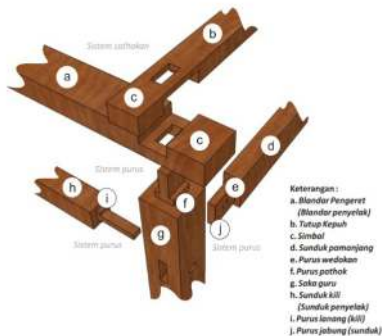
c. Konstruksi Rumah Tradisional Jawa

Pembagian rumah tradisional Jawa secara umum tidak berbeda dari rumah modern, yaitu terdiri dari kaki, badan, dan kepala. Bagian kaki terdiri dari pondasi, lantai, dan umpak. Bagian badan terdiri dari *saka*, dinding, pintu, dan ventilasi. Sementara bagian kepala terdiri dari rangka atap, penutup atap, dan langit-langit.

Pada bagian kaki, umpak merupakan bagian yang penting dalam rumah tradisional Jawa. Bagian ini menghubungkan antara bagian kaki dan badan rumah. Umpak merupakan alas tiang yang terbuat dari batu alam. Di bagian bawah umpak dikeruk sedikit sebagai penahan agar posisi umpak tidak bergeser. Sementara bagian atas umpak dibuat lubang persegi sebagai purus tiang. Prinsip sambungan pada umpak ini hampir sama dengan sistem sambungan persendian.

Sistem sambungan purus ini juga dapat ditemukan pada sambungan antara tiang dan *blander* dalam rumah tradisional Jawa. Prinsip dari sistem purus ini adalah menghubungkan dua balok dengan satu balok dilubangi, sementara balok yang lain dibentuk seperti tusuk untuk kemudian dimasukkan ke dalam balok yang pertama tadi.

Gambar 4.
Ilustrasi Sistem Sambungan *Purus* dan
Cathokan



Sumber: Jogja Heritage Society, 2007.

Dalam rumah tradisional Jawa, selain menggunakan sistem purus digunakan sistem *cathokan* untuk menghubungkan antarbalok kayu. Berbeda dengan sistem purus, pada sistem *cathokan* dua buah balok kayu dikeruk sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan *setangkap*. Pada sistem *cathokan* ini bisa diberi pengunci (*emprit gantil*) dan bisa juga tidak. Prinsip dalam sistem *cathokan* ini adalah membuat dua balok kayu saling berkaitan dengan sistem tarik. Dengan demikian, kedua balok kayu tersebut akan saling mengunci secara *rigid*. Sistem sambungan ini digunakan di seluruh struktur rumah tradisional Jawa, sebagaimana tampak dalam ilustrasi sambungan di sekitar *saka guru* berikut.

Sistem sambungan purus dan *cathokan* ini membuat rumah tradisional Jawa bersifat fleksibel. Berbeda dengan penyambungan dengan paku, sambungan pada rumah tradisional Jawa ini lebih lentur sehingga

relatif lebih tahan terhadap guncangan gempa. Struktur pada atap rumah tradisional Jawa sebagaimana tampak struktur atap *brunjung* pada rumah *joglo* juga menggunakan sistem sambungan yang saling mengait. *Molo* (balok kayu yang berada pada struktur paling atas atap) ditopang oleh empat buah *dudur brunjung*. Dengan cara ini, ujung *brunjung* akan menjadi sendi yang menghubungkan tiga bagian (*molo* dan dua *dudur brunjung*) dengan sistem khusus yang saling mengunci. Pola sambungan serupa juga digunakan untuk menyambungkan *dudur brunjung* dengan *takir* (balok kayu yang menopang *dudur brunjung*), baik *takir pemanjang* maupun *takir penyalak*. Dengan ketepatan dan kecermatan sistem ini akan menghasilkan sambungan yang stabil.

C. PENUTUP

Uraian mengenai rumah Jawa di atas setidaknya menunjukkan dua hal sebagai berikut. Pertama, rumah Jawa merupakan cerminan gagasan masyarakat Jawa untuk mewujudkan harmoni baik dengan Tuhan maupun lingkungan, -- fisik dan sosial--, di sekitarnya. Kedua, dalam konteks permasalahan menghadapi kerawanan terhadap bencana gempa bumi, beberapa faktor seperti material bangunan, tata tapak bangunan, serta konstruksi bangunan menyebabkan rumah Jawa relatif tahan terhadap guncangan gempa. Secara empiris, hal ini pun dibuktikan dengan relatif sedikitnya bangunan rumah tradisional Jawa, --baik bentuk *panggangpe*, *kampung*, *limasan*, ataupun *joglo*-- , yang mengalami kerusakan total pada kejadian gempa di Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006.

Usaha yang penting untuk dilakukan di

masa depan adalah memanfaatkan berbagai gagasan kearifan pada konstruksi rumah Jawa sebagai solusi alternatif mewujudkan bangunan hunian tahan gempa. Sebagai pengantar dalam usaha pemanfaatan kearifan rumah Jawa tersebut, beberapa catatan perlu ditekankan di akhir tulisan ini.

Sebagai tindak lanjut dari studi mengenai tema Kearifan Lokal, pemanfaatan gagasan kearifan dalam rumah Jawa dalam mewujudkan rumah hunian tahan gempa mensyaratkan untuk menghindari apa yang disebut oleh Utama (2011) sebagai “ranjau-ranjau studi kearifan lokal”. Sebagaimana kutipan berikut, ranjau-ranjau tersebut meliputi.

“Satu di antara beberapa ranjau itu lahir dari istilah “kearifan lokal” itu sendiri. (1) Konsep kearifan lokal menyadarkan bahwa cakupan efektifitas dari bahasan ini bersifat lokal. (2) Kearifan lokal merupakan konsep yang lahir dari peneliti/ akademisi.... Jika tidak hati-hati inilah awal dari ranjau kedua yaitu bahwa kearifan dalam konteks suatu permasalahan belum tentu arif dalam permasalahan yang lain. (3) Jika tidak hati-hati diskusi maupun kajian tentang kearifan lokal juga akan terjebak pada ranjau ketiga, yaitu: studi kearifan lokal akan menghasilkan deskripsi tentang semacam rumus-rumus yang dianut sebuah komunitas dalam merespon permasalahan. Hal ini tidak produktif karena lingkungan, fisik maupun nonfisik, selalu berubah dan diperlukan pula perubahan dalam merespons lingkungan tersebut.” (Utama, 2011)

Demikianlah, semoga di masa depan studi mengenai kearifan-kearifan masyarakat di Indonesia semakin memberikan andil bagi usaha membangun solusi alternatif permasalahan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, Putra. 2006. “Etnosains, Etnotek, dan Etnoart Paradigma Fenomenologis Untuk Revitalisasi Kearifan Lokal”, makalah Seminar *Pemanfaatan Hasil Riset UGM dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Indonesia*. Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- . 2012. “Budaya Bangsa Peran untuk Jatidiri dan Integrasi”, makalah dalam Seminar Nasional *Peran Sejarah dan Budaya dalam Pembinaan Jatidiri Bangsa*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Boen, Teddy. 2006. *Perbaikan dan Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah*. Yogyakarta: Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah.
- Dakung, Sugiyarto. 1982. *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jogja Heritage Society. 2007. *Pedoman Pelestarian Bagi Pemilik Rumah Kawasan Pusaka Kotagede, Yogyakarta, Indonesia*. Jakarta: UNESCO.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Roland, Arya. 2005. *Nilai-Nilai Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Setiawan, (B) Bobi. 2007. *Best Practice Penanganan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Lintas sektor membangun Kembali dengan Martabat*. Yogyakarta: Tim Teknis Nasional.
- Sutton, Mark Q dan E.N. Anderson. 1992. *Introduction to Cultural Ecology*. North Amerika: Altamira Press.

Utama, Bakti. 2011. "Rasionalitas dalam Kearifan Lokal: Studi Pengelolaan Listrik Mikro Hidro Pada Komunitas Petungkriyono" dalam *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

BUDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DI PULAU JAWA: Sebuah Refleksi Masa Lampau untuk Melihat Prospek Masa Depan

Budiana Setiawan
Puslitbang Kebudayaan
budianasetiawan@gmail.com

Abstract

This article is the result of study literature of papers in the Scientific Discussion on 5-7 November 2009 in Bogor, West Java that was organized by the Center for Research and Development of Culture. The topic of Scientific Discussion is "One Hundred Years of Civilization in Java: The existence of Agriculture and Plantation. From the results of this study literature, we find informations that Java is known as a very fertile island that agriculture and plantations can be developed. The fertility of land in Java Island of Java has support a very dense population, which the populations need settlements and supporting by several infrastructures. It make depreciation of land for agricultural and plantations. From year to year, more and more of land for agricultural and plantations has shrinking. But it can be offset by increase of production for agricultural and plantation. The increasing of production for agricultural and plantation due to the innovation and development of technology, both by farmers and government. Although agriculture and plantation production can be increased, the welfare of farmers and planters in generally are lacking because the economic system that hurt for agricultural and plantations that are not in favor to farmers and planters. Therefore, they need the necessary policies for increase their income and protect the welfare of farmers and planters with a system.

Keywords: *agriculture, plantation, land depreciation, population growth, government policy*

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil kajian literatur terhadap makalah-makalah dalam kegiatan Diskusi Ilmiah Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan pada tanggal 5 s.d. 7 November 2009 di Bogor, Jawa Barat. Diskusi Ilmiah Kebudayaan tersebut mengambil tema "Seratus Tahun Peradaban di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". Dari hasil kajian literatur ini dapat diperoleh gambaran bahwa Pulau Jawa dikenal sebagai pulau yang sangat subur sehingga pertanian dan perkebunan dapat berkembang dengan baik. Kesuburan tanah di Pulau Jawa menyebabkan pulau ini sangat padat penduduk, yang pada gilirannya kebutuhan permukiman dan infrastruktur pendukungnya mendesak lahan pertanian dan perkebunan. Dari tahun ke tahun lahan pertanian dan perkebunan semakin menyusut, namun masih dapat diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dikarenakan oleh adanya inovasi dan pengembangan teknologi, baik yang dilakukan petani, pekebun, maupun pemerintah. Meskipun produksi pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan, kesejahteraan petani dan pekebun pada umumnya masih kurang karena dirugikan oleh sistem ekonomi pertanian dan perkebunan yang tidak berpihak pada petani dan pekebun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi kesejahteraan petani dan pekebun.

Kata Kunci: *pertanian, perkebunan, penyusutan lahan, perkembangan penduduk, kebijakan pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan salah satu dari lima pulau besar¹ di Indonesia yang memiliki sejarah peradaban yang panjang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa situs penting prasejarah (seperti: Situs Manusia Purba Sangiran di Jawa Tengah, Situs Punden Berundak Gunung Padang di Jawa Barat, gua-gua prasejarah di Pacitan, Jawa Timur, dan lain-lain) maupun pusat-pusat kerajaan besar nusantara (seperti: Tarumanegara, Padjadjaran, Mataram Kuno, Majapahit,

1 Kelima pulau besar di Indonesia, adalah: Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa.

dan Mataram Islam) yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa tersebut bercorak agraris karena keberlangsungan kerajaan ditunjang oleh pertanian masyarakatnya. Hasil pertanian dapat digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kerajaan. Selain dikenal dengan pertaniannya, Pulau Jawa juga dikenal dengan hasil perkebunannya, seperti kopi, teh, karet, tebu, dan lain-lain. Perkebunan pada awalnya dikenal hanya terbatas pada pemanfaatan pekarangan rumah. Perkebunan dengan lahan luas mulai dikenal masyarakat Jawa setelah kedatangan Belanda di Indonesia dan terbentuknya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Lombard, 1996a: 74-76 dan Lombard, 1996b: 67-68).

Mengapa pertanian dan perkebunan dapat berkembang dengan baik di Pulau Jawa? Hal ini tidak terlepas dari letak geografis dan kondisi topografi Pulau Jawa yang menyebabkan lahan-lahan pertanian dan perkebunan di pulau ini dikenal sangat subur. Secara geografis Pulau Jawa terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik, sehingga memungkinkan terjadinya musim penghujan dan musim kemarau yang teratur sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan iklim di Pulau Jawa kondusif untuk budidaya tanaman pangan. Secara geografis Pulau Jawa memiliki 121 gunung api yang sebagian masih aktif. Material dan abu vulkanik yang keluar dari gunung api-gunung api tersebut menghasilkan tanah-tanah yang subur (Lombard, 1996a: 20-23).

Kesuburan tanah di Pulau Jawa juga memicu pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pulau-pulau lainnya, baik yang disebabkan oleh pertambahan alami maupun migrasi penduduk dari pulau-pulau lain. Pada masa kerajaan-kerajaan besar yang berpusat di Pulau Jawa, kepadatan penduduk di Pulau Jawa sudah jauh lebih tinggi daripada pulau-pulau lainnya. Pada awal abad XX penduduk Pulau Jawa diperkirakan telah mencapai 29 juta jiwa atau 69% dari total sekitar 42 juta

penduduk Indonesia (Levang, 2003: 47 dan 75).

Beberapa dasawarsa yang lampau pengembangan lahan pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa telah mencapai titik jenuhnya. Tidak ada lagi daerah yang dapat dibuka untuk lahan pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, tingkat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata melahirkan dampak yang sangat besar bagi masyarakatnya. Dampak itu antara lain berupa tingginya tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Saat ini diperkirakan sekitar 132 juta penduduk tinggal di pulau seluas 138.754 km² ini (Irianto, 2009). Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa juga berakibat pula pada menyusutnya lahan-lahan pertanian dan perkebunan, digantikan oleh permukiman-permukiman penduduk dan pembangunan fasilitas penunjangnya, seperti jalan raya, pabrik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Di samping itu kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan di masa lampau menyebabkan ekosistem di Pulau Jawa juga ikut berubah, yang ditandai dengan menyusutnya areal hutan dan flora-faunanya, akibat terdesak oleh aktivitas perambahan hutan untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan penduduk.

Menurut Lombard, berdasarkan gabungan catatan dari Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Republik Indonesia, perkembangan penduduk di Pulau Jawa sampai dengan tahun 1980 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk di Pulau Jawa 1940 – 2008

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (dalam jutaan)
1.	1815	4,6
2.	1831	6
3.	1845	9,5
4.	1855	10,9
5.	1870	16,4
6.	1880	19,7
7.	1905	30
8.	1920	35

9.	1930	41,7
10.	1950	50,4
11.	1961	62,9
12.	1971	76
13	1980	92

Sumber: Lombard, 1996c: 54.

Irianto (2009) menambahkan bahwa pada tahun 2000 jumlah penduduk meningkat menjadi 121,29 juta dan pada tahun 2008 menjadi 132,86 juta. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu kurang dari 200 tahun penduduk di Pulau Jawa berkembang lebih dari 28 kali lipat.

Semakin menyusutnya lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan perubahan pola mata pencaharian penduduk, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis. Menyusutnya lahan pertanian dan pertambahan jumlah penduduk yang pesat menyebabkan hasil yang diperoleh dari pertanian tidak mampu memberikan kesejahteraan hidup yang layak. Sistem pertanian di Pulau Jawa mengalami proses involusi sehingga kemiskinan penduduk semakin parah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk (Poerwanto, 2008: 201). Hal ini yang mendorong banyak petani yang kemudian memilih lapangan pekerjaan lain di bidang industri. Di sisi lain, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan, yang ditandai dengan semakin menyusutnya nilai-nilai kehidupan komunal dan sosial, berganti menjadi nilai-nilai individual. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, sudah tentu akan mengikis nilai-nilai budaya agraris, khususnya bidang pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa, yang telah terbentuk selama beratus-ratus tahun.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana prospek budaya pertanian dan perkebunan masyarakat Jawa pada masa yang akan datang? Kedua, adakah nilai-nilai budaya pertanian dan perkebunan dari masyarakat di

Pulau Jawa yang tetap relevan dengan kondisi perkembangan di Pulau Jawa? Ketiga, strategi dan perencanaan yang bagaimanakah yang dapat digunakan sebagai arah pengembangan budaya pertanian dan perkebunan, sebagai salah satu pilar perkembangan peradaban di Pulau Jawa? Strategi dan perencanaan yang tepat tersebut di masa yang akan datang secara tidak langsung akan mendukung upaya pelestarian budaya pertanian dan perkebunan masyarakat di Pulau Jawa.

Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap budaya pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa. Bahan kajian didasarkan pada makalah-makalah yang dipresentasikan pada kegiatan Diskusi Ilmiah Kebudayaan dengan tema "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan", pada tanggal 3-5 November 2009, bertempat di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.² Di samping menggunakan makalah-makalah yang disajikan dalam kegiatan Diskusi Ilmiah Kebudayaan, juga dilakukan studi pustaka terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan sejarah pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa. Data dari makalah-makalah yang dikaji dan kajian terhadap literatur yang relevan kemudian disintesis dan dianalisis guna menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

Tujuan dari kajian ini adalah

-
- 2 Kegiatan diskusi ini menampilkan satu orang pembicara kunci dan sembilan pembicara lainnya, yaitu: Prof. Dr. Emil Salim (Pembicara Kunci), S. Gatot Irianto (Kepala Badan Litbang Pertanian), Satyawati Sunito (Fakultas Ekologi Manusia, IPB), Aris Poniman Kertopurmono (Bakosurtanal), Pudjo Sumedi (Antropologi UGM), Mohammad Iskandar (Sejarah UI), Sarjana Sigit Wahyudi (Sejarah Undip), Agustin (Ditjen P2HP, Kementerian Pertanian), Myra P. Gunawan (ITB), dan Hester Basuki (Kampung Wisata Cinangneng). Sebagian dari makalah tidak relevan dengan bahan kajian penulis karena lebih difokuskan pada aspek pariwisata karena bidang Kebudayaan saat itu masih bergabung dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

untuk mengetahui bagaimana prospek pengembangan pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa di masa yang akan datang, mengingat pulau ini merupakan yang terpadat penduduknya, sehingga paling berat bebannya dalam menghadapi masalah laju pengalihan lahan pertanian dan perkebunan untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur penunjangnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Budaya Pertanian

Sebelum memasuki masa sejarah, Pulau Jawa telah dikenal sebagai pulau yang sangat subur, sehingga mendorong tumbuhnya budaya pertanian. Arif Poniman dan kawan-kawan menyampaikan bahwa kesuburan tanah di Pulau Jawa didukung oleh kondisi geografisnya. Pulau Jawa yang memiliki sejumlah gunung api yang masih aktif, dataran pantai utara yang memanjang dari barat ke timur, daerah perbukitan, dan pegunungan yang mendominasi di bagian selatan. Kondisi geografis ini telah menumbuhkan kearifan kearifan lokal dalam silang budaya pertanian, khususnya padi (Poniman dkk., 2009).

Menurut data arkeologis, budaya tani padi sawah pertama kali diperkenalkan oleh budaya Dong Son dari Vietnam Utara (Yokokura, 1978; dalam Poniman, 1989). Budaya padi sawah berkembang pesat di Pulau Jawa setelah berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, dimulai dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada sekitar abad V. Hal ini didasarkan pada Prasasti Tugu yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman, yang menyebutkan bahwa sang raja meresmikan penggalan sungai buatan di samping Sungai Candrabhaga (sekarang Sungai Bekasi) dan pemberian hadiah 1.000 ekor lembu kepada para brahmana. Penggalan sungai buatan tersebut diperkirakan merupakan saluran air untuk kepentingan pengairan tanaman padi (Soekmono, 1973: 36). Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa budaya padi sawah telah berkembang pada saat itu. Meskipun demikian, baru pada abad XVII budaya padi sawah dikenalkan

oleh Kerajaan Mataram Islam ke luar Jawa. Pada masa itu padi mulai diekspor dari Jawa ke Penang (Malaysia) dan Sulawesi (Poniman dkk., 2009).

Lahan pertanian di Jawa secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tegalan dan persawahan. Tegalan adalah lahan kering yang diolah dan ditanami tanaman yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar, seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah. Persawahan adalah lahan yang mendapat pengairan dengan baik, sehingga dapat ditanami padi dan berbagai jenis palawija (Lombard, 1996a: 23).

Penggunaan lahan pertanian padi sawah di Jawa berkembang dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, pada masa Pemerintahan Orde Baru (ORBA), dengan tercapainya swasembada beras. Namun, sebagai akibat dari berkembangnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, sedikit demi sedikit, penggunaan lahan pertanian mengalami penyusutan karena dikonversi menjadi daerah permukiman, industri, dan sarana-prasarana pendukungnya (Poniman dkk., 2009). Adapun laju penyusutan lahan pertanian sejak masa Pemerintahan ORBA hingga tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa laju konversi lahan pertanian terjadi secara besar-besaran justru terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan memasuki era reformasi pada tahun 1997 s.d. 2000. Padahal seharusnya selama masa krisis ekonomi pembangunan infrastruktur melambat, sehingga laju konversi lahan mestinya berkurang. Kemungkinan ketika itu banyak petani yang menjual lahan pertaniannya.

2. Sejarah Budaya Perkebunan

Berbeda halnya dengan budaya pertanian yang telah dikenal masyarakat Jawa sejak masa prasejarah, budaya perkebunan besar baru dikenal pada pertengahan abad XVII oleh Belanda (Poniman dkk., 2009). Meskipun demikian, sebelumnya, penduduk di Pulau Jawa maupun di Indonesia pada umumnya telah

Tabel 2.
Perkembangan Konversi Lahan Sawah (1979-2005)

Periode	Masa Pemerintahan	Nama Presiden	Nama Kabinet	Laju Konversi Lahan (Ha/tahun)
1979-1984	Orde Baru	Suharto	Pembangunan III-IV	8.347
1985-1990	Orde Baru	Suharto	Pembangunan IV-V	7.526
1991-1996	Orde Baru	Suharto	Pembangunan V-VI	28.525
1997-2000	Krisis Ekonomi dan Reformasi	Suharto BJ.Habibie Abdurachman W.	Pembangunan VI-VII Reformasi Pembangunan-Persatuan Nasional	62.271
2000-2005	Pasca Reformasi	Megawati S.P. Susilo Bambang Y.	Gotong Royong Indonesia Bersatu	15.534

Sumber: Poniman dkk, 2009.

mengenal sistem ladang, tegalan, dan kebun (*garden system*).³ Masyarakat Jawa mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Usaha kebun dijadikan usaha pelengkap dan sampingan dalam kegiatan pertanian pokok, bukan kegiatan utama seperti halnya perkebunan besar (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991).

Sistem perkebunan besar di Jawa mulai diperkenalkan Belanda setelah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atau Kongsi Dagang Hindia Timur bubar pada tahun 1799. Kongsi dagang ini didirikan pada tahun 1602, semula merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Setelah VOC bangkrut kekuasaan monopoli perdagangan diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda kemudian membentuk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dengan wilayah kekuasaan meliputi pulau-pulau di Nusantara, yang kelak kemudian menjadi

negara Indonesia. (*Vereenigde Oostindische Compagnie*. https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie, diunduh tanggal 23 Mei 2013 pukul 8.55).

Setelah menguasai wilayah Nusantara, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan sistem Tanam Paksa atau *Cultuur Stelsel* oleh Gubernur Jenderal Van der Bosch. Namun pada akhirnya sistem Tanam Paksa ini dihentikan karena sangat menyengsarakan masyarakat pribumi dan secara tidak langsung berimbas pada produktivitas kerja mereka. Hal ini juga berakibat pada menurunnya perekonomian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Setelah berakhirnya era Tanam Paksa, sistem perkebunan besar atau *plantation system* mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad XIX hingga awal abad XX, ketika diterapkannya *Open Door Policy* bagi investor dari negara-negara Benua Eropa. Gagasan untuk membentuk perkebunan muncul karena terjadinya persaingan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dengan Inggris. Belanda yang kalah dalam persaingan perdagangan tersebut kemudian mengalihkan fokus perdagangan dari rempah-rempah ke

3. Sebelumnya masyarakat Jawa telah mengenal “kebun” sebagai tempat pembudidayaan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan yang terbatas. Biasanya lahan yang digunakan sebagai “kebun” adalah areal di sekitar rumah petani.

tanaman-tanaman hasil perkebunan, seperti: kopi, teh, kina, tembakau, tebu, dan lain-lain. Hasil dari perkebunan tersebut semakin menguntungkan ketika tanaman perkebunan dikerjakan oleh tenaga kerja berupah rendah dan lahan yang berharga murah. Untuk mencapai tujuan itu, kongsi-kongsi dagang Belanda yang mengusahakan perkebunan tersebut harus didukung oleh Pemerintah Belanda. Dengan dukungan dan fasilitas dari negara, kongsi-kongsi dagang ini mempunyai hak untuk menguasai aset lahan-lahan perkebunan di Hindia Belanda (*Perkebunan dalam Lintas Zaman*. <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/inventaris-berita/87-lintas-zaman-perkebunan.html>, diunduh tang-gal 24 Mei 2013 pukul 10.27).

Ciri-ciri perkebunan adalah tumbuhan/pohon yang dibudidayakan sejenis dengan jumlah yang sangat besar, sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas. Perkebunan dapat berkembang di Pulau Jawa karena telah dikenalnya sistem kepemilikan tanah partikelir. Menurut Iskandar (2009), pada abad XIX telah ada empat jenis kepemilikan lahan di Pulau Jawa, yakni:

a. Tanah Milik Raja

Masyarakat Jawa, dan juga masyarakat Asia Tenggara pada umumnya, mempercayai bahwa raja adalah wakil dewa atau wakil Tuhan, yang bertugas mengatur kehidupan yang harmonis di bumi. Konsep kekuasaan raja sebagai wakil dewa atau Tuhan ini oleh Von Heine Gelderen disebut sebagai konsep “Dewa-Raja”. Oleh karena itu mengabdikan kepada raja dianggap identik dengan pengabdian kepada dewa atau Tuhan. Sebagai wakil dewa atau Tuhan, seorang raja memiliki seluruh tanah yang berada di wilayah kerajaannya. Rakyat menggarap lahan pertaniannya adalah atas perkenan raja. Oleh karena itu pembayaran pajak atau upeti kepada raja dianggap sebagai ungkapan terima kasih atas kemurahan hati sang raja yang telah memperkenankan mereka menggarap lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai timbal baliknya,

raja menyerahkan tanah kepada para abadinya untuk digarap. Luas lahan yang diterima dihitung dalam bentuk *cacah*. Besar-kecilnya jumlah *cacah* yang diserahkan kepada para abdi tergantung pada kedudukan mereka di hadapan raja. Tanah-tanah yang diserahkan oleh raja ini dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai tanah *lungguh* atau tanah gaji.

b. Tanah Ulayat/ *Titisara*

Tanah ulayat atau *titisara* adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat. Tanah ini digarap secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh kelompok yang ada di desa tersebut. Sebagai tanah yang dimiliki secara komunal, tanah-tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada keluarga penggarapnya.

c. Tanah Individual

Tanah individual adalah tanah-tanah yang dimiliki secara perorangan. Tanah ini banyak terdapat di desa-desa yang jauh dari kekuasaan raja. Desa-desa tersebut pada awalnya merupakan hutan-hutan, yang kemudian dibuka menjadi lahan pertanian. Tiap-tiap penduduk mengkapling lahan dengan luas tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Jenis tanah ini dapat diwariskan dari seorang petani kepada keturunannya.

d. Tanah Partikelir/ *Particuliere Landerijen*

Jenis tanah partikelir atau *particuliere landerijen* bukan berasal dari budaya masyarakat Jawa, melainkan suatu sistem baru yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Tanah partikelir adalah tanah milik swasta yang bermunculan sebagai akibat dari praktik penjualan tanah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kepada pihak swasta. Para pemilik tanah partikelir juga diberi hak-hak istimewa oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hak istimewa tersebut, antara lain: hak untuk menuntut pajak produksi, hak pajak tenaga kerja, dan hak mengangkat dan memberhentikan pejabat setempat. Mereka juga mempunyai hak untuk mempekerjakan

penduduk-penduduk desa yang tinggal di atas tanahnya. Hal ini dikarenakan proses penjualan tanah partikelir berbeda dengan penjualan tanah pada masa kini, di mana yang diserahkan bukan hanya tanah beserta berbagai jenis tanaman yang tumbuh di atasnya, tetapi juga para penduduk yang tinggal di lokasi lahan tersebut. Lahan-lahan tersebut yang kemudian dikembangkan sebagai perkebunan. Dengan demikian perkebunan berkembang seiring dengan sistem tanah partikelir. Sistem tanah partikelir ini pada akhirnya lenyap oleh berkecamuknya Perang Asia Timur Raya, yang disusul dengan Perang Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1940 s.d. 1950 (Iskandar, 2009).

Budaya perkebunan muncul setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendorong para pemilik modal, khususnya orang-orang Eropa, untuk memiliki lahan yang sangat luas untuk membangun perkebunan-perkebunan besar. Untuk itu, mereka memaksa masyarakat untuk membuka hutan-hutan untuk ditanami tanaman-tanaman perkebunan. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan "Sistem Tanam Paksa" atau *Cultuur Stelsel*. Sistem tanam paksa ini secara ekonomi menguntungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hasil dari perkebunan memberikan kontribusi ekspor hingga 80% dari total ekspor (Semedi, 2008), namun sangat merugikan masyarakat Indonesia karena para petani dipaksa untuk menanam jenis tanaman tertentu upah pekerja kebun yang rendah.

Sistem Tanam Paksa berlangsung sejak tahun 1830 s.d. 1870. Ketika itu Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hanya memperbolehkan penduduk di areal perkebunan untuk menanam jenis-jenis tanaman tertentu, yang hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Setelah berakhirnya Sistem Tanam Paksa, pada tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria, yang memunculkan *Corporate Plantation System*, yang memungkinkan pengusaha asing memperoleh izin untuk mengusahakan tanaman ekspor, seperti

teh, tebu, kopi, dan tembakau. Di samping itu para buruh perkebunan mendapat upah yang lebih memadai daripada Sistem Tanam Paksa. Undang-Undang Agraria mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk melindungi masyarakat pribumi agar terjaga hak milik atas tanah-tanah garapannya terhadap penguasaan oleh orang-orang asing. Kedua, memberikan peluang kepada para investor asing untuk menyewa tanah dari masyarakat pribumi pemilik lahan (Poerwanto, 2008: 203).

Sistem tanah partikelir berakhir sejak Pemerintahan Hindia Belanda dikalahkan oleh Jepang dan menguasai Indonesia pada tahun 1942 s.d. 1945, dan akhirnya digantikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945. Setelah Kemerdekaan RI, pemerintah mengubah status tanah partikelir yang ditinggalkan Belanda menjadi tanah milik Pemerintah RI. Dengan demikian, aktivitas perkebunan tetap berlanjut. Lahan-lahan perkebunan yang ditinggalkan Pemerintah Hindia Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagian diberikan kembali kepada ahli waris pemilik tanahnya atau penduduk setempat, sebagian lagi kemudian dinasionalisasi menjadi BUMN dengan PT Perkebunan Nusantara sebagai pengelolanya (Iskandar, 2009).

Selain lahan-lahan perkebunan yang dikuasai negara, sebagian masyarakat juga mengembangkan perkebunan yang dikelola secara mandiri, yang disebut dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Secara tidak langsung masyarakat yang mengelola perkebunan tersebut mewarisi sistem manajemen perkebunan warisan Belanda, yang disebut dengan prinsip *Domein Verklaring* yang berlaku sejak 1870 (Sunito, 2009).

3. Prospek Pengembangan Pertanian

Emil Salim menyampaikan bahwa Pulau Jawa dikenal sebagai pulau yang sangat subur, sehingga mendorong peningkatan jumlah penduduk. Sebaliknya, jumlah penduduk Pulau Jawa yang semakin bertambah juga mendorong naiknya produksi pertanian, yang

kemudian menekan sumber daya alam dan ekosistem. Tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem tersebut pada gilirannya mengancam kelestarian alam. Dari aspek sosial budaya, jumlah penduduk yang semakin bertambah akan mendorong terjadinya benturan antargolongan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi konflik sosial. Konflik sosial akan semakin meningkat ketika pertambahan jumlah penduduk tidak diikuti dengan kenaikan hasil produksi pertanian. Di sini diperlukan suatu sistem budaya yang dapat mengakrabkan hubungan sosial antarmasyarakat dan dapat meredam konflik sosial. Dengan demikian gabungan faktor alam dan sosial mengubah kondisi lingkungan Jawa dan berdampak pada perubahan budaya Jawa (Salim, 2009).

Menurut Emil Salim, tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan pulau ini mempunyai beberapa kota besar dengan penduduk di atas satu juta jiwa, seperti: Jakarta (9.607.787), Surabaya (2.765.487), Bandung (2.394.873), Semarang (1.555.984), Tangerang (1.798.601), Depok (1.738.570), dan Bekasi (1.290.322) (Sensus 2010). Wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini telah berkembang menjadi Megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan jumlah penduduk mencapai 28.019.545. Wilayah Surabaya dan sekitarnya berkembang menjadi metropolitan yang disebut dengan Gerbang Kertassusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) dengan jumlah penduduk 9.115.485 jiwa. Sedangkan Bandung dan sekitarnya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) juga berkembang menjadi metropolitan dengan jumlah penduduk 7.622.905 jiwa (*Daftar Kota di Indonesia Menurut Jumlah Penduduk*, http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk, diunduh tanggal 6 Juni 2013 pukul 8.25).

Kota-kota besar tersebut harus dilengkapi dengan infrastruktur penunjang mobilitas dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduknya, seperti: jalan raya, jalur kereta api, listrik, air

minum, dan lain-lain. Di samping itu juga harus disertai dengan infrastruktur di bidang kesejahteraan sosial, seperti: sekolah, rumah sakit, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu memerlukan lahan yang cukup luas, sehingga seringkali dengan menggusur lahan-lahan pertanian (Salim, 2009).

Menyusutnya lahan pertanian sawah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada belum dapat melindungi pertanian lahan sawah di Pulau Jawa. Oleh karena itu inventarisasi dan evaluasi kearifan lokal budaya padi di Jawa perlu diteruskan, sehingga dapat dipilih dan dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan. Di samping itu perlu ada integrasi inventarisasi dan evaluasi kearifan lokal budaya padi, khususnya di Jawa dan umumnya di Indonesia, dalam mengembangkan keanekaragaman pangan nasional (Poniman dkk., 2009).

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian, Gatot S. Irianto menyatakan bahwa dewasa ini semakin sedikit masyarakat, terutama generasi mudanya, yang mau bekerja di sektor pertanian. Generasi muda dari keluarga petani lebih suka bekerja di sektor industri, walaupun hanya sekedar menjadi buruh pabrik. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa pekerjaan di sektor pertanian pangan identik dengan kemiskinan. Fakta ini yang membuat generasi muda tidak tertarik untuk menggeluti bidang pertanian. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sekitar 69% petani padi berusia di atas 35 tahun dan sekitar 33% di antaranya berusia di atas 54 tahun (Irianto, 2009).

Dari sudut pandang yang lain, Satyawan Sunito menyampaikan bahwa peningkatan tenaga kerja di bidang pertanian baru dapat terealisasi ketika suatu negara mengalami krisis ekonomi karena akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kemiskinan penduduk, baik di kota maupun di desa. Dalam hal ini, sektor pertanian menjadi satu-satunya peluang kerja yang dapat diperoleh kembali, terutama

penduduk yang kehilangan pekerjaan di sektor industri. Dengan demikian sektor pertanian akan meningkat pada saat krisis (Simanjuntak, 200: 63 dalam Sunito, 2009).

Berdasarkan fakta bahwa semakin sedikitnya tenaga kerja di bidang pertanian karena lebih memilih pekerjaan di bidang industri, pembangunan di bidang pertanian di Pulau Jawa tidak bisa menargetkan terjadinya peningkatan jumlah orang yang bekerja di sektor ini. Oleh karena itu orientasi pembangunan pertanian adalah pada upaya peningkatan hasil produksi. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian tampaknya memberikan hasil, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini (Irianto, 2009).

Tabel 3
Produksi Hasil Tanaman Pangan di Jawa
Tahun 1940 – 2008

No	Jenis Produksi Tanaman	Produksi (dalam Ribuan Ton)				
		1940	1942	1945	1950	2008
1.	Padi	8.989	8.302	6.470	7.528	32.340
2.	Jagung	1.900	2.165	1.399	1.600	8.440
3.	Kedelai	294	353	102	245	497

Sumber: Irianto, 2009

Meskipun terjadi peningkatan produksi pertanian, orientasi pembangunan pertanian ini belum berpihak pada peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu Irianto menyampaikan bahwa orientasi pembangunan pertanian di masa yang akan datang harus dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani, harus diciptakan suatu sistem pertanian industrial. Pertanian industrial adalah upaya inovasi di bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, serta didukung dengan sistem kelembagaan dan hukum yang melindungi petani dari praktik-praktik yang dapat merugikan pendapatan

petani. Dengan demikian, maka kesejahteraan petani dapat meningkat.

Satyawan Sunito mengemukakan paradigma baru pembangunan di bidang pertanian. Paradigma tersebut meliputi tiga aspek, yaitu: berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Aspek kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; serta perlindungan dan penguatan kelompok-kelompok tani, nelayan, peternakan, dan perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan sumberdaya. Aspek berkeadilan dimaksudkan sebagai kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi. Adapun

aspek berkelanjutan adalah terjadinya integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan (Sunito, 2009).

Berkaitan dengan semakin menyusutnya lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa, para petani harus berinovasi agar dengan lahan yang semakin menyempit dapat menghasilkan panen yang semaksimal mungkin. Teknologi ini yang pada masa Pemerintah Orde Baru dikenal dengan istilah “Intensifikasi Pertanian”.⁴

4 Sebagai lawan dari intensifikasi pertanian adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu membuka lahan-lahan pertanian seluas mungkin. Meskipun demikian,

Dalam upaya intensifikasi pertanian, menurut Poniman dan kawan-kawan, beberapa tempat di Pulau Jawa telah mengembangkan budaya ramah lingkungan dan adaptasi teknologi (*agroecological approach*), antara lain dengan sistem *galewor* di Majalaya, Jawa Barat. Dalam sistem ini dikembangkan teknologi pertanian berteras dan dikombinasikan dengan kolam ikan (Poniman dkk., 2009).

Masih menurut Poniman dan kawan-kawan, pada masa puncaknya, budaya pertanian menghasilkan kearifan lokal yang dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi, yakni:

a. Budaya Padi Eksploitatif yang Masih dalam Batas Daya Dukung Lingkungan

Dalam budaya padi eksploitatif, petani menanam padi hingga tiga kali tanam per tahun. Untuk mencukupi kebutuhan air untuk tanaman padinya, pada musim penghujan petani mengandalkan air irigasi, namun pada musim kemarau petani melakukan penyedotan air tanah.

b. Budaya Ramah Lingkungan

Dalam budaya ramah lingkungan, petani tidak mengeksploitasi air tanah, namun mengandalkan air irigasi dan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanamannya.

c. Budaya Intensif Tumpangsari

Petani menanam jenis tanaman lain di sela-sela lahan pertanian yang sempit, seperti sayur-sayuran, bawang, jagung, dan lain-lain. Sistem pertanian ini sering disebut tumpangsari (Poniman dkk., 2009).

I Nyoman Sirna menyatakan bahwa salah satu dampak dari berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan adalah semakin sedikitnya tanah yang dimiliki petani. Para petani di Jawa rata-rata memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Keterbatasan

lahan pertanian akan mendorong para petani mengubah pola pertaniannya secara bervariasi. Mereka menanam lahan sawahnya tidak dengan tanaman padi, melainkan dengan tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan. Sebagian petani juga mengubah lahan sawahnya untuk lahan perternakan, seperti sapi perah atau ayam potong. Sebagai kesinambungan dari berubahnya pola usaha tanaman padi menjadi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, maupun perternakan, para petani harus menjalin hubungan dengan para pengusaha untuk memasarkan produknya (Sirna, 1993: 28-29). Meskipun demikian, perubahan pola pertanian dari tanaman padi ke sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahkan perternakan tersebut relatif lebih berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani.

4. Prospek Pengembangan Perkebunan

Sejak berakhirnya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan digantikan Pemerintah Republik Indonesia, lahan-lahan perkebunan yang ditinggalkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda diambil alih Pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan lahan-lahan perkebunan tersebut didasarkan pada Perundingan Meja Bundar tahun 1949. Berdasarkan perjanjian tersebut, perkebunan tinggalan Belanda tersebut kemudian dinasionalisasi menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan ditangani oleh lembaga yang bernama Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991). Namun pada awal-awal masa Pemerintahan Republik Indonesia, potensi perkebunan sebagai penghasil devisa tampaknya belum menjadi fokus perhatian pemerintah karena situasi politik yang belum kondusif ketika itu.

Baru pada masa Orde Baru, perkebunan-perkebunan tinggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kembali dilirik sebagai sektor yang potensial untuk menghasilkan devisa negara. Langkah pertama dimulai dengan memberikan tambahan modal dan

mengingat Pulau Jawa sudah sangat padat, maka ekstensifikasi pertanian hanya dapat dilakukan di luar Pulau Jawa.

peningkatan kemampuan perkebunan-perkebunan tinggalan Belanda tersebut, yang kemudian disebut Perkebunan Besar Negara (PBN). Seiring dengan keberlangsungan pengelolaan PBN oleh negara, di masyarakat juga tumbuh perkebunan rakyat yang dikelola secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, yang disebut dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Perkembangan PIR sangat mewarnai pembangunan perkebunan di Indonesia, di samping juga berkembangnya perkebunan-perkebunan yang dikelola perusahaan-perusahaan swasta, yang disebut Perkebunan Besar Swasta (PBS) (*Perkebunan dalam Lintas Zaman*. <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/inventaris-berita/87-lintas-zaman-perkebunan.html>, diunduh tanggal 24 Mei 2013 pukul 10.27).

Seperti halnya petani di sektor pertanian, kesejahteraan para pekebun di sektor perkebunan rakyat saat ini juga masih kurang. Hal ini menurut Romahurmuziy disebabkan beberapa kendala, yaitu:

- a. Kapasitas SDM dan kelembagaan/organisasi perkebunan rakyat masih rendah, sehingga sulit bersaing dengan perkebunan besar;
- b. Ketidakmampuan pekebun untuk mengadopsi teknologi pengolahan pascapanen sehingga komoditas yang jual tidak memiliki nilai tambah
- c. Produktivitas dan mutu tanaman yang rendah akibat tanaman yang sudah tua, rendahnya kualitas dan kuantitas saprodi, rendahnya pemanfaatan Iptek yang pada gilirannya menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi tanaman
- d. Pekebun (plasma) tidak memiliki *bargaining position* ketika berhadapan dengan Inti, misalnya: inti menunggak pembayaran kepada plasma; dan penetapan harga komoditas plasma ditentukan secara sepihak, terkadang di bawah harga pasar (M. Romahurmuziy, *Perkebunan Rakyat Sebagai Lokomotif Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan*.

http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/wp-content/uploads/2012/04/perkebunan_prosdENIP11_MUDPR.pdf, diunduh tanggal 9 Juni 2013 pukul 22.47).

Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, pekebun membutuhkan pendampingan pengelolaan perkebunan. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi terhadap kebutuhan pekebun (misalnya: pupuk, bibit tanaman, obat pembasmi hama, dan lain-lain), dan jaminan pemasaran dengan harga yang stabil (*Legislator: Petani Perlu Pendampingan Kelola Perkebunan*, <http://www.antarababel.com/berita/3353/legislator-petani-perlu-pendampingan-kelola-perkebunan>, diunduh tanggal 9 Juni 2013 pukul 18.10).

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa lalu budaya pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa secara umum mampu meningkatkan perekonomian dan mendatangkan kemakmuran, meskipun hal itu lebih dinikmati oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa budaya pertanian (sebelum diikuti dengan budaya perkebunan) telah ikut membesarkan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti: Tarumanegara, Padjadjaran, Mataram Kuno, Majapahit, dan Mataram Islam.

Kesuburan tanah di Pulau Jawa secara tidak langsung ikut mendorong pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah penduduk di pulau ini meningkat tajam, hingga dalam waktu kurang dari 200 tahun meningkat lebih dari 28 kali lipat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya dukung Pulau Jawa untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian, prospek budaya pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa pada masa yang akan datang relatif masih dapat dipertahankan. Menyusutnya lahan untuk pertanian dan

perkebunan secara drastis sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dapat diatasi dengan sistem Intensifikasi Pertanian, yang di antaranya melalui peningkatan inovasi dan teknologi pertanian dan perkebunan, sehingga dengan luas lahan yang sama dapat menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang lebih banyak. Meskipun melakukan inovasi dan peningkatan teknologi, mereka tidak meninggalkan nilai-nilai budaya pertanian dan perkebunan yang telah diwarisi dari leluhurnya. Nilai-nilai tersebut dalam pengembangan budaya pertanian adalah pertanian yang ramah lingkungan, seperti: sistem pertanian intensif, tumpangsari, pemenuhan kebutuhan pengairan melalui irigasi dan air hujan, dan sistem pertanian berteras pada lahan miring. Sedangkan pengembangan budaya perkebunan, adalah dengan cara pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) oleh masyarakat.

Di sisi lain, kesejahteraan petani maupun pekebun saat ini belum sesuai dengan harapan. Masih rendahnya kesejahteraan petani dan pekebun bukan disebabkan oleh kurangnya produksi pertanian dan perkebunan yang dihasilkan, melainkan lebih disebabkan oleh sistem kelembagaan dan kebijakan yang belum berpihak pada petani dan pekebun, sehingga walaupun produksi pertanian dan perkebunan tinggi, tetap belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun. Hal ini pula yang menyebabkan tenaga kerja pada kedua sektor ini semakin sedikit, terutama tenaga kerja dari generasi mudanya. Padahal, apabila negara mengalami krisis ekonomi, maka pertanian (dan juga perkebunan) menjadi satu-satunya peluang kerja yang dapat diperoleh kembali. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani harus terdapat sistem kelembagaan dan hukum yang melindungi petani dari praktik-praktik kebijakan yang merugikan pendapatan petani. Sementara di kalangan pekebun harus dilakukan kebijakan yang menguntungkan pekebun, seperti pemberian subsidi dan jaminan pemasaran produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar Kota di Indonesia Menurut Jumlah Penduduk*, http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk, diunduh tanggal 6 Juni 2013 pukul 8.25.
- Irianto S. Gatot. 2009. "Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Pulau Jawa". *Makalah pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan"*. 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Iskandar, Muhammad. 2009. "Pertanian dan Pelestarian Lingkungan: Kasus Partikelir Tanah." *Makalah pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan"*. 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kartodirdjo, Sartono., dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Legislator: Petani Perlu Pendampingan Kelola Perkebunan*, <http://www.antarababel.com/berita/3353/legislator-petani-perlu-pendampingan-kelola-perkebunan>, diunduh tanggal 9 Juni 2013 pukul 18.10
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo ke Tanah Sabrang, Transmigrasi di Indonesia*. cetakan pertama. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia..
- Lombard, Denys. 1996a. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1996b. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1996c. *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka

- Utama.
Perkebunan dalam Lintas Zaman. <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/inventaris-berita/87-lintas-zaman-perkebunan.html>, diunduh tanggal 24 Mei 2013 pukul 10.27.
- Poerwanto, Hari. 2008. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poniman, Aris., Nurwadjedi., Suprajaka. 2009. "Penggunaan Lahan Pertanian di Pulau Jawa: Kajian Khusus Budaya Padi". *Makalah* pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Romahurmuziy, M., *Perkebunan Rakyat Sebagai Lokomotif Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*. http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/wp-content/uploads/2012/04/perkebunan_prosdENIP11_MUDPR.pdf, diunduh tanggal 9 Juni 2013 pukul 22.47
- Salim, Emil. 2009. "Pengembangan Pertanian Berbasis Alam dan Budaya". *Makalah* pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Semedi, Pujo. 2009. "Drinking with The Devil: Plantation Community and The World Capitalism in Java, 1870s–2000s". *Makalah* pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Sirna, I Nyoman. 1993. "Pembangunan Masyarakat Pedesaan yang Terpadu dan Berkesinambungan", dalam *Semiloka Nasional Pembangunan Masyarakat Pedesaan yang Terpadu dan Berkesinambungan*. Jakarta: Project 2 SIRD, IILP, Balitbang Depsos RI. hlm. 17-33.
- Soekmono, R. 1973. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid II*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Sunito, Satyawan. 2009. "Strategi Pertanian P. Jawa di Persimpangan Jalan?". *Makalah* pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Vereenigde Oostindische Compagnie*. https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie, diunduh tanggal 23 Mei 2013 pukul 8.55
- Wahyudi, Sarjana Sigit. 2009. "Gula sebagai Komoditas Ekspor dan Ketimpangan dalam Sistem Pertanian di Hindia Belanda 1870 – 1940". *Makalah* pada Diskusi Ilmiah Kebudayaan: "Satu Abad Kebudayaan Masyarakat di Jawa: Eksistensi Pertanian dan Perkebunan". 3-5 November 2009. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

PERUBAHAN SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEKAL DI DESA SIBAK, KABUPATEN MUKO-MUKO, PROVINSI BENGKULU: Dari Petani Peladang Menjadi Petani Kelapa Sawit

Bambang H. Suta Purwana
Puslitbang Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud
bambangjuta@gmail.com

Abstract

Before 2000s the majority of Pekal people in Sibak Village, South Muko-Muko District, Muko-Muko Regency, Bengkulu Province, were worked as shifted-cultivation farmers (slash and burn cultivation). Since the opening of oil palm plantations in South Muko-Muko District, step by step they has switched to be the oil palm plantation farmers. The research of this article is a qualitative method. In this method, activity for gathering of data is based on participation observation, indepth interview, and study of literature. Based on the analysis, there is a change of economic orientation, from a subsistence economic (just for household need) to be market economic orientation, and from multicultural farming to be a monoculture farming. There is no problem in tranformation of economic system, from subsistence to be market orientation. The succesfull of farmers of Sibak Village are caused by no activity from investors and local government for buying the farmer fields. The impact of the development of oil palm plantation is degradation of co-working (gotong royong). The Pekal people's point of view on custome plan (tanah adat) has changed also, due to the development of oil plantations. They assessed land solely be the most important factor in the economic system of oil plam.

Key worrds: dry cultivation farmer, oil palm plantation, subsistence economic, market economic, transformation

Abstrak

Sebelum tahun 2000 sebagian besar masyarakat Pekal di Desa Sibak, Kecamatan Muko-Muko Selatan, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu bekerja sebagai petani ladang berpindah (*slash and burn cultivation*). Setelah dibukanya perkebunan kelapa sawit secara perlahan mereka beralih menjadi petani kebun kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, serta didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis dapat disampaikan bahwa terjadi perubahan orientasi ekonomi dari ekonomi subsisten (sekedar mencukupi kebutuhan rumah tangga) menjadi ekonomi pasar dan dari sistem pertanian multikultur menjadi pertanian monokultur. Keberhasilan para petani kebun kelapa sawit di Desa Sibak dapat terjadi karena perusahaan maupun pemerintah setempat tidak menerapkan sistem pembebasan lahan pertanian secara paksa, sehingga memungkinkan para petani menjadi pengusaha kebun sawit. Dampak dari berkembangnya perkebunan kelapa sawit ini adalah mudahnya kehidupan gotong royong pada masyarakat Pekal. Di samping itu berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit telah mengubah pandangan mereka terhadap tanah adat, karena mereka menilai tanah semata-mata menjadi faktor produksi yang paling penting dalam sistem perekonomian kelapa sawit.

Kata kunci: petani ladang, perkebunan kelapa sawit, perekonomian subsisten, perekonomian pasar, transformasi.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Pekal di Desa Sibak, Kecamatan Muko-Muko Selatan, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu pada masa lalu merupakan petani peladang yang bercocok tanam padi, jagung,

umbi-umbian, dan beraneka sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga mereka. Setiap keluarga orang Pekal menguasai puluhan hektar tanah ladang, baik yang sedang diolah maupun diistirahatkan atau di-*bero*-kan. Kurang lebih setiap dua tahun sekali mereka berpindah lokasi pembukaan ladang. Tanah bekas ladang yang dianggap sudah tidak subur ditinggalkan agar tumbuh tanaman liar dan berubah menjadi hutan sekunder setelah melewati waktu kurang lebih sepuluh tahun. Melalui sistem rotasi seperti inilah para peladang menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem.

Pada masa lalu hampir tidak pernah terjadi para peladang kekurangan lahan untuk melakukan praktik pembukaan ladang secara berpindah-pindah tempat karena hutan masih terbentang luas. Hutan bagi masyarakat Pekal merupakan basis material penyangga sistem ekonomi perladangan. Hutan juga berfungsi sebagai penyangga kebutuhan bahan pangan penduduk setempat, setiap keluarga bisa mencari buah-buahan, bahan masakan (seperti pucuk rotan dan tumbuhan paku-pakuan) dan tempat berburu binatang liar. Selain itu ada hasil hutan yang bernilai sebagai komoditi, yakni: damar, rotan, dan madu yang dapat menambah *income* rumah tangga petani peladang.

Subsistensi ekonomi rumah tangga peladang berbeda dengan dengan gambaran subsistensi petani sawah. Masyarakat peladang di Muko-Muko Selatan yang mengembangkan sistem pertanian subsisten bukan karena kekurangan lahan pertanian namun karena keterbatasan tenaga kerja dalam rumah tangganya. Lahan yang merupakan cadangan untuk pengembangan usaha pertanian tersedia secara melimpah berupa hutan primer dan sekunder sebenarnya memungkinkan para petani atau peladang untuk mengembangkan ekstensifikasi lahan pertanian. Namun keterbatasan ketersediaan tenaga kerja dalam rumah tanggapelatani peladang dan keterbatasan akses terhadap pasar mengkondisikan mereka untuk mengembangkan sistem pertanian

subsisten.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar di Kecamatan Muko-Muko Selatan telah mengubah tata perekonomian warga masyarakat setempat yakni dari sistem pertanian multikultur dan berorientasi pada subsistensi rumah tangga petani menjadi sistem pertanian monokultur yang berorientasi pada pasar. Tulisan ini bermaksud menggambarkan proses dinamika perubahan sistem perekonomian orang Pekal di Desa Sibak, Kecamatan Muko-Muko Selatan dari petani peladang yang berorientasi pada subsistensi rumah tangga menjadi petani pekebun kelapa sawit yang sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Proses transformasi seperti di beberapa tempat tidak berlangsung dengan baik seperti yang dipaparkan oleh Dewi (2006) di Kabupaten Landak dan Purwana (2005) di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat telah menyebabkan marginalisasi bagi penduduk asli setempat. Mereka justru mengalami kemunduran ekonomi yang menggenaskan di tengah keberhasilan perusahaan perkebunan kelapa sawit mengembangkan usahanya. Apakah proses transformasi ekonomi dari peladang berpindah (*slash and burn cultivation*), sistem pertanian multikultur yang berorientasi subsistensi rumah tangga menuju arah ekonomi perkebunan kelapa sawit yang bersifat monokultur dan berorientasi pasar, dapat memperkuat atau justru memarginalkan secara ekonomi bagi orang Pekal di Desa Sibak? Seluruh data primer dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan pada tahun 2008 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Sibak

Desa Sibak merupakan salah satu dari 11 desa yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Muko-Muko Selatan, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Desa Sibak berada dalam jarak 200 km dari ibukota provinsi dengan prakiraan

waktu tempuh sekitar 4,5 jam perjalanan darat. Waktu tempuh yang relatif lama ini disebabkan kondisi jalan yang turun naik, berkelok-kelok tajam serta rusak parah parah. Kondisi jalan yang buruk ini disebabkan oleh kualitas pengaspalan yang rendah dan pengaruh gempa bumi yang baru saja melanda wilayah Bengkulu Utara pada tahun 2008 sehingga terjadi banyak keretakan di badan jalan.

Dalam monografi Desa Sibak tahun 2007 tercatat 54 orang memiliki tanah sawah dan 83 orang sebagai buruh tani, 114 orang pemilik tanah perkebunan kelapa sawit, dan 17 orang sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Sebagian kecil penduduk Desa Sibak lainnya memiliki mata pencaharian di sektor peternakan, pertambangan galian golongan C, perdagangan, dan jasa, yang meliputi pegawai pemerintahan desa, guru, PNS, TNI, dan pegawai di perusahaan swasta.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sibak pada masa sebelum tahun 2000 adalah petani dengan sistem pertanian ladang berpindah (*slash and burn cultivation*). Pada tahun 2008 hampir 90% warga Desa Sibak beralih mata pencaharian ke usaha perkebunan kelapa sawit. Perubahan pola mata pencaharian ini didorong oleh pembukaan beberapa perkebunan kelapa sawit, seperti PT Daria Dharma Pratama dan PT. Mitra Punding Mas di wilayah Kecamatan Muko-Muko Selatan, serta keberhasilan warga transmigran dalam membuka perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan masyarakat asli Desa Sibak termotivasi untuk membuka sendiri perkebunan kelapa sawit di ladang-ladang mereka.

Masyarakat asli Desa Sibak disebut orang Pekal. Mereka merupakan bagian dari sukubangsa Pekal yang mendiami dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Orang Pekal tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Muko-Muko Selatan di Kabupaten Muko-Muko, Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Ketahun di Kabupaten Bengkulu

Utara. Secara etimologis, kata Pekal bermakna *setengah matang* atau *mengkal*, mentah tidak, matang pun belum. Penamaan ini berkaitan dengan mitologi tentang asal-usul Sukubangsa Pekal yang dianggap memiliki hibriditas identitas, yakni campuran antara Sukubangsa Minangkabau di Sumatera Barat dan Rejang di Bengkulu. Namun versi lain menggambarkan mereka berasal dari campuran Sukubangsa Rejang dan Jambi.

2. Petani Subsisten

Institusi ekonomi suatu masyarakat berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup mereka berdasarkan sistem pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya. Kebudayaan memberikan kerangka pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan warga masyarakat dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kebudayaan juga akan selalu berubah sejalan dengan penemuan atau inovasi baru mengenai cara-cara warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih baik atau lebih memuaskan. Seluruh sistem pengetahuan dan teknologi pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat dikonsepsikan sebagai sistem mata pencaharian.

Dalam naskah klasik etnografi, sistem mata pencaharian petani tradisional seringkali digambarkan secara romantik sebagai suatu jenis ekonomi yang spesifik atau tersendiri dan tidak bisa disamaratakan dengan sistem ekonomi masyarakat modern atau Barat. Sistem perekonomian tradisional demikian memiliki terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem perekonomian masyarakat petani. Sistem mata pencaharian yang dibangun masyarakat petani biasanya digambarkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani, sekedar cukup memenuhi kebutuhan makan seluruh anggota keluarga petani, menggunakan sistem teknologi yang sederhana, serta tradisional ini sering disebut *subsistence economy* atau

household economy. Dalam khasanah literatur antropologiklasik, sistem perekonomian seperti ini sering dikategorikan dalam perspektif substantif. Para pendukung paradigma teori ini percaya bahwa sistem perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Sistem perekonomian merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sehingga tidak dapat digeneralisasikan sebagai sistem perekonomian kapitalistik sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Barat (Hasyim, 1984: 21).

Masyarakat Pekal di Desa Sibak sekitar dua puluh tahun yang lalu dapat dikatakan sebagai masyarakat petani tradisional dengan ciri-ciri *subsistence economy*. Sampai dua warsa yang lalu, orang Pekal masih dikenal sebagai petani peladang dan memperoleh bahan kebutuhan pangan utama dari hasil usaha tersebut. Sistem pertanian seperti itu sering disebut sistem ladang berpindah (*slash and burn cultivation*) karena petani melakukan rotasi dalam membuka, menggarap, dan mem-bero-kan ladang “tidak ditanami”. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk membuka dan menggarap ladang. Ladang dipergunaan sebagai tempat bercocok tanam padi dan sayur-sayuran, di mana padi merupakan jenis tanaman yang terpenting. Sistem perekonomian masyarakat Pekal adalah pertanian subsisten, di mana pola produksi mereka berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah-tangga mereka.

Pada waktu itu Desa Sibak dikelilingi kawasan hutan alam tropis. Apabila ditinjau dari perspektif hubungan faktor demografi dan ketersediaan sumber daya hutan akan nampak keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestariannya. Sistem pertanian ladang berpindah sebagai mata pencaharian penduduk Sibak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi warga Pekal. Praktik pertanian perladangan selama beberapa generasi, sejauh yang terekam dalam tradisi lisan tentang keberadaan orang Pekal di kawasan Ipuh, *pyung* atau nenek moyang

orang Ipuh sudah mengenal sistem pertanian ladang berpindah, terbukti dalam rentang waktu yang panjang tersebut sistem pertanian ini mampu mewujudkan kelestarian fungsi ekonomi dan fungsi ekologis secara seimbang dan mendukung terbangunnya sistem relasi yang harmonis antarkomunitas orang Pekal di kawasan Ipuh.

Pembukaan ladang di Ipuh biasanya dilakukan dengan pembakaran pada musim kemarau, khususnya antara bulan Juni s.d. September. Tahap pertama, peladang akan melakukan penebasan tumbuhan semak belukar untuk dikeringkan dan selanjutnya akan dibakar. Tahap pembakaran semak belukar ini merupakan kegiatan penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja karena semak belukar yang telah kering sangat berguna dalam proses pembakaran batang-batang pohon yang besar. Pada waktu hutan masih lebat dan terhampar luas, petani peladang akan memilih lahan yang subur dengan tanda alam, antara lain pohon-pohon yang tumbuh di tempat tersebut minimal berdiameter 25 cm.

Sistem pertanian ladang sepenuhnya tergantung kepada kemurahan sumber daya alam yang ada di tempat tersebut. Mereka tidak menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanaman, karena sepenuhnya hanya memanfaatkan abu hasil proses pembakaran batang-batang pohon tersebut. Penebangan pohon itupun bertujuan untuk menciptakan ruang yang terbuka sehingga semua tanaman ladang dapat melakukan proses fotosintesis secara sempurna dengan memanfaatkan curahan sinar matahari sepanjang hari. Oleh karena itu tahap pembakaran ladang merupakan tahap yang penting bagi keberhasilan proses peladangan, yakni mempersiapkan lahan yang subur. Agar pembakaran lahan tidak meluas ke lahan tetangga di sekitar lahan yang akan dibakar, dibuat “*pemutus api*” dengan membersihkan ranting dan daun-daun kering dari lahan tadi.

Setelah ladang tersedia, padi biasanya ditanam pada bulan Oktober atau pada waktu jatuh hujan pertama. Saat itu dimulai

aktivitas menugal yaitu membuat lubang di tanah ladang dengan kayu yang diruncingkan ujungnya. Di dalam lubang itu kemudian diletakkan benih padi. Bibit padi sebelum ditanam biasanya dicampur dengan bibit mentimun. Penugalan dan penanaman benih padi dan mentimun itu dilakukan dengan bantuan suatu kelompok kerja kooperatif, warga masyarakat yang merupakan tetangga atau saudara di kampung. Kelompok gotong-royong bergantian mengerjakan ladang, berkeliling pada semua anggotanya sehingga semua ladang bisa diselesaikan dengan baik. Ketika menanam padi, orang-orang dalam kelompok gotong-royong itu berdiri berjajar ke samping (berjejer), secara bersamaan mereka melubangi atau mencocok tanah dengan tugal, mereka bekerja menyeberangi ladang bersama-sama. Kemudian diikuti oleh sebaris wanita yang menaruh bibit padi dan mentimun dalam lubang-lubang tadi. Keluarga yang memiliki lahan perladangan berkewajiban menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh anggota kelompok yang bekerja itu. Jenis tumbuhan yang ditanam di ladang, selain padi dan mentimun juga ubi kayu, jagung, labu, dan berbagai macam sayuran seperti sawi dan bayam. Kelompok kerja ini biasanya terdiri dari warga anggota *kaum*. Kelompok *kaum* ini selain merupakan kelompok sosial yang melakukan sistem resiprositas sebanding, sesama anggota *kaum* terikat oleh kewajiban sosial untuk melakukan pertukaran tenaga dan material untuk dapat hidup harmonis saling bantu-membantu. Namun kelompok kerja kooperatif ini juga dapat terjadi antar sesama tetangga yang sepakat untuk bekerjasama gotong-royong membuka ladang dengan dilandasi prinsip resiprositas sebanding.

Sistem pertanian ini merupakan bentuk adaptasi terhadap ekologi hutan tropis yang terbentang sangat luas. Setiap keluarga mampu membuka ladang antara 2 sampai dengan 4 ha pada satu musim tanam. Mereka bercocok tanam padi ladang, jagung, kacang-kacangan, ubi, dan sayur-sayuran. Pada masa lalu satu keluarga akan kembali mengolah bekas

lahannya setelah berpindah atau ditinggalkan kurang lebih 10 tahun. Bekas ladang itu telah tumbuh menjadi hutan sekunder yang dipenuhi pohon dengan diameter lebih dari 20 cm. Lahan tersebut dianggap sudah cukup subur untuk dibuka kembali menjadi ladang. Selain itu mereka juga menanam pohon karet untuk diambil getahnya. Orientasi ekonomi rumah tangga mereka adalah subsisten atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi yang normal di mana jumlah penduduk relatif kecil dan lahan tersedia cukup luas, maka sistem pertanian berpindah ini cukup *sustainable*, baik dipandang dari sisi kelestarian alam maupun dari sudut subsistensi rumah tangga petani.

Hutan pada masa lalu bagi masyarakat Pekal bukan hanya sekedar kawasan penyangga sistem pertanian ladang berpindah, namun juga merupakan sumber daya ekonomi penduduk. Setiap orang Pekal dapat mencari kayu di hutan untuk membangun rumah mereka dan hutan juga menyediakan sumber protein, khususnya binatang buruan seperti rusa. Namun kurang tepat apabila dikatakan bahwa seluruh usaha ekonomi masyarakat Pekal hanya berorientasi pada kebutuhan subsistensi saja. Orang Pekal mempunyai usaha tani yang lain, yaitu kebun karet. Kebun karet merupakan pengembangan dari ladang berpindah menjadi kebun milik pribadi. Biasanya ladang yang pernah ditanami padi akan ditanami bibit pohon karet dan tanaman keras lainnya, seperti nangka dan durian. Tanaman keras ini bukan hanya sekedar untuk dipetik hasilnya, namun juga berfungsi sebagai tanda bahwa hamparan tanah tersebut telah dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga petani peladang. Hasil dari kegiatan menyadap getah memungkinkan setiap keluarga memperoleh uang tunai. Melalui usaha karet ini berarti sistem pertanian orang Pekal sudah bersinggungan dengan mekanisme pasar yang mengatur sistem fluktuasi harga getah karet. Tanaman karet sudah lama dikenal oleh petani, tidak diketahui pasti kapan karet pertama kali ditanam di wilayah ini. Orang-orang tua

bercerita semenjak kecil mereka sudah terbiasa menyadap getah karet. Pekerjaan menyadap getah karet banyak menyerap tenaga petani apabila pekerjaan di ladang sudah tidak begitu padat, terutama masa setelah menanam padi atau selama waktu menanti musim panen padi. Kegiatan menyadap getah karet dilakukan oleh keluarga petani dimulai pada jam 6 pagi dan selesai sekitar jam 11 siang.

Ladang dan kebun karet mereka kebanyakan relatif jauh dari kampung, satu jam perjalanan ke ladang merupakan hal biasa yang dilakukan penduduk setiap pagi hari. Akibat lokasi ladang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka semakin lama lokasi ladang petani akan semakin jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Namun demikian, lokasi ladang tersebut kebanyakan tidak terlalu jauh dari lokasi ladang sebelumnya. Hal ini disebabkan ada beberapa pertimbangan, yaitu jika para peladang tersebut telah membuat pondok di ladang maka mereka dapat menggunakan kembali pondok tadi. Pertimbangan lainnya jika peladang membuat ladang baru yang berdekatan dengan ladang sebelumnya, maka berbagai tanaman yang sudah ditanam, seperti ubi, tebu, pisang, dan lainnya yang masih tumbuh di ladang lama setelah beberapa bulan ditinggalkan hasilnya masih dapat dipetik.

Selain berladang, mereka juga melakukan pekerjaan lain seperti mencari ikan di sungai dengan menggunakan kail, alat penangkap yang terbuat dari anyaman bambu, atau menggunakan jala. Pekerjaan lainnya adalah berburu rusa. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh kaum laki-laki pada waktu senggang ketika selesai menggarap ladang, misalnya pada masa setelah menebang sambil menunggu proses pengeringan pohon-pohon yang telah ditebang selama kurang lebih satu bulan, juga pada masa antara musim menyiangi padi dan panen. Usaha ekonomi lainnya adalah beternak ayam, kambing, dan sapi. Binatang ternak yang paling banyak dipelihara penduduk adalah ayam dan sapi. Kebanyakan binatang ini dibiarkan berkeliaran dan tidur di

jalan atau kebun.

3. Perubahan Orientasi Perekonomian Petani

Orientasi sistem pertanian masyarakat Pekal mulai berubah ketika pada tahun 1970-an beroperasi beberapa perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di kawasan Kecamatan Ipuh atau sekarang bernama Muko-Muko Selatan. Perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya hutan dengan melakukan penebangan pohon besar bernilai ekonomis tinggi dalam skala besar. Tidak sedikit warga Desa Sibak yang terlibat sebagai tenaga kerja dalam proses penebangan dan pengolahan kayu. Di tepi Sungai Ipuh sampai saat ini masih tersisa bekas bangunan perusahaan pengolahan kayu. Sistem perekonomian “kayu” ini telah mengubah cara pandang masyarakat Pekal tentang sumber daya hutan. Sebelumnya hutan merupakan kawasan komunal tempat penyangga kebutuhan hidup warga masyarakat Pekal. Secara historis kultural, keberadaan hutan dan masyarakat peladang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Pekal memiliki sistem *tanurial* atau sistem penguasaan tanah yang khas serta berbeda dengan masyarakat daerah perkotaan yang sistem kepemilikan dan penguasaan tanahnya bersifat individual. Tanah secara kultural menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Pekal. Tanah bernilai lebih dari sekedar faktor produksi pertanian, namun bermakna kultural, sosial, dan spiritual. Dalam sistem pengetahuan masyarakat Pekal, kawasan tanah adat mereka dibedakan menjadi *petalangan*, *sesap*, *jerami*, *ombu*, dan *dusun*. Tanah *petalangan* adalah tempat warga masyarakat Pekal berladang; *sesap* adalah tanah yang pernah dibuka oleh seseorang, apabila tanah tersebut ditumbuhi semak belukar maka disebut *sesap semak*; *jerami* adalah suatu areal dalam hutan yang sudah dirambah atau sudah dikuasai oleh seseorang dan biasanya di areal tanah tersebut telah tumbuh pohon buah seperti durian dan duku atau sering juga ditanami pohon

karet; *ombu* adalah kawasan hutan yang belum pernah dirambah atau dibuka oleh seseorang; dan *dusun* merupakan kawasan permukiman orang Pekal. Masyarakat Pekal sebagai peladang secara turun-temurun menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari hutan. Hubungan antara seseorang atau suatu rumah tangga peladang dengan tanah hanya dipahami dalam kontes kultural masyarakat Pekal. Semakin intens satu keluarga peladang mengolah sebidang tanah, maka semakin kuat hubungannya dengan tanah tersebut. Penguasaan suatu keluarga peladang terhadap lahan di hutan cukup ditandai bahwa keluarga tersebut diketahui oleh warga pernah membuka ladang di area tertentu.

Legalitas penguasaan atas sebidang tanah adalah pengakuan sosial dari masyarakat dan bukan selembar kertas yang ditandatangani oleh seorang penguasa administrasi pemerintahan. Pola pemanfaatan hutan sebelumnya merupakan bagian dari aktivitas perekonomian subsisten. Dengan beroperasinya HPH, sumber daya hutan dieksploitasi menjadi kegiatan *profit making* yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Masyarakat Pekal selama ratusan tahun telah mengembangkan sistem penguasaan hutan yang terkait dengan sistem perladangan mereka. Pada pihak lain, negara dan pemilik modal swasta berpandangan bahwa sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), oleh karena itu sumber daya hutan dapat dikelola dengan menerapkan prinsip *capital-based forest management* yang dipercaya bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Pemberian hak kepada pihak swasta, yakni pemegang HPH, dilandasi oleh paradigma pembangunan pada masa Orde Baru. Rezim Orde Baru memperkuat basis kekuasaan dan kapasitas negara, salah satunya diukur dari kemampuan negara mengontrol teritorial dan sumberdaya (Barber, 1996: 27). Kemampuan mengontrol teritorial itu diwujudkan dengan penyeragaman sistem pemerintah desa melalui

UU No. 5 tahun 1979, sehingga birokrasi pemerintahan dapat menjangkau secara efektif ke semua wilayah di negara ini sampai daerah paling terpencil sekalipun. Negara juga membangun kapasitas kekuasaannya melalui kontrol terhadap penguasaan sumberdaya. Melalui dua mekanisme tersebut negara mampu menanamkan kekuasaannya hingga menjangkau wilayah pedalaman. Dalam pandangan negara, seluruh wilayah dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara. Oleh karena itu, negara tidak mengakui adanya penguasaan tanah secara adat atau sistem *tenurial* yang berlaku dalam suatu sistem sosial budaya masyarakat tertentu.

Dengan demikian secara sepihak negara dapat menentukan pemanfaatan suatu kawasan hutan dan dapat menentukan siapapun pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola kawasan tersebut. Penetapan kawasan hutan di sekitar Kecamatan Muko-Muko Selatan sebagai daerah eksploitasi sumberdaya hutan, khususnya kayu, merupakan bagian dari penerapan mekanisme kontrol kekuasaan negara di wilayah tersebut tanpa harus mempertimbangkan kepentingan dan persetujuan masyarakat Pekal sebagai penduduk asli di wilayah tersebut. Demikian juga dengan pembukaan beberapa Satuan Permukiman (SP) Transmigran dari Jawa di wilayah Kecamatan Muko-Muko Selatan dapat dipahami dalam konteks kepentingan ekonomi politik negara untuk menjalankan kontrol kekuasaannya.

Perubahan pola penguasaan sumber daya alam memiliki dua peranan penting dalam proses transformasi sosial ekonomi yang berlaku secara makro dan mikro. Secara ekonomis, eksploitasi sumber daya alam yang masif, khususnya hutan menjadi modal pembangunan bagi negara. Transformasi politik menciptakan suatu sistem yang mengklaim sumber daya alam dalam penguasaan negara. Namun, transformasi masyarakat sipil justru mengarah kepada pengikisan daya tahan masyarakat lokal

terhadap marginalisasi dan delegitimasi hak mengelola serta mengolah sumberdaya alam setempat. Dalam situasi seperti itu, merupakan hal yang wajar apabila hutan menjadi arena pertentangan kepentingan komunitas lokal pada satu sisi, dan kepentingan negara serta pemilik modal swasta pada sisi lain.

Warga Pekal yang terlibat dalam proses pembabatan hutan tersebut, baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku *illegal logging*, dengan alasan daripada mereka hanya menonton hutan mereka habis ditebang oleh HPH, seperti PT. Maju di Muko-Muko Selatan, mereka memilih ikut menikmati hasil kayu tersebut. Pada saat itu banyak warga Sibak memiliki “usaha kayu” dengan modal gergaji mesin, yakni sebagai pencari kayu di hutan, terutama kayu meranti, jelutong, ketukau, kepu, dan buai. Bagi warga yang memiliki modal besar dapat mendirikan usaha *sawmill* untuk pengolahan atau penggergajian kayu hasil *illegal logging* yang dipasok dari para pencari kayu di hutan. Di Desa Sibak pernah berdiri usaha *sawmill* dan beroperasi sampai dengan tahun 1996.

Hutan sebenarnya memiliki manfaat tak langsung yang sungguh tak ternilai harganya, yakni sebagai penyangga ekosistem suatu kawasan yang terkait. Hutan tidak semata-mata menjadi basis kehidupan beraneka ragam flora dan fauna saja, namun juga memiliki peran sebagai penyangga keseimbangan ekologis kawasan sekitarnya. Ketika hamparan hutan di Kecamatan Muko-Muko Selatan mulai rusak sebagai konsekuensi eksploitasi sumberdaya hutan dan pembabatan secara besar-besaran, berakibat pada timbulnya bencana alam besar, yakni banjir bandang dan mengakibatkan kerusakan parah di beberapa desa, seperti: Desa Talang Arah, Serai Baru, dan Lubuk Talang di Muko-Muko Selatan. Akhirnya permukiman penduduk di tiga desa tersebut dipindahkan dari tepi sungai ke tempat yang lebih tinggi permukaan tanahnya. Bencana serupa juga menghantam Desa Sibak pada tahun 1989, sehingga warganya dipindahkan dari tepi Sungai Ipuh ke tempat yang lebih

tinggi dari tempat sebelumnya.

Fenomena eksploitasi sumber daya alam dengan cara membatasi habis hutan di kawasan Kecamatan Muko-Muko Selatan ini menegaskan kembali tentang ganasnya privatisasi sumber daya alam sebagaimana yang digambarkan oleh Hardin. Gagasan privatisasi sumber daya alam berkembang luas setelah publikasi *Tragedy of the Commons* oleh Garrett Hardin, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1968. Hardin berpendapat bahwa sumber daya alam sebagai milik umum akan menjadi biang keladi kesemrawutan sosial. Kepemilikan umum atas sumber daya alam akan memupuk tragedi, seperti konflik antarkomunitas untuk memperebutkan hak atau akses terhadap sumber daya alam tersebut. Prediksi Hardin tentang bencana kepemilikan umum berdasarkan gagasan utama bahwa kompetisi adalah kekuatan penggerak dalam masyarakat. Jika individu tidak bersaing untuk memiliki sesuatu, hukum dan aturan akan hilang (Shiva, 2002: 29-31). Privatisasi sumber daya alam, dalam sistem ekonomi liberal merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pasar. Perdagangan dan persaingan bebas dianggap sebagai cara terbaik untuk perekonomian suatu negara. Liberalisasi ekonomi berarti “bebas dari kontrol pemerintah”, termasuk kebebasan untuk melakukan privatisasi sumber daya alam yang semula merupakan *public goods*. Fakihi memperingatkan bahwa awal abad ini merupakan era neoliberal yang akan memangkas peran negara dalam menata atau mengontrol masalah ekonomi. Prinsip dasarnya adalah “biarkan pasar bekerja”. Kepercayaan ini termasuk membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan negara atau pemerintah, apapun akibat sosialnya (Fakihi, 2002: ix-xxi).

Secara politik, pemerintah Orde Baru melakukan dominasi dan hegemoni secara sistematis dalam hampir semua pengambilan keputusan politik, termasuk dalam hal perumusan kebijakan pembangunan di suatu daerah sehingga keterlibatan

masyarakat dalam aspek ini hampir-hampir tidak ada. Orang-orang daerah, termasuk aparat birokrasi di daerah, tidak dipandang merepresentasikan kepentingan daerah, melainkan kepentingan pusat (Purwana, 2003: 85-88). Kekuatan eksternal hadir dalam bentuk ekspansi birokrasi pembangunan yang dirancang dari pusat nyaris tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Loekman Soetrisno menyebut fenomena ini sebagai delegitimasi lembaga negara karena kehadiran lembaga birokrasi negara di daerah tidak berkaitan dengan kepentingan hidup warga masyarakat (Soetrisno et al, 1998: 74). Pada tingkat sosio-kultural mereka hadir dalam bentuk sistem sosial baru yang semakin majemuk dengan tuntutan standar-standar normatif dan nilai-nilai kebudayaan yang semakin beragam (Soetrisno et al, 1998: 71). Masyarakat Pekal yang secara kultural dan turun-temurun merawat hutan yang ada di kawasan Kecamatan Muko-Muko Selatan tidak pernah dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

4. Petani Kelapa Sawit

Terjadinya banjir besar yang pernah terjadi di Desa Sibak menjadi pertanda bahwa kawasan hutan primer dan sekunder di sekitar Muko-Muko Selatan telah rusak karena proses eksploitasi yang dilakukan oleh HPH, *illegal logging*, dan penduduk setempat. Setelah kayu ditebang, pemerintah memberi peluang pihak swasta untuk membuka perkebunan di wilayah Kecamatan Muko-Muko Selatan dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar bekas *illegal logging*. Tahun 1985, PT. Dana Dharma Pratama (DDP) membuka usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan *crude palm oil* (CPO) seluas 7000 ha, setelah memperoleh izin dari Gubernur Bengkulu No. 851 tahun 1984 tertanggal 24 Desember 1984, (Karsyawan, 2003).

Pada era pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan besar bertujuan untuk meningkatkan investasi modal

asing dan swasta. Maksud lain dari pembukaan perkebunan kelapa sawit juga untuk memperluas sumber devisa baru setelah memudarnya ekspor minyak bumi. Perkembangan perkebunan kelapa sawit mendapat prioritas utama karena pemerintah berupaya memperkuat basis perekonomian nasional melalui penguasaan dan eksploitasi sumberdaya alam secara maksimal. Pemerintah memandang penting kedudukan perkebunan kelapa sawit dalam struktur perekonomian negara, sehingga pemerintah memberi fasilitas yang paling penting bagi keberadaan perkebunan kelapa sawit, yakni fasilitas untuk memperoleh tanah dan buruh yang murah serta perlindungan yang diberikan pemerintah kepada investor, seperti kemudahan dalam perizinan melalui deregulasi kebijakan, fasilitas permodalan melalui kredit lunak dari bank-bank pemerintah, tenaga kerja murah, dan pembebasan dari sewa tanah dengan pemberian Hak Guna Usaha (Purwana, 2005: 100-101).

Perkebunan besar selalu membutuhkan penguasaan tanah yang luas dan tenaga kerja yang sangat besar, seringkali jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di “pasar” masyarakat lokal di sekitar perkebunan. Oleh karena itulah diciptakan mekanisme “ekstra pasar”, yakni kuli kontrak dan transmigrasi (Wiradi, 2002: viii). Program transmigrasi di Kecamatan Muko-Muko Selatan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan perkebunan melalui mekanisme “ekstra pasar”. Di wilayah Kecamatan Muko-Muko Selatan semenjak tahun 1985 dibuka 8 SP (Satuan Permukiman) transmigran.

Perkebunan kelapa sawit cenderung terus berkembang di berbagai tempat di Indonesia karena permintaan pasar global terhadap minyak kelapa sawit terus meningkat. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia modern saat ini banyak sekali memanfaatkan hasil olahan dari minyak kelapa sawit, seperti margarin, selai roti, minyak goreng, sabun, shampo, deterjen, kosmetik, lilin,

cat, resin, dan krayon. Sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan tersebut, kebutuhan akan pasokan minyak kelapa sawit terus membumbung tinggi melampaui minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak biji kapas, dan minyak kelapa (Madanika, Telapak Indonesia; Puji Jaji, 2000: 1). Kebutuhan minyak kelapa sawit di pasar global yang sangat tinggi, telah mendorong Indonesia untuk memacu ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Sejak tahun 1980-an, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memperlancar bagi proses konversi kawasan hutan dan lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Termasuk di dalamnya beragam kemudahan dan insentif bagi investor swasta untuk berusaha dalam subsektor ini. Sebaliknya tidak ada kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang termarginalkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit ini (Madanika; Telapak Indonesia; Puji Jaji, 2000: 4).

Dari perspektif ekonomi politik¹, nampak

sekali Pemerintah Indonesia memberikan proteksi dan kemudahan yang berlebihan kepada para investor di bidang perkebunan kelapa sawit. Pemerintahan Orde Baru, mengarahkan pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sektor penghasil devisa negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai dengan tahun 1980 luas lahan mencapai 294.560 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Sejak saat itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat, terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program Perkebunan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun). Dalam pelaksanaannya, perkebunan besar sebagai inti membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma. Perkembangan perkebunan semakin pesat lagi setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan, yaitu PIR-Transmigrasi sejak tahun 1986. Program tersebut berhasil menambah luas lahan dan produksi kelapa sawit. Pada tahun 1990-an, luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 1,6 juta hektar yang

1 Istilah ekonomi politik –*political economy*—biasa digunakan dalam disiplin ekonomi khususnya ekonomi klasik yang mempelajari tentang proses ekonomi. Istilah “ekonomi politik” menggambarkan kenyataan bahwa ilmu ekonomi lebih memperhatikan secara langsung interrelasi antara teori ekonomi dengan kegiatan politik. Marx juga menulis dalam salah satu karyanya, digambarkan dalam tulisannya tersebut sebagai “kritik terhadap ekonomi politik” dan penolakan terhadap sementara pendapat bahwa tata kapitalis merupakan sesuatu yang alamiah. Pemakaian kembali istilah ekonomi politik oleh ekonom dan sosiolog bermaksud untuk menyegarkan dan menyesuaikan kembali analisis sosio-ekonomi dan ekonomi modern dalam suatu cara kembali pada perhatian utama dalam ekonomi awal, yakni karya Marx yang menegaskan kembali bahwa tata ekonomi itu bukan sesuatu yang alamiah, namun tidak lepas dari kepentingan politik dari golongan tertentu (Jary dan Jary, 1991: 476). Perspektif ekonomi politik merupakan salah satu dari perspektif dalam kajian sosiologi ekonomi, yang dikenal dengan istilah *the authority approach*. Secara umum kajian dalam kerangka pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan tentang kenyataan saling hubungan antara negara dengan sektor swasta, saling

hubungan antara negara dengan perusahaan swasta, dan struktur kekuasaan dalam jaringan usaha swasta (Hamilton dan Biggart, 1992: 181-200). Ekonomi politik dapat dijelaskan sebagai analisis terhadap pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak lainnya yang melibatkan pendayagunaan sumber-sumber daya yang pada umumnya langka dan dimiliki oleh golongan orang tertentu. Rachbini (1994: 65) menyatakan bahwa ilmu ekonomi politik dapat menjadi jembatan untuk memahami realitas dan proses ekonomi yang berkaitan dengan proses politik. Ismail (1993: 3-4) menyatakan bahwa melalui kajian dengan perspektif ekonomi politik maka akan dapat diketahui seberapa besar peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu melalui perspektif ekonomi politik dapat dipertanyakan seberapa besar kepentingan petani peserta PIR-Bun dan petani atau masyarakat setempat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan PIR-Bun kelapa sawit selama ini.

tersebar di berbagai sentra produksi, seperti Sumatera dan Kalimantan (Fauzi, dkk, 2002: 3-4). Antara tahun 1994-1998 konsumsi global minyak kelapa sawit telah meningkat dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 ton. Diprediksi semakin kuat pasaran global seiring dengan kenaikan tuntutan konsumen sebesar 50% selama beberapa tahun ke depan (Madanika; Telapak Indonesia; Puji Jaji, 2000: 3-4).

Kebijakan pemerintahan Orde Baru untuk memacu pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prioritas pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan makro ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu diartikan sebagai peningkatan devisa negara dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Pada awalnya pemerintah mengandalkan kenaikan devisa negara melalui hasil ekspor minyak, namun ketika harga minyak di pasar dunia mulai turun, pemerintah mengalihkan perhatiannya pada sektor ekonomi kehutanan dan *agroforestry*. Sumber daya hutan dianggap sebagai “tambang minyak” yang baru sehingga pemerintah memacu upaya eksploitasi sumber daya hutan secara maksimal. Kemudian muncullah berbagai produk perundang-undangan yang bertujuan untuk melegalisasi dan melegitimasi eksploitasi sumber daya alam tersebut. Pemerintah menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti: UU Pokok Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Penataan Ruang, sebagai instrumen utama dalam pengambilalihan sumber-sumber daya hutan milik komunitas-komunitas lokal dan secara kolusif serta nepotis diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta tertentu maupun BUMN.

Sepanjang dekade 1990-an, dua juta hektar lahan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tahun 2003 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit berlokasi di Sumatera. Sebagian besar lahan kelapa sawit berasal dari hutan hujan tropis dataran rendah, sebelum proses *land clearing* berlangsung. Modus utama yang dilakukan untuk mendapatkan lahan

perkebunan kelapa sawit adalah dengan mengkonversi hutan. Cara ini dilakukan karena dua alasan, pertama, perkebunan kelapa sawit membutuhkan areal luas, sedangkan lahan yang tersedia adalah hutan atau kawasan berhutan; kedua, pengusaha perkebunan akan memperoleh keuntungan tambahan dari hasil tebangan kayu melalui fasilitas Izin Pemanfaatan Kayu (Anonim, 2003).

Kehadiran perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO di wilayah Desa Sibak secara bertahap sangat berpengaruh terhadap proses perubahan sistem mata pencaharian warga setempat. Pada masa awal pembukaan perkebunan tersebut, sebagian besar tenaga kerja di Desa Sibak terserap dalam kegiatan pembukaan lahan, seperti penebangan pohon, pembersihan semak belukar, dan pembakaran batang pohon beserta dengan semak belukar yang telah kering. Kemudian ketika proses rekrutmen pegawai perusahaan tersebut berlangsung, banyak warga Desa Sibak yang terdaftar sebagai tenaga kerja lapangan dengan status tetap atau buruh harian lepas, keamanan, dan administrasi kantor. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit seluas ribuan hektar membutuhkan banyak tenaga kerja dalam semua tahap budi daya tanaman sawit di areal perkebunan.

Pada waktu itu orang Pekal terdorong untuk menjual tanah mereka untuk keperluan membangun rumah, memenuhi biaya menikahkan anak, dan membeli kendaraan bermotor. Penguasaan lahan yang luas ini sebagai konsekuensi dari sistem pertanian ladang berpindah, sehingga orang-orang Pekal dapat menguasai puluhan hektar tanah *sesap semak* dan tanah *jerami* di semua bekas ladang yang pernah dibukanya. Pada sisi lain pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit juga sangat berminat untuk memperluas kebun usahanya karena kapasitas produksi satu pabrik pengolahan CPO biasanya membutuhkan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dari 10.000 ha kebun kelapa sawit, sedangkan PT. DDP sampai dengan tahun 2001 luas perkebunan sawit yang dikuasainya

baru mencapai 678.607 ha (Karsyawan, 2003: 25). Meningkatnya kebutuhan perusahaan dan warga transmigran untuk membuka kebun kelapa sawit dan kecenderungan warga setempat untuk menjual tanah menyebabkan lahan untuk pembukaan ladang berpindah bagi warga Desa Sibak bisa dikatakan habis pada tahun 1990. Namun pada waktu yang sama, warga transmigran yang membuka kebun kelapa sawit mulai menikmati hasil usahanya.

Warga transmigran mulai membangun rumah permanen yang relatif bagus; membeli kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil; serta membiayai anak-anak mereka bersekolah di Kota Bengkulu atau di Jawa. Sejak saat itu, orang Pekal di Desa Sibak dan desa-desa sekitarnya mulai tertarik untuk membuka kebun kelapa sawit sendiri. Secara bertahap orientasi perekonomian warga Desa Sibak dan sekitarnya mulai bergeser dan meninggalkan usaha ladang berpindah menjadi petani sawit. Namun, sebagian dari mereka sampai saat ini ada yang masih mempertahankan usaha kebun karet.

Warga Desa Sibak yang relatif awal memulai usaha kebun sawit pada saat ini sudah menikmati kesejahteraan ekonomi yang cukup tinggi. Pada saat penelitian berlangsung, 1 ha kebun kelapa sawit berumur 3 tahun dapat menghasilkan 800 kg TBS, dalam waktu satu bulan dapat dipanen dua kali dengan harga TBS di kebun Rp 1.320,- per kg, sedangkan harga di pabrik Rp 1.420,- per kg. Namun demikian rata-rata terendah perolehan petani kelapa sawit setiap hektar untuk setiap bulan adalah 1 ton TBS. Apabila harga 1 kg TBS di kebun Rp 1.320,-, maka pendapatan kotor setiap petani kelapa sawit terendah adalah Rp 1.320.000,- untuk setiap hektar kebun kelapa sawitnya. Usia tanaman kelapa sawit juga menentukan kapasitas produksinya. Puncak produktivitas pohon kelapa sawit adalah antara umur 7 sampai 15 tahun. Tidak sedikit warga Desa Pekal pada saat ini memiliki puluhan hektar kebun kelapa sawit. Pada tahun ini di Desa Sibak terdapat 127 KK

pemilik kebun kelapa sawit dengan total luas 360 ha dan diperkirakan pada tahun 2008 ini akan bertambah 40 ha kebun kelapa sawit baru yang dibuka. Besarnya minat warga untuk menanam kelapa sawit karena di Kecamatan Muko-Muko Selatan terdapat dua pabrik CPO, yakni PT Daria Dharma Pratama dan PT Mitra Punding Mas, dengan kapasitas masing-masing 30 ton TBS per jam, sehingga petani kelapa sawit relatif mudah menjual TBSnya. Pertimbangan lain adalah usaha pertanian ladang berpindah sudah tidak memungkinkan dilakukan lagi karena keterbatasan lahan yang ada. Selain itu biaya membuka ladang untuk menanam padi pada saat ini harus menyediakan dana sekitar Rp 3.900.000,- per ha untuk serapan tenaga kerja, sedangkan hasil padi yang diperoleh diperkirakan hanya 3 ton gabah kering per tahun seharga kurang lebih Rp 6.000.000,-.² Biaya produksi itu dianggap sangat mahal karena dengan biaya yang hampir sama seorang petani dapat membuka satu ha kebun kelapa sawit. Biaya pengolahan ladang sebesar itu saat ini sudah bisa dibeli untuk satu ha tanah kosong meskipun lokasinya jauh dari dusun bahkan bisa dicapai antara tiga sampai empat jam jalan kaki. Pada saat ini seluruh penggunaan tenaga kerja dalam sistem pertanian tidak dapat lagi menggunakan cara bergotong-royong atau

2 Perincian biaya membuka ladang untuk menanam padi per ha adalah sebagai berikut: membayar 10 orang selama satu hari kerja untuk *nebas* dengan upah Rp 30.000,- per orang untuk satu hari kerja; membayar 15 orang selama satu hari kerja untuk *nebang* pohon dengan upah Rp 40.000,- per orang untuk setiap hari kerja; membayar 20 orang selama satu hari kerja untuk *mandu* (membakar pohon dan semak belukar) dengan upah Rp 40.000,- per orang selama satu hari kerja; membayar 10 orang selama satu hari untuk *nugal* dengan upah Rp 40.000,- per orang untuk satu hari kerja; membayar 10 orang selama satu hari untuk menyemai bibit padi dengan upah Rp 30.000,- per orang untuk satu hari kerja; membayar 10 orang selama satu hari untuk menyiangi rumput dengan upah Rp 30.000,- untuk satu hari kerja; dan membayar 30 orang untuk memanen padi selama satu hari dengan upah Rp 30.000,- per orang selama satu hari kerja.

pertukaran tenaga kerja antarrumah tangga petani. Sistem gotong-royong dalam pertanian mulai ditinggalkan semenjak warga Desa Sibak tidak lagi melakukan budi daya tanaman padi dengan sistem perladangan.

Perkebunan sawit di Kecamatan Muko-Muko Selatan telah menciptakan *multiplier effect* bagi kesejahteraan warga Pekal. Sebagai contoh saat ini terdapat 25 orang warga Desa Sibak yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT DDP dan lebih dari 100 orang bekerja sebagai buruh harian. Upah buruh angkut TBS di perusahaan relatif baik, yakni Rp 29.800,- per hari/orang dengan target kerja mengangkut 125 TBS. Dengan demikian satu bulan kerja seorang buruh angkut TBS dapat memperoleh penghasilan Rp 894.000,-.

Selain buruh angkut TBS dari kebun ke atas truk, ada juga buruh bongkar dari truk ke gudang pabrik dengan upah Rp 4.500,- per ton. Dalam satu hari seorang buruh bongkar harus berbagi dengan pihak pemerintah desa dan *kaum*, yakni: 50% untuk kas desa, 20% untuk *kaum* yang sedang mendapat giliran untuk bertindak sebagai pengawas, dan 30% untuk upah buruh yang bersangkutan.

Dengan demikian, pendapatan seorang buruh bongkar TBS sehari sekitar Rp 37.800,-. *Kaum* dalam masyarakat Pekal dapat dikatakan sebagai institusi sosial yang terbentuk dari ikatan darah berdasarkan garis keturunan ibu. *Kaum* dalam sistem sosial masyarakat Pekal memiliki fungsi yang penting karena institusi politik desa juga terkait dengan *kaum*. Jabatan kepala desa digilir menurut jumlah *kaum* yang ada di Desa Sibak, demikian juga komposisi pamong desa mempresentasikan konfigurasi *kaum* ini. Dalam kaitannya dengan retribusi yang dibayarkan pihak pabrik untuk ongkos bongkar TBS ini, dalam setiap bulan terdapat pergantian *kaum* yang bertindak sebagai tim pengawas kegiatan bongkar TBS ini. Dalam setiap bulan terdapat pergantian *kaum* yang bertindak sebagai tim pengawas, yakni setiap tanggal 15 terjadi proses pergiliran perwakilan *kaum* yang menjadi tim pengawas. Sistem pengaturan dan pelaksanaan kegiatan

pergiliran perwakilan *kaum* ini selalu dibahas dalam musyawarah desa. Setiap bulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Desa Sibak dari retribusi angkutan TBS ini rata-rata sebesar Rp 4.000.000,-.

Usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki warga Desa Sibak juga membuka peluang kerja baru, yakni bekerja sebagai buruh petik kelapa sawit. Buruh *dodos* yang mengambil TBS dari pohon biasanya dilakukan buruh laki-laki, sedang buruh angkut TBS dari kebun ke atas truk dapat dilakukan oleh buruh laki-laki dan perempuan. Buruh perempuan sering disebut sebagai buruh gendong, khususnya untuk mengangkut butir-butir buah sawit yang rontok. Sistem pengupahan yang berlaku untuk upah borongan biasanya Rp 100,- per kg untuk semua kategori tenaga buruh tersebut. Selain itu, banyak juga warga desa yang bekerja sebagai buruh *nebas* rumput di kebun-kebun kelapa sawit milik penduduk dengan upah Rp 28.000,- per hari. *Multiplier effect* lain dari usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Sibak adalah berkembangnya penyediaan jasa pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik. Di Desa Sibak, pada saat ini terdapat 12 keluarga yang memiliki usaha jasa pengangkutan TBS dengan truk. Jumlah seluruh truk yang dimiliki oleh 12 keluarga tersebut adalah 24 buah. Selain itu ada 26 keluarga yang menyediakan jasa pengangkutan TBS dengan kendaraan *pick-up*, masing-masing keluarga memiliki satu kendaraan *pick-up*. Setiap truk dalam satu hari bisa mengangkut TBS dari kebun ke pabrik sebanyak 3 kali, dengan kapasitas angkut 7 ton. Selama satu hari setiap truk dapat mengangkut TBS seberat 21 ton, sementara ongkos angkut TBS dari kebun ke pabrik adalah Rp 100,- per kg. Dengan demikian penghasilan kotor yang diperoleh pemilik truk sekitar Rp 2.100.000,-. Adapun kapasitas angkut satu kendaraan *pick-up* adalah 1,5 ton, dalam satu hari dapat mengangkut TBS 3 kali, dengan demikian penghasilan kotor yang diperoleh pemilik *pick-up* setiap hari sebesar Rp 450.000,-. Gambaran lain tentang

multiplier effect dari keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dinikmati warga Desa Sibak dapat ditunjukkan dari data, bahwa di desa ini terdapat 201 bangunan rumah permanen (atau 32,68% dari seluruh bangunan rumah di Desa Sibak) yang sebagian memberikan kesan cukup mewah, serta terdapat 111 buah sepeda motor yang dimiliki warga desa ini.

Multipilereffect dari sistem perkebunan kelapa sawit selain dalam bidang ekonomi yang dirasakan penduduk Desa Sibak lainnya adalah munculnya kecenderungan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak mereka untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik di Bengkulu maupun di Jawa. Pada saat ini sudah ada 15 orang sarjana dari Desa Sibak. Dalam tiga tahun terakhir ini juga ada beberapa orang yang melakukan ibadah haji dengan memanfaatkan hasil perkebunan kelapa sawit. Tahun 2006 ada 6 orang yang pergi haji dari Desa Sibak.

Mata pencaharian lain penduduk Desa Sibak adalah usaha perkebunan karet, terdapat 50 ha kebun karet di wilayah desa ini. Usaha karet sebenarnya sudah lama dirintis oleh warga desa, khususnya ketika mereka masih melakukan sistem pertanian ladang berpindah. Menyadap getah adalah pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga petani mulai jam 6 pagi hingga sekitar jam 11 siang. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan selama musim hujan karena pori-pori kulit pohon karet yang sudah disayat akan tertutup oleh cairan air hujan dan seandainya getahnya keluar akan lebih terhambur dari wadah penampung yang disediakan karena terbawa oleh tetesan air hujan. Hasil usaha karet ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani apabila luas kebun karetnya mencapai paling sedikit 0,5 ha dengan pendapatan satu hari 5 kg getah karet, kurang lebih seharga Rp 40.000,-.

Peternakan sapi, kerbau, dan kambing juga merupakan mata pencaharian sebagian penduduk Desa Sibak. Tercatat di monografi desa bahwa 37 orang beternak sapi, 11 orang memelihara kerbau, dan 21 orang

mengembangkan usaha peternakan kambing. Kebanyakan hewan tersebut pada waktu siang hari dilepas di areal perkebunan kelapa sawit dan pada malam hari dimasukkan ke dalam kandangnya. Namun, tidak sedikit juga kerbau dan sapi pada malam hari dibiarkan tidur di areal perkebunan kelapa sawit. Pekerjaan menanam padi masih dipertahankan oleh 54 orang di sawah tadah hujan mereka. Pada saat ini sudah tidak ada lagi orang mengusahakan penanaman padi di ladang berpindah karena kawasan untuk ladang sudah habis untuk areal perkebunan kelapa sawit, baik yang dikuasai oleh perusahaan maupun keluarga petani sendiri.

5. Basis Struktural Pemilikan Lahan sebagai Penopang Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran petani tradisional yang terikat oleh adat istiadat gotong-royong, melihat permasalahan sosial dan ekonomi dalam perspektif kepentingan kolektif. Usaha perekonomian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani atau sering disebut perekonomian subsisten, sudah tidak ditemui lagi pada masyarakat Pekal di Desa Sibak. Gambaran James Scott (1976) yang romantis tentang petani tradisional yang menganut gaya hidup tolong-menolong, *non profit oriented*, dan melihat permasalahan ekonomi dari kepentingan kolektif, serta terikat moral ekonomi yang mendahulukan selamat dari pada mencari keuntungan maksimal dalam usahanya. Karakteristik kehidupan petani seperti ini tidak terdapat dalam diri petani warga komunitas Pekal di desa ini. Moralitas mendahulukan selamat inilah yang menjadi faktor kunci dalam pendekatan moral ekonomi untuk menjelaskan mengapa para petani menolak perubahan, terutama komersialisasi pertanian dan inovasi teknologi baru, seperti benih tanaman varietas baru maupun inovasi teknologi pengolahan lahan, serta teknologi produksi pascapanen yang padat modal (Ashar, 1999: 16). Namun fenomena yang terjadi di Desa

Sibak menunjukkan hal yang sebaliknya. Para petani secara bertahap dapat meninggalkan sistem teknologi tradisional dalam pengolahan ladang berpindah, kemudian berubah dengan mengadopsi teknologi baru dalam sistem budi daya tanaman kelapa sawit.

Mungkin perspektif teori Popkin (1979) lebih dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di Desa Sibak. Popkin membangun perspektif teoritisnya berdasarkan premis bahwa perilaku manusia selalu dilandasi motif mencari keuntungan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Basis premis yang dikembangkan Popkin adalah setiap individu, termasuk petani di mana pun, memiliki kebebasan untuk memilih perilaku yang paling efisien guna mencapai keuntungan yang maksimal bagi dirinya. Relasi sosial dalam perspektif Popkin merupakan perjuangan kepentingan ekonominya sendiri, bukan dilandasi oleh pertimbangan moral kolektif.

Dalam konsepsi Popkin, setiap petani dalam komunitas petani pada dasarnya termotivasi menuntut keuntungan dari tindakan kolektif dengan partisipasi sekecil mungkin. Petani merupakan individu-individu yang bebas mengembangkan kreativitasnya secara rasional. Petani adalah manusia biasa, sama dengan kebanyakan orang lain yang menginginkan hidup sejahtera. Petani pada dasarnya bersifat rasional individual dan berusaha memaksimalkan keuntungannya. Gambaran tentang petani Pekal di Desa Sibak ini juga mempertegas perspektif ekonomi formalistik dalam khasanah literatur antropologi klasik yang menyatakan bahwa masyarakat yang telah mengenal sistem ekonomi kapitalis akan kehilangan ciri-ciri tradisionalnya. Namun deskripsi tentang perubahan sistem perekonomian yang terjadi pada masyarakat Pekal di Desa Sibak harus diberi catatan kritis bahwa masyarakat semenjak awal tidak memiliki permasalahan struktural sebagaimana yang digambarkan oleh Scott tentang petani-petani gurem (petani yang memiliki maupun menguasai lahan pertanian yang sempit), sehingga menolak

sistem komersialisasi pertanian. Petani di desa ini memiliki basis struktural yang cukup kuat, yakni mereka memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga ketika berkembang sistem pertanian modern yang berorientasi pasar, para petani pada dasarnya memiliki salah satu faktor produksi yang utama, yaitu tanah yang cukup luas sehingga dengan cepat dapat merespon perubahan ekonomi ke arah perekonomian yang kapitalistik dengan baik.

Basis struktural petani di Desa Sibak yang kuat ini dapat terjadi karena tidak ada upaya pembebasan tanah secara paksa maupun secara terselubung, sehingga para petani masih memiliki dan menguasai lahan pertanian dalam jumlah yang relatif luas. Penekanan mengenai basis penguasaan tanah yang cukup luas oleh para petani di Sibak ini penting sebagai bahan perbandingan dengan temuan Dewi (2006) tentang kehidupan para petani plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Petani plasma dalam perkebunan kelapa sawit di PTPN XII Ngabang, Kabupaten Landak, setelah tiga dasa warsa berubah menjadi petani gurem kelapa sawit karena pada awal tahun 1980-an, pihak perusahaan bekerjasama dengan aparat pemerintah memberlakukan pembebasan tanah dengan pendekatan represif. Para petani peladang dipaksa untuk melepaskan tanah mereka. Setiap keluarga peladang biasanya menguasai puluhan hektar ladang kemudian diambil-alih paksa oleh perusahaan dan setiap keluarga diberi jatah 2 hektar kebun kelapa sawit. Setelah 30 tahun berlangsung, keluarga petani plasma kelapa sawit ini harus membagi kebunnya dengan anak-anak mereka yang sudah berkeluarga, kemudian berkembanglah massa petani gurem kelapa sawit yang miskin dan sebagian dari mereka terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan “mencuri” TBS di kebun inti milik perusahaan.

C. PENUTUP

Harus diakui bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan

Muko-Muko Selatan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Mata pencaharian penduduk Desa Sibak banyak berubah seiring dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Secara perlahan namun pasti penduduk Desa Sibak meninggalkan pola bercocok tanam tradisional di ladang-ladang mereka dan memanfaatkan peluang ekonomi untuk masuk dalam putaran sistem perekonomian perkebunan kelapa sawit, baik sebagai pemilik kebun, buruh, maupun penyedia jasa pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik. Secara penuh warga Desa Sibak menerapkan prinsip perekonomian rasional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dari setiap bentuk usaha ekonomi mereka. Mereka telah meninggalkan sistem perekonomian subsisten.

Transformasi sistem perekonomian dari subsisten ke sistem perekonomian yang sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dapat berlangsung dengan baik di Desa Sibak. Bahkan para petani, khususnya yang masih memiliki lahan-lahan pertanian yang cukup luas, dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam sistem perekonomian perkebunan kelapa sawit. Keberhasilan para petani kebun kelapa sawit Desa Sibak dapat terjadi karena mereka memiliki basis kepemilikan lahan pertanian yang cukup luas dan perusahaan maupun pemerintah setempat tidak menerapkan sistem pembebasan lahan pertanian secara paksa, seperti yang terjadi pada kasus di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Pembangunan bidang perekonomian seperti pembukaan perkebunan kelapa sawit pasti menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai dampak yang muncul dalam kehidupan sosial ekonomi orang Pekal di Desa Sibak, antara lain memudahkan kehidupan gotong royong dalam sistem perekonomian orang Pekal. Dahulu ketika mereka membuka ladang, menyemai benih padi dan mentimun, serta ketika mereka

panen di ladang dilaksanakan secara gotong royong yang dilandasi prinsip resiprositas tenaga kerja. Namun, ketika para petani sudah beralih mata pencaharian menjadi petani kebun kelapa sawit, semua kegiatan yang terkait dengan proses produksi di kebun mereka dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga mereka atau mengupah buruh tani untuk memanen dan menaikkan ke dalam truk pengangkut TBS. Keberhasilan orang Pekal mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit telah membuktikan bahwa mereka merupakan petani rasional yang mampu memaksimalkan keuntungan dari peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Sibak telah mengubah pandangan mereka terhadap tanah adat. Mereka menilai tanah semata-mata menjadi faktor produksi yang paling penting dalam sistem perekonomian kelapa sawit. Nilai-nilai kultural yang dahulu melekat pada tanah adat sudah tidak berlaku lagi. Perubahan ini sebenarnya mulai terjadi ketika pemerintah memberikan izin eksploitasi hutan kepada perusahaan HPH yang tidak mengindahkan sistem *tanurial* adat yang berlaku di wilayah Kecamatan Muko-Muko Selatan. Orang Pekal sebagai penduduk asli daerah ini merasa para pekerja HPH yang datang dari luar daerah berbuat semena-mena menebang kayu dalam hutan yang secara kultural merupakan warisan dari nenek moyang orang Pekal. Tidak ingin ketinggalan kesempatan mengeksploitasi sumber daya hutan, banyak orang Pekal yang melakukan pembalakan kayu dalam hutan atau tanah ulayat. Semenjak itu, konsepsi tentang tanah adat atau tanah ulayat semakin memudar, karena tanah dinilai semata-mata menjadi aset ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003, "Dibalik Kerusakan Hutan Indonesia (bagian kedua)", *Intip Hutan*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Ashar, Ipong, 1999, *Radikalisasi Petani Masa*

Orde Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Dewi, Oetami, 2006, "Resistensi Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Perlawanan Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Persero) PIR V Ngabang, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat)". *Disertasi*. Depok; Program Pascasajana, Departemen Sosiologi, Fisipol, UI. Tidak dipublikasikan.

Fauzi, Noer, 2003, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria, Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist.

Hamilton, Gary G. dan Nicole Woolsey Biggart, 1992, "Market, Culture, and Authority: A Comparative Aanalysis of Management and organization in Far East", dalam Mark Granovetter dan Richard Swedberg (Editor), *The Socilogy of Economic Life*. Boulder, San Fransisco, Oxford: Westview Press.

Hashim, Wan, 1984, *Petani dan Persoalan Agraria*. Petaling Jaya: Fajar Bakti SDN, BHD.

Ismail, Nurhasan. 1993. *Aspek Ekonomi Politik Pembentukan Hukum. Studi Kasus: Pembangunan Sektor Perikanan*. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.

Jary, David dan Julia Jary, 1991, *Collins Dictionary of Sociology*. Harper Collins Publisher.

Karsyawan. 2003. "Analisis Perencanaan Laba dan Pengendalian Biaya Produksi Pada Pabrik CPO (Studi Kasus Pada PT.Daria Dharma Pratama Ipuh,Kabupaten Bengkulu Utara)". *Skripsi*. Bengkulu: Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.

Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of

California Press.

Purwana, Bambang H. Suta. 2005. "Babad Babat Sawit di (Hutan) Kalimantan Barat", dalam Budi Susanto (Editor). *Ingat(!)an: Hikmah Indonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat*. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Penerbit Kanisius.

Rachbini, Didik J. 1994. "Perspektif Teori Ekonomi Politik Baru, Kajian Terhadap Negara, Masyarakat, dan Pasar". *Prisma*, Maret, halaman 65-73.

Scot, James. 1976. *The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Shiva, Vandhana. 2002. *Water War: Privatisasi, Profit, dan Polusi*. Yogyakarta: Insist Press dan Walhi.

Soetrisno, Loekman et al. 1998. *Kekeraran Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: Kerjasama P3PK UGM dan Departemen Agama RI.

Wiradi, Gunawan. 2002. "Kata Pengantar", dalam Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press.

PENGARUH AGEN SOSIALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN BUDI PEKERTI REMAJA

Ais Irmawati
Puslitbang Kebudayaan
ais.irmawati@gmail.com

Abstract

The purpose of this analysis was to find out the influence of socialization and to identify which socialization agent was more effect in moral development of adolescence. This paper was a result of literature studies of social agents that influenced the moral development of adolescence. This paper showed there were four socialization agents influenced in some one life, ie: family, school, peer group, and mass media. Amongst them, family was the most dominant socialization agent, from which the child was socialized about everything. Family was the place where child started learning about moral concepts, examples in moral modelling from the parents, spouses whom he admired most. Time flow by when the child reached his preschool, he met other socialization agent that were school and peer groups. This socialization grew until he became an adult. Socialization in his family would determine whether an adolescence accepted or rejected other socialization. When a child felt secure in his former family, he would find out the same concept in his school, peer group, or mass media as he already had.

Keyword: character building, socialization, moral, family

Abstrak

Tujuan kajian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan mengidentifikasi agen sosialisasi yang paling berperan dalam pembentukan budi pekerti remaja. Artikel ini merupakan hasil kajian pustaka mengenai agen-agen sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan budi pekerti para remaja. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat empat agen sosialisasi yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, yaitu: keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa. Di antara empat agen tersebut, keluarga adalah agen sosialisasi yang paling dominan, mengingat keluarga merupakan agen sosialisasi primer tempat seorang anak mulai disosialisasikan tentang banyak hal. Di dalam keluarga, seorang anak mulai mengenal konsep-konsep budi pekerti, contoh-contoh pelaksanaan budi pekerti yang dilakukan oleh kedua orangtuanya sebagai pasangan pertama yang ia kenal, kagumi, dan dipuja menjadi sosok role modelnya. Waktu menginjak usia prasekolah, anak mulai berkenalan dengan agen sosialisasi lainnya, yaitu sekolah dan teman bermain. Sosialisasi ini berkembang semakin meluas sampai usia dewasa. Sosialisasi dalam keluarga akan menentukan apakah seorang remaja akan mengikuti atau menolak nilai yang ditawarkan oleh agen sosialisasi lainnya. Bila seorang anak merasa aman dalam bimbingan nilai sosialisasi dari orangtuanya, dengan konsep seperti itulah dia akan mencari tempat di kehidupannya yang akan datang, baik lingkungan sekolah, *peer group*, maupun pilihan terhadap media massa.

Kata kunci: budi pekerti, sosialisasi, moral, keluarga

A. PENDAHULUAN

Masalah rendahnya moralitas atau budi pekerti semakin mengemuka sejak tahun 1999-an, misalnya kasus mengenai orang yang gagal merampok namun kemudian melakukan pemerkosaan terhadap pembantu rumah tangga (*Kompas*, 23 Juni 1999). Selain itu, seorang tersangka pencuri sepeda motor babak belur dikeroyok massa, bahkan sempat dibakar hingga akhirnya tewas (*Kompas*, 9 Juni 2001), atau peristiwa adu jotos yang dilakukan oleh anggota MPR (*Kompas*, 23 November 2001). Sepuluh tahun lebih berselang, masalah moralitas bukannya menjadi hilang, tetapi bahkan menjadi lebih marak terjadi di masyarakat.

Contoh lainnya adalah tawuran antarpelajar. Menurut data dari Polda Metro Jaya, pada tahun

1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota POLRI, dan tahun berikutnya korban meningkat menjadi 37 korban tewas. Pada tahun 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antarpelajar. Pada 2011, terdapat 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Kemudian pada Januari-Juni 2012, terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. (<http://edukasi.Kompasiana.com/2012/11/11/solusi-tawuran-pelajar-belajarliah-kepada-jepang-502357.html>).

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tawuran, misalnya pada tahun 2000 Dikdasmen Depdiknas Jakarta menerbitkan buku *Pendidikan Budi Pekerti Jilid I dan II*. Pada tahun 2002 Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas juga menerbitkan *Seri Pendidikan Budi Pekerti* untuk tingkat SD sampai SLTA yang termuat dalam salah satu *Seri Kurikulum Berbasis Kompetensi* (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131808332/budi%20pekerti.pdf>). Nampaknya, usaha pemerintah tersebut belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan masih saja terjadi tawuran antarpelajar yang sampai saat ini belum ditemukan akar permasalahannya.

Dalam laman Lampost.co tanggal 11 Februari 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyatakan bahwa pada kurikulum baru, pendidikan agama dan budi pekerti minimal harus diajarkan selama empat jam pada masing-masing sekolah. Ditetapkannya pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam kurikulum tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat perkembangan tingkah laku generasi muda yang mulai memprihatinkan (<http://lampost.co/berita/pramuka-dan-budi-pekerti-wajib-masuk-kurikulum>).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi remaja terhadap pembentukan budi pekerti?

2. Agen sosialisasi manakah yang paling berperan dalam mempengaruhi budi pekerti remaja?

Dengan demikian, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sosialisasi remaja terhadap budi pekerti dan mengidentifikasi agen sosialisasi yang paling berperan dalam mempengaruhi budi pekerti para remaja.

Artikel ini merupakan hasil kajian pustaka terhadap agen-agen sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan budi pekerti para remaja. Ada pun sumber-sumber pustaka yang digunakan sebagai bahan kajian meliputi artikel dari internet, surat kabar, dan buku-buku mengenai sosiologi dan pendidikan. Sumber-sumber pustaka tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui keterkaitan antara aspek yang satu dengan lainnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sosialisasi

Para ahli sosiologi menggunakan istilah sosialisasi untuk merujuk pada pengalaman belajar sosial seumur hidup, di mana individu mengembangkan potensial kemanusiaannya dan mempelajari budaya (Macionis, 1996). Sementara itu, Thomas Ford Hout berpendapat bahwa proses sosialisasi merupakan proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan masyarakatnya (Vembriarto, 1990).

Atas dasar kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar mengenai nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman tingkah laku pembentukan kepribadian seseorang sesuai dengan apa yang diamati, dirasakan, dan diajarkan, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial individu yang bersangkutan.

Beberapa metode yang dipergunakan oleh orang dewasa atau masyarakat dalam memengaruhi proses sosialisasi remaja dapat digolongkan menjadi tiga kategori, sebagai

berikut.

a. Metode Ganjaran dan Hukuman

Tingkah laku yang salah, tidak baik, tercela, kurang pantas, tidak diterima oleh masyarakat mendapatkan hukuman; sedangkan tingkah laku yang sebaliknya mendapatkan ganjaran. Melalui proses ganjaran dan hukuman ini secara perlahan-lahan dalam diri anak berkembang kesadaran akan norma-norma sosial.

b. Metode *Didacting Teaching*

Metode ini mengajarkan anak berbagai macam pengetahuan dan keterampilan melalui pemberian informasi, ceramah, dan penjelasan. Metode ini digunakan dalam pendidikan di sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepramukaan, dan sebagainya.

c. Metode Pemberian Contoh.

Dengan memberi contoh, terjadi proses imitasi (peniruan) tingkah laku dan sifat-sifat orang dewasa. Proses imitasi dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Tertanamnya nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan cita-cita dalam diri anak terutama melalui proses imitasi tidak sadar. Proses imitasi berhubungan erat dengan identifikasi. Dengan identifikasi itu, anak menyatukan diri (secara psikologis) dengan orang lain. Proses imitasi menjadi sangat intensif terhadap orang dewasa manakala anak mengidentifikasikan dirinya.

Selanjutnya, menurut Ihromi, ed. (1999) tahapan sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

- a. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. Pada tahapan ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- b. Sosialisasi sekunder, yang didefinisikan sebagai proses tahapan berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari

dunia nyata di masyarakat. Pada tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme. Sosialisasi sekunder ini meliputi sekolah, teman bermain, dan media massa.

Sosialisasi primer berlangsung sejak anak lahir sampai berusia lima tahun, saat anak mulai mengenal agen sosialisasi lainnya. Adapun agen sosialisasi utama yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang, yaitu keluarga, sekolah, dan teman bermain (*peer group*), serta dipengaruhi pula oleh media massa.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengidentifikasi fungsi keluarga menjadi delapan, yaitu:

- a. *Establishment of emotional, social and economic bonds between the spouses;*
- b. *Procreation and sexual relation between the spouses;*
- c. *Giving name and status, especially to the children;*
- d. *Basic care of children and, in many cultures, of the elderly and relatives with disabilities;*
- e. *Socialization and education of the children and even of the parents;*
- f. *Protection of the family members;*
- g. *Emotional care and recreation of the family members;* dan
- h. *Exchange of good and services*

(United Nations Publications, 1996).

Judith G. Smetana (tanpa tahun) menyatakan bahwa terdapat dua proposisi mengenai peran orangtua dalam perkembangan moral, yaitu; 1) aspek afeksi interaksi alamiah orangtua memudahkan perkembangan moral anak; dan 2) aspek kognisi interaksi orangtua mempermudah perkembangan moral anak.

Berkaitan dengan pola asuh, Baumrind (dalam Berkowitz and Grych, 1998) menjelaskan tiga pola asuh, yaitu pola asuh utama (*parenting styles*) meliputi pola asuh *authorian*; pola asuh *permissive*; dan pola

asuh *authoritative*. Pola asuh *authoritarian* bersifat terlalu banyak kontrol dan tuntutan, tetapi bersikap dingin dalam kasih sayang, bermusuhan, dan biasanya tidak komunikatif. Pola Asuh *permissive* cenderung mencintai dan berkomunikasi namun hanya mempunyai sedikit kontrol dan tuntutan terhadap perilaku yang matang (*mature behavior*). Pola Asuh *authoritative* bersifat mencintai, mengontrol, komunikatif dan mempunyai tuntutan perilaku yang matang terhadap anak-anaknya. Jenis yang terakhir inilah yang dapat menghasilkan karakter anak yang paling positif, termasuk penggunaan moral yang lebih tinggi.

Pada masyarakat modern sekolah merupakan agen utama untuk menyapih anak dari rumahnya, dan memperkenalkannya terhadap masyarakat yang lebih luas. Anak-anak mungkin belajar matematika dan ilmu-ilmu sosial, akan tetapi mereka juga diberi sosialisasi mengenai peran menjadi siswa (Light Jr and Keller, 1982). Kehidupan di sekolah merupakan perubahan drastis dari kehidupan di rumah. Dalam keluarga, hubungan dibangun karena ikatan emosional. Di sekolah, anak diharapkan untuk mematuhi, bukan karena mereka mencintai, namun karena peraturan yang berlaku, dan harus dipatuhi.

Salah satu cara melihat sekolah sebagai institusi yang memengaruhi moral, yaitu membedakan antara kurikulum formal dan informal (Berkowitz and Grych, 1998). Kurikulum formal dalam hal ini merupakan kurikulum yang diajarkan dalam aktivitas pendidikan yang sistematis. Kurikulum informal menumbuhkan pengaruh dari kehidupan sekolah, seperti pembuatan peraturan, norma sekolah, dan perilaku orang dewasa yang dijadikan model.

Untuk mencapai masa dewasa, remaja harus banyak membuat penyesuaian baru. Yang terpenting dan tersulit, yaitu penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, dukungan

dan penolakan sosial, dan seleksi pemimpin (Hurlock, 1980).

Dalam kelompok sebaya, anak mempelajari peranan sosial yang baru. Anak yang berasal dari keluarga yang bersifat otoriter mengenal suasana kehidupan yang demokratis dalam kelompok sebaya. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga demokratis mungkin menghadapi pimpinan yang otoriter dalam kelompok sebaya (Vembriarto, 1990). Ketika dua orang atau lebih, remaja berkumpul dalam sebuah *peer group*, bila mereka berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah yang mempunyai tatanan nilai yang baik, maka jadilah kelompok itu menjadi *peer group* yang baik. Sebaliknya bila mereka merupakan orang-orang yang teralienasi di keluarga atau sekolahnya, jadilah mereka bergabung dalam *peer group* yang menyimpang.

Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi lainnya, yang selain bermanfaat dalam kehidupan masyarakat juga mempunyai efek sosial negatif, misalnya dalam pergeseran nilai budaya dan pemberitaan mengenai perilaku kejahatan. Saat ini media massa dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu media cetak, seperti koran, majalah, dan tabloid; media elektronik, seperti radio dan televisi; dan media digital yang dapat diakses melalui internet. Di antara ketiga media massa tersebut, tampaknya yang paling berpengaruh untuk masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan budaya lisan adalah media televisi.

Banyak tayangan yang semula sebagai tontonan berubah menjadi semacam tuntunan, baik model pakaian dan dandanan artis, maupun perilaku yang tidak senonoh, misalnya tindakan kekerasan dan/atau pornografi. Sebagai contoh ada model mukena Kris Dayanti, yaitu mukena yang dipakai oleh artis Kris Dayanti pada salah satu sinetron televisi lokal; atau merebaknya kaos bola versi *Manchester United (MU)* dalam berbagai ukuran dan bahan. Selain model pakaian dan dandanan, perilaku masyarakat pun banyak meniru adegan televisi. Penyebaran nilai yang tidak mengindahkan norma masyarakat,

misalnya dengan munculnya istilah “EGP” (*emang gue pikirin*), “Ciyus” (serius), dan “Miyapah?” (demi apa?). Ketiga istilah tersebut digunakan untuk menolak ajakan atau anjuran untuk berperilaku baik. Padahal tayangan televisi tersebut seharusnya juga dapat digunakan sebagai transfer informasi yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku mulia. Contoh lain, misalnya pada film kartun. Dibandingkan film Donal Bebek, film Ipin Upin lebih banyak mengajarkan nilai-nilai moral.

2. Pengertian Budi Pekerti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budi pekerti berasal dari kata “budi” dan “pekerti”. Budi berarti: 1) alat batin yg merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk; 2) tabiat, akhlak, watak; 3) perbuatan baik, kebaikan; 4) daya upaya, ikhtiar; dan 5) akal (dalam arti kecerdikan menipu atau tipu daya). Adapun “Pekerti” berarti tingkah laku, perangai, dan akhlak (<http://www.kbbi.web.id>). Jadi, dapat disimpulkan bahwa budi pekerti adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruknya suatu tingkah laku, perangai, dan akhlak.

Menurut Marvin W. Berkowitz di berbagai negara terdapat beberapa definisi mengenai *moral education* yang saling menggantikan. Inggris menggunakan definisi *values education*. Adapun Amerika saat ini memakai *character education*, di mana sebelumnya menggunakan istilah *moral education* dan sebelumnya lagi *values education*. Istilah yang populer di Jepang adalah *morality* (Berkowitz, 1997)

Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. “Moral” berasal dari kata latin *mores*, yang berarti: tatacara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral-peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok (Hurlock, 1990)

Moralitas sosial pada dasarnya berada pada tataran budaya, tetapi juga diinternalisasikan oleh individu (Ritzer, 1992). Bertindak secara moral berarti menaati suatu norma, yang menetapkan perilaku apa yang harus diambil pada suatu saat tertentu dan bahkan sebelum kita dituntut untuk bertindak. Ruang lingkup moralitas, yaitu ruang lingkup kewajiban (Abdullah dan Van Der Leeden, (ed.) 1986).

Tabel 1. Tahapan Perkembangan Psikososial Erikson

<i>Stage</i>	<i>Age</i>	<i>Psychosocial Crisis</i>
1	<i>Infancy (birth to 1½)</i>	<i>Trust vs mistrust</i>
2	<i>Early childhood (1½ to 3)</i>	<i>Autonomy vs shame, doubt</i>
3	<i>Play age (3 to 5)</i>	<i>Initiative vs guilt</i>
4	<i>School age (5 to 12)</i>	<i>Industry vs inferiority</i>
5	<i>Adolescence (12 to 18)</i>	<i>Identity and repudiation vs identity confusion</i>
6	<i>Young adult (18 to 25)</i>	<i>Intimacy and solidarity vs isolation</i>
7	<i>Adulthood (25 to 65)</i>	<i>Generativity vs Stagnation</i>
8	<i>Maturity (65 +)</i>	<i>Integrity vs despair</i>

Sumber: (Dacey and Kenny, 1997)

Menurut Erikson, kemajuan kehidupan manusia melalui rangkaian tahapan yang terdiri atas delapan tahap. Masing-masing tahap ditandai dengan krisis yang harus diselesaikan sebelum individu dapat beranjak (Dacey and Kenny, 1997)

Selanjutnya, secara rinci tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, *basic trust versus mistrust* (lahir sampai dengan usia 1½ tahun). Seorang bayi akan tumbuh menjadi orang yang mempercayai dan menghargai kepercayaan apabila peraturan diterapkan dalam lingkungan kehidupan awalnya. Anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi ketidakteraturan dan perawatan yang tidak memadai, seperti kecemasan dan ketidakamanan, dapat mengakibatkan dampak negatif pada keluarga dan hubungan lainnya, serta akan mengganggu tumbuhnya kepercayaan. Kadangkala seseorang yang tidak mengalami keadaan yang bermasalah pada masa kecilnya dapat kehilangan dasar kepercayaannya karena adanya pengalaman yang merusak di kehidupannya pada masa yang akan datang

Kedua, *autonomy versus shame and doubt* (usia 1½ sampai dengan 3 tahun). Ketika anak mencapai usia 1½ tahun, saat mulai dapat mengontrol tubuhnya, biasanya pada masa *toilet training*, mereka seharusnya telah menginjak tahapan kedua yang ditandai dengan krisis otonomi versus rasa malu dan keragu-raguan. Ketika anak-anak berani mengeksplorasi tubuh dan lingkungannya, berkembanglah tingkat kepercayaan dirinya. Namun, jika ia selalu dicela mengenai ketidakmampuannya melakukan pembuangan, maka mereka mulai meragukan kemampuan dirinya. Hal mengakibatkan timbulnya rasa malu dan ketakutan untuk menguji kemampuan dirinya. Anak pada tahap ini mulai belajar untuk mengatur dirinya dalam setiap pengaturan perilakunya. Walaupun timbul sedikit keraguan mengenai kepantasannya, namun secara umum kontrol diri harus dikembangkan.

Ketiga, *initiative versus guilt* (usia 3 sampai dengan 5 tahun). Bila orang tua dan pihak lainnya membuat anak merasa tidak cakap, mereka akan mengembangkan perasaan bersalah terhadap dirinya. Jika dalam tahapan otonomi mereka merasa dipermalukan oleh orang lain, dalam tahap ini mereka merasa malu terhadap dirinya sendiri.

Keempat, *industry versus inferiority* (usia 5 sampai dengan 12 tahun). Tahapan ini berkaitan dengan masa anak-anak di sekolah dasar. Tugas mereka meliputi peniruan model ideal dan mempelajari dasar teknologi kebudayaan. Anak-anak memperluas cakrawala pandangnya mulai dari keluarga menuju ke lingkungan sekitarnya.

Kelima, *identity and repudiation versus identity confusion* (usia 12 sampai dengan 18 tahun). Tugas utama dari masa remaja adalah mencapai tahapan identitas yang merupakan gambaran seseorang secara keseluruhan. Erikson menggunakan terminologi krisis identitas untuk menggambarkan kebutuhan seseorang akan adanya pengakuan identitas diri tersebut. Bila seseorang berada dalam tahapan identitas, maka sejumlah aspek dari gambaran diri seseorang akan menjadi sama.

Keenam, *intimacy versus isolation* (usia 18 sampai dengan 25 tahun). Pada tahap keenam, hubungan intim dengan orang lain seharusnya berkembang. Yang dimaksud oleh Erikson tidak hanya sekadar hubungan intim secara seksual, melainkan juga kemampuan seseorang berhubungan dengan orang lain dengan mencurahkan harapan dan kekhawatirannya yang terdalam kepada orang lain, serta sebaliknya.

Ketujuh, *generativity versus stagnation* (usia 25 sampai dengan 65 tahun). *Generativity* artinya kemampuan untuk menjadi berguna bagi diri kita sendiri maupun masyarakat. Pada tahap ini seseorang bisa menjadi produktif dan kreatif, dan akan memperoleh pengakuan dan ganjaran berupa material. Pada tahap ini juga ditujukan untuk menghasilkan sesuatu bagi orang lain. Jadi, tindakan untuk menjadi produktif itu sendiri sudah merupakan

ganjaran, tanpa memandang adanya ganjaran berupa material ataupun pengakuan dari orang lain.

Kedelapan, *integrity versus despair* (usia 65 tahun ke atas). Orang dewasa yang telah berhasil mengarungi ke tujuh tahapan terdahulu memperoleh perasaan integritas diri, merasa hidupnya telah dilalui dengan baik. Mereka merasa telah membantu menciptakan kehidupannya untuk diharga orang lain.

Dalam tahap psikososial Erikson ini dapat disimpulkan bila pada tahap pertama anak dibesarkan dalam kecemasan dan ketidakamanan, maka pada usia selanjutnya dia akan mengalami keraguan, rasa bersalah, dan rendah diri, sampai pada masa tuanya ia akan merasa putus asa terhadap keberadaan dirinya. Dapat dibayangkan, jika orang yang merasa rendah diri tersebut menjadi orangtua yang kelak mensosialisasikan nilai pada anaknya, maka nilai seperti apa yang akan diturunkan kepada anak-anaknya di kemudian hari? Sebagaimana pendapat Bruner dalam Curtis, orangtua mempunyai peran kunci dalam membentuk proses pembelajaran anak (Curtis and Hagan, 2005).

3. Pembahasan

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, ada empat agen sosialisasi utama, yaitu: keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa. Di antara ke empat agen sosialisasi utama tersebut, yang paling berpengaruh, yaitu keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Menurut Oetting dan Donnermeyer (tanpa tahun), sumber sosialisasi sekunder hanya dapat bekerja melalui dampak dari sosialisasi primer. Teori ini mengemukakan bahwa sosialisasi primer, --selain akibat adanya ciri-ciri kepribadian, karakteristik komunitas, stres, dan faktor lain yang dapat memengaruhi ikatan sumber sosialisasi primer atau mengubah komunikasi norma melalui sumber-sumber itu--, tidak akan mengakibatkan atau hanya mengubah sedikit dari perilaku yang menyimpang

(<http://www.term-papers.us/ts/fb/peh113.shtml>). Dengan demikian, keluarga sebagai lingkungan pembentukan budi pekerti atau watak yang pertama dan utama, seyogyanya diberdayakan secara optimal. Sebagaimana disarankan Phillips (2000), keluarga hendaklah kembali menjadi "*school of love*", sekolah untuk kasih sayang (Azra, 2012). Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai "*school of love*" atau sebagai "*madrasah mawaddah wa rahmah*", yaitu tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang.

Bila terdapat perbedaan antara nasihat dan perilaku orangtua, maka anak akan lebih memilih meniru perilaku orangtuanya. Konsistensi ucapan dan perilaku orangtua sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan moral seorang anak. Tidak jarang dalam masyarakat kita melihat seorang ibu menyuruh anaknya belajar, di waktu bersamaan ibu tersebut, alih-alih menemani anak belajar, malah menonton sinetron dengan asyiknya. Bahkan bila kemudian anak tersebut menanyakan pelajaran yang tidak dikuasainya, sang ibu akan menjawab, "Sudah sana kerjakan sendiri, (sinetronnya) lagi seru *nih!*" Hal tersebut membuat anak mengalami kebingungan dalam bersikap, lebih lanjut menjadi bingung dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk memilih antara belajar atau bermain. Kesulitan pengambilan keputusan tersebut semakin menjadi ketika seorang anak memasuki masa remaja, saat ajakan teman menjadi sangat menjanjikan dan ikatan anak dengan orangtua sudah tidak lagi kuat. Katakanlah, bila kawan-kawannya mengajak ke acara nonton bareng, ulang tahunan, menghadiri *valentine day*, pertunjukkan tahun baru, dan sejenisnya di sebuah cafe, sementara orangtua tidak mengetahui atau tidak lagi mempunyai kontrol terhadap anak remajanya yang sedang dalam masa pemberontakan, --hal mana terjadi karena anak merasa orang tuanya bukan idola yang layak dijadikan panutan--, maka di saat seperti inilah *peer group* akan memegang kendali yang sangat kuat.

Pembentukan budi pekerti/watak dan bahkan pendidikan karakter melalui sekolah, tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pembelajaran teoritis, tetapi melalui penanaman atau pendidikan nilai-nilai. Secara umum kajian-kajian tentang nilai biasanya mencakup dua bidang pokok, yaitu estetika dan etika (akhlak, moral, dan budi pekerti). Estetika mengacu pada hal-hal yang dipandang manusia sebagai sesuatu yang indah, dan yang disenangi. Etika mengacu pada hal-hal menyangkut tingkah laku yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari agama, adat istiadat, konvensi, dan lain-lain.

Pembentukan budi pekerti (Azra, 2012) merupakan bagian dari pendidikan nilai (*value education*) yang dilakukan melalui sekolah. Hal ini merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab tidak hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, budi pekerti, karakter, dan kepribadian. Usaha pembentukan budi pekerti/watak melalui sekolah secara berbarengan dapat pula dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menerapkan pendekatan “*modelling*” atau “*exemplary*” atau “*uswah hasanah*”, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau keteladanan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi “*uswah hasanah*” (suri teladan) yang dinamis bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang tidak baik. Usaha ini dapat dibarengi dengan langkah-langkah sebagai

berikut.

- a. Memberi penghargaan (*prizing*) dan menumbuhkembangkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang tidak baik;
- b. Menegakkan nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik secara terbuka dan berkelanjutan;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai;
- d. Melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan;
- e. Membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (*husn al-zhan*) serta tujuan-tujuan ideal; dan
- f. Membiasakan bersikap dan bertindak dengan cara yang baik dan diulangi secara terus-menerus dan konsisten sehingga menjadi suatu pembiasaan.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*). Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap bahan kajian/materi ajar nilai di samping mempelajari pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Sejarah, Pancasila, dan sebagainya.

Di masa lalu, ketika guru menjadi seorang panutan yang *digugu* dan *ditiru*, maka dengan hanya melihat sosok guru tersebut saja seorang siswa akan sungkan melakukan hal yang dianggap negatif, bahkan walaupun hanya untuk berbicara tidak sopan. Sekarang, ‘dengan melandaskan’ persamaan hak dan kedudukan, banyak nilai mulia yang dulu dianggap biasa, seperti mengucapkan permissi sambil membungkukkan badan bila lewat di depan guru, atau mencium tangan guru pun sudah banyak memudar. Bahkan tidak jarang ditemui, apabila siswa berjumpa dengan gurunya di luar sekolah, ia berperilaku seolah-olah tidak mengenal gurunya tersebut. Seperti perilaku yang tidak konsisten dalam

keluarga, hal ini dapat terjadi akibat gurunya pun mengatakan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Misalnya, ucapan “Jangan merokok!”, “Jangan memakai rok di atas lutut!”, “Jangan berkuku panjang!”, “Jangan datang terlambat!”, dilontarkan oleh mereka yang melakukan hal tersebut. Faktor ketidakkonsistenan itulah juga yang tampaknya membuat anak tidak lagi memandang gurunya, sebagaimana juga orangtuanya, sebagai sosok yang layak untuk diteladani. Namun, tentu saja imitasi atau pengidentifikasian anak tetap saja berlangsung, karena mereka mempunyai kecenderungan untuk meniru.

Dengan tidak berlakunya kurikulum informal, atau sering disebut *hidden curriculum*, maka tinggalah kurikulum formal yang berlaku dengan metode pemberian ganjaran dan hukuman. Metode *didactic teaching* yang dilakukan tanpa pemberian contoh akan mengakibatkan seorang anak sampai remaja, bahkan mungkin masa dewasanya kelak, juga hanya akan mampu berbicara, tapi tidak mampu melakukan. Pada pelajaran membuang sampah, misalnya, semua orang mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah, kantor, rumah sakit, dan taman banyak ditemui tulisan “Dilarang membuang sampah sembarangan!”, namun tetap saja ditemukan sampah berserakan. Adapun kurikulum ganjaran dan hukuman, karena tidak dilakukan dari hati, hanya akan berjalan bila ganjaran dan hukuman tersebut diterapkan. Misalnya, pernah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang membuang sampah sembarangan, namun sejak dikeluarkannya perda tersebut sampai sekarang belum mengubah kebiasaan orang dalam membuang sampah. Artinya, perda tersebut, atau lebih luasnya metode ganjaran dan hukuman, tidak cukup ampuh dalam mengubah watak/karakter seseorang.

Dengan demikian, keluarga dan sekolah dipandang sebagai agen utama yang prososial, sedangkan teman sebaya (*peer groups*) dipandang membawa resiko besar

dalam menurunkan norma penyimpangan. Sosialisasi keluarga mengandung dua komponen yang akan memengaruhi resiko penyimpangan, yaitu adanya kekuatan ikatan keluarga dan kegunaan ikatan yang kuat itu untuk meneruskan norma prososial.

Pendidikan moral, yaitu apa yang sekolah lakukan untuk membantu kaum muda menjadi dewasa sehingga matang, mampu berpikir dan bertindak secara moral (<http://www.hi-ho.ne.jp/taku77/refer/ryan.htm>). Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. (<http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>). Bagi sebagian keluarga, proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak *play group* dan taman kanak-kanak. Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut *digugu lan ditiru*, dipengaruhi karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik.

Penyimpangan moral yang diakibatkan oleh teman sebaya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena dibanding dengan keluarga, kelompok sebaya kurang bersifat mengikat secara emosional, anak dapat dengan mudah berpindah-pindah keanggotaannya dalam kelompok sebaya (Vembriarto, 1990). Oleh karena itu penyimpangan moral yang dilakukan oleh kelompok sebaya dapat diatasi dengan cara memperkuat sosialisasi primer dengan keluarga di masa-masa awal kehidupan seseorang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Michell dan West, *The Issues of Selection and Projection in Regard to Smoking*

and Peer Group Influences, yang menyatakan, "That 12-to 14-year-olds who did not want to smoke avoided particular social situations and contexts associated with smoking behavior, or chose non-smoking friends, or, if necessary, dropped friends who started to smoke" (dalam Ungar, 2000).

Peran media massa yang semakin terbuka luas dan dapat mengarah ke contoh buruk pun, sesungguhnya dapat diminimalisir dengan meningkatkan ikatan emosional orangtua dan anak. Alasan kesibukan orangtua bekerja, saat ini bukan lagi merupakan hambatan yang serius, apalagi dengan hadirnya beraneka ragam fasilitas telekomunikasi, baik berupa telepon, *short message system (sms)*, *whatsapp*, maupun jejaring sosial lainnya, seperti *facebook* dan *twitter*. Fasilitas tersebut yang diyakini dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, apabila dioptimalkan untuk mengharmoniskan kembali hubungan dalam keluarga, saling dukung, dan saling memuji, maka akan meningkatkan afeksi yang dampaknya sangat besar dalam penanaman budi pekerti.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mengacu pada kajian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Dalam sosialisasi anak terhadap perkembangan budi pekerti anak terdapat empat agen sosialisasi utama yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Agen tersebut meliputi: keluarga, sekolah, kelompok teman bermain (*peer group*), dan media massa;
- b. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer di mana seorang anak memperoleh sosialisasi dari lahir sampai mengenal sosialisasi sekunder, seperti lingkungan sekolah, atau kelompok teman bermain. Hal ini didukung oleh keberadaan sekolah berperan sebagai agen sosialisasi sekunder yang prososial;
- c. Keberadaan teman sebaya (*peer group*) dan media massa sebagai agen sosialisasi

sekunder lainnya banyak memberi manfaat meskipun ada kalanya memiliki dampak sosial yang negatif terhadap perkembangan budi pekerti anak, mengingat masa kanak-kanak belum memiliki kepribadian yang stabil; dan

- d. Fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi primer dalam melakukan sosialisasi sangat penting, karena melalui keluarga seorang anak dapat memilih untuk mengikuti atau menolak sosialisasi dari agen sekunder lainnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran, sebagai berikut.

- a. Para orangtua hendaklah melaksanakan pola asuh secara efektif di rumah, dengan cara memberi teladan kepada anak dan tidak menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak di tangan pembantu rumah tangga, karena anak tidak hanya membutuhkan pangan, sandang, dan papan, tetapi juga penanaman moral dari orang terdekat dan yang mereka hormati;

- b. Sekolah hendaklah dalam mendidik anak dengan budi pekerti, lebih banyak memberikan contoh keteladanan, mengingat anak sangat mudah mengimitasi perilaku orang yang mereka hormati;

- c. Puslitbangbud Balitbang Kemdikbud lebih pro aktif memberi respon terhadap pendidikan yang berkenaan dengan budi pekerti atau pembentukan watak dalam wujud pendidikan karakter bangsa dan meningkatkan frekuensi keahian dan/atau penelitian lanjutan mengenai pengaruh media massa, dalam hal ini televisi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak. Selanjutnya, hasilnya dijadikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk menyeleksi program-program acara yang dapat ditayangkan serta jam tayangnya; dan

- d. Masyarakat lebih pro aktif lagi dalam memberikan kontrol sosial terhadap aplikasi pendidikan karakter bangsa di masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. <http://edukasi.kompasiana.com/2012/11/11/solusi-tawuran-pelajar-bela-jarlah-kepada-jepang-502357.html>, diunduh tanggal 21 Februari 2013
- Anonim. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131808332/budi%20pekerti.pdf>, diunduh tanggal 14 Februari 2003
- Anonim. <http://lampost.co/berita/pramuka-dan-budi-pekerti-wajib-masuk-kurikulum>, diunduh tanggal 21 Februari 2013.
- Anonim. <http://www.hi-ho.ne.jp/taku77/refer/ryan.htm>, diunduh tanggal 2 April 2013
- Anonim. <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>) diunduh tanggal 2 April 2013
- Anonim. <http://www.kbbi.web.id>, diunduh tanggal 21 Februari 2013.
- Abdullah, Taufik dan AC. Van Der Leeden. ed.1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azra, Azumardi. 2012. *Pendidikan Karakter: Peran Sekolah dan Keluarga* (www.erlangga.co.id) diunduh tanggal 6 April 2013
- Berkowitz, Marvin W. 1997. *Integrating Structure and Content in Moral Education*. Marquette University. (<http://www4.wittenberg.edu.ame.kuhmerker.html>) diunduh tanggal 14 Agustus 2001
- Berkowitz and Grych. 1998. *Fostering Goodness: Teaching Parents to Facilitate Children's Moral Development*. Marquette University. (<http://www4.wittenberg.edu.ame.kuhmerker.html>) diunduh tanggal 1 Maret 2002.
- Curtis Audrey and Maureen O' Hagan. 2005. *Care and Education in Early Childhood*. Routledge Falmer. Taylor and Francis Group diunduh tanggal 16 Maret 2014
- Dacey, John & Maureen Kenny. 1997. *Adolescent Development*. WCB Graw Hill
- Kompas, 23 Juni 1999. "Gagal Merampok Malah Perkosa Pembantu". (<http://www.kompas.com>) diunduh tanggal 14 Desember 2002.
- Kompas, 9 Juni 2001. "Pencuri Motor Tewas Dihajar Massa" (<http://www.kompas.com>) diunduh tanggal 14 Desember 2002.
- Kompas, 23 November 2001. "Wapres tentang Kisruh Antar-anggota MPR Cermin Hilangnya Akhlak." (<http://www.kompas.com>) diunduh tanggal 14 Desember 2002
- Hurlock, Elizabeth B. 1990. *Perkembangan Anak*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, ed. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Light, Donald Jr/Keller, Suzanne. 1982. *Sociology*. New York: Alfred A. Knppf.
- Macionis, John.1996. *Society the basics*. Prentice Hall. Upper Saddle River NJ 07458
- Oetting & Donnermeyer. (tanpa tahun). *Primary Socialization Theory* (<http://www.term-papers.us/ts/fb/peh113.shtml>) diunduh tanggal 15 Desember 2002.

- Smetana, G. Judith. (tanpa tahun). *The Role of Parents in Moral Development: A Social Domain Analysis* University of Rochester (<http://www4.wittenberg.edu/ame.kuhmerker.html>) diunduh tanggal 23 Agustus 2001.
- Ungar, Michael, T. 2000. *The Myth of Peer Pressure*. <http://npin.org/> diunduh tanggal 4 April 2003.
- Ritzer, George. 1992. *Classical Sociological Theory*. USA: Mc Graw—Hill Publishing Inco.
- United Nations Publications, 1996. USA. *Family challenge for the future*.
- Vembriarto, S.T. 1990. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.

REAKTUALISASI DAN REVITALISASI KESENIAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER

R.R. Nur Suwarnigdyah
Puslitbang Kebudayaan
nur.sdyah@gmail.com

Abstract

Art is not only a medium of entertainment, but a part of human lived. For example in running a ritual, art has always been a part of it. This study explain about art of dance that has functions as entertainment, ritual, and education media, i.e. Bedhaya Dance from Yogyakarta Palace. Beside as a clasical art dance, Bedhaya Dance as a worth valuable, also contains of high philosophy values. In ancient times Bedhaya Dance is a sacred dance that should not be danced and watched by commonly people. There are rituals and regulations that must be met in order to dance or watch it. Through the re-actualization, it can bring back Bedhaya Dance, that before it as a sacral dance, to be general Bedhaya Dance who anyone can dance or watch it, along with its philosophy that values are transmitted to the next generation. So, Bedhaya Dance can be revitalized or utilized as a media for character education. In addition, the art of dance utilized as educational media, both within formal, informal and non-formal education. The packaging is made in such a way that the art of dance is required to attract the attention of students in schools and institutes in addition to school, so that arts education is not only the forms but truly understand for meaning, values, and character that contained in the arts.

Keywords: reactualization, revitalization, art of dance, media for character education

Abstrak

Kesenian tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang dijalani manusia. Contohnya dalam menjalankan sebuah ritual, kesenian selalu menjadi bagian di dalamnya. Penelitian ini mengangkat tentang seni tari yang mempunyai fungsi sebagai hiburan, ritual, dan media pendidikan, yaitu Tari *Bedhaya* dari Keraton Yogyakarta. Tari *Bedhaya* selain sebagai seni tari klasik yang bernilai adiluhung, juga mengandung nilai-nilai filosofis tinggi. Pada zaman dahulu Tari *Bedhaya* merupakan sebuah tari sakral yang tidak boleh ditarikan dan ditonton secara sembarangan. Ada ritual dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menarik atau menonton tarian tersebut. Melalui reaktualisasi, menghadirkan kembali Tari *Bedhaya* yang pada mulanya bersifat sakral menjadi Tari *Bedhaya* yang bersifat umum, siapa saja bisa menarik atau menontonnya, beserta nilai-nilai filosofinya yang ditransmisikan kepada para generasi penerus, maka tarian ini juga dapat direvitalisasi atau dimanfaatkan sebagai media pendidikan karakter. Selain itu, seni tari dapat digunakan sebagai media pendidikan kepada anak didik, baik di lingkungan pendidikan formal, informal, maupun non formal. Pengemasan diperlukan agar seni tari tersebut dapat menarik perhatian anak didik di sekolah-sekolah maupun lembaga di luar sekolah, sehingga pendidikan kesenian tidak hanya mengenal bentuk, namun betul-betul memahami lebih jauh makna, nilai, dan karakter yang terkandung dalam kesenian tersebut.

Kata kunci: reaktualisasi, revitalisasi, seni tari, media pendidikan karakter

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesenian adalah sesuatu yang ada dan dekat dengan kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia diwarnai oleh berbagai bentuk kesenian, yaitu ketika manusia melakukan ritual dan upacara tradisional, seperti: perkawinan, panen padi, khitanan, dan sebagainya. Begitu pula peristiwa kematian, peperangan, yang divisualisasikan dalam bentuk tarian ketika ritual

dilakukan.

Seni tari juga banyak digunakan sebagai media persembahan atau media memohon kepada Tuhan akan apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya ritual-ritual tersebut. Jika berbicara tentang fungsi, maka seni itu sendiri mempunyai fungsi luas. Seni, khususnya seni tari, ketika hadir dalam sebuah peristiwa misalnya upacara, perayaan, maka tari itu sendiri berperan penting. Artinya jika tarian tidak dihadirkan maka jalannya upacara atau perayaan menjadi tidak sah, tidak bermakna/sakralnya berkurang, dan sebagainya. Oleh karena itu seni menjadi hal penting yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Begitu pula seni sangat dekat dengan dunia pendidikan. Sejak manusia dilahirkan maka seni ada dalam diri manusia tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini memfokuskan tentang apa fungsi dari seni tari tersebut kaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan seni pun melekat di dalamnya, sejak kecil manusia senang diajarkan tentang nyanyian-nyanyian, gambar-gambar, berbagai macam bentuk-bentuk benda, dan sebagainya. Oleh karena itu seni berfungsi sebagai media pendidikan dan seni ada dan hidup di sekeliling kita.

Melalui media budaya, karakter sebuah bangsa akan tercermin pada ciri budayanya, yaitu salah satunya melalui seni. Seni adalah wujud kebudayaan yang berasal dari beberapa suku bangsa, yaitu terdiri dari etnis-etnis yang memiliki ciri khas unik. Seni juga bagian penting dalam kehidupan manusia, karena seni merupakan sebuah perwujudan ekspresi manusia dalam peristiwa kebudayaan, yaitu sebuah gambaran kehidupan atau peradaban manusia mulai dari zaman ke zaman, salah satunya adalah seni pertunjukan. Tentunya seni pertunjukan yang ada pada zaman dahulu dengan zaman sekarang akan jauh berbeda perwujudannya. Hal ini terkait dengan bentuk-bentuk seni pertunjukan yang tumbuh di dalam masyarakat dan biasanya berkembang secara turun-temurun. Pentingnya generasi penerus bangsa untuk tahu dan memahami seni pertunjukan milik bangsanya sendiri,

sebagai wujud pembangunan karakter bangsa Indonesia yang menghargai dan mencintai budaya bangsa sendiri, yaitu Indonesia.

Melalui media kesenian berbagai fungsi dapat dirasakan bagi kebutuhan manusia di dalam kehidupannya. Namun sifat dari sebuah bentuk kesenian tersebut bisa dikatakan tidak langgeng. Hal ini sangat mempengaruhi keberadaan atau eksistensi dari kesenian tersebut. Manusia berperan penting terhadap kelanggengan dan fungsi kesenian sebagai media berbagai macam kebutuhan. Punah dan tidak punah sebuah bentuk kesenian, tergantung pada manusia yang ada di sekitar, di mana kesenian tersebut tumbuh dan berkembang. Bentuk kesenian di Indonesia jika dilihat dari asal-usul di mana kesenian itu ada/ lahir, tumbuh, dan berkembang, maka ada dua kategori bentuk kesenian, yaitu kesenian rakyat dan kesenian istana. Kesenian rakyat yang dimaksud adalah kesenian yang berasal dari rakyat biasa bukan dari lingkungan istana. Biasanya lebih sering dekat dengan yang disebut kesenian yang berfungsi sebagai hiburan atau tontonan biasa. Sedangkan kesenian yang berasal dari lingkungan istana biasa disebut dengan kesenian klasik, kesenian adiluhung, dan sebagainya. Biasanya menjadi bagian dari sebuah upacara tradisi yang sakral.

Tari *Bedhaya* merupakan tarian yang banyak dikenal di negara-negara tetangga, seperti: Amerika, Inggris, Jepang, Belanda, dan sebagainya. Adanya akses antar kerajaan dan pemerintahan ketika itu, maka Tari *Bedhaya* menjadi mudah dikenal di dunia luar negeri. Ketika jenis tarian yang berasal dari lingkungan istana atau keraton, pada zaman dahulu tidak semua orang bisa melihatnya, menjadi hal yang sakral dan eksklusif *performance*. Namun kembali lagi bahwa eksistensi sebuah kesenian akan terus langgeng tergantung manusia yang hidup di sekitarnya. Oleh karena itu pihak keluarga kraton sendiri sudah membuka diri untuk pelestarian dan pengembangan keseniannya termasuk seni Tari *Bedhaya*. Seni Tari *Bedhaya* adalah bentuk seni tari yang sarat dengan filosofi tingggi,

yang dikenal sebagai seni *adiluhung*. Seni *adiluhung* ini keberadaannya jika ditelusuri juga mengajarkan pendidikan. Oleh karena itu dalam penelitian ini pun mencoba menggali keterkaitan antara seni yang *adiluhung* tersebut dengan dunia pendidikan. Makna *adiluhung* lebih kepada hal yang bernilai tinggi dan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan pendidikan itu sendiri bersifat universal dan luas, siapapun bisa mengenyam atau mendapatkannya, dengan kebutuhannya masing-masing.

Kita bisa melihat dari beberapa jenis repertoar tari (Tari *Golek*, Tari *Srimpi*, Tari *Saman*, Tari *Babarlayar*, dan sebagainya) atau bentuk tari yang mempunyai latar belakang berbeda, pada hakikatnya sama, yaitu seni mempunyai fungsi hiburan dan sebagai media pendidikan. Oleh karena itu kita sering mendengar istilah rekonstruksi, revitalisasi, dan reaktualisasi. Ketiga peristilahan tersebut mempunyai arti berbeda meskipun tujuannya boleh di bilang hampir sama, yaitu pelestarian. Dalam pelestarian meliputi makna perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Rekonstruksi adalah sebuah langkah untuk mencari jejak sejarah yang sempat hilang atau terlupakan begitu saja, sehingga pada saat kembali ingat, maka muncul dorongan kuat untuk menelusuri sejarahnya. Rekonstruksi juga mempunyai pengertian kembali membuat sebuah konstruksi atau membangun bentuk asli dari sebuah seni beserta sejarah lengkap yang menyertainya. Bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula. Penyusunan atau penggambaran kembali peristiwa atau bentuk-bentuk asli sesuai ketika ada pertama kali muncul atau tercipta (Marbun. 1996: 469). Rekonstruksi tari berarti membangun kembali sebuah tarian yang sudah hilang atau punah dengan alur cerita dan struktur tari yang sesuai dengan sejarahnya. Rekonstruksi dibuat seperti aslinya, tanpa mengurangi sedikit pun. Tingkat kesulitan rekonstruksi sangat besar dan rumit, sehingga sebaiknya jika memunculkan

kembali sebuah tarian yang sudah lama tidak eksis, lebih mudah melakukan revitalisasi. Seperti yang dikatakan oleh Sri Rustiyanti dalam bukunya "*Menyingkap Seni Pertunjukan Etnik di Indonesia*", mengatakan bahwa:

"Revitalisasi adalah usaha untuk memvital-kan atau menghidupkan kembali sesuatu yang eksistensinya masih berarti sehingga perlu dijaga dan dikembangkan (2010:22)".

Revitalisasi, yaitu lebih menggiatkan kembali kegiatan pentas kesenian agar masyarakat lebih mengenal terhadap bentuk kesenian tersebut, sehingga eksistensinya pun akan terlihat. Misalnya menghadirkan Tari *Bedhaya* dalam acara upacara ritual, *event-event*, dan sebagainya. Kemudian muncul istilah yang lain, yaitu reaktualisasi, pada intinya hampir sama dengan revitalisasi, yaitu mengekskiskan yang pernah eksis. Namun reaktualisasi lebih kepada bentuk-bentuk kesenian yang sifatnya sakral, hampir punah, bahkan sudah punah dihadirkan kembali persis bentuk aslinya. Maka sah-sah saja jika ada sedikit tidak sama persis asli yang dikarenakan sulitnya mendapatkan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan reaktualisasi bentuk dan sejarahnya, karena hanya mengaktualisasikan yang pernah ada agar mengingatkan kembali bentuk kesenian tersebut (pendapat Prof. I Wayan Dibia, dalam acara seminar tari "Indonesia Menari" yang diselenggarakan oleh Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada tanggal 5 Juni 2012).

Kemudian perbedaan reaktualisasi dengan rekonstruksi adalah jika melakukan rekonstruksi harus benar-benar memiliki data kuat karena harus dihadirkan kembali persis asli tanpa menambah ataupun mengurangi data. Hal ini tentunya kesulitan, karena sumber data yang dapat dipercaya biasanya sudah tidak ada, sehingga hanya imajinasi yang bermain atau rekayasa sejarah atau pun rekayasa bentuk gerakan tarinya. Untuk mengantisipasi kesalahan fatal dari rekonstruksi seni tari, maka dilakukan

reaktualisasi, yaitu menghadirkan kembali bentuk asli pertunjukan seni tari semaksimal mungkin sebagai alat pengingat manusia bahwa di zaman dahulu ada bentuk tarian yang dihadirkan di masa sekarang, dengan catatan sumber sejarahnya bisa tidak semua tergali persis, karena keterbatasan sumber data maupun narasumber yang dibutuhkan. Reaktualisasi adalah menghadirkan kembali bentuk kesenian, yaitu seni tari dengan pemaknaan baru sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya, misalnya masyarakat pada zaman dahulu tahu tentang Tari *Bedhaya* itu sakral. Maka masyarakat mengetahui bahwa Tari Klasik *Bedhaya* hanya milik raja dan kerabatnya tertentu saja yang boleh menyaksikan. Bentuk asli yang seperti dahulu tentunya sudah kesulitan untuk mendapatkan data-datanya, namun melakukan reaktualisasi merupakan langkah awal untuk melakukan rekonstruksi, sehingga didapatkannya pertunjukan Tari *Bedhaya* dalam bentuk baru namun esensinya tetap ada.

Mengingat begitu pesatnya teknologi yang melanda di dunia ini, sesuatu menjadi lebih mudah, cepat, dan menarik, seakan-akan yang bersifat kuno menjadi ditinggalkan. Begitu pula dengan perkembangan seni yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir para generasi muda yang hanya berpikir sesaat dan menyenangkan saja. Misalnya lebih mengasyikkan dan cepat belajar tari modern dibandingkan belajar tari tradisional yang banyak aturan atau pakem sehingga lama untuk bisa menariknya. Oleh karena itu banyak para generasi bangsa ini yang tidak paham bahkan tidak tahu akan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai budaya bangsa hampir dilupakan begitu saja jika kita tidak memulai untuk mengingatkannya dan mengenalkannya kembali. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang mengarahkan pada unsur-unsur pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal. Secara efektif melalui bangku sekolah dapat dimasukkan pelajaran tentang budaya bangsa.

Bidang budaya yang bisa masuk dalam pelajaran anak-anak sekolah biasanya adalah bidang seni. Berbagai bidang seni bisa diajarkan di sekolah, yaitu seni musik, seni tari, seni lukis, seni suara, seni teater, dan sebagainya. Di dalam penelitian ini potensi seni tari sangat besar untuk diajarkan, baik di bangku sekolah maupun di sanggar-sanggar. Permasalahannya, pelajaran kesenian biasanya banyak digemari oleh anak-anak perempuan saja, sedangkan anak-anak laki-laki menganggap kuno jika belajar kesenian tradisional, sehingga mereka lebih suka kesenian yang berasal dari mancanegara, yang tentunya berbeda nilai-nilai budayanya dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Di dalam penelitian ini potensi kesenian, khususnya Tari *Bedhaya* dari Yogyakarta, dapat direaktualisasikan sebagai media pendidikan dengan pengemasan yang lebih menarik, dan bobot materinya pun perlu dipikirkan, sehingga anak didik tidak hanya mendapat wujud bentuk dari seni tari itu saja beserta iringannya, tetapi lebih jauh lagi diajarkan lagi tentang latar belakang sejarahnya, nilai-nilainya, dan fungsi, dari seni tari yang dipelajari tersebut. Di sinilah seni tersebut benar-benar dapat dipahami dan dihayati menjadi media pendidikan budaya bangsa sendiri, sehingga mampu menjadi filterisasi masuknya pengaruh negatif dari budaya asing. Bentuk-bentuk kesenian khususnya seni tari yang ada dapat direaktualisasikan sehingga tetap eksis dan dapat digunakan sebagai media pendidikan karakter yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tujuan mengidentifikasi dan mendiskripsikan terjadinya perubahan-perubahan bentuk dan fungsi seni pertunjukan Tari *Bedhaya*, merupakan bentuk sikap untuk mereaktualisasikan seni tari tersebut di masa sekarang, yang ditransmisikan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya kepada anak didik sebagai penerus bangsa dalam pembangunan karakter.

Penelitian ini difokuskan pada seni pertunjukan tari yang direaktualisasi

untuk dapat dikenali, dipahami, bahkan dikembangkan untuk para generasi penerus bangsa. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Keraton Yogyakarta. Tari yang berasal dari keraton tentunya mengandung makna filosofi yang sarat adanya unsur-unsur pendidikan bagi hakikat manusia itu sendiri. Tari *Bedhaya* selain indah, agung, dan filosofinya juga sangat tinggi, hingga saat ini masih diyakini oleh pihak keluarga keraton maupun masyarakat. Tari *Bedhaya* mempunyai fungsi sebagai regalia yang turut memperkokoh serta memberi perlindungan, ketenteraman, kesejahteraan, dan keamanan kepada raja dan seluruh *kawula*-nya, yakni kesejajaran antara mikrokosmos dan makrokosmos, berusaha mencari keselarasan, keserasian maupun keharmonisan kehidupan dengan mengharapkan kelanggengan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan (Sumandiyo. 2001: 16).

Kesenian merupakan sebuah nilai keindahan yang terkait satu dengan yang lain dari cabang-cabang ilmu pengetahuan. Keterkaitan ilmu-ilmu di dalam sebuah seni tari, yaitu pengetahuan olah tubuh/ gerak itu sendiri, ilmu seni rupa (riasan wajah), ilmu filsafat (makna, nilai, filosofi), ilmu musik (karawitan/ *gendhing-gendhing*), dan sebagainya. Di dalam penelitian ini khusus mengambil satu unsur kebudayaan, yaitu kesenian. Konsep kebudayaan nasional Indonesia dalam ruang lingkup yang terbatas meliputi tujuh unsur kebudayaan yang universal, yaitu: teknologi dan peralatan, mata pencaharian hidup, organisasi kemasyarakatan/ adat istiadat, bahasa, keagamaan, pengetahuan/ kearifan lokal, dan kesenian (Koentjaraningrat. 2004: 2). Edi Sedyawati juga mengatakan bahwa seni bagian dari kebudayaan, bicara tentang seni, bahwa:

“seni pertunjukan di Indonesia berangkat dari suatu keadaan di mana ia tumbuh dalam lingkungan etnik yang berbeda satu sama lain. Dalam lingkungan-lingkungan etnik ini, adat, atau kesepakatan bersama yang turun-

temurun mengenai perilaku, mempunyai wewenang yang amat besar untuk menentukan rebah-bangkitnya kesenian, seni pertunjukan pada pertunjukan (Sedyawati. 1981: 52)”.

Jelas dikatakan bahwa hidup dan berkembangnya sebuah kesenian sangat bergantung pada masyarakat yang berada dekat dengan lingkungan, di mana kesenian tersebut ada. Terciptanya suatu kesenian (pertunjukan) secara konseptual akan berpedoman pada sistem nilai budaya yang mengelilinginya dan khas sesuai dengan budaya daerah tersebut (Bandem.1988: 50). Sistem nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diakui dan diyakini oleh masyarakatnya secara turun-temurun, misalnya nilai kesatuan, kebersamaan, dan sebagainya. Begitu pula dengan bentuk-bentuk kesenian yang berkembang, biasanya mencerminkan budaya dari daerah di mana kesenian tersebut ada, yaitu kesenian rakyat atau kesenian tradisional. Kesenian tradisional juga sebagai kesenian di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai atau berbagai ajaran tentang hubungan antarmanusia dengan Sang Penguasa/ Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Hal ini tentunya jika ditelaah maka ajaran-ajaran yang bernilai dalam sebuah budaya, yaitu bentuk seni tersebut akan terkait dengan pendidikan yang diterapkan pada suku yang meyakini hal tersebut, di mana kita tahu bahwa pendidikan mempunyai tiga kategori, yaitu: pendidikan formal, informal, dan non formal.

Hakikat pendidikan adalah merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal, informal, maupun non formal. Disebut pula bahwa pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusus lingkungan sekolah). Menurut Ki Hajar Dewantoro yang ditulis oleh H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada

pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara terjadi di dalam habitus yang sentripetal, yaitu pendidikan yang berpusat dari budaya lokal dan berangsur-angsur meluas hingga ke tingkat nasional, disebut juga dengan pendidikan *multicultural*. Prinsip pendidikan *multicultural* adalah pentingnya mengembangkan identitas manusia yang berakar dari keluarga serta budaya lokal (2008-2009: 56). Kesenian dapat dijadikan sebagai media pendidikan berdasarkan pada filosofi, nilai-nilai, dan tata aturannya, yang bisa didapatkan baik melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun sanggar-sanggar.

2. Metode Penelitian

Di dalam penelitian: “Reaktualisasi Kesenian sebagai Media Pendidikan”, dengan melalui pendekatan secara kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku yang ditulis oleh Lexy J Moleong yang berjudul *Metode Kualitatif*, bahwa metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004: 14-18).

Untuk menjelaskan penelitian ini secara detail dan komprehensif digunakan pendekatan kualitatif dan deskripsi analisis. Metode deskripsi analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian, berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. Maka penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data kepustakaan dan mempelajari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian sebagai data awal sebelum melakukan penelitian di lapangan, yaitu tentang reaktualisasi kesenian sebagai media

pendidikan.

b. Penentuan Lokasi dan Berkoordinasi

Menentukan lokasi penelitian sesuai tujuan dari penelitian. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak daerah yang terkait dengan penelitian, yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Keraton Yogyakarta.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan adalah dengan cara observasi dan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*). Maka instrumen penelitian ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian, sebagai upaya penggalian data secara kualitatif. Observasi juga diupayakan untuk dapat melakukan pendokumentasian subyek penelitian dengan melakukan pencatatan data, pengambilan foto-foto, dan perekaman suara. Oleh karena itu di dalam penelitian ini di lapangan juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang terkait dengan fokus penelitian.

d. Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah didapatkan untuk dikaji kembali, dipilah-pilah, kemudian dibuat analisis data menjadi sebuah pernyataan-pernyataan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian didiskripsikan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu tentang “Reaktualisasi Kesenian Sebagai Media Pendidikan”, yang di dalamnya juga memuat rekomendasi-rekomendasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenian adalah bagian dari kebudayaan, keragaman budaya khususnya pada bidang seni pertunjukan tari dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia yang merupakan aset budaya bangsa. Berbagai seni pertunjukan tari yang dimiliki bangsa Indonesia banyak dikenal hingga mancanegara, seperti Tari *Bedhaya* dari Yogyakarta, Tari *Kecak* dari Bali; Tari *Topeng* dari Jawa Barat; Tari *Gendhing Sriwijaya* dari Palembang; Tari *Saman* dari Aceh; dan sebagainya. Pada berbagai kebudayaan di



(dok. RR. Nur. Suwarnigdyah)

Foto 1. Sembilan orang penari *Bedhaya* dari Keraton Yogyakarta

Indonesia dijumpai tari yang dipakai untuk mengiringi upacara-upacara, penyambutan tamu, hajatan, yang semua itu merupakan aspek penting yang ada di sekeliling dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh adalah tarian untuk mengiringi permulaan siklus pertanian; pesta-pesta pada siklus daur hidup, juga pada upacara hari jadi (Soedarsono, terjemahan dari Claire Holt. 2000: 124).

Seperti pada pertunjukan Tari *Bedhaya* Keraton Yogyakarta yang masuk dalam kategori tari klasik. Tari *Bedhaya* merupakan karya yang dianggap *adiluhung*, penuh dengan muatan filosofis, religius, edukatif, dan juga magis. Fungsi Tari *Bedhaya* yang lainnya adalah sebagai tuntunan atau pendidikan moral. Hal itu dapat dilihat dari simbol-simbol yang terdapat dalam gerak tari, pola lantai, tata rias, dan tata busananya. Unsur pendidikan moral itu tampak dari gerak tari melalui kehalusan gerakan, sopan santun, keluwesan, etika, dan latihan kekompakan atau kerja sama. Oleh karena itu semua gerakan pada

Tari *Bedhaya* adalah gerak-gerak yang halus dan penuh makna.

Seperti dikatakan oleh G.B.P.H. Suryobrongto dalam *Mengenai Tari Klasik Gaya Yogyakarta*, bahwa patokan dasar dalam tari klasik gaya Yogyakarta ini disebut dengan *Ilmu Joged Mataram*. Ilmu ini dibagi dalam empat bagian, yaitu:

1. *Sawiji*, yaitu konsentrasi total dengan tidak menimbulkan ketegangan jiwa, sehingga penari meleburkan dirinya dengan tari yang diperagakannya sepenuh hati dan jiwa. Hal ini jika diajarkan dalam media pendidik karakter maka mengandung ajaran bahwa manusia dalam menjalankan sesuatu harus dengan konsentrasi, seperti halnya dalam belajar, berlatih, manusia atau siswa harus serius terfokus, konsentrasi, dan disiplin pada apa yang sedang dipelajari atau latihan. Namun, tidak dilakukan secara terpaksa, karena jika dilakukan dengan terpaksa maka hasil yang diharapkan tidak tercapai.

2. *Greged*, yaitu dinamika atau semangat

dalam jiwa seseorang, yang berwujud emosi-emosi yang harus dapat dikendalikan sehingga tidak muncul gerakan kasar, namun mantap, bertenaga tapi tetap lembut. Hal ini mengajarkan kepada manusia untuk mempunyai semangat dalam menjalankan kehidupan ini dengan kelembutan hati dan sikap. Maka dalam pendidikan karakter semangat adalah sesuatu yang harus dimiliki anak didik ketika belajar dan menghadapi masa depan.

3. *Sungguh*, yaitu *self confidence* atau percaya diri tanpa mengarah kesombongan, yang menumbuhkan sikap meyakinkan, pasti, tidak ragu-ragu, dan rendah hati karena tetap terkendali. Hal ini mengajarkan pada manusia bahwa ketika yakin dalam belajar maka pasti akan meraih yang terbaik, untuk itu diajarkan

4. *Ora Mingkuh*, yaitu suatu keteguhan hati dalam memainkan perannya, dengan tetap setia dan berani menghadapi situasi apapun dengan penuh tanggungjawab (Suryobrongto.1981: 90-92). Hal ini mengajarkan bahwa manusia harus berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Misalnya dalam ujian kalau tidak belajar atau berlatih akibatnya tidak lulus, dan jika belajar atau berlatih maka niscaya akan lulus ujian, sehingga manusia atau siswa berani bertanggung jawab dengan segala resikonya.

Pada dasarnya teori-teori dalam *Ilmu Jaged Mataram* adalah sebuah teori untuk penghayatan dan konsentrasi dalam menarikan tari klasik Keraton Yogyakarta. Pada saat itu *Ilmu Jaged Mataram* merupakan



(dok. RR. Nur. Suwarnindyah)

Foto 2. Tarian Sakral *Bedhaya*, ditarikan oleh 9 orang penari putri

tidak boleh merasa paling pintar dan paling baik, karena sikap sombong tidak membawa kepada kebaikan diri sendiri, bahkan bisa membuat celaka diri sendiri. Oleh karena itu ditanamkan sikap rendah hati yang akan membawa kebaikan dan kerukunan.

ilmu yang sakral, karena tidak boleh sembarang orang boleh mempelajarinya, hanya untuk keluarga Keraton saja. Namun perkembangan di masa sekarang tari *Bedhaya* sudah bisa dipelajari oleh siapa pun yang ingin belajar. Melalui reaktualisasi dan revitalisasi *Tari*

Bedhaya mampu dikenali dan dipahami oleh masyarakatnya bahkan sampai ke luar negeri. Nilai-nilai yang ada juga dapat disampaikan dalam pendidikan karakter bangsa, antara lain adalah adanya nilai-nilai kebersamaan, tenggang rasa, saling menghargai, rendah hati, kerukunan, saling kerjasama, dan sebagainya.

Oleh karena itu seni pertunjukan Tari *Bedhaya* merupakan bentuk kesenian yang mempunyai potensi dan diyakini eksistensinya dalam kehidupan masyarakat di mana kesenian tersebut berada. Bila dilihat dari hasil penelitian ini, maka melakukan reaktualisasi dan revitalisasi merupakan hal yang sangat penting, guna membangunkan potensi dari kesenian tersebut untuk kepentingan dunia pendidikan dan membangun karakter, baik secara formal dan non formal, agar masyarakat mampu dalam memfilterisasi diri terhadap derasnya arus budaya asing yang masuk dan memengaruhi pola pikir para generasi muda terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Reaktualisasi dilakukan sebagai upaya agar kesenian tidak mengalami penurunan eksistensi. Seperti dikatakan oleh Edward Shils dalam *Tradition*, yang dikutip Nunus Supardi dalam sajian makalah yang berjudul “Pendekatan dalam Memprakirakan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian Tradisional”, mengatakan, bahwa:

“Sekurang-kurangnya tiga generasi dalam penerusan atas sesuatu hal, untuk kemudian dapat digolongkan hal tersebut sebagai tradisi. Sesuatu akan disebut tradisi bila dianggap oleh masyarakatnya memberikan manfaat yang masih relevan dengan kemajuan jamannya. Hal ini karena tradisi memiliki daya ikat yang kadang-kadang sangat hebat, sehingga yang terlibat di dalamnya menganggap sesuatu itu pantas untuk diteruskan dan kemudian mengikatkan diri dengannya” (2000: 1-2).

Jelas dikatakan bahwa perlu adanya pewarisan budaya, yaitu sekurang-kurangnya tiga generasi, supaya bentuk budaya tersebut tidak mengalami kepunahan dan eksistensinya menghilang. Upaya kesenian sebagai media

pendidikan karakter adalah sebagai upaya pewarisan budaya agar tetap berjalan dan eksistensi seni tetap diakui. Di dalam kesenian kita dapat memahami berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya. Adapun potensi kesenian yaitu sebagai media pendidikan karakter yang dapat diajarkan di sekolah maupun non sekolah, sehingga anak didik tidak hanya mengenal bentuk-bentuk secara kasat mata dari bentuk seni tari itu sendiri, tetapi lebih memahami secara mendalam, sehingga reaktualisasi dengan cara menghadirkan kembali bentuk seni pertunjukan Tari *Bedhaya* yang dikemas sedemikian hingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam dunia pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan bisa melalui sekolah-sekolah maupun sanggar-sanggar. Oleh karena itu sangat penting bagi anak didik di sekolah untuk mempelajari dan memahami bentuk kesenian milik bangsa sendiri, yang berasal dari beraneka ragam suku bangsa. Agar memiliki sikap menghargai dan bangga terhadap salah satu aset bangsa, maka melalui reaktualisasi merupakan suatu sistem pembelajaran pengetahuan tentang kesenian, khususnya seni tari, agar dapat meningkatkan peradaban manusia dan pengembangan bentuk baru dari seni yang direaktualisasikan tersebut. Pendidikan *multiculture* adalah pendidikan yang mengedepankan pentingnya mengembangkan identitas manusia yang berakar dari keluarga serta budaya lokal, yaitu melalui seni pertunjukan tari. Adanya hubungan personal antar manusia, hingga terbentuknya identitas etnis dan identitas Bangsa Indonesia, maka hal inilah sebagai upaya menumbuhkan ketertarikan para generasi muda terhadap seni, yang mengajak untuk berpikir kreatif menciptakan inovasi dan kreasi seni yang berkarakter ciri khas budaya Bangsa Indonesia.

Hasil penelitian ini mengajak kita untuk dapat melihat bahwa di dalam beberapa bentuk senitari, seperti Tari *Bedhaya*, mempunyai nilai-nilai kedisiplinan, kerjasama, kekompakan,

keserasian, saling menghargai, pengendalian diri, pengendalian emosi, tidak sombong, tegas berprinsip, dan bertanggungjawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni pertunjukan Tari *Bedhaya* tersebut dapat dijadikan sebagai materi pendidikan karakter di beberapa cabang ilmu pelajaran, seperti: sejarah, kebangsaan, budi pekerti, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu direaktualisasi dan revitalisasi terhadap seni pertunjukan Tari *Bedhaya* selain pada bentuknya juga tentang:

1. Sejarah atau latar belakang terciptanya seni Tari *Bedhaya*;
2. Fungsi dan peran seni Tari *Bedhaya* pada awal mulanya diciptakan;
3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tari *Bedhaya*, yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Pemahaman tentang kostum (pakaian tari), properti (alat tari), yang semuanya dapat diajarkan sehingga pendidikan seni tari menjadi lebih menarik dan tidak membosankan.

Seni pertunjukan Tari *Bedhaya* dapat dijadikan sebuah paket bahan ajar yang dapat dikemas dengan dibantu alat-alat peraga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan sistem simulasi. Dengan demikian pembentukan karakter dapat ditanamkan sedini mungkin, sehingga karakter yang kokoh akan mampu menahan dan menyaring pengaruh-pengaruh dari bangsa lain yang masuk, yang belum tentu cocok dengan kepribadian atau adat budaya bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

Tari *Bedhaya* adalah seni tari adiluhung yang berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Tarian ini berfilosofi tinggi dan penuh aturan-aturan yang harus dijalani oleh penari maupun penyelenggara pementasan. Perkembangan terjadi pada Tari *Bedhaya* saat sekarang telah dapat ditonton oleh siapapun. Bahwa Tari *Bedhaya* mengandung nilai-nilai yang mengajarkan manusia terhadap:

1. Tatanan kehidupan manusia

dalam bermasyarakat, adanya nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, kekompakan, dan sebagainya.

2. Pembentukan karakter manusia, adanya filosofi tentang bagaimana pengendalian diri, pengendalian emosi, keteguhan hati, rendah diri, dan sebagainya, bisa dimiliki atau dipelajari manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Melalui bentuk seni tari manusia banyak belajar tentang arti hidup dan berkehidupan di dunia ini. Hal ini sangat penting diwariskan kepada para generasi muda melalui pendidikan. Jelas terlihat bahwa pentingnya sebuah materi pendidikan dikemas sedemikian melalui bentuk-bentuk kesenian, karena jika diteliti lebih dalam kesenian sarat dengan pengetahuan dan ajaran yang dapat diberikan kepada anak-anak di sekolah-sekolah maupun di lembaga pendidikan non sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan reaktualisasikan kembali bentuk-bentuk seni, seperti seni tari yang masih banyak lagi macamnya di Indonesia yang beragam budayanya, kemudian dikemas dan disarikan tentang ajaran apa saja yang ada dalam kesenian tersebut, sehingga anak didik pun lebih tertarik dan semangat untuk mempelajari dan memahaminya, serta mampu menghargai dan mencintai budaya bangsa sendiri. Ibarat pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, maka perlu diperkenalkan secara intensif dan mendalam tentang budaya bangsa kita sendiri. Hal tersebut mengarahkan kepada seni sebagai media pendidikan karakter yang mampu membentuk pribadi-pribadi individual menjadi manusia yang mempunyai karakter khas sesuai dengan adat budaya bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman budaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandem, I Made. 1988. *Teater Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Marbun B. N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Hadi, Y. Sumandiyo. 2001. *Pasang Surut Tari Klasik Gaya Yogyakarta: Pembentukan-Pembentukan Pengembangan Mobilitas*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan ISI.
- Koentjaraningrat. 2009. *Perspektif Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, Tilaar, H.A.R. 2008/2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustiyanti, Sri. 2010. *Menyingkap Seni Pertunjukan Etnik di Indonesia*. Bandung: Sunan Ambu, STSI Bandung.
- Sedyawati, Edi. 1981. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soedarsono. 2000. *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*. Terjemahan dari Claire Holt. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Soeryobrongto, G.B.P.H. 1981. *Mengenal Tari Klasik Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Dewan Kesenian DIY.

MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENGUKUHKAN KETAHANAN BUDAYA PELAJAR INDONESIA DI SINGAPURA

S. Dloyana Kusumah
Puslitbang Kebudayaan
yanakusumah@yahoo.co.id
siti.dloyana@kemdikbud.go.id

Abstract

Opportunity to study abroad has been done by various Indonesian students who want to continue their education, including in Singapore. According to official information from the Indonesian embassy in Singapore, the number of Indonesian students in this country occupies the largest number compared with other countries. The question that arises, whether the students are still holding fast to his nation symbols if they are still recognizable, while globalization and the ideology that supported the country where they study different from Indonesia. Studies case approach, observations and interview with selected respondents purposive, research conducted to determine the cultural resistance Indonesian students. The results will be used as a reference modeling curriculum debriefing for those who will study broad, especially to minimize the possibility of students loss of identity as citizens of the Indonesian nation.

Keywords: students, learning models, curriculum

Abstrak

Kesempatan yang terbuka untuk belajar di luar negeri nampaknya telah dimanfaatkan oleh semua kalangan, terbukti dari tahun ke tahun makin banyak anak-anak Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri termasuk di Singapura. Menurut keterangan resmi dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di negeri ini menempati jumlah terbesar dibanding dengan negara lainnya. Persoalan yang timbul, apakah para pelajar dan mahasiswa tersebut masih memegang teguh pranata budaya bangsanya, dan apakah simbol-simbol kebangsaan masih mereka kenali, sementara arus globalisasi dan ideologi yang didukung negara tempat mereka belajar jauh berbeda dengan Indonesia. Melalui pendekatan studi kasus, observasi dan wawancara dengan responden yang terpilih secara *purposive*, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketahanan budaya para pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian akan dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penyusunan model kurikulum pembekalan bagi mereka yang akan belajar di luar negeri, terutama untuk memperkecil kemungkinan para pelajar dan mahasiswa kehilangan identitasnya sebagai Bangsa Indonesia.

Kata kunci: pelajar, model pembelajaran, kurikulum

A. PENDAHULUAN

Ketahanan budaya, adalah suatu istilah yang dimaknai sebagai pengertian dinamis, kuat dan tahan, tidak goyah, dan tidak bergeming. Dari pengertian tersebut, tersirat makna bahwa sesuatu itu tahan terhadap sesuatu yang lain yang dihadapinya, atau lebih khusus lagi tahan terhadap ancaman tertentu. Dalam konteks ketahanan budaya, perlu terlebih dahulu diidentifikasi apakah hal-hal yang mempunyai potensi dan mengancam kebudayaan itu (Edi Sedyawati, 1994). Oleh karena sifat kebudayaan itu dinamis, maka tidak ada satu pun kebudayaan di muka bumi ini yang tidak tersentuh oleh pengaruh nilai dari kebudayaan lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap kebudayaan, pada prinsipnya diakibatkan oleh dua faktor. Pertama faktor internal, yakni perubahan yang disebabkan dari dalam kebudayaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena berbagai penyebab antara lain, kecenderungan manusia pendukung kebudayaan yang selalu ingin

berubah ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Penyebab lainnya bisa jadi karena adanya inovasi dan modifikasi dari hal-hal yang didukungnya, sehingga muncullah gagasan-gagasan pemikiran baru yang berbeda dengan pemikiran yang sebelumnya.

Kedua, perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal atau yang datang dari luar. Faktor kedua inilah yang ditengarai jauh lebih besar pengaruhnya, karena didukung oleh kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini perkembangan teknologi begitu cepat hingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan tersebar luas ke seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

Bagi Bangsa Indonesia, globalisasi mempunyai dua sisi pengaruh, baik positif maupun negatif, seperti:

1. Dari aspek globalisasi ekonomi dan terbukanya pasar internasional yang lebih intensif mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan penerimaan devisa negara, sehingga akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa.

2. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan pengembangan ilmu pengetahuan dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing di sejumlah aspek kehidupan bangsa.

Hal serupa juga terjadi dalam bidang pendidikan, kini telah banyak orang Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai negara. Fasli Jalal ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa, hingga tahun 2010 jumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai negara tercatat 40.000 orang. Sekalipun tidak ada catatan yang resmi, Malaysia dan Singapura adalah negara yang paling banyak diminati oleh pelajar dan

mahasiswa Indonesia, dengan perkiraan jumlah sebesar 10.000 orang. (Fasli Jalal, 9 Januari 2010).

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga mempunyai sisi negatif terhadap kehidupan Bangsa Indonesia, baik yang menetap di negeri sendiri, maupun yang berada di negeri lain. Sisi negatif dari globalisasi, seperti:

1. Paham liberalisme yang dibawa oleh globalisasi dapat mengakibatkan adanya perubahan sudut pandang terhadap ideologi Pancasila ke arah liberalisasi karena diyakini akan membawa kemajuan yang cepat.
2. Kalangan muda banyak yang secara tidak langsung mengalami pengikisan pada identitas diri sebagai Bangsa Indonesia karena gaya hidup dan orientasi nilai budaya mereka pada budaya asing yang dianggap sebagai kiblat.
3. Munculnya sikap individualisme dan ketidakpedulian atas sesama warga.
4. Globalisasi ekonomi menghilangkan rasa cinta terhadap produksi dalam negeri dan dikuatirkan akan berakibat menipisnya rasa patriotisme.

Kekuatiran akan menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air bagi kalangan pelajar/ mahasiswa dikarenakan:

1. Penguasaan akan simbol-simbol kebangsaan masih terbatas, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, baik dalam lingkup kedaerahan (adat istiadat daerah asal) maupun kebudayaan Indonesia pada umumnya.
2. Bergesernya minat generasi muda (terutama yang belajar di negara lain) dari budaya lokal kepada nilai-nilai global yang mendukung sifat materialisme, sehingga mengubah orientasi nilai-nilai kulturalnya karena nilai budaya baru yang diadopsi dianggap memberikan identitas sosial baru kepada dirinya. Identitas baru tersebut acap kali

dikategorikan sebagai gaya hidup (*life style*).

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: sebagai sebuah bangsa, Indonesia berusaha untuk berpijak kukuh pada jati diri bangsa yang berakar kepada nilai-nilai ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda atau kalangan pelajar adalah calon-calon penerus dan pemimpin bangsa di masa depan. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan sejak dini. Strategi yang paling tepat untuk menyiapkan mereka adalah melalui pendidikan dan kebudayaan. Para ahli mengatakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dalam arti keduanya memiliki muatan nilai-nilai.

Budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia, dari budaya dapat terbentuk identitas seseorang, identitas suatu masyarakat dan identitas suatu bangsa. Dalam kaitan dengan pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki jati diri yang kokoh, maka pelajar Indonesia yang berada di luar negeri juga menjadi bagian dari program tersebut. Artinya, perlu dibekali dengan pendidikan berdimensi budaya agar tercipta manusia yang memiliki sikap mental dan integritas yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pertanyaannya adalah, "Apakah para pelajar Indonesia di luar negeri sudah dibekali dengan pendidikan kebudayaan agar mereka tidak mudah terpancing oleh faham-faham dan ideologi budaya lain yang berbeda dengan kepribadian, ideologi dan budaya bangsa Indonesia?"

Penelitian yang dilakukan di Negara Singapura ini ditujukan kepada dua jenis institusi pendidikan. Pertama, institusi pendidikan yang didirikan oleh orang Indonesia. Kedua, institusi pendidikan yang bersifat internasional. Untuk institusi yang pertama, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah para pelajar Indonesia di

Singapura memperoleh pembelajaran yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia, seperti: bahasa, kesenian, adat istiadat, dan tata krama.

2. Untuk mengetahui apakah ideologi negara diperkenalkan dan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri (seperti: simbol-simbol kebangsaan, lagu-lagu, teks Pancasila, dan sebagainya)
3. Untuk mengetahui apakah para pelajar Indonesia diwajibkan mengikuti Upacara bendera, peringatan hari-hari bersejarah Bangsa Indonesia, dan sebagainya, untuk penguatan ketahanan nasional.

Untuk jenis institusi yang kedua, tujuan penelitian terhadap pelajar dan mahasiswa di Singapura adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dari mana pelajar Indonesia memperoleh pembelajaran yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia, ideologi kebangsaan, dan pengetahuan keindonesiaan.
2. Untuk mengetahui peranan orangtua, organisasi pelajar, dan institusi perwakilan negara Indonesia dalam menanamkan kesadaran berbangsa dan berbudaya Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana semangat kebangsaan memengaruhi pola interaksi pelajar Indonesia dengan pelajar dari negara lainnya.

Sasaran dan ruang lingkup penelitian ini terdiri atas dua hal, pertama adalah ruang lingkup materi, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersekolah di Singapura. Kedua, aktivitas belajar dan mengajar WNI di dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan aktivitas sosial budaya di luar lingkungan keluarga. Adapun ruang lingkup spasial penelitian adalah sekolah Indonesia atau lokasi yang dihuni oleh komunitas Indonesia di Negara Singapura.

Dalam realitasnya, Warga Negara Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri terdiri atas

beragam etnis dengan latar belakang budaya/tradisi yang berbeda. Kemajemukan tersebut harus senantiasa diperhitungkan artinya dalam mengambil kebijakan dan keputusan sehingga tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Untuk itu metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi kasus. Hal ini dilakukan mengingat kendala teknis dan keterbatasan waktu, dengan menggunakan cara tersebut, pelaksanaan penelitian dapat mempersempit ruang lingkup lokus dan populasi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yakni menelaah tulisan-tulisan atau memahami realitas bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan ketahanan budaya di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri, hendaknya dijadikan kerangka dasar dalam pengembangan pendidikan kebudayaan Indonesia. Untuk melengkapi data tentang Negara Singapura, penelaahan terhadap artikel atau tulisan yang berkaitan dengan profil dan kondisi negara tersebut kaitannya dengan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Langkah berikutnya adalah melakukan observasi atau pengamatan terlibat dengan komunitas yang dijadikan sampel penelitian, yakni suatu arena yang menjadi tempat pertemuan para pelajar dan masyarakat Indonesia di Negara Singapura. Observasi juga dilakukan di Sekolah Indonesia Singapura, sebagai tempat yang menjadi arena penanaman nilai budaya Indonesia dan daerah-daerah asal siswa. Teknik wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih melalui metode *purposive* dengan asumsi bahwa responden terpilih dapat mewakili sebagian atau seluruh kalangan dalam komunitasnya. Mereka terdiri atas informan kunci (*key informan*), seorang yang ditokohkan oleh kalangan pelajar atau ketua himpunan pelajar Indonesia, anggota perhimpunan, serta pejabat di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara bersangkutan.

Secara konseptual kata “ketahanan budaya”

adalah suatu istilah yang dapat diartikan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, untuk menghindari salah paham, lebih dahulu perlu dijelaskan bagaimana kata-kata itu diartikan dalam penelitian ini. Istilah “ketahanan budaya” diambil dalam pengertiannya yang dinamis, dan bukan dalam pengertian “tidak bergerak”, atau statis. Kata “tahan” itu sendiri mengandung makna “tidak goyah”, “tidak bergeming”, bahkan disebut sebagai “mampu menderita”. Dari pengertian di atas, tersirat makna bahwa sesuatu itu tahan terhadap sesuatu yang lain yang dihadapinya, atau lebih khusus lagi tahan terhadap suatu ancaman tertentu. Dengan demikian maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi, apakah hal-hal yang mempunyai potensi untuk menyentuh, atau bahkan mengancam kebudayaan itu.

Ada dua golongan yang mempunyai potensi demikian. Pertama, sentuhan terhadap kebudayaan itu datang dari dorongan-dorongan perubahan yang datang dari masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Kedua, adalah hal-hal yang mempunyai potensi mengancam kebudayaan adalah pengaruh-pengaruh dari luar kebudayaan yang bersangkutan. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kontak-kontak atau interaksi antarbangsa. Kuat atau lemahnya budaya luar memengaruhi bergantung kepada beberapa hal, antara lain:

1. Intensitas penampilan (*exposure*);
2. Kedudukan golongan masyarakat yang menerimanya;
3. Kedudukan golongan masyarakat yang menyebarkannya. (Edi Sedyawati, 1995/1996:112-116).

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “pelajar” adalah anak sekolah, terutama mereka yang duduk pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pelajar bisa juga diartikan sebagai murid, anak didik, atau siswa.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) adalah organisasi yang beranggotakan para

pelajar dari Indonesia yang sedang belajar di luar negeri. Mereka terdiri atas para pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata pendidikan di negeri yang bersangkutan.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Singapura (PPIS) berdiri sejak tahun 2005, yang kemudian diresmikan pada tanggal 11 Maret 2006 dan didukung penuh oleh KBRI di Singapura. PPIS mempunyai fungsi sebagai wadah yang mempersatukan berbagai komunitas pelajar Indonesia di berbagai institusi pendidikan di Singapura. Tujuannya adalah untuk menjalin dan mempererat hubungan antar pelajar Indonesia di Singapura dan mempersatukan anggotanya untuk menggalang aspirasi serta kerjasama dan berkontribusi melalui usaha-usaha yang bermanfaat bagi seluruh pelajar Indonesia di Singapura dan bagi bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya, sebagai perwujudan usaha pengembangan generasi muda yang handal dan dinamis (*Perhimpunan Pelajar Indonesia*. http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pelajar_Indonesia. Diunduh tanggal 3 Maret 2013, pukul 14.04).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Singapura Kaleidoskop Multikultural

Singapura atau secara resmi dikenal sebagai Republic of Singapore adalah sebuah negara yang mempunyai ciri khusus, yakni *Hi-tech* atau negara yang canggih bidang teknologinya, juga menjadi salah satu negara terkaya di kawasan Asia Tenggara. Berbagai bidang kehidupan selalu diawasi dengan ketat oleh pemerintah sehingga Singapura dikenal dengan istilah *Strict Social Control*.

Negara ini berlokasi pada sebuah pulau utama dan dikelilingi oleh sekitar 50 pulau kecil lainnya, yang seluruhnya dihubungkan dengan jembatan dan tanggul yang dibangun dengan sangat kokoh. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, Singapura tumbuh menjadi kawasan yang penuh dengan gedung pencakar langit, hingga menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi siapa saja yang bekerja keras di negeri ini.



Gambar 1. Peta Negara Singapura

Sebagian besar penduduk Singapura tinggal dalam perumahan umum atau apartemen yang disebut "*Public-Housing Tower*". Mereka sangat menikmati hidup karena memiliki penghasilan yang baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, mereka harus patuh terhadap aturan yang ditentukan pemerintah yang mengawasi rakyatnya dengan hukum yang pasti bagi mereka yang melanggar peraturan.

2. Penduduk dan Kehidupan Sosial Budaya

Sebagai masyarakat yang multirasial, Singapura adalah rumah bagi suatu paduan komunitas, budaya, dan agama, masing-masing dilengkapi dengan warisan budaya yang kaya dari masa lalu. Lebih dari hanya berdampingan satu dengan lainnya, terdapat juga rasa saling menghormati dan hal lain yang dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari dan perayaan yang meriah.

Kondisi yang membuat Singapura demikian menarik adalah jalinan budayanya. Berbagai budaya itu bisa hidup bersatu sebagai satu masyarakat yang kohesif. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari Singapura adalah sifat penduduknya yang kosmopolitan sejati, sebuah hasil alami dari posisi geografis negeri ini dan keberhasilan komersialnya.

Menurut catatan sejarah, Singapura didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles

sebagai sebuah pos perdagangan pada tanggal 29 Januari 1819. Kota kecil di tepi pantai ini segera menarik para imigran dan pedagang dari berbagai negeri, terutama dari Cina, India, Indonesia, Semenanjung Malaya, dan Timur Tengah. Para imigran yang datang masing-masing membawa serta budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisinya sendiri. Kemudian terjadi pula perkawinan silang dan integrasi yang turut membantu menyatukan pengaruh yang beragam ini menjadi suatu jalinan masyarakat Singapura yang multifaset.

Di penghujung abad ke-19, Singapura telah menjadi kota paling kosmopolitan di kawasan Asia dengan lima etnis utama, yakni: Melayu, Cina, India, Peranakan, dan Eurasia. Di bidang kependudukan, pemerintah Singapura mendorong agar rakyatnya memiliki anak lebih dari dua dan mengajak agar rakyatnya memiliki karakter yang jauh lebih baik. Penduduk Singapura sangat dianjurkan untuk menggunakan Bahasa Inggris dengan baik, yang disebut dengan *"Speak Good English"*. Dari komposisi jumlah penduduknya diketahui bahwa Warga Negara Singapura keturunan Cina menduduki posisi tertinggi dengan prosentasi 74,2 % dari seluruh penduduk, sementara Etnis Melayu secara prosentasi berjumlah 13,4%, Etnis India 9,3 %, dan 3,2 % sisanya terdiri atas Etnis Eurasia, Peranakan, dan etnis lain.

Selain jumlah warga negara yang tetap, diketahui juga sejumlah pekerja asing yang tinggal di Singapura. Hingga tahun 2010 jumlah penduduk Singapura tercatat sebesar 4,5 juta orang. Sesuai dengan penduduknya yang multikultur, pemerintah setempat menetapkan empat bahasa utama yang menjadi pengantar dalam komunikasi, yang disebut dengan *"Major Languages"*, yakni: Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa Inggris menjadi jembatan yang bisa menghubungkan pergaulan antarbangsa, sedangkan bahasa lainnya digunakan oleh sesama warga dari mana mereka berasal. Sebagai pengakuan dan untuk menghormati Etnis Melayu sebagai penduduk asli Singapura, Pemerintah

Singapura menetapkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional.

Meskipun Singapura merupakan negara dengan penduduk yang multikultur, akan tetapi hanya ada satu partai yang dominan, yakni the People's Action Party (PAP). Partai inilah yang dominan hidup di Singapura semenjak negara ini merdeka, dengan kekuatan suara kurang lebih 60% dari seluruh penduduk.

Kehidupan beragama di Singapura dapat dikatakan cukup harmonis sekalipun terdapat lima agama besar yang dianut oleh warganya, yakni: Tao, Budha, Islam, Kristen, dan Hindu. Setiap penganut agama yang berbeda selalu menghormati penganut lain tanpa paksaan. Perayaan keagamaan menjadi milik semua warga hingga tidak ada kesenjangan satu dengan lainnya. Tidak adanya kesenjangan antara penganut agama satu dengan yang lain juga terlihat dari tempat ibadahnya. Tempat ibadah dari agama yang berbeda acap kali dibangun berdampingan, seperti masjid berdekatan dengan gereja, atau kelenteng dengan mandhir Hindu di permukiman umum. Demikian kehidupan beragama mendapat perhatian yang besar dari pemerintah sehingga setiap pemeluk agama apapun bisa beribadat dengan tenang.

Negara Singapura juga acap kali dijuluki sebagai salah satu *"Asia's Economic Tigers"* atau Macan Ekonomi di kawasan Asia. Kehidupan ekonominya yang pesat tersebut didorong oleh perusahaan elektronik dan iklim pelayanan keuangan yang sangat bagus hingga bisa bertahan menghadapi krisis perbankan pada tahun 1997, 2003, dan 2009 yang lalu.

Di masa yang akan datang, Singapura menghadapi tantangan yang kuat terutama dari negara tetangganya. Oleh sebab itu, kini pemerintahannya sedang mempelajari kemungkinan untuk membuka peluang di bidang/ sektor jasa dan industri pariwisata.

3. Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Bidang Pendidikan dan Seni Budaya

a. Bidang Pendidikan

Selain menjadi perwakilan Pemerintah Indonesia di Singapura, dalam banyak hal, seperti bidang pendidikan, KBRI juga turut membina Sekolah Indonesia Singapura (SIS). Jumlah murid yang bersekolah di SIS ini hingga tahun 2011 tercatat 140 orang siswa, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Kepala sekolah dan guru adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalam perkembangannya ada juga guru yang non-PNS.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak KBRI tidak semata-mata terhadap para guru, tetapi juga siswa dengan maksud kegiatan belajar dan mengajar bisa berjalan dengan baik dan sesuai sasaran. Di luar kegiatan belajar di kelas para siswa juga diberi kesempatan mengembangkan talenta masing-masing, yang difasilitasi oleh sekolah. Di lingkungan sekolah tersebut kini terdapat berbagai fasilitas belajar maupun pengembangan bakat siswa. Untuk memantau proses kemajuan belajar anak, telah dibentuk pula komite sekolah dengan anggotanya para orangtua siswa, dengan tugas memberikan masukan bagi peningkatan kegiatan belajar dan kegiatan lainnya di Sekolah Indonesia Singapura.

Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Singapura telah pula ditandatangani dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MOU) tanggal 24 Juni 2006, meliputi kerjasama (*linkages*) dengan perguruan tinggi ke dua negara, yaitu antara National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University (NTU), dan Singapore Management University (SMU) dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Di samping itu juga ada program sekolah kembar, yakni kegiatan bersama, seperti perkemahan, pertukaran kunjungan, dan pelatihan di antara para pengajar. Selain kegiatan di atas, KBRI juga memfasilitasi berbagai kunjungan sekolah dan perguruan tinggi yang akan melakukan studi banding atau kerjasama di bidang pelatihan dan pertukaran pelajar dan guru di Singapura (*Perkembangan Hubungan Bilateral*. [http://](http://marcolausantosa.blogspot.com/2011/01/perkembangan-hubungan-bilateral.html#ixzz1BepCoQI)

marcolausantosa.blogspot.com/2011/01/perkembangan-hubungan-bilateral.html#ixzz1BepCoQI. Diunduh tanggal 5 Maret 2013, pukul 10.15).

b. Seni dan Budaya

Dalam bidang seni dan budaya telah banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak KBRI. Bukan hanya dalam bentuk pertunjukan kesenian, tetapi juga berbagai usaha lain, seperti pameran produk Indonesia (batu mulia, kuliner, busana, dan seni kriya) dan promosi kepariwisataan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia. Kerjasama *people to people contact* bidang sosial budaya antara kedua negara juga dilakukan. Dengan kata lain, persahabatan antara Indonesia dengan Singapura dibentuk melalui banyak kepentingan bersama.

Pergelaran berbagai kesenian Indonesia di pusat-pusat kebudayaan Singapura juga mencerminkan bahwa kebudayaan Indonesia telah dikenal baik oleh masyarakat Singapura. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seniman/seniwati dari Indonesia rupanya jauh lebih populer dan diminati oleh banyak kalangan di Singapura. Contoh konkret yang terjadi, pada saat penelitian dilakukan, tim peneliti diundang untuk menghadiri acara “Semarak Seni 2011: Tradisi Kekal Seni Semarak” yang diselenggarakan di Goodman Arts Centre-Blackbox. Acara tersebut dibuka dengan pertunjukan Wayang Kulit kolaborasi antara mahasiswa ISI Yogyakarta dengan mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi di Singapura.

4. Pola Pendidikan yang Berbasis Kebudayaan Indonesia (Hasil Kajian terhadap Sekolah Indonesia Singapura)

a. Pola Penanaman Nilai Budaya di Lingkungan Sekolah Indonesia Singapura (SIS)

Sekolah Indonesia Singapura didirikan pada tanggal 20 Mei 1969, bertempat di Holland Road. Pada tahun pertama, sekolah

ini hanya dibuka untuk kelas Taman Kanak-kanak (TK). Pada tahun 1970 kemudian dibuka Sekolah Dasar (SD), pada tahun 1971 dibuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan akhirnya pada tahun 1974 dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA). Dikarenakan sekolah ini berkembang pesat dan membutuhkan perluasan lahan untuk menambah prasarana belajar dan mengajar, pada tanggal 27 Maret 1987 mulai dilakukan pembangunan gedung baru SIS yang berlokasi di Siglap Road Nomor 20A, Singapura 455859. Bersamaan dengan pembangunan gedung sekolah, dibangun juga perumahan guru dan pegawai SIS lainnya agar mereka bisa menekuni pekerjaannya tanpa harus memikirkan tempat tinggal. Status SIS berdasarkan Surat Keputusan (SK) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Luar Negeri RI Nomor 191/81/01 dan 051/V.1981 tanggal 21 Januari 1981 tentang Petunjuk Pengelolaan Sekolah-Sekolah Indonesia di Luar Negeri, diakui sebagai Institusi Sekolah Swasta Berbantuan.



Foto 1. Gerbang Sekolah Indonesia Singapura

Sekolah Indonesia di Singapura diperuntukkan bagi putra-putri WNI yang bekerja dan menetap di Singapura, yang memiliki harapan bahwa mereka dapat memperoleh pendidikan berbasis Kurikulum Nasional RI yang berkualitas. Selain pendidikan bermutu, siswa-siswi SIS juga mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan seni budaya Indonesia, serta mempraktikkan keterampilan tersebut di berbagai kesempatan.

Selain tetap mempertahankan kepribadian Indonesia, siswa-siswi SIS juga didorong untuk menjalin persahabatan dan memperkenalkan seni budaya Indonesia dalam rangka meningkatkan *people to people relations*.

SIS yang berada di bawah pembinaan KBRI tersebut mempunyai visi “Kompeten, Konstruktif, Berkepribadian Bangsa, dan Taqwa”. Visi tersebut kemudian dirinci menjadi beberapa *statement*, antara lain:

- 1) SIS menyiapkan pendidikan untuk anak-anak WNI maupun asing.
- 2) SIS berfungsi sebagai payung untuk membangun dan mengembangkan rasa nasionalisme Indonesia, memperkokoh rasa persatuan dan kepribadian Indonesia.
- 3) SIS berpartisipasi dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Singapura pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas, SIS menerapkan berbagai peraturan untuk 150 orang siswa-siswinya untuk menciptakan suasana kondusif dan disiplin di kalangan pelajar. Peraturan tersebut antara lain berkenaan dengan pakaian seragam sekolah yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Hari Senin - Rabu siswa mengenakan seragam hem putih dan celana pendek warna biru untuk tingkat SD sampai dengan SMP, sedangkan siswi mengenakan blus putih dan rok biru. Sementara di tingkat SMA, siswa mengenakan hem putih dan celana panjang biru, siswi mengenakan blus putih dan rok biru.
- 2) Hari Kamis seluruh siswa dan siswa dari tingkat dasar dan menengah diwajibkan mengenakan baju bagian atas (blus atau hem) batik, dan rok atau celana biru.
- 3) Hari Jumat semua siswa dan siswi wajib mengenakan pakaian pramuka karena hari itu terdapat kegiatan kepramukaan.

b. Fasilitas Penunjang

Untuk mempermudah proses belajar dan mengajar, selain disediakan berbagai fasilitas pendidikan, seperti: ruang belajar (kelas), laboratorium bahasa, perpustakaan, serta ruang kepala sekolah dan guru, di SIS tersedia juga sebuah *hall* (lapangan tertutup) yang bersifat multifungsi. Artinya, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti: pertemuan, resepsi, olahraga, upacara, latihan, dan pertunjukan seni budaya, bahkan untuk menyelenggarakan berbagai seremonial yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan.

Prasarana bermain untuk siswa Taman Kanak-kanak (TK) juga disediakan dalam kondisi yang sangat baik. Jenis permainan anak-anak tadi disesuaikan dengan usia dan minat anak, sehingga mereka bisa menikmati permainan sambil belajar bekerjasama dengan sesamanya. Jenis sarana bermain anak-anak ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan yang biasa kita jumpai di tanah air. Tujuannya sudah tentu untuk melatih psikomotorik anak-anak.

SIS juga dilengkapi dengan kantin yang terbuka untuk seluruh murid ataupun masyarakat sekitarnya. Di kantin ini tersedia makanan dan minuman yang berasal dari Indonesia, atau bercita rasa daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar siswa tetap mengenal kekayaan kuliner bangsanya. Kantin ini dikelola oleh seorang ibu yang berasal dari Indonesia dan bersuamikan pria setempat. Keberadaan kantin ini sangat membantu para siswa memenuhi kebutuhan makan dan minum selama mereka berada di sekolah. Sekalipun hari libur (Minggu atau hari besar lainnya), kantin tetap buka untuk melayani para guru, staf SIS, ataupun mahasiswa dari berbagai himpunan (misalnya PPIS atau himpunan pelajar/ mahasiswa lainnya) yang sedang beraktivitas olahraga dan kesenian.

Sesuai dengan visi dan misi sekolah, yakni melahirkan siswa yang bukan saja cerdas dan pandai atau memahami pengetahuan dengan baik, para siswa lulusan SIS diharapkan menjadi manusia yang kukuh

pada kepribadian bangsanya. Oleh karena itu diperlukan berbagai sarana dan fasilitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Selain konsisten menempatkan berbagai simbol kebangsaan, seperti: Garuda Pancasila, foto presiden dan wakilnya, Bendera Merah Putih di berbagai sudut sekolah, di lingkungan SIS juga dijumpai berbagai benda budaya agar siswa tetap mengingat kekayaan budaya bangsanya. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari perlengkapan sekolah, seperti: hiasan dinding, taplak meja, bahkan motif-motif yang tertera di berbagai pojok bangunan sekolah selalu menyertakan motif batik atau kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia.



Foto 2. Hiasan dinding terbuat dari aneka ragam motif batik

Di samping penyediaan prasarana-prasarana di atas, SIS juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan prestasi, kemampuan, dan keterampilan para siswa. Fasilitas-fasilitas tersebut, antara lain:

1) *Smart Consultant*

Smart Consultant adalah sebuah ruang kelas/ ruang konseling yang diperuntukkan bagi siswa untuk melakukan konsultasi dengan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) jika ada masalah yang berkaitan dengan menurunnya prestasi belajar siswa, hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan beradaptasi, atau persoalan lain yang memerlukan penanganan serius dari pihak sekolah.

2) *Languages Clinic*

Languages Clinic merupakan laboratorium untuk melatih kemampuan berbahasa.



Foto 3. Sepasang boneka *Ondel-Ondel* yang menjadi ikon orang Betawi

Languages Clinic ini tidak berbeda dengan sebuah laboratorium bahasa yang dilengkapi berbagai peralatan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran bahasa. Ruang ini bukan saja dipergunakan untuk sesi pelajaran bahasa asing, seperti Inggris dan Mandarin, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas siswa dalam berbahasa Indonesia.

3) *Dancing Studio/ Studio Tari*

Untuk memfasilitasi minat siswa, terutama yang memiliki talenta/ bakat khusus di bidang tari, pihak SIS menyediakan sebuah ruang khusus untuk dijadikan studio tari, khususnya tari-tari tradisional Indonesia. Di ruang ini para siswa juga dapat berkreasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya, seperti peralatan musik dan gamelan. Sekalipun SIS sangat konsisten untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dan tradisi yang didukung oleh setiap suku bangsa di Indonesia, namun pihak SIS menyadari bahwa siswa juga memerlukan perluasan wawasan internasional, sehingga diperbolehkan untuk menciptakan koreografi tari-tarian modern selama tidak menyimpang dari aturan sekolah. Karya cipta siswa tersebut, dalam berbagai kesempatan akan ditampilkan di auditorium atau gedung serba guna.

4) *Display/ Peragaan Busana Daerah dan*

Boneka Etnik

Model penanaman nilai budaya bangsa yang diselenggarakan oleh SIS sangat luwes dan tidak kaku, artinya seluruh siswa bisa belajar kebudayaan tanpa harus duduk di dalam kelas. Secara bertahap siswa mengenali khasanah budaya bangsa melalui berbagai peragaan di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, sambil bermain atau beristirahat mereka bisa

mengenali busana daerah yang dipajang di koridor depan kelas. Selain peragaan busana daerah, siswa juga bisa mengetahui ikon-ikon daerah yang berbentuk boneka. Ketika penelitian berlangsung, sepasang *ondel-ondel* dan busana dari sukubangsa Betawi sedang dipajang di lingkungan SIS.

Selain memajang khasanah budaya tersebut di atas, di lobi SIS juga dipajang replika Candi Prambanan, warisan sejarah dari masa Kerajaan Mataram-Hindu. Dengan melihat replika candi tersebut siswa akan mempelajari perjalanan sejarah bangsa dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, sudah tentu gedung perwakilan negara pun harus memiliki *image* atau citra Indonesia. Untuk mewujudkan gambaran Indonesia tersebut, gedung KBRI di Singapura telah menempatkan berbagai benda budaya yang bisa membangun citra kebesaran budaya Indonesia. Salah satunya adalah menempatkan relief yang menggambarkan Epos Ramayana pada salah satu bagian dinding di lingkungan gedung KBRI. Maksudnya tidak lain untuk mengingatkan setiap Warga Negara Indonesia yang berkunjung ke KBRI, bahwa wayang adalah salah satu mata budaya Indonesia yang adi luhung.



Foto 4. Anak-anak muda yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di KBRI

5) Sekretariat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja Dwi Mingguan

Selain menjalankan fungsi pendidikan formal dan menghasilkan siswa yang berkualitas, SIS juga mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk turut mendidik warga negara Indonesia lainnya di luar siswa yang resmi. Seperti diketahui, dalam catatan KBRI jumlah tenaga informal yang berada di Singapura hingga tahun 201 tercatat 70.000 orang. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor jasa, tepatnya menjadi pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka yang masih berusia muda dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Jika majikan mereka mengizinkan, para pekerja di bidang jasa tadi bisa mengikuti pendidikan setiap dua minggu sekali di lingkungan SIS. Pihak KBRI memberikan istilah yang lebih terhormat kepada pekerja dengan Penata Laksana Rumah Tangga. Di bawah KBRI, SIS diminta memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka, dengan harapan di kemudian hari bisa lepas dari

ketergantungan kepada majikan dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik.

6) Pendidikan Agama

Sebagai bangsa yang mayoritas memeluk Agama Islam, keberadaan Sekolah Indonesia Singapura pun mengacu kepada kenyataan tersebut. Artinya, pendidikan agama yang diberikan kepada siswa adalah Agama Islam, sementara itu siswa yang memeluk agama lain dipersilakan untuk belajar sendiri. Namun, pihak sekolah memberikan fasilitas untuk mendatangkan guru pengajar agama lain. Penghormatan dan toleransi siswa terhadap keyakinan yang berbeda ditanamkan sejak tingkat Sekolah Dasar, mengingat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak akan bergaul dan berkomunikasi dengan berbagai sukubangsa dan agama yang berbeda. Dengan demikian dapat dipastikan ketika siswa telah menyelesaikan pendidikannya di SIS akan mampu beradaptasi dalam pergaulan yang multikultur.

Untuk menanamkan ketakwaan kepada siswa, di lingkungan SIS disediakan juga prasarana beribadat, yakni Mushala yang cukup besar, sehingga siswa atau para pengajar yang akan menunaikan ibadat sholat tidak perlu mencari tempat lain.

7) Kegiatan Pramuka

Seperti telah diuraikan di atas, setiap hari Jumat seluruh siswa SIS diwajibkan mengenakan pakaian seragam Pramuka. Sebagaimana yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, kegiatan ini diupayakan sebagai:

- Suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa.
- Dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah, di luar lingkungan pendidikan keluarga, dan di alam terbuka.
- Dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh SIS melibatkan semua siswa, kecuali siswa kelas III SLTP dan III SLTA, karena mereka harus fokus pada ujian. Pertimbangan diselenggarakannya kegiatan kepramukaan adalah, bahwa penanaman nilai-nilai, kepribadian, dan sikap yang positif harus dimulai sejak usia dini, yakni antara 7 hingga 25 tahun. Sebagaimana simbolnya yang berupa Tunas Kelapa, gerakan pramuka pada hakikatnya menekankan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Prinsip dasar Pramuka yang diterapkan di SIS meliputi: Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap pribadi, dan taat kepada Kode Kehormatan Pramuka. Sementara itu, hasil yang diharapkan dari gerakan kepramukaan adalah siswa yang memiliki kemandirian, keterampilan, menghargai kerjasama, jiwa patriotisme, dan keanekaragaman budaya (multikultur). Pada Bulan November 2011 Pramuka dari SIS mengikuti Jambore Internasional yang diselenggarakan oleh Negara Bagian Trengganu, Malaysia. Pada tahun yang sama juga mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) 2011 yang diselenggarakan di Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

8) Upacara Bendera

Seperti yang diberlakukan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, setiap hari Senin seluruh siswa SIS diwajibkan mengikuti upacara bendera sebelum pelajaran dimulai. Dalam kesempatan tersebut, tata cara upacara mengikuti aturan yang berlaku secara nasional di Indonesia, yakni diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah-naskah, dan jika diperlukan dilanjutkan dengan menyanyikan beberapa buah lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dilakukan secara langsung oleh siswa, artinya, tidak dibenarkan menggunakan kaset. Dengan demikian,

seluruh siswa diharuskan menghafal sedikitnya tiga atau empat lagu-lagu nasional di samping lagu Indonesia Raya. Setiap selesai upacara kepala sekolah selalu menyampaikan amanat atau pesan yang intinya mengimbau agar siswa senantiasa tekun belajar, tidak terpengaruh oleh model pergaulan yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, dan banyak hal lain yang intinya menanamkan kecintaan siswa kepada bangsanya.

9) Kurikulum/ Mata Pelajaran

Kurikulum yang diterapkan dalam sistem pembelajaran di SIS mengacu kepada Kurikulum Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Bahan ujian juga disamakan dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Pembobotan mata pelajaran juga disesuaikan dengan program nasional, hanya saja mata pelajaran Bahasa Inggris lebih diperbanyak jumlah jamnya, mengingat siswa harus menguasai bahasa tersebut agar mampu berkomunikasi dengan warga dari berbagai sukubangsa yang ada di Singapura.

Selain menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan Program Nasional, SIS juga memiliki ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Program tersebut dimaksudkan agar siswa memiliki pengetahuan yang handal, mampu beradaptasi dengan semua kalangan pelajar di dunia internasional, namun tetap berkepribadian Indonesia. Untuk sampai kepada target tadi, SIS menerapkan berbagai upaya seperti kemampuan berbahasa, berkesenian, berolahraga, dan sebagainya.

10) Zona Bahasa Daerah

Di lingkungan SIS terdapat suatu zona yang sangat spesial, yakni adanya Zona Bahasa Daerah. Yang dimaksud dengan Zona Bahasa Daerah tidak lain adalah suatu area tertentu dalam wilayah SIS yang mewajibkan siswa berbicara dalam bahasa daerah asalnya, jika mereka berada dalam wilayah tersebut. Karena siswa terdiri dari macam-macam sukubangsa

di Indonesia, tidak heran apabila dalam lingkungan SIS acapkali terdengar siswa bicara dengan temannya menggunakan Bahasa Minang, Jawa, Sunda, atau bahasa daerah lainnya. Keberadaan Zona Bahasa Daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada para siswa yang berasal dari berbagai daerah itu untuk mempelajari lebih dalam khasanah budaya daerah asal mereka, mendukung pelestarian bahasa dan sastra, serta mempermudah komunikasi dengan warga sesama daerahnya.



Foto 5. Zona bahasa daerah

11) Zona Bahasa Asing

Selain adanya Zona Bahasa Daerah seperti diuraikan di atas, di lingkungan SIS juga terdapat Zona Bahasa Asing. Ada dua bahasa utama yang harus diperhatikan para siswa. Pertama, zona Bahasa Inggris, kedua, zona Bahasa Mandarin. Pertimbangan menciptakan dua ruang bahasa tersebut tentu saja dengan pemikiran yang matang, yakni siswa diajarkan lebih mendalam tentang Bahasa Inggris sebagai bahasa utama kedua di Singapura. Dengan menguasai Bahasa Inggris diharapkan mereka tidak mengalami kendala dalam berkomunikasi dan berhadapan dengan siswa dari berbagai sekolah yang ada di Singapura. Penguasaan Bahasa Inggris juga menjadi sangat penting, mengingat adanya kegiatan yang diselenggarakan dengan sekolah lain, seperti diskusi antar institusi pendidikan, festival kebudayaan/ kesenian antarbangsa yang ada di Singapura, dan untuk mempermudah

pergaulan di lingkungan internasional.

Menguasai Bahasa Inggris juga akan meningkatkan pengetahuan siswa karena banyak bahan bacaan yang harus mereka baca menggunakan Bahasa Inggris. Sementara itu Bahasa Mandarin juga diterapkan dalam Zona Bahasa Asing dengan pertimbangan bahwa mayoritas warga Singapura adalah keturunan Cina. Demikian juga banyak siswa asal Indonesia yang berdarah Cina. Oleh karena itu Bahasa Mandarin menjadi pilihan untuk dikuasai para siswa. Perkembangan Negara Cina dewasa ini juga menjadi pertimbangan, karena banyak pengetahuan dari negeri tersebut yang bisa diadopsi untuk meningkatkan wawasan dan cakrawala siswa di SIS.

Dengan adanya Zona Bahasa Daerah dan Zona Bahasa Asing, menunjukkan kesungguhan SIS membina dan mendidik siswa sehingga lulusannya kelak bukan saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tetap menjadi orang Indonesia yang berpijak pada kepribadian Indonesia seperti kecintaannya pada Bahasa Indonesia.

12) Ruang Kelas yang Bernuansa Etnik/ Suku Bangsa di Indonesia

Selain adanya zona-zona bahasa, SIS juga menanamkan pengetahuan tentang kekayaan dan nilai budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Agar siswa tidak melupakan asal-usul daerahnya, setiap ruang kelas dinamai dengan nama provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, seperti: Kelas Aceh Darussalam, Kelas Sumatera Barat, Kelas Jawa Timur, Kelas Jawa Barat, Kelas Sumatera Utara, dan lain-lain.

Setiap kelas tadi akan dilengkapi dengan berbagai atribut budaya yang merujuk kepada khasanah budaya daerah bersangkutan. Sebagai contoh, Kelas Aceh Darussalam, selain ada Peta Provinsi Aceh, juga terdapat foto-foto atau gambar-gambar pahlawan Aceh, seperti: Cut Nyak Dien, Tengku Umar, Laksamana Malahayati, dan lain sebagainya. Demikian juga kekayaan seni dan tradisi diletakkan

dalam berbagai sudut kelas, misalnya: maket rumah adat Aceh dengan arsitektur khasnya, peralatan kesenian, pakaian adat, senjata tradisional (*rencong*), dan simbol-simbol budaya Aceh lainnya.

Hal serupa juga dijumpai pada kelas-kelas lain. Selain perlengkapan belajar dan mengajar, seperti: kursi, meja, lemari koleksi buku, dan sebagainya, juga dijumpai alat peraga untuk memperkenalkan kebudayaan masing-masing daerah kepada siswa. Seluruh siswa akan bergiliran menempati ruang kelas sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikutinya. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh siswa SIS akan mengenal kebudayaan seluruh suku bangsa di Indonesia melalui kelas-kelas tadi.

Di kelas Jawa Timur juga dijumpai berbagai simbol yang merujuk kepada kebudayaan Jawa Timur, seperti: peta Jawa Timur, foto-foto tokoh atau tokoh pahlawan, serta benda yang bernilai budaya lain, seperti: model angkring, model rumah adat, dan potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur.

Di kelas Bali, seperti halnya kelas yang lain, dijumpai berbagai benda yang menunjukkan kebesaran budayanya, seperti: peta dan foto/gambar potensi wisata Bali terpampang di sebagian besar dinding kelas. Hal ini menunjukkan bahwa Bali dikenal luas di kalangan dunia internasional sebagai daerah wisata yang diunggulkan. Selain memajang keindahan Bali, ada juga busana adat yang disimpan dalam lemari, buku-buku referensi, dan benda-benda budaya lainnya.

c. Kegiatan Penunjang di SIS

1) Pergelaran Kesenian Karya Siswa

Pada setiap hari Jumat, selain diisi dengan kegiatan kepramukaan, SIS juga menjadikan hari ini sebagai ajang presentasi kepiawaian siswa mengolah seni. Secara bergiliran, setiap kelas wajib mempertunjukkan hasil karya seni mereka di hadapan siswa lainnya di gedung pertemuan. Dalam agenda tersebut, siswa diperbolehkan mempertunjukkan aneka ragam jenis kesenian, seperti: tarian,

nyanyian, musik, dan sebagainya, dengan catatan harus berakar pada kesenian daerah di Indonesia. Para siswa diperbolehkan memilih jenis kesenian apa saja yang sesuai dengan minat mereka selama tidak menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati pihak sekolah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertebal kecintaan siswa terhadap kesenian daerah di Indonesia, sekalipun mereka tinggal dan bergaul dengan bermacam-macam bangsa dan kebudayaan yang berbeda. Hasil dari kegiatan mingguan ini adalah kesiapan siswa SIS ketika ada kesempatan untuk tampil di hadapan khalayak luas. Ikatan orangtua murid dan sekolah yang dibina oleh SIS memungkinkan kegiatan pertunjukan seni siswa ini dihadiri pula oleh orangtua bahkan undangan lainnya.

2) Bulan Bahasa (Indonesia)

Setiap tahun SIS menyelenggarakan Bulan Bahasa yang diisi dengan berbagai kegiatan. Sebagai contoh, kegiatan Bulan Bahasa yang dilaksanakan pada tahun 2011, meliputi:

- a) Lomba mendongeng dalam bahasa Indonesia;
- b) Lomba Desain poster;
- c) Lomba membuat pesan berantai;
- d) Lomba Cipta dan baca Puisi;
- e) Lomba cepat tangkas berbahasa;
- f) Lomba membuat iklan layanan masyarakat.



Foto 6. Poster kegiatan Bulan Bahasa 2011

5. Peran Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura (PPIS) dalam Ketahanan Budaya Indonesia

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura (PPIS) pada hakikatnya merupakan organisasi yang beranggotakan para pelajar Indonesia yang saat ini menjadi representasi dari mahasiswa di berbagai universitas di Singapura. Hingga saat ini anggota PPIS yang tercatat adalah mereka yang sedang menuntut ilmu di Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS), Singapore Management University (SMU), Singapore Institute of Management (SIM), Productivity Standard Board Academy (PSB Academy), TMC Academy, dan masih banyak lagi.

PPIS berdiri pada tahun 2005 dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 2006 oleh Duta Besar RI untuk Singapura ketika itu. Keberadaan PPIS ini dilindungi dan didukung oleh KBRI Singapura. PPIS berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai komunitas pelajar Indonesia yang tersebar di Singapura, dan menjalin atau mempererat hubungan antarpelajar, menggaling aspirasi, serta kerjasama untuk berkontribusi melalui usaha-usaha yang bermanfaat bagi seluruh pelajar Indonesia di Singapura dan bagi Bangsa Indonesia pada umumnya.

PPIS senantiasa memiliki agenda tahunan yang tetap, bukan saja untuk kemajuan organisasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pelajar Indonesia yang ada di Singapura. Agenda tersebut, antara lain:

a. Pada tahun 2011 PPIS telah menyelenggarakan Liga Basket dan Pertandingan Futsal yang dilangsungkan di Clement Sport Hall. Turnamen ini berlangsung dari tanggal 24 September s.d. 23 Oktober 2011 dan diikuti oleh sejumlah klub basket dan futsal dari berbagai universitas dan kelompok mahasiswa. Tujuan dari turnamen ini tidak semata-mata mencari tim yang terbaik, tetapi juga sebagai arena berekspresi juga silaturahmi yang mempertemukan pelajar Indonesia

dengan masyarakat Indonesia lainnya di Singapura.

b. Kerjasama dengan *Nusantara Development Institution*, yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara *multiyears* (berkelanjutan) dengan sasaran desa-desa tertinggal, dan diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Kegiatan dan bantuan untuk warga desa tersebut antara lain dengan mengupayakan bantuan listrik yang berasal dari tenaga surya dan sebagainya. Selain dengan *Nusantara Development Institution*, PPIS juga menggandeng *Lee Foundation* dan *National Youth Council Singapore*.

c. Kerjasama dengan Radio PPI Dunia. Yang dimaksud Radio PPI Dunia adalah *broadcasting* yang dikelola oleh PPI untuk menyiarkan berbagai program yang menjadi agenda PPI di seluruh dunia. Siaran radio tersebut berlangsung secara terjadwal dengan bermacam-macam program yang intinya penyebarluasan berita tentang PPI. Dalam kaitan itu, PPIS menjadi salah satu pengisi acara dan disiarkan baik langsung maupun rekaman ke seluruh dunia.

d. Kerjasama dengan *Diaspora Magazine for Misplaced and Displaced Indonesians*. Secara harfiah dikatakan majalah untuk orang-orang Indonesia yang nyasar ke Singapura. Majalah ini cukup populer di kalangan pelajar Indonesia di Singapura, karena lewat majalah ini mereka bisa menyuarakan isi hatinya, baik dalam bentuk tulisan lepas/ artikel, ceritera bersambung, atau artikel-artikel yang membantu orang-orang Indonesia, khususnya pelajar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi kalangan pelajar, keberadaan majalah ini sangat meringankan beban mereka, karena bisa dengan cepat mengetahui di mana pondokan yang murah dan bersih, atau alamat-alamat tertentu yang dibutuhkan.

e. Memasuki tahun 2012, PPIS menyelenggarakan kegiatan besar lainnya, yang dirancang sejak 1 November 2011, yakni:

- 1) *Indonesian Student Festival* yang terdiri atas *talent show (photography, visual art design)*;
- 2) *Food bazaar, games, arts and cultural workshops*;
- 3) *Who got talent, singing, dancing, standing comedy, magic, anything*;
- 4) *Visual art and photography competition*.

6. Peran Kelompok Mahasiswa SIM (Organisasi Mahasiswa Indonesia di Singapura Institute of Management)

Kelompok ini sekalipun secara resmi menjadi anggota PPIS, tetapi dalam keseharian mereka menggabungkan diri untuk bersama-sama mempelajari kesenian tradisional Indonesia. Mereka dijumpai ketika sedang berlatih gamelan dan tarian di Gedung Pertemuan SIS. Dilihat dari latar belakang kesukuan, mereka terdiri dari mahasiswa berasal dari Jawa, Sunda, Minang, Manado, dan Bugis-Makassar, dan bagian terbesar dari kelompok ini adalah mahasiswa Indonesia keturunan Cina. Setiap hari Sabtu dan Minggu mereka hadir di SIS untuk berlatih bermacam-macam jenis kesenian tradisional Indonesia.

Sekelompok mahasiswa SIM berlatih gamelan Sunda dengan dibimbing seorang guru kesenian yang berasal dari Bandung. Kegiatan ini mereka lakukan bukan semata-mata untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan seni budaya, tetapi terdorong oleh kecintaan mereka kepada kebudayaan Indonesia. Mahasiswa SIM tersebut nampaknya sangat bersemangat mengikuti instruksi pembimbing dan menikmati latihan hingga menjelang malam. Menurut Olga, Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia, di SIM hampir semua mahasiswanya berasal dari Jakarta. Ketika di Indonesia justru mereka tidak pernah mencoba memainkan alat musik tradisional tersebut. Minat mereka tumbuh ketika berada di Singapura dan berusaha untuk mencari guru pembimbing untuk melatih mereka agar mampu memainkan semua alat musik tradisional Indonesia.

Selain kelompok pemain gamelan,

beberapa orang dari mahasiswa tadi berlatih tarian tradisional Dayak. Menurut penjelasan Olga, setiap hari Sabtu dan Minggu secara bergantian mereka berlatih musik dan tari tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil pelatihan itu acapkali menjadi mata acara yang paling disukai ketika mereka tampil dalam berbagai acara di SIM.



Foto 7. Mahasiswa SIM berlatih gamelan

7. Aktivitas Mahasiswa Indonesia di National Arts Council Singapura

Aktivitas mahasiswa Indonesia di Singapura bukan saja terjadi di lingkungan SIS, KBRI, atau pertemuan dengan sesama WNI. Mereka juga cukup populer di kalangan seniman Singapura, terutama yang bermarkas di National Arts Council Singapura. Lembaga ini sesungguhnya adalah representasi dari kebudayaan seluruh kelompok etnis yang ada di Singapura. Kelompok etnis seperti Cina, India, Indonesia, Melayu, dan sedikit di antaranya orang Eropa, menyatukan visi berkebudayaan mereka di lembaga ini. Selain membawa kelompok kesenian dari seluruh etnis yang ada di Singapura ke berbagai negara, lembaga ini pun secara rutin menyelenggarakan kegiatan seni budaya, dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat yang mewakili tiap-tiap etnis.

Pada tanggal 6 s.d. 12 September 2011, para mahasiswa menyelenggarakan *Heritage Festival* di Melbourne, Australia. Pada tanggal 27 September s.d. 5 Oktober 2011, mereka mengikuti kegiatan *World Dance*

Festival di Cheonan, Korea Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 2011 mengikuti *Dance to Connect – Sri Warisan and Battery Dance Company* di New York, Amerika Serikat. Pada ke tiga event tersebut seniman Indonesia terlibat penuh dengan membawakan tari-tarian Nusantara. Pada tanggal 5 November Mahasiswa di National Arts Council Singapura menyelenggarakan Semarak Seni 2011. Dalam kesempatan ini mahasiswa Indonesia di Singapura bekerjasama dengan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menampilkan pertunjukan Wayang Kulit dengan lakon cuplikan dari Epos Ramayana.

C. PENUTUP

Menjadi warga dari suatu negara dan bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat dunia memang tidak mudah. Selain kendala bahasa, pola pikir dan perilaku menjadi kendala ketika berhadapan dengan warga dari negara lain. Hal ini tentu saja dikarenakan setiap manusia akan selalu berperilaku sesuai dengan budaya yang didukung selama hidupnya. Sebaliknya, ada pula persoalan yang berkaitan dengan perubahan sikap yang terjadi pada sebagian warga lainnya. Artinya, ketika menetap, baik permanen maupun sementara waktu di negara lain, seseorang akan berupaya beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang baru, seperti keengganan menggunakan bahasa daerahnya, dan tidak dapat menerapkan sepenuhnya dengan kebudayaan daerah asalnya, yang sesungguhnya telah mewarnai kehidupannya.

Persoalan lain yang juga dikuatirkan muncul adalah perubahan atas pandangan hidup atau ideologi, dan orientasi hidup yang lebih mementingkan materi sebagaimana umumnya manusia di negara-negara yang telah maju. Dampaknya, sudah tentu menipisnya rasa kebanggaan akan kebudayaan bangsanya, menurunnya kecintaan dan patriotisme, yang dapat diasumsikan sebagai suatu kondisi melemahnya ketahanan budaya.

Singapura adalah salah satu negara di kawasan ASEAN yang menjadi tujuan bagi

banyak orang Indonesia, baik untuk mencari nafkah ataupun melanjutkan sekolah. Mengalirnya orang Indonesia untuk belajar di Singapura sudah barang tentu karena negara tersebut menjanjikan banyak hal. Pertama, kemudahan untuk mencari perguruan tinggi yang sesuai dengan minat, fasilitas yang komplit, serta (bagi sebagian orang) biaya yang lebih murah dibanding dengan perguruan tinggi di Indonesia sendiri.

Sekalipun untuk belajar di Singapura harus melalui proses panjang dan cukup berbelit, namun hingga saat ini diperkirakan lebih dari 10.000 siswa dan mahasiswa Indonesia yang tengah menyelesaikan pendidikannya di negeri ini. Dari jumlah yang cukup besar ini banyak asumsi yang beredar bahwa di antara para pelajar itu ada yang sudah luntur pemahaman tentang kebudayaannya, ada pula yang beranggapan bahwa tradisi tidak perlu lagi diurus karena era globalisasi menghendaki perubahan yang total di semua lini. Sayangnya, banyak di antara para pelajar yang belum memahami bahwa ketangguhan karakter seseorang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Selain karena proses sosialisasi bawaan (*given*) sejak lahir, juga lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, antara lain kebudayaan di mana seseorang lahir dan tumbuh.

Menyadari akan pentingnya kebudayaan sebagai sumber pembelajaran karakter dan budi pekerti, kini banyak dilakukan kajian maupun penyemaian nilai budaya kepada masyarakat luas, khususnya kepada kalangan pelajar, dengan harapan mereka akan tumbuh menjadi manusia yang tangguh. Bukan saja dalam pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Adapun sumber pembelajaran karakter dan budi pekerti tidak lain adalah agama dan kebudayaan. Dua bidang itulah yang kemudian menjadi sumber inspirasi banyak pihak untuk memperkuat ketahanan budaya, seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Singapura, melalui lembaga pendidikan formal maupun informal.

Dari serangkaian data dan informasi yang berhasil diperoleh dapat diketahui bahwa hingga saat ini pendidikan kebudayaan tetap menjadi agenda penting. Data yang dihimpun dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni:

1. Keberadaan para pelajar di Singapura karena mengikuti orangtuanya yang bekerja di negara tersebut (misalnya sebagai pejabat korps diplomatik yang bekerja di lingkungan KBRI atau bekerja di sektor swasta dan jasa). Namun ada pula yang bersekolah di negeri ini dengan biaya sendiri dan/atau memperoleh beasiswa dari lembaga tertentu, baik di Indonesia maupun Singapura. Lama tinggal di Singapura antara dua hingga delapan tahun, yang mana di antaranya sudah menyelesaikan sekolah dan bekerja di negeri tersebut. Para pelajar tadi, selain yang tinggal dengan orangtuanya, sebagian besar di antaranya menyewa kamar kos atau tinggal di apartemen sederhana dengan teman-teman dari Indonesia. Ada pula pelajar yang mampu menempati rumah agak mewah karena latar belakang keluarganya yang kaya. Model kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan pelajar di Indonesia, yaitu belajar, bermain, dan berkegiatan lain yang sesuai dengan usia mereka.

2. Bagi pelajar yang bersekolah di lembaga pendidikan formal, seperti SIS, diharuskan mematuhi seluruh aturan sekolah, antara lain mengenakan seragam yang telah ditetapkan. Pakaian seragam itu sendiri bersifat umum, misalnya biru dan putih untuk anak SLTP. Namun pada hari tertentu siswa diwajibkan mengenakan seragam batik. Sudah tentu hal ini untuk memberi kesan bahwa SIS adalah sekolah Indonesia yang memiliki kebanggaan akan salah satu kekayaan mata budayanya, yakni batik.

Simbol keindonesiaan lainnya adalah bahasa pengantar wajib, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa lainnya yang wajib diikuti adalah Bahasa Inggris karena penguasaan Bahasa Inggris penting agar siswa mampu berkomunikasi dengan warga dan pelajar dari sekolah lain di negara tersebut. Selain

menjadi mata pelajaran wajib, bahasa dan sastra Indonesia juga harus tetap dipelihara, antara lain dengan menyelenggarakan Bulan Bahasa setiap tahun. Dalam kegiatan tersebut siswa diimbau untuk mempelajari sastra dan membaca puisi yang ditulis oleh sastrawan Indonesia di masa lalu. Dengan demikian pengetahuan Bahasa Indonesia para siswa akan tetap terjaga.

Untuk menyalurkan hobi dan minat siswa, pihak SIS membebaskan mereka untuk aktif bukan saja di lingkungan SIS, tetapi juga dalam organisasi pelajar atau seni budaya/sanggar yang ada di Singapura. Di lingkungan sekolah, siswa harus aktif dan ambil bagian dalam kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan selain mengajarkan keterampilan dan kemandirian, juga mengasah budi pekerti siswa agar menjadi anggota masyarakat yang peduli pada lingkungannya.

Di dalam lingkungan SIS sendiri tersedia studio tari atau *dance studio*, maksudnya agar siswa yang memiliki talenta tari bisa menyalurkan minatnya dan menciptakan kreasi /koreografi di studio ini. Hasilnya sudah banyak yang dipentaskan di auditorium SIS maupun di lingkungan KBRI di Singapura.

3. Tentang mata pelajaran yang mencerminkan kebangsaan. Seperti dipaparkan di muka, SIS adalah lembaga pendidikan formal yang konsisten menyelenggarakan pendidikannya bukan semata-mata agar siswa lulusannya menjadi manusia yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tetap berpijak pada kepribadian bangsanya. Artinya, siswa di SIS memperoleh pengetahuan kebudayaan, baik langsung diajarkan di dalam kelas maupun yang tidak langsung melalui contoh-contoh, misalnya setiap ruang kelas yang diberi nuansa sukubangsa di Indonesia, simbol kebangsaan, Garuda, Bendera Merah Putih, foto atau gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional, benda-benda budaya, seperti: maket rumah adat setiap suku bangsa, busana adat, makanan tradisional, dan benda budaya lain yang mencerminkan kekayaan budaya daerah.

Adanya Zona Bahasa Daerah juga merupakan sebuah komitmen yang besar untuk tetap mempertahankan bahasa daerah tempat siswa berasal. Dengan demikian selain menguasai bahasa asing, siswa juga tidak lupa akan kebudayaan yang didukungnya.

Kekayaan budaya Indonesia termasuk di dalamnya adalah berbagai jenis kesenian daerah seluruh Indonesia, juga menjadi pelajaran yang diberikan secara teoritis di dalam kelas maupun praktik di studio seni yang dimiliki oleh SIS. Auditorium yang besar juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk ajang mengekspresikan kemampuan seninya di hadapan siswa, guru, dan orangtua mereka. Dukungan juga diberikan oleh staf KBRI yang secara sukarela memberikan pelatihan berbagai jenis kesenian tradisional seperti memainkan gamelan (musik tradisional) berbagai daerah, tari-tarian tradisional maupun modern kepada siswa yang berminat.

Membangun karakter bagi siswa SIS tidak semata-mata dilakukan melalui pengajaran di kelas. Agar siswa menjadi manusia yang berkepribadian, dilakukan berbagai cara yang mengikat siswa untuk tetap berperilaku sopan dan santun di manapun berada. Di lingkungan SIS banyak dijumpai poster yang dipenuhi kalimat imbauan, seperti: "hari ini harus lebih baik dari kemarin", "budaya malu", dan kalimat imbauan lain yang intinya mengajak para siswa supaya berperilaku lebih baik.

Dalam bidang pengetahuan kesejarahan, siswa tidak sekedar belajar teks, tetapi juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh nasional dan pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia melalui foto atau gambar. Di setiap kelas dapat dilihat adanya foto/gambar tokoh, seperti: Tengku Umar dari Aceh, Supriyadi dari Jawa Timur, Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Seperti dipaparkan di atas, setiap kelas di SIS diberi nama provinsi di Indonesia, lengkap dengan peta, sejarah daerah, simbol daerah, dan kekayaan budayanya. Demikian juga untuk meningkatkan wawasan kesejarahan siswa, khususnya yang berkaitan dengan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia,

misalnya replika Candi Prambanan di lobi SIS.

Sementara Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan sebagai bahasa pengantar yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa SIS. Bahasa Indonesia juga menjadi sangat penting dalam proses belajar-mengajar di SIS, mengingat kurikulum yang digunakan menyesuaikan dengan kurikulum nasional.

4. Data dan informasi yang berkaitan dengan upaya mengokohkan rasa kebangsaan diperoleh di SIS melalui banyak kegiatan, seperti: upacara bendera setiap hari Senin, turut memperingati hari-hari nasional seperti Proklamasi Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, dan sebagainya, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Nasional). Saat upacara dilangsungkan, seluruh siswa diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara langsung (*live*), artinya tidak menggunakan *tape-recorder* seperti yang acapkali terjadi di banyak instansi pemerintah.

Tata upacara juga berlangsung sama, yakni menaikkan Bendera Merah Putih, mengucapkan Pancasila, atau naskah-naskah lain. Pada pelaksanaan upacara tertentu, beberapa lagu nasional harus dinyanyikan juga secara langsung oleh seluruh siswa. Dikarenakan upacara adalah wajib sifatnya, maka seluruh siswa SIS perlu menguasai sejumlah lagu-lagu nasional, di samping lagu Indonesia Raya.

Demikianlah, bahwa upaya menanamkan rasa kebangsaan, pendidikan kebudayaan termasuk kesenian yang dilakukan oleh SIS sebagai institusi pendidikan formal berjalan dengan sangat intensif, bahkan boleh dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan program pendidikan di Indonesia sendiri. Asumsinya, kesadaran akan pentingnya ketahanan budaya dilatarbelakangi oleh kenyataan, bahwa mereka berada di negara lain dan berhadapan dengan warga dunia yang mendukung kebudayaannya masing-masing. Ketahanan budaya menjadi agenda utama, mengingat

semakin derasnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan transformasi yang memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa. Kekuatiran menurunnya atau menipisnya ketahanan budaya di kalangan pelajar, khususnya yang tengah bersekolah di berbagai negara asing, memang perlu dipikirkan dan diantisipasi bersama oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu model yang dilakukan oleh SIS sangat layak untuk dijadikan percontohan.

Tanggung jawab untuk menanamkan nilai budaya Bangsa Indonesia di Singapura rupanya tidak hanya dibebankan kepada SIS, karena institusi lain terutama organisasi pelajar baik yang tergabung dalam PPIS, *Indonesian Student in SIM* (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapore Institute Management), dan lainnya juga melakukan upaya yang serupa. Program yang mereka susun tentu saja disesuaikan dengan minat kaum muda, yakni berkaitan dengan aktivitas seni budaya, pertunjukan, festival, lomba-lomba, dan sebagainya. Yang patut dicatat bahwa seluruh program kegiatan organisasi pelajar di Singapura tetap mengakar kepada kebudayaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Dawson, Catherine. 2010. *Metode Penelitian Praktis, Sebuah Panduan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia.
- Deputi Bidang Nilai Budaya Seni Dan Film. 2002. *Kebijakan Peningkatan Apresiasi Nilai Budaya Suku Bangsa*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Embassy of Indonesia In Singapore. 2010. *Opportunity Indonesia*. Singapore: Sun Media Pte Ltd.
- Embassy of Indonesia in Singapore. 2011. *Opportunity Indonesia*. Singapore: Sun Media Pte Ltd.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Pusat Studi Pariwisata UGM. 2004. *Wawasan Budaya untuk Pembangunan*. Yogyakarta: Pilar Politika Kelompok Pilar Media.
- Kusumah, Dloyana S, dkk. 2010. *Pengelolaan Keragaman Budaya "Interaksi Budaya"*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Perhimpunan Pelajar Indonesia*. http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pelajar_Indonesia. Diunduh tanggal 3 Maret 2013, pukul 14.04.
- Perkembangan Hubungan Bilateral*. <http://marcolausantosa.blogspot.com/2011/01/perkembangan-hubungan-bilateral.html#ixzz1BepCoQI>. Diunduh tanggal 5 Maret 2013, pukul 10.15.
- Sedyawati, Edi. 2008. "Klasifikasi Industri Budaya". *Industri Budaya Budaya Industri*. Bogor: Kongres Kebudayaan Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

PANCASILA SEBAGAI ACUAN DALAM STANDARISASI BUDAYA NASIONAL INDONESIA

Adityo Nugroho
Pusat Latihan Kepemimpinan Khusus Pejuang Tanpa Akhir
Email :aditmalaka@gmail.com

Abstract

This literature study aims to reinvent the role of standardizing the Pancasila in Indonesian culture that explicitly been lost and buried by globalization. The loss of the cultural value of standardizing the more we feel the life of the nation in the last decade. It certainly makes concerns the generation of each connector that will be passed down to future generations. The data and methodology used in the study of literature in this study many sourced from the literature relating to the Pancasila and Indonesian human development which is then connected to the cultural value of Indonesia's diverse. So Pancasila philosophy of life which is the nation Indonesia has agreed since June 1, 1945 to establish standards in the national culture. Standardizing the results were then produced a standard of leadership as a cultural value that comes from the nation's diverse cultures from every island in Indonesia. Leadership is rooted in every region and mengerucut become a national leadership that will be able to deliver on the high civilization of this nation.

Keywords: Pancasila, Leadership, National Culture

Abstrak

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menemukan kembali peranan Pancasila dalam menstandarkan budaya Bangsa Indonesia yang secara eksplisit telah hilang dan terpendam oleh arus globalisasi. Hilangnya penstandaran nilai budaya itu semakin kita rasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu dasawarsa terakhir. Hal itu tentu membuat keprihatinan yang dalam dari setiap penyambung generasi yang kelak akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Data dan metodologi secara studi kepustakaan yang digunakan dalam kajian ini banyak bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Pancasila dan pembangunan manusia Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan nilai budaya Bangsa Indonesia yang beraneka ragam, sehingga Pancasila yang merupakan falsafah hidup Bangsa Indonesia yang telah disepakati sejak 1 Juni 1945 menjadi standar di dalam membangun kebudayaan nasional. Hasil penstandaran itu kemudian menghasilkan suatu kepemimpinan sebagai standar nilai budaya yang berasal dari budaya bangsa yang beraneka ragam dari setiap pulau di Indonesia. Kepemimpinan yang mengakar dari setiap daerah dan mengerucut menjadi suatu kepemimpinan nasional itu akan mampu mengantarkan bangsa ini pada tingginya peradaban.

Kata Kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Kebudayaan Nasional

A. PENDAHULUAN

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam satu dasawarsa ini kian menunjukkan permasalahan-permasalahan yang akut, baik dalam tataran pemerintahan maupun rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kita sedang mengalami krisis multidimensi yang sangat memprihatinkan. Terlihat dengan adanya krisis ekonomi, politik, sosial, penegakan hukum, sampai dengan adanya krisis kepemimpinan yang kemudian berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Tanpa kita sadari akar permasalahannya adalah masalah budaya. Sebenarnya apa kaitannya dengan budaya?

Pertanyaan itu sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita, forum-forum diskusi, perguruan tinggi, sampai dengan dialog nasional, atau sarasehan nasional. Padahal kita memiliki Pancasila yang kerap kali disebutkan dalam upacara dari tingkat SD sampai SMA, bahkan di setiap instansi pemerintahan. Anomali-anomali demikian semakin berkembang, yang pada akhirnya membuat kita hidup menjadi lembaran-lembaran tipis yang menggugah dan mempertanyakan

keindonesiaan kita.

Untuk menjawab kompleksnya permasalahan tersebut kita dapat memulai dari pengertian budaya itu sendiri, yang dalam pengertian umum berasal dari Bahasa Sansekerta, "*budhayah*", yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi dan akal), yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Pendapat lain menyatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berkaitan dengan unsur rohani dan daya berkaitan dengan unsur jasmani manusia. Dengan demikian budaya merupakan hasil budi dan daya manusia (Koentjaraningrat, 1990: 3). Sedangkan kebudayaan merupakan kata sifat dari kata "budaya". Secara terperinci Gazalba mendefinisikan kebudayaan sebagai cara berpikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Cara berpikir dan merasa merupakan kebudayaan batiniah, sedangkan manifestasinya dalam bentuk cara berlaku dan cara hidup.

Dalam pemaknaan itu budaya adalah hal yang tidak dapat terlepas dari sisi batiniah manusia. Sisi batiniah manusia pun tidak dapat terlepas dari filsafat atau rangkaian ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Adapun filosofi seseorang biasanya berangkat dari keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Sebagaimana yang diurai oleh Mukti Ali mengenai definisi kebudayaan, yaitu:

"Kebudayaan adalah budi dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia digerakan oleh akal dan perasaannya. Yang mendasari semua itu adalah ucapan hatinya. Dan ucapan batin itu merupakan keyakinan dan penghayatannya terhadap sesuatu yang dianggap benar. Apa yang dianggap benar itu besar atau kecilnya adalah agama. Dan agama sepanjang tidak diwahyukan adalah hasil pemikiran filsafat" (Ali, 1982: 4).

Dari uraian di atas jelas bahwa kebudayaan bersumber dari filsafat atau dalam Bahasa Sansekerta adalah falsafah. Jika ditarik

kepada falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila, maka timbul lagi suatu pertanyaan mengapa kehidupan kita seperti saat ini? Sehingga tuntutan adalah untuk mengganti falsafah kita itu dengan falsafah lainnya. Mereka yang memiliki anggapan itu dikarenakan ketidakpahamannya terhadap Pancasila itu sendiri. Pandangannya cenderung melihat kemegahan dan keagungan filsafat luar dengan para filsufnya. Filsafat-filsafat itu pun kemudian menjadi landasan teoritis dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Kemudian bantahan dari hipotesa itu, ialah "Apakah Pancasila sudah pernah diamalkan oleh bangsa ini?"

Ada pula golongan orang yang sepakat dengan Pancasila, tetapi terjadi *missing link* ketika ditransfer ke dalam nilai budaya, sehingga golongan ini hanya memaknakan budaya pada suatu hal yang berwujud, seperti: tari-tarian, senjata khas daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Padahal jika kita tinjau dari pengertian budaya di atas, hal-hal yang bersifat jasmaniah itu hanyalah bagian terluar dari pengertian budaya itu sendiri. Dengan demikian, dua hal yang menjadi pembahasan utama, ialah mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan budaya yang distandarkan olehnya.

Sampai saat ini kita harus memberanikan diri untuk menjawab Pancasila belum pernah digunakan karena proses pengejawantahan itu belum pernah terjadi sampai saat ini. Tatanan nilai kehidupan yang pertama adalah nilai budaya. Dari nilai budaya inilah akan terdiferensiasi ke dalam nilai-nilai lainnya, yaitu nilai hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Jika pada budaya kita mengalami krisis maka berdampak pada terjadinya krisis nilai-nilai lainnya. Hanya ruang lingkup kajian ini berada dalam ranah budaya. Sedangkan kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang timbul sebagai buah budi rakyat Indonesia. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha

kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Soeprapto, 2008:43). Jadi, permasalahan yang krusial terjadi di bangsa kita adalah bagaimana membangun jembatan dari Pancasila kepada nilai budaya atau disebut juga dengan proses pengejawantahan dari Pancasila kepada budaya. Sehingga budaya yang terbangun telah distandarkan oleh Pancasila. Seperti itulah layaknya kebudayaan nasional kita yang standar dan akan menstandarkan nilai-nilai lainnya dalam kehidupan manusia. Bukan bermaksud untuk menyeragamkan kebudayaan yang beraneka ragam melainkan lebih kepada mengkonvergenitaskan kebudayaan yang beraneka ragam menjadi satu kebudayaan nasional yang standar.

Solusi yang tepat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut ialah dengan mengaktualisasikan kembali peranan Pancasila agar dapat difungsikan menjadi objek yang menstandarkan nilai budaya, sehingga pembangunan masyarakat Pancasila akan menjadi kenyataan dan membawa bangsa ini pada terangkatnya harkat dan martabat hidupnya. Pencarian dan penemuan kembali itu yang kemudian menjadi tujuan utama dari studi kepustakaan ini untuk dijadikan teori dalam pembangunan manusia Indonesia serta menjadi kurikulum pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal.

Kesadaran bangsa ini akan Pancasila menjadi tinggi pada saat ilmu pengetahuan itu menjadi kebutuhan utama. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Pancasila selalu dilandasi oleh sikap keberpihakan pada Tuhan Yang Maha Esa (YME), yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Setelah dalam tataran dunia, kemudian bagaimana manusia itupun selamat ketika kembali kepada Sang Penciptanya. Sebagai falsafah, Pancasila akan

menuntun manusia-manusia Indonesia untuk dekat kepada Tuhannya. Filsafat berusaha menilai secara kritis kesadaran manusia tentang Tuhan YME. Kesadaran itu nyata dalam berbagai macam hubungan manusia dengan Tuhan YME, menyangkut pengertian tentang-Nya, kepercayaan, dan pengetahuan ilmiah (Huijbers, 1982: 15).

Berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membangun budaya atau pola berpikir sangat melekat pada tuntunan Tuhan YME, baik yang tertulis di dalam kitab-Nya, maupun yang berada pada perjalanan sejarah manusia, dan alam semesta. Ilmu-ilmu itu pula yang mendekatkan manusia pada suatu kebenaran yang hakiki dan mengenal lebih dalam tentang Tuhannya beserta tempat kembali kita kepada-Nya. Sejauh mana pengaruh Tuhan YME dalam diri manusia yang menerima kebenaran tentang-Nya telah melampaui batas pikiran kita sebagai manusia. Dari pemahaman itu manusia akan mengerti suatu batasan yang tercermin dalam tingkah lakunya, sehingga tingkah laku manusia yang demikian akan mendekati suatu ketaqwaan (Huijbers, 1982: 33). Itulah kaitan antara alam pikiran manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dengan sila pertamanya yang berbicara mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut dalam pembahasan akan dijelaskan secara terperinci sampai dengan menghasilkan *output* yang tetap dan terukur: yaitu standar nilai budaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan sejarah Bangsa Indonesia dan pembangunan manusia Indonesia. Adapun metode matematis dalam bentuk grafik Cartesius dan Sigmoid digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa data dan informasi yang didapat dari literature, sekaligus pemodelan terhadap data dan informasi yang diteliti sampai membuahkan suatu hipotesis dan hasil akhir.

Penelitian ini ditentukan oleh penyusunan kronologi masalah yang kemudian divisualisasikan oleh model analisis dalam bentuk grafik sebagai pendekatan matematika,

sehingga variabel bebas dan variabel tetap yang telah ditemukan akan mudah digunakan dalam model tersebut (Kodri, 2001: 24). Dalam pembahasan ini Pancasila menjadi variabel tetap (konstanta) dan nilai budaya adalah variabel bebasnya, yang kemudian ada pola hubungan yang bersifat korelatif (interaktif) dan kausatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana proses penstandaran nilai budaya oleh Pancasila tidak dapat terlepas dari perjalanan panjang Bangsa Indonesia, yang sebelumnya merupakan suku-suku bangsa di Nusantara, sampai dengan disepakatinya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah Pancasila disepakati, disusunlah Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang bersumber dari Piagam Jakarta sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 (Tjahjathoe dkk., 1979: 143).

1. Sejarah Indonesia

Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia diawali dengan adanya masyarakat Nusantara, yang ditandai oleh dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, setelah mengalami berbagai macam akulturasi dan asimilasi budaya dengan bangsa lain. Kedatangan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, dan Belanda) yang membawa prinsip *Gold, Glory, dan Gospel* (3G) bertujuan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Dalam menjalankan misinya itu mereka banyak mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun, dengan politik adu domba para penjajah bisa membangun benteng dan loji sebagai tempat menimbun rempah-rempah yang kemudian dijual ke Eropa dengan keuntungan berlipat ganda. Di benteng dan loji itu juga mereka menimbun senjata untuk meredam perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Soeprapto, 2008: 1). Perlawanan demi perlawanan yang

dilancarkan oleh pejuang-pejuang pribumi takluk secara menyeluruh.

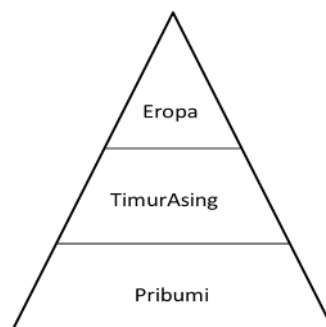
Hal ini menandakan semakin kokohnya kekuasaan Belanda di Nusantara, yang menyebabkan terjadinya *Cultuur Stelsel*. Dampak dari penerapan pola ini ialah perubahan perangkat aturan yang kemudian mengubah bangunan pola berpikir masyarakat Nusantara dari agamis menjadi materialis. Setelah itu terjadi pelebaran pola berpikir secara mistik dan penyempitan pola berpikir secara material, dialektika, dan logika.

Pada tahun 1901 politik etis atau politik balas budi diterapkan. Politik etis atau politik balas budi tersebut berisi:

- a. Irigasi (pengairan), yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
- b. Migrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi dan berpindah dari tanah kelahirannya.
- c. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Kedudukan kaum pribumi semakin terlihat ketertindasnya, yang tampak pada strata sosial masyarakat, di mana pribumi menempati strata terbawah setelah Bangsa Eropa dan Timur Asing.

Gambar 1. Strata masyarakat pada masa penjajahan Belanda



(sumber : Materi Sejarah NKRI, PUSLAKSUS)

Dampak-dampak itu yang membuat perlawanan kaum terpelajar (cendekiawan) pribumi dengan membuat suatu pergerakan yang berbasiskan organisasi untuk mendidik rakyat agar memiliki derajat yang tinggi. Pada tahun 1905, Dr. Wahidin Soedirohusodo mengusahakan berdirinya “*Studiefonds Dharma Wara*”, yaitu semacam yayasan dana pendidikan guna membantu pemuda tak mampu agar dapat meneruskan pendidikan. Hal ini didorong oleh keinginannya untuk menambah pendidikan dan pengajaran yang terjangkau oleh rakyat. Dorongan ini mendapat sambutan dari para bangsawan yang menyadari pentingnya pendidikan dan berserikat seperti yang dipraktikkan oleh Belanda. Hal inilah yang dilakukan oleh para pelajar STOVIA dengan mendirikan organisasi “Boedi Oetomo” pada tanggal 20 Mei 1908 (Soeprapto, 2008: 3-4). Perjuangan Boedi Oetomo yang merupakan perjuangan dengan berbasis budaya untuk melawan penjajah mendapat respon yang positif dari kaum pribumi untuk turut mendirikan organisasi-organisasi, seperti: *Indische partij*, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan yang sangat berpengaruh bagi munculnya Bangsa Indonesia, yaitu Perguruan Taman Siswa.

Perjuangan yang akhirnya mengerucut pada sebuah penemuan nama “Indonesia”. Nama Indonesia pertama kali dikemukakan oleh orang Jerman yang bernama Bastian dalam karyanya yang berjudul “*Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels*”, yang terbit pada tahun 1884. Yang dimaksud “*Indonesien*” tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Sejak itu kata “Indonesia” sudah menjadi lazim dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu bangsa-bangsa dan bahasa. Kemudian kata itu sering dipakai oleh ahli ilmu bangsa-bangsa asal Inggris, seperti J.R. Logan dan G.W Earl sebagai pengertian etnologis dan geografis murni untuk menyebut kepulauan ini. Dalam arti politik nama “Indonesia” sejak tahun 1922 dipakai oleh Perhimpunan Indonesia untuk menggantikan nama Hindia-Belanda (Hatta, 1980: 8-9).

Kesadaran untuk menjadi sebuah bangsa yang bernama Indonesia pertama kali dicetuskan dalam Kongres Pemuda II dalam bentuk Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia

(Soeprapto, 2008: 4)

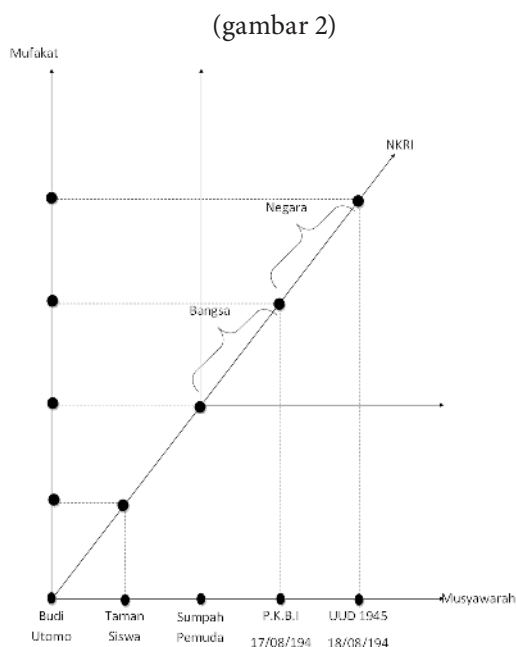
Dari bukti di atas, sangat jelas bahwa adanya Bangsa Indonesia atau istilah nasional baru ada ketika sumpah tersebut dibacakan. Jadi perlu diluruskan jika ada istilah nasional yang ditulis sebelum Sumpah Pemuda. Contohnya, 20 Mei 1908 sebagai era kebangkitan nasional, pernyataan itu kurang tepat karena pada tanggal tersebut belum ada Bangsa Indonesia. Momentum Sumpah Pemuda yang pesertanya adalah *jong-jong* kepemudaan memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana agar harkat dan martabat hidupnya terangkat. Komitmen itulah yang kemudian bertransformasi menjadi kata “merdeka”. Kelahiran Bangsa Indonesia itu nantinya akan menjadi dasar dalam penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai tujuan merupakan amanat Sumpah Pemuda. *Jong-jong* yang hadir dalam Sumpah Pemuda merupakan *jong* keagamaan (*Jong Islamiten Bond*) dan *jong* kepribumian (*Jong Java*, *Jong Borneo*, *Jong Sumatra Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, dan lain-lain). Sehingga dari dasar ini ditetapkan sebagai pijakan dalam penetapan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang dijabarkan dalam lima sila.

Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan YME didasarkan dari *jong* keagamaan yang hadir dalam Sumpah Pemuda. Sila kedua, ketiga, dan keempat merupakan dasar dari *jong* kepribumian, dan Sila

kelima adalah hasil ketika kebenaran absolut dan kebenaran relatif dijalankan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, terbukti Pancasila mampu mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia setelah dibacakan teks Proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Pernyataan sebagai bangsa yang merdeka itu diwujudkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Bangsa Indonesia melalui PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menandakan berdirinya NKRI.

Secara grafik, perjalanan sejarah bangsa itu dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik Sejarah Terbentuknya NKRI

(sumber : Materi Grafik risalah NKRI dalam Pusat Latihan Kepemimpinan Khusus)

Dari grafik itu terlihat bahwa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tonggak awal perjuangan pribumi untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi dan pendidikan

sebagai alat perjuangan. Dari perjuangan Budi Utomo yang membangun usaha pendidikan kepada rakyat secara informal berlanjut kepada pendirian Perguruan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan yang formal. Dua perjuangan ini merupakan perjuangan dalam bidang budaya sebagai pondasi untuk perjuangan yang lebih besar. Dengan melakukan pencerdasan kepada pribumi sebagai kaum terjajah akibat dari sistem *Culture Stelsel* dan politik etis oleh Belanda, menyebabkan kesadaran untuk merdeka semakin tinggi.

Kemerdekaan sebagai makna dari terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat akan terbentuk dan terarah jika ada persatuan. Momentum Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak lahirnya Bangsa Indonesia dengan komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi sebagai orang Indonesia asli. Setelah 17 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini berhasil meraih kemedekaannya dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta. Pada keesokan harinya Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri setelah disahkannya UUD 1945 dan diangkatnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden R.I oleh PPKI.

Dalam grafik itu, terdapat variabel Y (Mufakat) dan variabel X (Musyawarah). Kemudian $Y=f(X)$ merupakan hasil (*resultante*) dari proses musyawarah dalam setiap tahun-tahun yang menjadi tonggak sejarah perjalanan Bangsa Indonesia membentuk NKRI. Dalam perjalanan itu Pancasila, meskipun baru ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi secara sifat telah ada dan mengakar sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terlihat dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai hasil yang dibentuk oleh budaya Pancasila, karena kemufakatan sebagai hasil dari musyawarah merupakan suatu hidayah dari Tuhan YME. Dalam setiap aktivitas bangsa ini senantiasa diniati sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan YME. Berdasarkan

grafik itu juga NKRI sebagai hasil konstruksi bangsa Indonesia yang terlahir terlebih dahulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri kemudian sebagai mandataris bangsa. Maknanya, bahwa Bangsa Indonesia berperan sebagai pondasi yang menentukan bangunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sejarah Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Indonesia Merdeka

Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, untuk mencapai kemerdekaannya, terdapat data penting antara Lahirnya Bangsa Indonesia (28 Oktober 1928) dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia (17 Agustus 1945), yaitu tanggal 1 Juni 1945. Dalam risalah sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terjadi perdebatan yang panjang antara beberapa golongan yang hadir dalam persidangan mengenai dasar Indonesia Merdeka, dari tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Di antara golongan-golongan itu ada yang bersikeras untuk menjadikan agama (Islam) sebagai dasar Indonesia Merdeka. Salah satu anggota yang memberi usulan itu ialah Ki Bagoes Hadikusumo dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945, sebagai berikut:

“Tuan-tuan yang terhormat!
Sekarang telah tuan-tuan ketahui, kemaren ada beberapa pembicara yang membicarakan (berbicara mengenai) agama Islam. Salah seorang dari pembicara-pembicara itu telah mengucapkan perkataan yang sekiranya diucapkan di zaman dahulu (penjajahan) mungkin menimbulkan amarah kaum muslimin karena merasa terhina, perkataan itu ialah: “saya lebih suka berkumpul dengan orang Budha daripada orang Islam yang tidak baik!”. Tetapi pada masa sekarang ini saya tidak marah mendengarkan ucapan itu dan tidak akan marah, karena kita bersaudara dan bersatu hati, cinta mencintai dan sayang menyayangi. Marilah kita kembali kepada pembicaraan semula, yaitu: jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu pada berdasar persaudaraan dan kekeluargaan seta gotong-royong didirikan di negara kita ini atas petunjuk-petunjuk Al-Qur’an

dan Al-Hadist seperti yang sudah saya terangkan tadi.

Tuan-tuan yang terhormat!

Niscaya tuan-tuan mengharapkan negara kita ini mempunyai perekonomian yang kuat. Kalau benar demikian cobalah dirikan negara ini atas firman Allah: Dan ia (Allah) telah menyerahkan samudra kepadamu agar kamu makan ikannya yang lezat itu dan kamu keluarkan perhiasannya (mutiara dan sebagainya) untuk kamu pakai. Dan kamu melihat kapal berlayar di samudra. Maka hendaklah kamu berusaha mencari rezeki anugrahnya dan hendaklah kamu bersyukur (QS. An Nahl (16) : 14)

Sudah terang dan jelas arti ayat ini ialah menyuruh kita mencari rezeki Allah diatas dan di dalam laut dengan mengusahakan perikanan, pelayaran, serta pencaharian mutiara dan sebagainya. Masih amat banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang searti dengan ini, yakni menganjurkan pertanian, pengairan, peternakan, pertununan dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang tersebut dalam surah Ibrahim, An-Nahl, Al-Hajj, dan sebagainya. Oleh sebab itu agar perekonomian negara kita ini kuat dan sentosa haruslah didirikan atas perintah-perintah Allah (Syahrul, 2009: 66).

Pernyataan Ki Bagoes Hadikusumo itu mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an hanya menjadi dasar dan petunjuk bagi setiap manusia dan bagi negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Maknanya bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari sisi Ketuhanan atau dalam Islam disebut dengan Ketauhidan. Hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam al-Qur’an dan Al-Hadist harus menjadi pedoman bagi negara sebagai wadah dalam membangun masyarakat. Tentunya usulan ini mendapat sanggahan dari anggota-anggota lainnya yang menolak dasar agama sebagai dasar negara. Kebanyakan dari mereka yang menolak ialah kaum kebangsaan yang pernah menuntut ilmu di luar negeri. Perdebatan panjang pun sering terjadi dalam persidangan-persidangan berikutnya. Walaupun tidak atau belum diambil keputusan mengenai dasar negara, namun pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mempunyai arti yang penting, bukan saja oleh karena dapat mengintegrasikan seluruh pandangan para

anggota BPUPKI menjadi satu kesatuan yang utuh, tetapi juga oleh karena disampaikan dengan retorika yang kuat. Pidato Ir. Soekarno tersebut mendapat sambutan secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Walaupun demikian, suasana sidang pertama ini ditandai perbedaan faham tentang dasar negara antara dua golongan anggota yang kemudian diberi nama oleh Ir. Soekarno sebagai golongan Islam dan golongan Nasionalis (Syahrul, 2009: 132).

Ketika kita *flash back* ke belakang saat Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh *jong* keagamaan dan *jong* kepribumian ditemukan suatu kemufakatan yang utuh dalam menetapkan hasil kongres, yaitu isi sumpah pemuda. Dengan demikian, sudah tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua golongan ini dalam mencapai kemerdekaan. Di antara kedua faham ini, terdapat suatu kesepahaman bahwa kemerdekaan adalah cita-cita bersama. Jika digali lebih dalam adanya faham kebangsaan itu dilandasi oleh keagamaan yang bersumber pada hukum Tuhan. Berikut pernyataan Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945:

“Saudara-saudara sekalian kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam tetapi alangkah benarnya pernyataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophisgrondslag*, mencari suatu *Weltanschauung* yang kita semua setuju, saya katakan lagi setuju!

Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr Sanoesi setuju, yang sdr Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang bersama-sama kita setuju.” (Syahrul, 2009: 90).

Dari pernyataan tersebut, Ir. Soekarno secara tersirat meminta para anggota yang hadir untuk bersikap ikhlas dan jiwa yang bersih dalam mencapai suatu kemufakatan,

karena hanya dengan jiwa seperti itulah petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa bisa turun kepada orang-orang yang sedang berikhtiar mencapai kemerdekaannya. Kemufakatan itu bukan menjadi kepentingan dari golongan-golongan yang hadir, tetapi menjadi bentuk ketaqwaan kepada Tuhan YME. Dari seluruh anggota yang hadir pada tanggal 1 Juni 1945 telah menyepakati lima dasar yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno yang berisikan: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme, 3) Permufakatan atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima dasar itu yang kemudian dinamakan Pancasila. Isi dari Pancasila gagasan Ir. Soekarno itu belum menjadi isi yang baku, melainkan butuh penyempurnaan bahasa dan urutan sila-silanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, disepakati “Piagam Jakarta” atau di kemudian hari dikenal sebagai Mukadimah UUD 1945. Pancasila yang telah disempurnakan itu tertuang dalam alinea IV piagam tersebut, yang berbunyi: 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari isi yang telah disusun oleh Panitia Sembilan dan disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI itu kembali mendapat pertentangan. Pertentangan-pertentangan itu kebanyakan berasal dari daerah Indonesia Timur (Sulawesi Utara dan Maluku). Sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa bangsa kita adalah bangsa yang senantiasa belajar dan bermusyawarah antara satu sama lain. Sehingga dari setiap fenomena, kita selalu diingatkan oleh-Nya. Fenomena penolakan orang-orang Indonesia Timur itu membuat para anggota yang mengusulkan kata “Islam” menjadi sadar atas ketidaksempurnaan dari sila pertama (tujuh kata) itu dalam kehidupan umat beragama. Terlihat dalam sidang PPKI

tanggal 18 Agustus 1945, pada saat Ir. Soekarno membuka persidangan sebagai berikut:

“PPKI memutuskan untuk tidak mempergunakan Rancangan Pernyataan kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI, tetapi mempergunakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan dalam masa reses tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 pagi dengan persetujuan penuh dari tokoh-tokoh Islam telah dapat dituntaskan masalah anak kalimat dalam alinea keempat Rancangan Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja.....

Seperti dapat diduga, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 (mereka tokoh-tokoh masyarakat Indonesia Timur) menyampaikan reaksi kepada Drs. Mohammad Hatta sebagai salah seorang Proklamator. Mereka menyatakan berkeberatan terhadap anak kalimat “..dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang terdapat pada rancangan Pembukaan UUD 1945, yang telah disepakati BPUPKI tanggal 17 Juli 1945.

Empat orang tokoh Islam lain yang diajak Hatta untuk membahas keberatan tersebut sama sekali tidak berkeberatan, justru oleh karena keberatan seperti itulah mereka kemukakan juga pada tanggal 14 dan 15 Juli 1945. Penghapusan anak kalimat tersebut disetujui dengan cepat, tanpa perdebatan sama sekali. Keputusan tersebut telah memperlancar terbentuknya Republik”. (Risalah sidang BPUPKI/PPKI hal.xxxii-xxxiv)

Keputusan final pada persidangan itu ialah Pancasila yang sampai saat ini kita perdengarkan. Dengan dihapuskannya tujuh kata menjadi tiga kata dalam sila pertama tidak sama sekali mengubah makna Ketuhanan yang Islami bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadist, melainkan semakin ke arah pada pengesaan Tuhan Yang Maha Segalanya.

Agama lain pun juga menerima tiga kata ini karena sejatinya mereka juga menyembah Tuhan Yang Maha Esa dengan beragam nama dan penyebutannya. Tidak ada nuansa politis dan kepentingan apapun dari penetapan ini. Tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, karena semuanya adalah pemenang dan berasal dari Tuhan Semesta Alam.

Tidak akan pernah ada kepentingan dari diri Ir. Soekarno selaku penggali Pancasila (bukan penemu). Pernah beliau sampaikan pada saat peringatan 1 Juni, sebagai berikut:

“Sekarang saudara-saudara mengadakan peringatan ini, dan pada saat saya berhadapan dengan saudara-saudara, saya menanya pada diri sendiri: *“What happens with me? What is the matter with me?”* Karena orang mengatakan terima kasih kepadaku, orang mengagung-agungkan akan daku. Padahal aku bukan pencipta Pancasila. Padahal aku mengeluarkan galian Pancasila itu karena malamnya aku memohon kepada Allah SWT. Bukan Soekarno yang mengadakan Pancasila, tetapi ialah sebenarnya pemberian dari Allah SWT sebagai ilham kepada Soekarno. Marilah semuanya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT....”(Syahrul, 2009:130).

Setelah melihat pemaparan tersebut tersadarlah kita bahwa Pancasila merupakan suatu hidayah atau *given* (pemberian Tuhan) yang terkandung dalam bumi Indonesia. Kandungan ini pun sempat terkubur dalam-dalam oleh arus penjajahan selama ratusan tahun dan diketemukan kembali pada malam 1 Juni oleh Ir. Soekarno. Dalam pembahasan berikut, bagaimana lima sila dalam Pancasila itu ditransformasikan ke dalam nilai kehidupan manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa nilai kehidupan yang utama adalah nilai budaya, maka diperlukan penstandaran terhadap nilai budaya itu oleh Pancasila.

3. Penstandaran Nilai Budaya Oleh Pancasila

Pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia mengandung makna sebagai cita-cita Bangsa Indonesia yang dicetuskan saat lahir pada momentum Sumpah Pemuda. Cita-cita itu ialah terangkatnya harkat dan martabat hidup bangsa yang kemudian bertransformasi menjadikemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu juga berbentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kemerdekaan yang terwujud kemudian jika dan hanya jika Pancasila digunakan sebagai dasarnya. Pancasila sebagai sifat bangsa (*given*) merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi penetapan kebijakan dan pembangunan bangsa. Dalam pembahasan panjang mengenai perumusan dasar Indonesia merdeka, para pendiri republik ini melihat dampak jangka panjang akan adanya peradaban manusia yang dibangun sesuai kebenaran hukum Tuhan (sila pertama). Pancasila ketika diyakini oleh Bangsa Indonesia akan menjadi suatu keyakinan yang standar dari keyakinan yang beraneka ragam. Hal ini bukan menjadikan Pancasila sebagai agama baru atau penyeragaman keyakinan dari keyakinan-keyakinan yang ada, melainkan sebagai keyakinan objektif yang telah distandarkan oleh hukum Tuhan dan mengandung kebenaran universal dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

Mindstream yang telah mengakar di masyarakat selama ribuan tahun akhirnya menjadikan Pancasila sebagai filosofi (keilmuan) bagi Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya yang terurai dalam bidang-bidang kehidupan, seperti: budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Tindakan Bangsa Indonesia yang terjabarkan dalam bidang-bidang itu akan selalu berpihak kepada Tuhan YME, manusia-manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dimensi kehidupan masyarakat Pancasila akan terlihat pada nilai budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan

lingkungan.

Dimensi Pancasila dalam nilai budaya merupakan penstandaran nilai budaya oleh Pancasila, sehingga hasil yang diperoleh adalah kepemimpinan, karena merupakan aktualisasi moral seseorang yang subjektif ke dalam tatanan etika yang objektif. Moral subjektif seseorang sangat berkaitan dengan agama yang dianutnya. Maknanya adalah peranan hukum Tuhan yang menjadi dasar pemikiran seseorang dalam bertindak dan membuat kebijakan yang akan menjadi etika yang objektif di masyarakat. Jika kita lihat mengenai penetapan Pancasila, maka akan terlihat jelas peranan pemimpin dalam prosesnya.

Ir. Soekarno yang seorang Muslim menyatakan bahwa Pancasila itu adalah hidayah Allah SWT. Artinya, berdasarkan keyakinan subjektif (agama) yang dianut oleh Ir. Soekarno bahwa Islam merupakan sumber inspirasi dari penetapan itu. Hal ini terlihat sebelumnya dari kesepakatan dalam Piagam Jakarta bahwa kata "Islam" pun masuk menjadi anak kalimat dalam sila pertama. Usulan ini juga sebelumnya didukung oleh tokoh-tokoh Islam, seperti: Ki Bagoes Hadikusumo dan dr. Sukiman. Namun, ketika menjadi ketetapan akan menjadi etika subjektif yang tidak disepakati oleh banyak orang. Pola seperti ini bukan mencerminkan karakter kepemimpinan dari para penggagas usul tersebut melainkan pola kekuasaan.

Akan tetapi, karena Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang langsung memberikan peringatan kepada para pemimpin bangsa yang sedang bermusyawarah. Adanya fenomena-fenomena yang telah diurai pada pagi tanggal 18 Agustus 1945 merupakan suatu peringatan yang nyata. Pada saat itu juga seluruh pemimpin bangsa di dalam PPKI peka karena kedekatan dengan Tuhan dan menyadari kesalahan tersebut. Ketetapan yang telah ditetapkan itu pun menjadi ketetapan objektif yang diterima oleh setiap golongan tanpa mengurangi substansi dari bentuk mulanya. Bentuk mula dari ketetapan itu ialah adanya hukum Tuhan

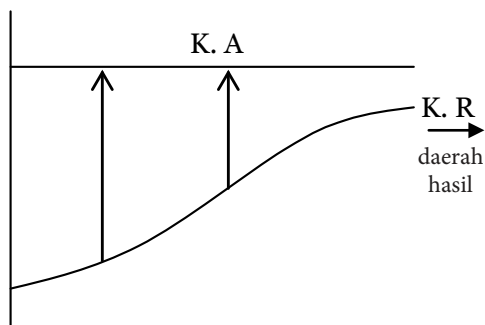
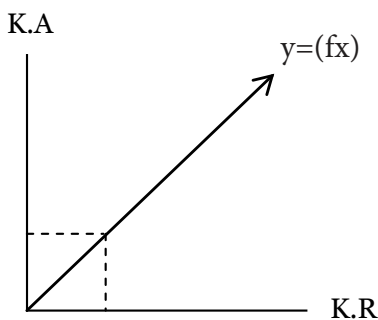
sebagai kebenaran absolut dengan pola ikhtiar manusia (kebenaran relatif) yang berjalan secara bersamaan dan menjadi *mindstream* bangsa ini. Dengan adanya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maksud dari para pendiri republik ini yang berasal dari golongan agama tetap terakomodir.

Kepemimpinan sebagai standar nilai budaya dengan subjeknya adalah pemimpin, yaitu seseorang yang mampu mengaktualisasikan moralnya yang subjektif ke dalam tatanan etika yang objektif. Sudah pasti orang tersebut akan memiliki sikap yang mendekatkan kehidupan manusia ini sesuai dengan perintah-Nya. Pola berpikir demikianlah yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa ini. Secara model dengan menggunakan pendekatan grafik Cartesius dan Sigmoid maka akan terlihat pada gambar 3 sebagai berikut:

Jadi dalam kehidupan di dunia ini, manusia (kebenaran relatif) harus didekatkan kepada hukum Tuhan (kebenaran absolut). Sehingga daerah hasilnya merupakan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan. Pada saat seseorang jauh dari hukum-hukum

Tuhan, maka dapat dikatakan seseorang tersebut adalah rendah secara keimanan dan ketaqwaannya di dunia. Dapat dipastikan, orang tersebut tidak terangkat harkat dan martabat hidupnya di dunia atau hidup dalam kesengsaraan, baik secara batiniah maupun lahiriah. Untuk bangsa ini, Pancasila telah menjawab permasalahan tersebut dengan menuntun anak bangsa ini untuk mencapai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME berdasarkan ajaran agamanya masing-masing. Jika hal itu terwujud maka kehidupan masyarakat yang adil dan makmur akan terlihat. Hal ini terlihat dalam pola hubungan dari sila-silanya yang juga menunjukkan model yang serupa, pada gambar 4 sebagai berikut:

Penjelasan grafik (gambar 4) tersebut memaknakan bahwa sila pertama merupakan konstanta atau kebenaran absolut. Sila kedua, ketiga, dan keempat adalah pola ikhtiar manusia Indonesia yang harus dilakukan agar mendekat kepada Tuhan YME, sedangkan sila kelima merupakan hasil pada saat sila kedua, ketiga, dan keempat dijalankan untuk mendekatkan kehidupan manusia pada hakikat nilai Ketuhanan YME. Pada saat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh

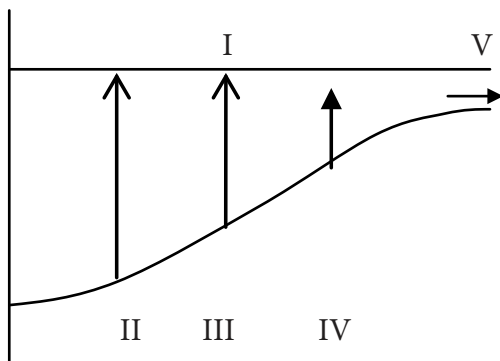


(Gambar 3)

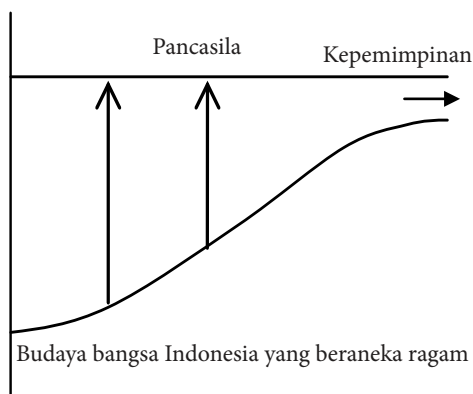
Penjelasan gambar;

- K.A : Kebenaran Absolut yang menjadi sumbu Y dalam grafik Cartesius, sedangkan dalam grafik Sigmoid menjadi konstanta dari sumbu X yang dijalankan
- K.R : Kebenaran Relatif yang menjadi sumbu X dalam grafik Cartesius, sedangkan dalam grafik Sigmoid menjadi
- Daerah hasil merupakan $Y=f(X)$ pada saat sumbu Y dan Sumbu X berjalan.

rakyat Indonesia maka kehidupan bangsa ini akan terangkat harkat dan martabat hidupnya. Adapun proses penstandaran nilai budaya oleh Pancasila merupakan diferensiasi dari grafik-grafik sebelumnya, pada saat Pancasila menjadi konstanta pada kebenaran relatifnya yaitu, budaya Bangsa Indonesia yang beraneka ragam pada gambar 5



gambar 4



gambar 5

Penjelasan gambar 5 tersebut adalah pada saat Pancasila menstandarkan nilai budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi budaya yang standar yaitu kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan yang mampu mengantarkan bangsa ini pada cita-citanya.

Setiap daerah dengan budayanya akan membangun kepemimpinan. Hal ini sudah terjadi dari sekian abad pada masyarakat kita yang telah mengenal konsep kepemimpinan dalam bentuk ketua adat, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang memang dipandang memiliki kelebihan di masyarakatnya.

NKRI yang memiliki tatanan bangsanya sebagai pondasi yang menentukan dari arah kebijakan negara merupakan penjelmaan dari hukum Tuhan (kebenaran absolut). Bahwasannya tidak ada bangsa yang bukan sebagai urusan Tuhan. Seluruh bangsa merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sedangkan negara merupakan hasil ikhtiar manusia atau murni buatan manusia (kebenaran relatif).

Dalam perjalanannya, kebenaran relatif senantiasa berjalan bersamaan dan didekatkan pada kebenaran absolut. Hal itu sebenarnya sudah dijabarkan dalam Pembukaan UUD kita yang merupakan rentetan perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai kemerdekaannya dan membentuk negara. Kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa merupakan fitrahnya bangsa atau manusia sebagai ciptaan Tuhan (alinea I Preamble). Sesuatu yang fitrah itu kemudian perlu ikhtiar manusia dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (alinea II Preamble). Setelah adanya ketetapan Tuhan dalam fitrah suatu bangsa dan upaya ikhtiar manusia dalam mencapai fitrah tersebut maka membuahkan hasil berupa kemerdekaan rakyat Indonesia atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan yang kuat dari orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan (alinea III Preamble). Setelah kebenaran absolut dan relatif itu berjalan secara bersamaan, maka kesinambungan hasil itu adalah membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia sampai membentuk negara telah disusun dalam UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila (alinea IV Preamble).

Seseorang yang memiliki budaya kepemimpinan harus memahami runtutan tersebut agar karakter kepemimpinan yang ada pada dirinya dapat dioperasionalkan ke dalam nilai kehidupan. Pemahaman akan sejarah merupakan syarat mutlak dalam memahami peran dan fungsi Pancasila yang kemudian diejawantahkan ke dalam UUD 1945. Konstitusi itu merupakan penjabaran dari setiap nilai kehidupan, termasuk budaya. Secara keseluruhan konstitusi kita juga menjabarkan urutan bangsa dulu terlahir baru negara dibentuk kemudian. Pasal 1 sampai dengan pasal 3 merupakan penjelasan mengenai bangsa dan lembaganya, pasal 4 sampai dengan 25 menjelaskan tentang lembaga negara. Kemudian pasal 26 sampai dengan 34 menjelaskan tentang kehidupan warga negara.

Secara keseluruhan isi pasal dalam konstitusi merupakan *mindstream* bangsa ini dalam berkehidupan. Namun secara spesifik mengenai pembangunan budaya berada di pasal 32 yang berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Kebudayaan nasional yang telah distandarkan oleh Pancasila adalah kepemimpinan, maka pemerintah harus mengembangkan karakter kepemimpinan warganya dengan pendidikan. Maka dari itu, pasal 32 ini sangat berkaitan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dalam upaya tersebut pemerintah harus

membangun suatu sistem yang membentuk karakter kepemimpinan, sebagaimana tujuan umum dari pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dalam Perguruan Taman Siswa yaitu:

- 1) *Ing ngarso sung tulodho*
- 2) *Ing madyo mangun karso*
- 3) *Tut wuri handayani*

Makna dari ketiga filosofi pendidikan tersebut adalah pengembangan seseorang agar menjadi pemimpin dan memiliki karakter kepemimpinan dengan menjadi suri teladan, membangkitkan, dan mampu memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya.¹

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila harus menstandarkan nilai budaya yang akan menghasilkan kepemimpinan sebagai standar nilai budaya. Karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang paham akan sejarah bangsanya itu yang kemudian mampu memecahkan permasalahan berupa krisis multidimensi. Krisis multidimensi yang terjadi berakar pada nilai budaya bangsa ini yang telah bergeser menjadi pola berpikir kekuasaan. Pergeseran itu disebabkan oleh ketidakpahaman bangsa ini terhadap sejarahnya. Sehingga bangsa ini tidak mengerti akan filosofi dan keilmuan Pancasila yang sangat berkaitan erat dengan sejarah. Akibatnya bangsa ini cenderung menggunakan filosofi-filosofi dari luar. Baik disadari maupun tidak disadari penggunaan itu membuat semakin memburuknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi saat ini, antaralain:

1. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang belum terselesaikan. Memang tidak dapat dipungkiri sehebat-hebatnya *founding*

1 Dijelaskan dalam Jurnal ilmiah yang berjudul "Sistem Among: Secara Konsep dan Praktek".

fathers di zamannya tetap meninggalkan pekerjaan rumah yang bersifat *masif* dan semakin menyebar ke masalah-masalah lainnya. Kesalahan di dalam satu ayat pada konstitusi telah berakibat berubahnya tatanan kita yang seharusnya bangsa menjadi pondasinya, dan negara adalah bangunannya, akhirnya justru terbalik menjadi negara yang menjadi pemegang kendali atas bangsanya. Hal ini menandakan bahwa pola kekuasaan mulai diterapkan di bangsa ini.

2. Semakin dominannya pola kekuasaan di negeri ini menghasilkan peluang masuknya filosofi luar yang bertentangan dengan filosofi bangsa kita. Pada akhirnya filosofi-filosofi itulah yang kemudian menggerogoti budaya bangsa kita.
3. Ditinggalkannya musyawarah mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Musyawarah mufakat yang identik dengan kepemimpinan saat ini tergantikan dengan demokrasi yang identik dengan kekuasaan.
4. Perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD 2002. Adanya Konstitusi baru tersebut justru melegitimasi hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan sejarah bangsa.
5. Faktor ini adalah akumulasi dari faktor-faktor sebelumnya, yaitu terjadinya kebodohan dalam arti tidak pahamnya sebagian besar anak bangsa ini terhadap sejarah bangsanya dan filosofi Pancasila sebagai ilmu kehidupan di bangsa ini.

Dampak yang luar biasa dari penyebab-penyebab di atas adalah jauhnya kehidupan bangsa ini dari Tuhannya. Dalam semua agama kita semua sama-sama mengetahui jika Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu sudah murka maka tidak ada manusia yang mampu menahan murka tersebut. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh manusia adalah lekas memohon ampun dan bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Itulah alasan kenapa kita wajib mempelajari

sejarah, karena dengan mempelajari sejarah kita mampu menarik pelajaran-pelajaran berharga dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kita sebagai makhluk Tuhan harus meyakini bahwa sejarah merupakan ketetapan Tuhan yang hendak dijadikan hukum bagi generasi manusia yang akan datang.

Dalam komparasi kadar keimanan generasi terdahulu dengan generasi saat ini jelas jauh berbeda. Generasi *founding fathers* sangat peka bila terjadi fenomena-fenomena berupa teguran dari Tuhan dan cepat untuk memperbaikinya. Setidaknya generasi itu masih melakukan musyawarah antara satu sama lain meskipun berbeda-beda paham dan dasar pemikirannya. Akan tetapi generasi saat ini terlena dengan keadaan yang menutup datangnya peringatan tersebut. Terhitung sejak tahun 2004, pada saat pertama kali bangsa ini menggunakan pemilu secara langsung telah terjadi berbagai bencana dahsyat yang banyak memakan korban jiwa. Teguran itu dapat berupa bencana alam, bencana sosial, dan kecelakaan transportasi. Bahkan dalam hal bermusyawarah satu sama lain hampir tidak pernah dilakukan. Dengan dominannya pola berpikir kekuasaan, karakter bangsa ini cenderung bersikap subjektif, *prejudice*, dan saling melecehkan. Penghormatan kepada seseorang bukan lagi dinilai dari moral dan keilmuan, melainkan dengan memandang materi, jabatan, dan keturunan.

Kondisi ini yang cepat atau lambat akan membawa bangsa ini pada kehancurannya (disintegrasi). Kita yang hidup di zaman ini akan menjadi generasi terlaknat bila tidak mampu menjaga titipan Tuhan dan warisan para pejuang kemerdekaan berupa bangsa dan negara yang lima sendi ini. Langkah-langkah penyelamatan harus cepat kita lakukan sebelum terlambat. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang luar biasa ini. Kita pun dituntut menjadi orang-orang yang luar biasa untuk menghadapi problematika ini.

Suatu upaya yang dapat dilakukan

agar Pancasila dapat kembali berfungsi dan menstandarkan nilai budaya yang menghasilkan kepemimpinan ialah dengan dua langkah, yaitu kebijakan dan pencerdasan kepada bangsa ini.

1. Kebijakan (secara sistem) merupakan suatu pola untuk mengembalikan tatanan kita yang telah hancur dengan cara:

- a. mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 agar tatanan bangsa sebagai pondasi dan negara sebagai bangunan menjadi stabil;
- b. menjalankan musyawarah mufakat sebagai metode dalam menetapkan pemimpin yang berjenjang dari tingkatan terkecil hingga terbesar.

Langkah ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat telah mengakarnya sistem UUD Amandemen (2002) dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

2. Langkah pencerdasan merupakan alternatif yang berpengaruh dalam upaya yang ditempuh pada langkah kebijakan, karena upaya pencerdasan merupakan strategi dalam membangun SDM yang memiliki karakter kepemimpinan. Orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan itu yang dapat mengembalikan tatanan NKRI. Langkah praksis dalam metode ini antara lain:

- a. memberikan pemahaman sejarah NKRI yang benar kepada setiap anak bangsa ini beserta peran dan fungsi Pancasila, karena penstandaran nilai budaya akan cepat terwujud pada saat anak bangsa ini memahami sejarah;
- b. membangun pelatihan-pelatihan kepemimpinan kepada rakyat untuk membentuk karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Segala hasil, seluruhnya kita kembalikan kepada kehendak-Nya. Berdasarkan makna kepemimpinan yang senantiasa menyandarkan segala sesuatunya pada Kuasa-Nya, maka kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pesimis. Kita wajib meyakini bahwa tatanan itu akan kembali seperti semula. Pancasila akan

berjalan untuk menuntun bangsa ini pada terangkatnya harkat dan martabat hidupnya, serta mencapai peradaban besar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1980. *Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grafindo.
- Hatta, Mohammad. 1980. *Nama Indonesia: Penemuan Komunis*. Jakarta: Idayu Press.
- Huijbers, Theo. 1982. *Manusia Mencari Allah Suatu Filsafat Ketuhanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kodri, Agus. "Latihan Kepemimpinan". *Makalah dalam Pelatihan Kepemimpinan Khusus*, Jakarta, 27 Februari 2001.
- Materi-materi pelatihan kepemimpinan di Pusat Latihan Kepemimpinan Khusus Pejuang Tanpa Akhir tahun 2010-2011.
- Rismawan, Yetty. "Sistem Among: Dalam Konsep dan Praksis". *Jurnal Pendidikan*, bulan Oktober, 2012.
- Soeprapto, dkk. 2008. *Ancaman Terhadap Jatidiri Bangsa*. Jakarta: Yayasan Dewan Harian Nasional.
- Syahrul, Hermawan. 2009. *Star Revolution: Menyingkap Tabir Karya Terbesar Founding Fathers Berdasarkan Akte Autentik Proses Kelahiran Indonesia*. Jakarta: Arga Publishing.
- Tjahjatheo, dkk. 1979. *Pemuda Indonesia Membangun Desa Pancasila*. Jakarta: Yayasan Pemuda 66.

BENCANA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT PANGANDARAN, CIAMIS, JAWA BARAT

Mikka Wildha Nurrochsyam; R.R Nur Suwarnigdyah
Pusatlitbang Kebudayaan
mikkawildha@yahoo.com; nur.sdyah@gmail.com

Abstract

In 2006 Pangandaran, Ciamis Regency, West Java Province was hit by tsunami waves after an earthquake with its strength approximately 6.8 on the Richter scale. Life in the community and surrounding area Pangandaran Beach into ruins. A number of 600 people were confirmed dead. The incident made people develop knowledge of natural disasters, the Society has the knowledge of the signs will be provided by natural disasters alam. This Research aims to find out about the local knowledge possessed by Pangandaran community as one of the disaster-prone areas. This study used a qualitative approach, namely observation and in-depth interviews of the informants are competent to issue local knowledge and disaster in the Pangandaran area. This paper is a recommendation to the government in order to overcome various problems of post-tsunami communities, delivering messages related to natural disasters through local knowledge owned by communities Pangandaran wisely and well targeted.

Keywords: Local wisdom, culture, disaster

Abstrak

Pada tahun 2006 di wilayah Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat telah terjadi tsunami setelah diawali dengan gempa yang mengguncang dengan kekuatan kurang lebih 6,8 Skala Richter yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya. Peristiwa itu membuat masyarakat mulai mengembangkan pengetahuan tentang bencana alam. Masyarakat lalu mempunyai pengetahuan tentang tanda-tanda yang diberikan oleh alam akan terjadinya bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Pangandaran sebagai salah satu daerah rawan bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan pengamatan dan observasi serta wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang berkompeten terhadap masalah kearifan lokal dan bencana di daerah Pangandaran, serta melakukan studi pustaka terhadap buku atau artikel yang berkenaan dengan bencana tsunami. Tulisan ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam rangka untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan masyarakat pasca tsunami, dengan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Pangandaran, yang secara arif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Kearifan lokal, budaya, bencana

A. PENDAHULUAN

Indonesia terletak di daerah rawan bencana karena berada dalam Cincin Api Pasifik, yaitu merupakan daerah yang sering mengalami gempa dan letusan gunung api yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Diperkirakan sekitar 90 % peristiwa gempa bumi terjadi di wilayah cincin api ini.¹ Banyaknya gunung berapi di Indonesia karena terjadi benturan antara lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dan Lempeng Pasifik yang bergerak ke barat. Bencana di Indonesia tidak hanya akibat dari letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami, tetapi juga beberapa bencana lainnya, misalnya terjadi luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.

1 Rienna Oktarina dan Wenny Gustamola. *Pemetaan Sistem Konfigurasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia*. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2151/KIN.CD.016.pdf?sequence=1>. Diunduh tanggal 29 April 2013.

Banyaknya gunung berapi di Indonesia ini menyadarkan bahwa Indonesia adalah daerah rawan bencana, namun sekaligus merupakan berkah yang tak terhingga karena Indonesia mempunyai tanah yang subur yang berasal dari abu vulkanik gunung berapi.

Dalam berapa dekade terakhir ini bencana alam melanda kawasan Indonesia seakan tidak ada hentinya, mulai dari tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang telah mengakibatkan sekitar 200 ribu jiwa tewas²; disusul kemudian bencana gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 yang memporakporandakan Yogyakarta bagian selatan dan sebagian Kabupaten Klaten, bersamaan dengan itu terjadi letusan Gunung Merapi. Di samping itu, bencana yang tidak kalah mengerikan adalah lumpur panas di Sidoarjo yang masih menjadi masalah hingga kini.

Wilayah Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah yang tidak luput dari bencana alam. Pada tahun 2006 telah terjadi tsunami setelah diawali dengan gempa yang mengguncang dengan kekuatan kurang lebih 6,8 Skala Richter yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya.

Karena kenyataan bahwa Indonesia begitu dekat dan sering terjadi bencana alam, maka bagi sebagian masyarakat telah terbiasa dengan keadaan ini. Mereka pun mulai mengembangkan pengetahuan tentang bencana alam sebagai kearifan lokal. Masyarakat kemudian mempunyai pengetahuan tentang tanda-tanda yang diberikan oleh alam akan terjadinya bencana.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Pangandaran sebagai salah satu daerah rawan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan pengamatan dan observasi serta wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang berkompeten

terhadap masalah kearifan lokal di daerah Pangandaran. Diharapkan tulisan ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam rangka untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan masyarakat pascatsunami, dengan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Pangandaran secara arif dan tepat sasaran.

Kearifan lokal masyarakat itu secara implisit atau eksplisit terdapat dalam budaya masyarakatnya. Budaya dalam pengertian ini menurut Raymond William (1921–1988) mengacu pada tiga hal. Pertama, yang mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok, atau masyarakat. Kedua, mengacu pada khazanah kegiatan intelektual dan artistik, sekaligus produk-produk yang dihasilkan (film, benda-benda seni, dan teater) atau yang kita kenal dengan kesenian. Ketiga, pengertian budaya mengacu pada gambaran keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok, atau masyarakat (Sutrisno, 2005).

Istilah kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu “kearifan” dan “lokal”. Kata “kearifan” berasal dari kata dasar “arif”, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KKBI) mempunyai beberapa arti, yakni: bijaksana; cerdik dan pandai; serta berilmu, sedangkan kata “lokal” menunjukkan sebagai “ruang yang luas”; “terjadi (berlaku, ada) di satu tempat”, “tidak merata”; dan mengandung arti “setempat”.

Berdasarkan uraian tersebut kearifan lokal mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Di antara pengertian-pengertian itu masyarakat cenderung melihat kearifan lokal sebagai sebuah gagasan konseptual yang mengandung nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tertentu. Saya melihat pengertian kearifan lokal dari pengertian filosofis. Karena itu istilah kearifan tersebut di atas dapat dipersamakan artinya dengan bijaksana, seperti seorang filsuf adalah seorang yang mencintai kebijaksanaan. Bijaksana itu perlu dibedakan dengan kepintaran karena mempunyai banyak pengetahuan. Kebijaksanaan itu tidak hanya dari sekedar

2 Zika Zakiya. 26 Desember 2004, *Gempa dan Tsunami Getarkan Aceh*. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/12/26-desember-2004-gempa-dan-tsunami-getarkan-aceh>. Diunduh tanggal 29 April 2013

mempunyai banyak pengetahuan, tetapi dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki itu demi untuk kepentingan kehidupan manusia (Sastrapratedja, 2004).

Istilah “lokal” berarti setempat. Istilah ini menunjuk pada kekhususan tempat atau kewilayahan. Karena itu, kearifan lokal dapat dipahami sebagai kebijaksanaan setempat, yaitu kebijaksanaan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Kearifan lokal itu akan bersifat relatif antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Dikarenakan adanya batas wilayah dan geografis, maka kearifan lokal mempunyai ciri khasnya yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Dengan demikian dalam masyarakat Pangandaran, makna lokal tidak bisa terlepas dari konteks ciri sebagai masyarakat maritim dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pangandaran sebagai Tujuan Wisata

Pangandaran adalah sebuah kawasan wisata yang telah terkenal sejak zaman dahulu. Sejak dahulu masyarakat Pangandaran dikenal sebagai masyarakat maritim. Mereka hidup sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di laut. Namun, seiring dengan potensi alam dan budayanya yang menawan, maka masyarakat mulai banyak yang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kepariwisataan. Hal ini mengakibatkan mulai banyak dari mereka yang beralih dari mata pencaharian nelayan menjadi penyedia jasa pariwisata. Saat penelitian ini berlangsung, berdasarkan pengamatan, baik pekerjaan di sektor nelayan maupun penyedia jasa pariwisata, kedua-duanya masih dijalankan. Pada musim ikan mereka mencari ikan di laut, tetapi pada saat-saat tertentu ketika kunjungan wisata meningkat mereka juga menjadi penyedia jasa bagi wisatawan.

Kawasan Pangandaran ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai yang luas dan panjang dengan pasirnya yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas wisata tepi pantai para turis. Beberapa daerah

di kawasan Pangandaran terdapat tempat-tempat yang indah sebagai tujuan wisata. Di Batu Karas misalnya, sebuah teluk kecil yang indah, yang sangat cocok untuk berenang, sedangkan di luar teluk ombaknya besar, yang sangat cocok sekali untuk peselancar. Di kawasan Pangandaran juga terdapat cagar alam yang menyimpan kekayaan flora dan fauna. Di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan langka, termasuk di antaranya Bunga Raflesia. Sejumlah binatang liar dapat kita lihat, misalnya: monyet, rusa, dan berbagai jenis burung. Di samping itu di Pangandaran juga terdapat wisata alam yang terkenal dengan sebutan *Green Canyon*. Nama tempat ini mirip dengan nama tebing yang curam di Amerika Serikat, tepatnya di Negara Bagian Arizona. Apabila di Amerika Serikat nama tebing itu adalah *Grand Canyon*, maka di Pangandaran kata *grand* diganti dengan *green*. Nama *green* ini tampaknya mengacu pada warna hijau dari air di Sungai Cijulang yang mengalir di tebing ini. Selain itu di kawasan Pangandaran juga terdapat wisata goa, seperti Goa Jepang, Goa Lanang, Goa Panggung, dan Goa Parat. Selain wisata alam, di Pangandaran juga dijumpai banyak atraksi budaya, di antaranya adalah Wayang Golek, Ronggeng Gunung, Ronggeng Amen, Jaipongan, dan Hajat Laut.

Potensi alam dan budaya itu sangat menarik para wisatawan, meskipun bencana tsunami yang dahsyat telah melanda kawasan ini, seakan bencana itu mulai terlupakan dan wisata di Pangandaran masih tetap ramai dikunjungi wisatawan.

Dalam mengamati kearifan lokal di daerah Pangandaran tidak bisa mengabaikan posisi Pangandaran sebagai tempat wisata. Karena itu, kearifan lokal harus diorientasikan sebagai bagian masyarakat Pangandaran yang merupakan masyarakat maritim atau nelayan sekaligus sebagai masyarakat yang menjadi penyedia jasa pariwisata.

Dalam konteks daerah wisata itu maka apakah tepat misalnya dengan membiarkan tanda-tanda peringatan tanda bahaya atau plang-plang evakuasi serta poster-poster peringatan tsunami dipasang di beberapa tempat di Pangandaran karena justru akan memberikan kesan bahwa Pangandaran itu sangat tidak aman atau rawan terhadap

bencana. Demikian pula bahwa banyak problem yang terkait dengan pascabencana, misalnya banyak bangunan rumah dan gedung pemerintah yang roboh, namun sampai saat ini ditelantarkan atau tidak dibangun kembali, memberikan kesan bahwa daerah ini masih sangat rentan terhadap bencana.

2. Suasana Tsunami Saat Menerjang Pangandaran.

Tsunami melanda dengan dahsyat, tepatnya tanggal 17 Juni 2006, sekitar jam 15.16 WIB. Kekuatan gempa dengan kisaran 6,8 Skala Richter telah menyebabkan tsunami di wilayah Pantai Pangandaran dan sekitarnya. Gelombang air laut itu diperkirakan sampai setinggi 10 meter telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pantai dan penyedia jasa pariwisata. Korban meninggal diperkirakan sejumlah 600 orang.

Meskipun tidak ada peringatan secara langsung akan datangnya tsunami, tetapi menurut keterangan narasumber peringatan terjadinya tsunami itu telah terlihat sebelumnya dari tanda-tanda alam, yaitu setelah terjadinya gempa bumi tersebut air laut surut sampai kurang lebih 3 km dari bibir pantai. Tanda-tanda alam lainnya adalah pada saat surut terdapat banyak ikan di laut.

Terdapat dua sikap yang terjadi dari orang-orang yang melihat gejala alam ketika akan ada tsunami pada waktu itu, yaitu banyak orang di pantai yang terlihat biasa-biasa saja saat tanda-tanda akan munculnya tsunami, namun di antara mereka juga tampak menunjukkan kecemasan, karena mereka sudah memiliki pengetahuan tentang adanya tanda-tanda tsunami ketika melanda Aceh pada tahun 2004.

Tsunami di Pangandaran ini terjadi dalam tiga gelombang air. Gelombang air pertama yang datang tidak terlalu besar. Sedangkan gelombang kedua sangat besar yang menyebabkan kerusakan dan kematian manusia. Seorang narasumber mengatakan bahwa gelombang air yang kedua ini suaranya bergemuruh seperti suara kapal terbang. Dari kejauhan tampak bahwa gelombang tsunami ini berwarna sangat hitam pekat dengan gelombang laut yang berdiri tegak. Banyak

orang yang tidak selamat dari ganasnya tsunami. Namun, di antara mereka juga banyak yang bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, seperti di Gunung Pananjung. Adapun gelombang yang ketiga tidak terlalu besar seperti pada gelombang kedua. Setelah ketiga gelombang air laut menghantam daratan Pangandaran, tidak berapa lama kemudian air mulai menyusut dengan cepat air itu kembali ke laut.

Bagi nelayan yang pada saat itu sedang melaut kebanyakan tidak menyadari bahwa telah terjadi bencana di daerah mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan dahsyatnya tsunami yang melanda daratan Pangandaran. Kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa bencana tsunami melanda sanak dan kerabat mereka di daratan. Seorang nelayan mengatakan bahwa ketika dia pulang dari mencari ikan di laut ia sangat kaget karena Pantai Pangandaran sangat sepi dan gelap karena lampu-lampu banyak yang mati, tanpa disadarinya bahwa telah terjadi bencana alam yang menewaskan ratusan orang.

Suasana pada saat itu sangat mengerikan dan mengenaskan, bangunan-bangunan rumah, perhotelan, dan lapak-lapak tempat orang berjualan souvenir dan keperluan lain untuk wisatawan di tepi pantai porak-poranda dibawa arus tsunami yang deras. Perahu-perahu, jaring-jaring, perkakas, mobil, dan barang-barang rumah tangga yang lain berserakan di jalan-jalan.

3. Kearifan Lokal pada Masyarakat Pangandaran

Tulisan berikut ini berupaya untuk melakukan pembahasan tentang kearifan lokal pada masyarakat Pangandaran. Kearifan lokal itu tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai pengetahuan tentang adanya bencana, tetapi masyarakat bisa membacanya dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam sebelum terjadinya bencana. Kearifan lokal itu juga di antaranya terdapat pada seni dan budaya lokal yang secara implisit dapat diolah atau dikreasikan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam. Meskipun tidak secara eksplisit kami temukan tentang seni dan budaya yang memaparkan secara tegas mengenai pengetahuan tentang penanggulangan

bencana tsunami, tetapi beberapa seni lokal di Pangandaran sebetulnya bisa dikemas dan dikreasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam. Kearifan lokal dalam kaitannya dengan bencana alam itu dapat dilihat pula dari tradisi yang sudah dikembangkan dalam masyarakat, seperti adanya kentungan untuk memperingatkan terjadinya bahaya. Kearifan lokal juga secara intrinsik melekat dalam sistem sosial masyarakat, seperti adanya unit-unit terkecil pemerintahan, yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Beberapa kearifan lokal yang dapat kami amati, antara lain: Upacara Hajat Laut, pergelaran kesenian tradisional, dan pemanfaatan teknologi tradisional sebagai sarana komunikasi.

a. Upacara Hajat Laut

Upacara Hajat Laut adalah kearifan lokal yang terkait dengan kepercayaan masyarakat Pangandaran. Kalau dimaknai lebih jauh, Upacara Hajat Laut adalah lebih merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masyarakat telah diberi rezeki dari hasil bumi dan laut. Upacara Hajat Laut ini dilaksanakan satu tahun sekali, pada malam Jumat Kliwon, Bulan Muharam. Adapun prosesi yang dilaksanakan adalah dengan membuat sesaji, di mana terdapat kepala kerbau yang dibungkus dengan kain kafan, sedangkan dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan. Sesaji tersebut juga menyertakan beberapa makanan sehari-hari, seperti nasi dan lauk pauk, serta ada pula buah-buahan. Sesaji dilengkapi dengan sepasang pakaian lelaki dan perempuan, serta seekor ayam kecil yang masih hidup yang disebut "*kauripan*", yang berarti kehidupan.

Kalau mengamati Upacara Hajat Laut tampaknya tidak terkait langsung dengan bencana tsunami di Pangandaran. Upacara Hajat Laut merupakan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa alam yang mempunyai kekuatan. Kita diperkenankan untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan dengan doa-doa dan mantra yang kita panjatkan dalam upacara tersebut. Namun, dalam upacara Hajat Laut sekaligus dapat menjadi sebuah permohonan untuk keselamatan dan

kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Keterkaitan antara ritual dan masyarakat menurut Geertz lebih dekat dengan antropologi sosial yang menekankan cara bagaimanakah kepercayaan, khususnya ritus, memperkuat ikatan-ikatan sosial (Geertz, 1992).

Masyarakat percaya bahwa adanya doa-doa dan mantra itu bisa menjadi sarana mencegah bencana tsunami yang datang lagi di Pangandaran. Namun, bencana alam adalah tetap bencana alam, seperti halnya peristiwa banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Bencana tersebut adalah ujian bagi manusia agar senantiasa ingat dan hanya tunduk kepada Allah SWT.

Ada lagi kepercayaan yang bersifat supranatural yang terkait dengan bencana alam, yang dimiliki oleh beberapa orang di Pangandaran. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Pangandaran, bahwa dahulu bapaknya adalah seorang yang mempunyai kekuatan supranatural, yang meramalkan bahwa pada tahun 2000-an pantai sebelah barat dan sebelah timur di Pangandaran akan "kawin". Berdasarkan atas ramalan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa terjadinya tsunami pada tahun 2006 tersebut telah "mempertemukan" antara pantai sebelah barat dan sebelah timur. Apabila kita lihat pada peta, antara pantai sebelah barat dan timur hanya dipisahkan jarak yang tidak terlalu jauh (lihat gambar 1). Pada saat terjadi tsunami, kedua pantai tersebut "menyatu" karena tertelan gelombang air laut yang dibawa oleh tsunami tersebut. Ramalan ini sifatnya hanya kepercayaan, namun secara implementatif tidak dapat dipastikan secara tepat kapan tsunami itu akan terjadi.

Masyarakat Pangandaran, seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, memercayai adanya pengetahuan yang sifatnya supranatural. Dikatakan oleh Kusnadi, salah seorang tokoh masyarakat, bahwa sebelum tsunami berlangsung seorang warga telah meramalkan berdasarkan penglihatan supranatural. Dalam penglihatan supranaturalnya dikatakan bahwa akan terjadi bencana besar di Pangandaran. Untuk mengurangi resiko korban maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh warga Pangandaran, yaitu dengan mengibarkan bendera merah putih di



Gambar 1. Peta Pantai Pangandaran
(Sumber: www.mypangandaran.com/peta)

sudut-sudut lapangan. Ternyata ramalan ini benar, tidak lama berselang terjadilah bencana tsunami yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka.

b. Pergelaran Kesenian Tradisional

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Pangandaran adalah dengan pertunjukan kesenian. Masyarakat Pangandaran mempunyai banyak kesenian tradisional, di antaranya adalah Ronggeng Gunung, yaitu sejenis tarian yang mengisahkan Dewi Samboja, puteri dari sebuah kerajaan di pesisir selatan. Pada suatu ketika datang para perompak menyerang kerajaannya yang menyebabkan suaminya, sang raja di

kerajaan tersebut tewas. Sang Dewi lalu lari ke gunung dengan menyamar sebagai penari Ronggeng yang bernama Rengganis. Di samping Ronggeng Gunung, di Pangandaran juga ada sejenis seni pertunjukan yang disebut dengan Ronggeng Amen. Ronggeng Amen adalah perkembangan dari seni pertunjukan Ronggeng dengan ciri khas adanya pola lingkaran tarian dengan penari sebagai titik sentralnya. Di samping seni Ronggeng, ada pula tari Jaipongan, Sintren, dan seni pertunjukan lainnya. Di samping itu, di Pangandaran juga terdapat seni pertunjukan yang digemari masyarakatnya, yaitu Wayang Golek, yang biasanya dipentaskan di Pangandaran pada setiap akhir tahun.

Seni pertunjukan Wayang Golek adalah seni pertunjukan yang memungkinkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana tsunami dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan di dalam pementasan Wayang Golek, pesan-pesan itu dapat disampaikan dengan cara lebih mudah dan gamblang pada saat adegan *goro-goro* atau adegan humor para *panakawan*. Dengan melalui pertunjukan Wayang Golek, pesan-pesan itu dapat disampaikan dengan tidak terkesan memaksa dan menggurui, namun masyarakat bisa mencermatinya dan memilihnya sendiri sembari memperoleh tontonan yang menghibur.



Foto 1. Pertunjukan Wayang Golek efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kearifan lokal tentang bencana alam (Dok. PDWI)

Richard Rorty mengatakan bahwa dalam filsafat seni, penyampaian pesan yang bersifat teoritis tidak berguna dalam membangun solidaritas. Dengan demikian bahwa khotbah-khotbah atau imbauan-imbauan, apalagi dari pemerintah, akan tampak tidak efektif dalam upaya untuk membangun solidaritas. Hal ini dikarenakan imbauan-imbauan dan khotbah-khotbah memberikan kesan menggurui. Oleh karena itu, Rorty mengharapkan peran para penyair, penulis novel, entograf, dan wartawan (Suseno, 2000).

Tentu saja, solidaritas akan menjadi efektif jika dilakukan dengan memanfaatkan seni pertunjukan sebagai sarana untuk

menyampaikan pesan-pesan kearifan yang terkait dengan bencana tsunami. Hal ini sangat penting, karena selain dapat mengangkat seniman tradisional dengan memberikan kesempatan banyak pentas, seni pertunjukan juga dapat memberikan program-program yang lebih kreatif kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan bencana alam tsunami. Menurut Endang Sukarya, Kepala UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wilayah Pangandaran, program-program yang berbasis pada seni dan budaya ini menjadi sangat penting sebagai sarana mengatasi kecemasan masyarakat terhadap bencana.

Menurut Yusuf, seorang tokoh masyarakat pangandaran, dipasangnya tulisan-tulisan evakuasi dan poster-poster besar tentang bencana tsunami tidak terlalu efektif, seakan masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan akan bahaya tsunami yang bakal mengancam wilayah mereka. Demikian juga dengan adanya program-program yang bersifat diskusi atau simulasi, mereka telah jenuh dengan semua itu. Dengan penggunaan bahasa yang muluk-muluk dan akademisi, masyarakat kurang dapat mencerna pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, program-program melalui sarana seni dan budaya ini sangat penting.



Foto 2. Informasi tentang jalur evakuasi

Dikatakannya lebih lanjut bahwa program-program yang sifatnya fisik sebenarnya telah dilakukan, bahkan plang-plang peringatan

untuk evakuasi masih dalam keadaan baik, tetapi tetap dilaksanakan program yang dialokasikan untuk pembuatan plang, poster, diskusi, dan simulasi, yang sebenarnya ini adalah pemborosan. Yang diperlukan oleh masyarakat adalah upaya untuk memulihkan mental dan moral mereka agar tidak lagi trauma terhadap bencana.



Foto 3. Informasi tentang zona dampak langsung tsunami

c. Pemanfaatan Teknologi Tradisional sebagai Sarana Komunikasi

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam bentuk pemanfaatan teknologi tradisional sebagai sarana komunikasi dalam kaitannya dengan bencana itu dapat kita lihat dari tradisi masyarakat pada masa lalu, yaitu penggunaan kentungan. Kalau pada masa lalu di setiap gardu pos ronda terdapat kentungan yang dipakai sebagai komunikasi untuk menyampaikan, tanda-tanda bunyi kentungan yang akan mengabarkan bahwa telah terjadi sesuatu, seperti pencurian, bencana alam, banjir, kematian, gotong royong dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hubungan sosial masyarakatnya. Masyarakat mempunyai pengetahuan tentang komunikasi sosial. Melalui tanda-tanda bunyi kentungan itu masyarakat dapat menafsirkan secara mudah adanya sebuah peristiwa tertentu. Namun,

tradisi ini sekarang tidak pernah dipraktikkan oleh masyarakat. Karena itu, tampak bahwa ketika terjadi bencana tsunami orang berteriak “air.....air....air...!”, maka seorang ibu tampaknya salah persepsi dikira ada kebakaran, karena teriakan air itu dianggapnya orang mencari pertolongan karena rumahnya telah terbakar.

Tradisi kentungan untuk keperluan siaga bencana itu sekarang sudah musnah. Di Pangandaran justru ditempatkan sirene di beberapa titik, namun bunyi sirene ini tidak dapat mewakili pengetahuan masyarakat tentang adanya bencana alam, karena ambulan dan bunyi mobil patroli polisi juga menggunakan sirene. Penggunaan sirene ini juga menuai masalah, karena dengan ditempatkan sirene dan peralatan pendeteksi tsunami lainnya, tetap memerlukan perawatan dengan baik. Pada kenyataannya, sirene-sirene yang ditempatkan di pantai-pantai itu kini telah banyak yang rusak.

Sistem sosial dan birokrasi masyarakat itu sebenarnya juga dapat dimanfaatkan secara efektif untuk dapat melaksanakan program-program dan pesan-pesan yang terkait dengan bencana. Menurut Endang Sukarya, Kepala UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wilayah Pangandaran, program Keluarga Berencana (KB) pada zaman Orde Baru dulu dapat berhasil karena melibatkan sistem sosial dalam pemerintahan yang paling kecil, yaitu di tingkat RW dan RT. Masalah penanganan bencana tsunami itu pula akan menjadi efektif kalau melihatkan sistem sosial masyarakat yang paling kecil. Selama ini program-program untuk penanganan bencana tidak melibatkan pemerintahan desa, tetapi cenderung terkesan bahwa berbagai program yang terkait dengan bencana berjalan dengan dirinya sendiri, tanpa berupaya mengetahui bagaimanakah keinginan dan kebutuhan warga masyarakatnya sendiri.

4. Pengetahuan dari Tanda-Tanda Alam

Kearifan lokal yang secara umum dimiliki oleh para warga merupakan pemahaman akan tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada manusia sebelum terjadi bencana. Tanda-tanda itu dapat diamati secara umum, misalnya setelah terjadi gempa terlihat permukaan

air surut sampai beberapa kilmometer dari pantai. Pengetahuan akan terjadinya tsunami ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi juga perlu adanya upaya-upaya untuk mengimplementasikan pengetahuan ini sehingga nantinya ketika terjadi bencana dapat segera dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan.

Di Pantai Pangandaran masyarakat dan pemerintah serta aparat yang terkait berupaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana dengan mengadakan simulasi bencana. Di samping itu juga ditempatkan *balawisata*, yang selain menjadi petugas pantai juga bertugas di garda depan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi bencana tsunami. Kelengkapan peralatan elektronika, seperti *loud speaker* yang mampu untuk memberikan peringatan secara efektif ketika tanda-tanda bahaya tsunami itu akan datang juga ditempatkan di beberapa lokasi di Pantai Pangandaran. Di samping itu, dibuat jalur-jalur untuk evakuasi dengan memberikan tanda-tanda arah evakuasi, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang memadai seandainya bencana datang kembali. Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi tsunami secara dini juga dilakukan dengan menempatkan alat deteksi tsunami di lautan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan bencana alam di daerah wisata Pangandaran, sebagai berikut.

- a. Kearifan lokal pada masyarakat Pangandaran diperoleh secara alamiah dengan melihat tanda-tanda dan gejala alam sebelum terjadi tsunami. Tanda-tanda alam itu sendiri, misalnya adanya gempa yang mendahului sebelum terjadinya tsunami dan disertai dengan menyusutnya air laut yang jauh sekali dari bibir pantai, serta banyak ikan terdampar saat air laut surut.
- b. Kearifan lokal terdapat dalam sistem kepercayaan masyarakat Pangandaran, seperti Upacara Hajat Laut yang merupakan wujud syukur. Upacara Hajat Laut juga merupakan doa-doa untuk

dijauhkan dari bencana.

- c. Kearifan lokal terdapat dalam seni dan budaya pada masyarakat Pangandaran yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam, seperti pertunjukan Wayang Golek, dapat efektif digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam.
- d. Kearifan lokal terdapat dalam tradisi masyarakat Pangandaran yang perlu dihidupkan lagi, misalnya penggunaan kentungan dalam pos-pos ronda.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka perlu disampaikan beberapa saran, sebagai berikut.

- a. Perlu dicari upaya-upaya yang lebih kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bencana alam. Seni dan budaya merupakan cara arif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut karena masyarakat mulai jenuh dengan adanya program-program yang hanya mengingatkan mereka pada trauma masa lalu.
- b. Seni dan budaya merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan persoalan-persoalan pascabencana. Menggunakan seni dan budaya tradisional mempunyai dua sisi, yaitu di samping dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan secara arif kepada masyarakat juga memberikan kesempatan kepada seniman-seniman tradisional untuk dapat tampil di pentas. Di samping itu seni pertunjukan akan membuat masyarakat menjadi terhibur untuk melupakan tragedi bencana yang menimpa mereka.
- c. Perlu sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat dalam upaya menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan pascabencana. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan dapat mendukung terlaksananya program-program secara efisien dan efektif, demi kesejahteraan dan kepentingan

- masyarakat.
- d. Program-program yang terkait dengan persoalan-persoalan pascabencana perlu diorientasikan kepada kebutuhan masyarakat, --masyarakat Pangandaran adalah masyarakat maritim dan berorientasi pada penyediaan jasa wisata-- sehingga program yang dijalankan akan menjadi bermanfaat dan berdaya guna.
 - e. Kearifan lokal dapat kita lihat dari sistem sosial masyarakat Pangandaran, yang terstruktur berdasarkan unit-unit terkecil, yaitu RT dan RW. Unit-unit terkecil dari struktur pemerintahan ini harus diberdayakan untuk melakukan program-program dan pesan-pesan yang terkait dengan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Terjemahan dari *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. Yogyakarta: Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz. 2000. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno, Mudji. dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Oktarina, Rienna. dan Wenny Gustamola. *Pemetaan Sistem Konfigurasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia*. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2151/KIN.CD.016.pdf?sequence=1>. Diunduh tanggal 29 April 2013.
- Sastrapratedja, M. S. J., 2004. "Pengantar: Apakah Filsafat Manusia Itu?". *Diklat Kuliah Manusia dan Permasalahannya, Butir-Butir Refleksi Filsafat*. Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.
- Zika Zakiya. 26 Desember 2004, *Gempa dan Tsunami Getarkan Aceh*. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/12/26-desember-2004-gempa-dan-tsunami-getarkan-aceh>. Diunduh tanggal 29 April 2013

**PEDOMAN PENULISAN *JURNAL KEBUDAYAAN*
PUSLITBANG KEBUDAYAAN**

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah diterbitkan, serta merupakan hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan.
2. Judul dibuat ringkas tetapi harus dapat mencerminkan isi naskah, ditulis dengan huruf kapital, dan tidak lebih dari 16 kata.
3. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar di bawah judul, diikuti di bawahnya nama institusi tempat penulis bekerja, dan email penulis.

Contoh:

**DARI KOMERSIAL KE KEBERPIHAKAN:
PERS TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA (1886-1942)**

Oleh:

Irawan Santoso Suryo Basuki
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
Email: irawan_ssb@yahoo.com

4. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diletakkan di bawah judul dan identitas penulis. Panjang abstrak antara 150-200 kata, 1 spasi dan 1 paragraf. Isi Abstrak meliputi tujuan penelitian, metode dan hasil akhir. Kata kunci maksimal 6 kata.
5. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik 1,5 spasi. Banyaknya antara 20-30 halaman, dan dicetak pada kertas A4, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis Huruf : Times New Roman
 - b. Ukuran : 12
 - c. Margin kiri : 4 cm
 - d. Margin Kanan : 3 cm
 - e. Margin Atas : 4 cm
 - f. Margin Bawah : 3 cm
6. Sistematika penulisan
 - a. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
 - b. **A. PENDAHULUAN**, meliputi:
 - i. Latar Belakang
 - ii. Permasalahan
 - iii. Tujuan
 - iv. Ruang lingkup (materi dan wilayah)
 - v. Landasan teori/ Konsep/ Tinjauan Pustaka
 - vi. Metode Penelitian

Nama sub bab mulai dari “Latar Belakang” sampai “Metode Penelitian” tidak perlu ditulis secara eksplisit.
 - c. **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi uraian data hasil penelitian dan analisisnya.
 - d. **C. PENUTUP**, meliputi simpulan dan saran.
7. Pembagian bab menggunakan huruf kapital: A, B, C, ... Subbab menggunakan angka: 1, 2, 3, ... Bagian-bagian dari subbab secara berurutan menggunakan huruf kecil: a, b, c, ... ; angka 1), 2), 3), ...; huruf kecil : a), b), c), ... ; angka (1), (2), (3), ...; dan huruf kecil: (a), (b), (c), ...
8. **Daftar Pustaka merupakan sumber yang dikutip/digunakan sebagai acuan di dalam tulisan.** Acuan sumber di dalam teks, dicantumkan dalam kurung, dengan susunan: nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Catatan kaki (footnote) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembar teks yang dijelaskan.
Contoh penulisan bahan pustaka yang dikutip di dalam tulisan: (Geertz, 1992: 5), (Koentjaraningrat, 1994: 11), (Endraswara, 2003: 37).

9. **Sumber pustaka yang digunakan diharapkan merupakan sumber pustaka mutakhir.** Kebaruan sumber acuan menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana studi pustaka dan kesesuaian pokok bahasan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
10. **Daftar Pustaka** ditulis di bagian akhir, disusun menurut abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Bila ada nama keluarga (seperti nama barat, nama marga/fam), maka yang ditulis adalah nama keluarga terlebih dahulu, diikuti koma dan berikutnya nama kecil.

Contoh:

1. Makalah, Laporan Penelitian, Skripsi, dan Tesis

Sunjayadi, R. Achmad. "Dari Layanan Domestik ke Ranah Publik: Peran Pelayan Pribumi dalam Akomodasi Turisme Kolonial di Hindia-Belanda", *Makalah dalam The 4th International Conference on Indonesian Studies*, Bali, 9-10 Februari 2012.

Fachrizal, Effan dkk. 2010. *Konservasi Kawasan Brayon Bengkel*, laporan penelitian kelompok pada Fakultas Teknik Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

2. Buku

Kleden, Ignas. 2004. *Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Newberry, Jan. 2013. *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*, terjemahan oleh Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Aris. Jakarta: KITLV Jakarta dan dengan Pustaka Yayasan Obor Indonesia.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri (Ed.). 2007. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

Mude, M. Saleh dkk. 2009. *Bugis di Tanah Rantau: Membangun Bangsa dan Negara, Merekat Etnis Nusantara*. Jakarta: Penerbit FOCUS Grahamedia bekerja sama dengan BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

3. Surat Kabar

Kurniawan, Iwan. "Eksplotasi dan Pengelolaan Hutan Suku Rejang", *Media Indonesia*, 19 Mei 2012, hlm. 24.

4. Internet

Hardjasaputra, A. Sobana. "Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi di Priangan 1870-1906", diakses dari <http://resources.unpad.ac.id>, Tanggal 24 April 2011.
(Khusus untuk sumber dari internet, agar lebih rapi diletakkan di catatan kaki/footnote).

11. Instrumen pendukung dapat berupa gambar, foto, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya. Judul instrumen pendukung ditulis di atas, serta sumber rujukan di bawahnya. Penulisannya menggunakan huruf kapital di awal judul. Penyajian instrumen pendukung dimaksudkan sebagai sarana informasi dalam melengkapi dan mendukung deskripsi tulisan. Semua unsur dalam instrumen pendukung dapat terbaca dengan jelas.
12. Naskah yang masuk akan diedit oleh Dewan Redaksi terkait dengan format penulisan dan ditinjau substansinya oleh Mitra Bestari yang sesuai dengan kepakarannya.
13. Naskah yang lolos seleksi dari Mitra Bestari akan diberikan honor.



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEBUDAYAAN

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Vol. 8 No. 1 Juni 2013